



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2024



H Subandi SH.,M.Kn.
Bupati Sidoarjo

Hj Mimik Idayana
Wakil Bupati Sidoarjo



KATA PENGANTAR

Nomor : 100.1.7/2770/438.1.2.2/2025

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo tepat waktu.

Sebagaimana amanah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 dan Pasal 71, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan LKPJ menggunakan format dan sistematika yang telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud. Oleh karenanya, format, sistematika, serta substansi penyusunan LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud.

Melalui LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024, diharapkan DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat memperoleh informasi secara menyeluruh yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Bupati Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2024. Laporan ini juga diharapkan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategis untuk tahun berikutnya, demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 juga dapat menjadi sumber informasi bagi berbagai pihak untuk menilai dan mengukur keberhasilan kinerja Kabupaten Sidoarjo pada tahun tersebut.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa ruang lingkup LKPJ adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan. Termasuk juga pelaksanaan 17 Program Prioritas Bupati Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Capaian Indikator Kinerja Utama, Capaian Indikator Kinerja Daerah, serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2023. Kami menyadari bahwa meskipun telah banyak target kinerja yang tercapai, namun masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal. Kritik dan saran yang membangun kami terima dengan sangat terbuka. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2024 sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan pada tahun selanjutnya.

Demikian pengantar LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2024, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

BUPATI SIDOARJO,



Ditandatangani secara elektronik oleh

SUBANDI, S.H., M.Kn.

SUBANDI, S.H., M.Kn.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Dasar Hukum	1
	B. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026	4
	C. Gambaran Umum Daerah	12
	1. Kondisi Geografis Daerah	12
	2. Gambaran Umum Demografis	17
	3. Kondisi Perekonomian	19
	D. Sumber Daya PNS	22
	E. Pengelolaan Pendapatan Daerah	24
	F. Pengelolaan Belanja Daerah	29
	G. Pengelolaan Pembiayaan Daerah	33
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	34
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	46
	A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	46
	B. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2024	58
	C. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2024	131
	D. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	165
	1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	165
	2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	216
	3. Urusan Pilihan	278
	4. Unsur Penunjang Pemerintahan	293
	E. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	388
	F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Tahun Sebelumnya	420
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	460
BAB V	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	461
BAB VI	PENUTUP	466



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud, berkaitan dengan capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang diterapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran sebelumnya. Adapun hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan berupa capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan di atasnya, serta capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

Penyusunan LKPJ merupakan bagian dari siklus perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan daerah, dimana LKPJ merujuk pada kebijakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021, yang pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD dimaksud. Selanjutnya, sebagai



dokumen perencanaan tahun keempat pelaksanaan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang telah diubah melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Selain itu, penyusunan LKPJ juga didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang pada hakikatnya menunjukkan hasil kesepakatan bersama antara Bupati Sidoarjo dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya LKPJ akan dibahas oleh DPRD dengan penerbitan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD tersebut, ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai bahan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, serta dapat menjadi pertimbangan penyusunan kebijakan strategis daerah.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Sidoarjo Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penglolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024;
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.

C. VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 – 2026

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut.

1. Visi

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025,



maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah :

**” TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU,
BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN ”**

Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Pokok - Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”	Sidoarjo Sejahtera	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola an diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Keempat pokok Visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

2. Misi

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan	Sidoarjo Sejahtera	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	Sidoarjo Maju	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui



Berkelanjutan”		Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha
	Sidoarjo Berkarakter	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	Pembangunan Berkelanjutan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Pemetaan sebagaimana dilakukan pada tabel di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1: *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.*

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat .

Misi 2: *Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.*



Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sektor perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: *Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.*

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan sosial yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo

Misi 4: *Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.*

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya



penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

Misi 5: *Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.*

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan cara untuk mencapainya melalui Tujuan dan Sasaran. Tujuan adalah kinerja jangka menengah / lima tahunan, sedangkan Sasaran adalah kinerja tahunan. Adapun Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerjanya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi-1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Nilai SAKIP Kabupaten Opini atas Audit BPK Survey Eksternal Persepsi Korupsi Status Kinerja LPPD Nilai Indeks SPBE



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Indeks Inovasi Daerah
				Tingkat Maturitas SPIP
			Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Misi-2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan Ekonomi	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan
				Persentase kontribusi PDRB sektor industri
				Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas
				Persentase pertumbuhan nilai investasi
		Indeks GINI	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase usaha mikro mandiri
				Persentase koperasi berkualitas
			Persentase Desa Mandiri	
	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentar tenaga kerja yang terserap di semblan sektor
		Persentase penduduk miskin	Menurunnya Penduduk miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan
Misi-3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
				Indeks Infrastruktur Pendidikan
				Indeks Infrastruktur Kesehatan
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara
			Indeks Kualitas Tutuan Lahan	
			Indeks Resiko Bencana	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Misi-4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
			Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Misi-5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi
			Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Indeks Pelestarian Budaya
				Indeks Rasa Aman

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

4. Program Prioritas

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan.

Program prioritas dimaksud, merupakan langkah percepatan (*Quick Win*) untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan. Adapun Program Prioritas dimaksud, yang selanjutnya menjadi 17 Agenda Pokok Prioritas Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru
2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
4. 10.000 Beasiswa Kuliah
5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama
6. Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan
7. Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT
8. 20.000 UMKM Naik Kelas
9. Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan
10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu
11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorir
12. Youth Center, Bangun Pusa Kreativitas Anak Muda
13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi



14. Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat
16. Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif
17. Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

D. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sidoarjo, secara astronomis terletak di antara $7,3^{\circ}$ – $7,5^{\circ}$ LS (Lintang Selatan) dan antara $112,5^{\circ}$ – $112,9^{\circ}$ BT (Bujur Timur). Sementara secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Selat Madura di sebelah timur, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar $719,34 \text{ km}^2$ ini terbagi menjadi 18 Kecamatan, 318 Desa, dan 28 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah sebesar 11,53 persen terhadap luas wilayah kabupaten secara keseluruhan. Diikuti oleh Kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,01 persen terhadap luas wilayah kabupaten.

Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan kota “Delta”, dikarenakan wilayahnya yang berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Surabaya di sebelah utara dan Kali Porong di sebelah selatan.

Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Tarik	39,73
2	Prambon	29,89
3	Krembung	27,90
4	Porong	30,71
5	Jabon	82,92
6	Tanggulangin	29,78
7	Candi	42,86
8	Tulangan	31,31
9	Wonoayu	30,29
10	Sukodono	32,85
11	Sidoarjo	62,03
12	Buduran	43,65

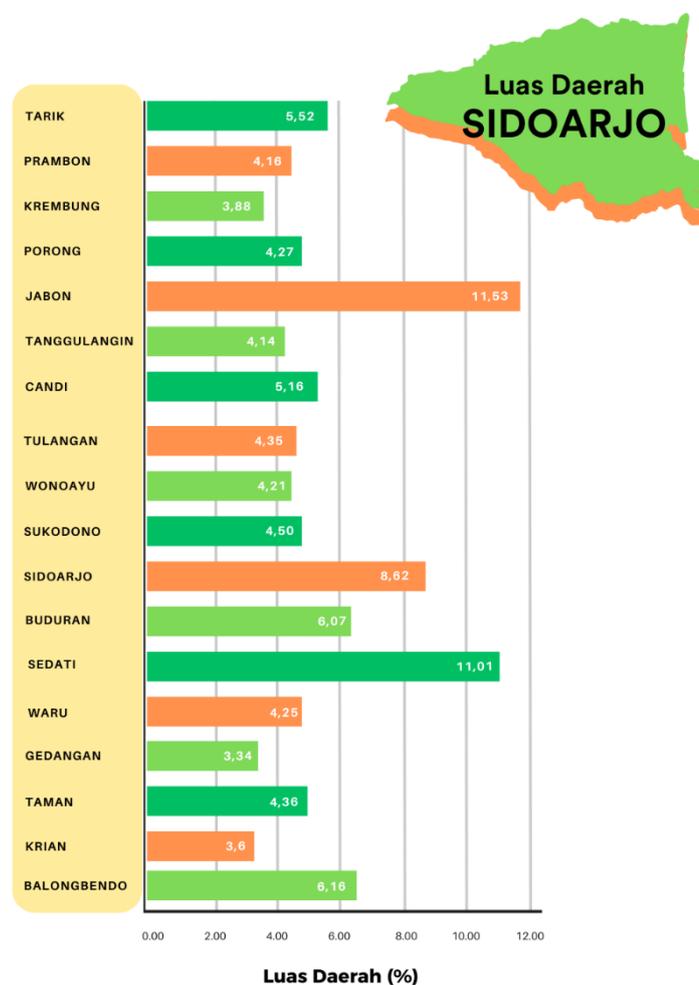


LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

13	Sedati	79,23
14	Waru	30,59
15	Gedangan	24,01
16	Taman	31,36
17	Krian	25,89
18	Balongsendo	44,34
Jumlah		719,34

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2024



Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 318 Desa dan 28 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*). Pada Tahun 2023 dilakukan penggabungan untuk Desa dan Kelurahan yang terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Terdampak



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lumpur Sidoarjo, dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa Dalam Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Gedang digabung menjadi Kelurahan Gedang;
- 2) Kelurahan Mindi dan Kelurahan Porong digabung menjadi Kelurahan Porong.
- 3) Desa Renokenongo digabung dengan Desa Glagaharum menjadi Desa Glagaharum Kecamatan Porong
- 4) Desa Besuki digabung dengan Desa Dukuhsari menjadi Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon
- 5) Desa Pejarakan digabung dengan Desa Kedungcangkring menjadi Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon
- 6) Desa Kedungbendo digabung dengan Desa Ketapang menjadi Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin

Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	12	3
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangin	18	-
8.	Jabon	13	-
9.	Krian	19	3
10.	Balombangendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	318	28

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025



Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada pada ketinggian 0-25 mdpl dan terbagi atas tiga kelas, yaitu :

- 0-3 meter, merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau, berada di sebelah timur
- 3-10 meter, merupakan daerah bagian tengah yang berair tawar
- 10-25 meter, terletak di daerah bagian barat

Sepanjang Tahun 2024, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 36,6°C, terjadi di bulan April dengan kelembaban rata-rata 73,3%. Sementara suhu terendah terjadi di bulan Agustus, sebesar 20,4°C dengan kelembaban rata-rata sebesar 72,0 persen.

Sementara itu, BMKG juga mencatat selama Januari-Desember 2024 jumlah hari hujan di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 156 hari hujan dengan jumlah terbanyak pada bulan Desember dengan jumlah 27 hari hujan.

Curah hujan dan jumlah hari hujan sepanjang 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Desember, sebesar 584,6 mm dengan hari hujan sebanyak 27 hari.

Curah hujan mulai turun secara signifikan di bulan Mei menjadi 0,5 mm dengan 4 hari hujan, namun kembali meningkat di bulan November, sebesar 209,6 mm dengan hari hujan sebanyak 17 hari.



Suhu dan Kelembapan per Bulan di Tahun 2024

Bulan	Suhu (°C)			Kelembapan (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	23,0	28,5	35,8	56,00	82	98,0
Februari	23,2	28,3	35,0	59,0	84,0	97,0
Maret	23,6	28,7	35,0	50,0	82,0	99,0
April	23,2	29,2	36,6	52,0	83,0	98,0
Mei	22,8	29,1	34,4	51,0	76,0	97,0
Juni	23,0	28,4	34,4	49,0	78,0	100,0
Juli	21,2	27,4	33,0	46,0	75,0	98,0
Agustus	20,4	27,5	33,4	39,0	72,0	93,0
September	23,2	29,0	35,0	32,0	69,0	92,0
Oktober	23,8	30,0	36,4	38,0	66,0	86,0
Nopember	23,4	29,8	35,6	42,0	75,0	94,0
Desember	23,2	27,9	34,4	46,0	82,0	100,0

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Kecepatan Angin dan Tekanan Udara per Bulan di Tahun 2024

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)		Tekanan Udara (mb)
	Rata-Rata	Maksimum	Rata-Rata
Januari	6,4	19,0	1.010,2
Februari	6,0	21,0	1.011,2
Maret	6,4	17,0	1.010,4
April	5,3	11,0	1.009,3
Mei	6,0	17,0	1.010,0
Juni	5,9	15,0	1.011,4
Juli	6,3	15,0	1.011,7
Agustus	7,2	16,0	1.012,2
September	7,1	18,0	1.011,0
Oktober	7,3	17,0	1.011,2
Nopember	6,1	16,0	1.009,5
Desember	6,8	19,0	1.008,2

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari per Bulan di Tahun 2024

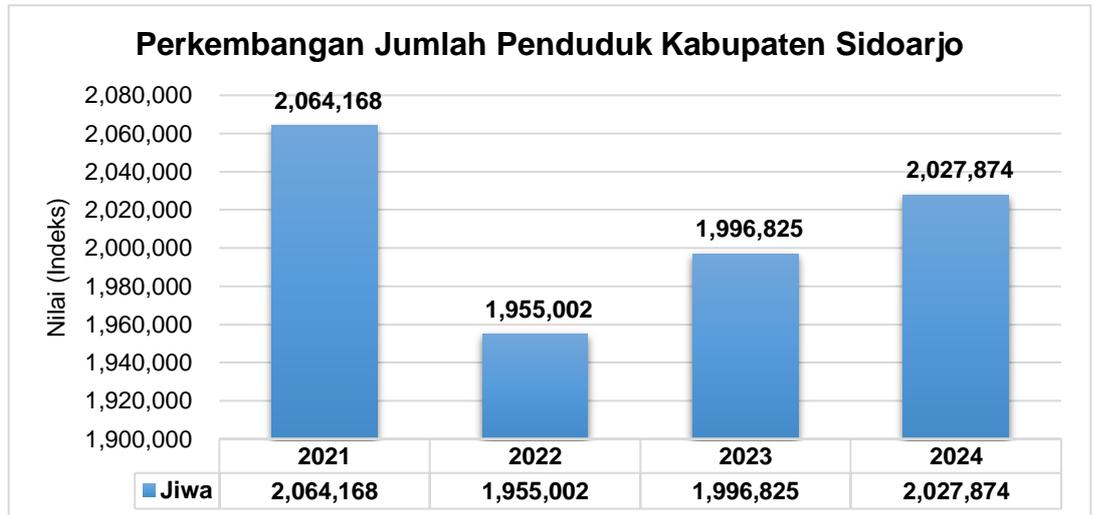
Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (day)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	396,8	24	78,0
Februari	445,3	23	85,0
Maret	125,6	19	22,0
April	363,0	22	80,0
Mei	0,5	4	1,0
Juni	98,4	11	36,0
Juli	24,5	2	20,0
Agustus	1,0	1	1,0
September	15,1	4	15,0
Oktober	8,1	2	8,0
Nopember	209,6	17	50,0
Desember	584,6	27	96,0

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025



2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, berdasarkan laporan perkembangan penduduk di Tahun 2024, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.027.874 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia Tahun 2024 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Struktur Usia	Laki-Laki	Perempuan	Total
0-4	60.676	56.588	117.264
5-9	75.800	70.642	146.442
10-14	81.577	76.547	158.124
15-19	76.809	71.700	148.509
20-24	84.745	80.255	165.000
25-29	80.038	76.464	156.502
30-34	74.990	72.647	147.637
35-39	71.937	70.359	142.296
40-44	80.375	82.294	162.669
45-49	73.855	78.723	152.578
50-54	73.644	78.882	152.526
55-59	64.387	69.057	133.444
60-64	46.528	50.894	97.422
65-69	34.633	34.859	69.492
70-75	20.135	20.105	40.240
75+	15.733	21.996	37.729
JUMLAH	1.015.862	1.012.012	2.027.874

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025



Sedangkan apabila dijabarkan berdasarkan Kecamatan, maka Kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk terbanyak, dan yang terkecil adalah Kecamatan Jabon.



Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan / Desa / Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	TARIK	34.287	33.661	67.948
2	PRAMBON	40.264	39.307	79.571
3	KREMBUNG	34.613	34.488	69.101
4	PORONG	35.479	34.976	70.455
5	JABON	28.000	27.737	55.737
6	TANGGULANGIN	44.192	44.093	88.285
7	CANDI	78.922	78.869	157.791
8	TULANGAN	51.581	51.240	102.821
9	WONOAYU	43.082	42.256	85.338
10	SUKODONO	63.169	62.409	125.578
11	SIDOARJO	99.232	100.938	200.170
12	BUDURAN	50.631	50.598	101.229
13	SEDATI	48.969	48.709	97.678
14	WARU	96.869	98.892	195.761
15	GEDANGAN	60.118	59.948	120.066
16	TAMAN	101,722	101.412	203.134
17	KRIAN	67.041	65.770	132.811
18	BALONGBENDO	37.691	36.709	74.400
JUMLAH		1.000.067	996.758	1.996.825

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

3. Kondisi Perekonomian

Nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo atas dasar harga berlaku pada Tahun 2024 mencapai 296,89 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 23,19 triliun rupiah dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai 273,70 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kenaikan produksi di seluruh lapangan usaha.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 160,95 triliun rupiah pada Tahun 2023 menjadi 169,87 triliun rupiah pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama Tahun 2024 terjadi percepatan terhadap perekonomian Sidoarjo sebesar 5,54 persen. Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan



oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi tiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021), struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, sebagai berikut: industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda; dan kategori konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Sidoarjo.

Pada Tahun 2024, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sidoarjo dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 48,57 persen, meningkat 5,18 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 15,98, meningkat 4,67 persen dari Tahun 2023, disusul oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 13,82 persen.

Pertumbuhan ekonomi Sidoarjo Tahun 2024 sebesar 5,54 persen, mengalami perlambatan dibandingkan Tahun 2023 yang pertumbuhannya sebesar 6,16 persen. Salah satu indikator pendukung perlambatan adalah melambatnya pertumbuhan pada beberapa sektor unggulan di Kabupaten Sidoarjo antara lain transportasi dan pergudangan yg hanya tumbuh 7,87 persen pada tahun 2023 dan 22,14 persen pada tahun 2022.

Berdasarkan pengeluaran, pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo pada 2024 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yaitu berturut-turut sebesar 53,94 persen dan 28,98 persen.

Kondisi ekonomi daerah diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB diukur berdasarkan perhitungan 17 (tujuh belas) sektor usaha yang dominan di masyarakat. Rincian PDRB per sektor usaha Tahun 2024 berdasarkan angka sementara, sebagai berikut :



PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

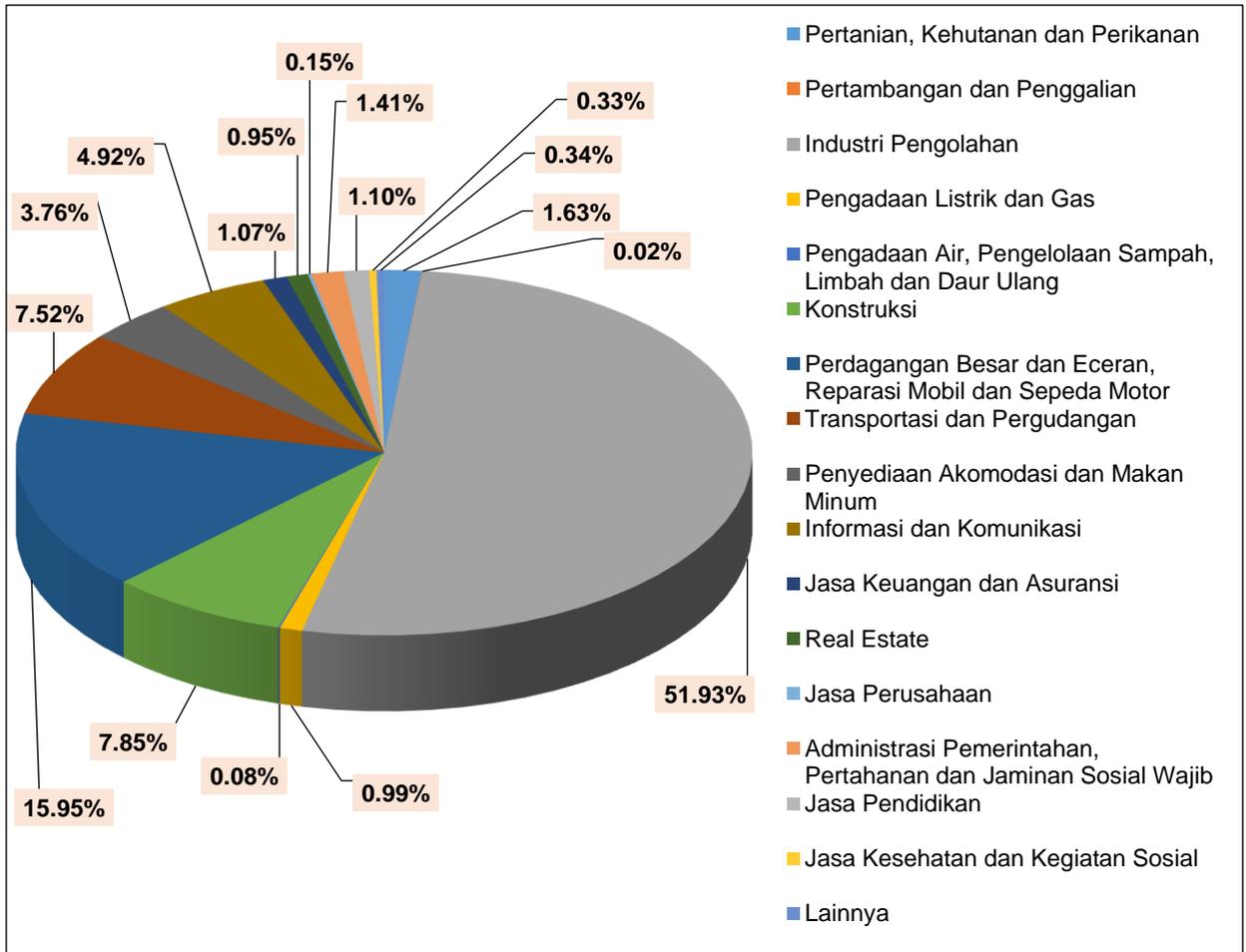
No.	Sektor	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.291,45	2.766,84
2	Pertambangan dan Penggalian	70,13	40,60
3	Industri Pengolahan	144.199,37	88.214,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.939,15	1.677,73
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	159,41	128,34
6	Konstruksi	20.187,34	13.332,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	47.433,14	27.095,27
8	Transportasi dan Pergudangan	41.009,47	12.775,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.697,64	6.395,20
10	Informasi dan Komunikasi	9.649,99	8.353,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.260,96	1.814,50
12	Real Estate	2.359,18	1.606,75
13	Jasa Perusahaan	419,47	253,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.544,97	2.403,30
15	Jasa Pendidikan	2.900,49	1.867,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	858,48	565,78
17	Jasa Lainnya	906,46	576,00
TOTAL		296.887,11	169.867,80

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor administrasi pemerintah, sektor transportasi, sektor akomodasi dan makan minum. Berikut *share* PDRB berdasarkan ADHK Kabupaten Sidoarjo per sektor, sebagaimana grafik :



Share PDRB Berdasarkan ADHK



Sumber data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

E. Sumber Daya PNS

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 13.934 orang yang terdiri dari, sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah	Struktural	Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Daerah	17	78	39	134
2	Sekretariat DPRD	5	41	8	54
3	Inspektorat	4	15	54	73
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16	341	6.970	7.327
5	Dinas Kesehatan	24	163	1300	1.487
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	7	60	11	78



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

7	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	8	26	8	42
8	Satuan Polisi Pamong Praja	12	15	57	84
9	Dinas Sosial	6	10	5	21
10	Dinas Tenaga Kerja	6	8	16	30
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	12	6	24
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6	9	4	19
13	Dinas Pangan dan Pertanian	8	39	95	142
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7	205	12	224
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	23	20	49
16	Dinas Perhubungan	19	47	14	80
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	35	14	56
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6	21	2	29
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	14	7	26
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6	37	5	48
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	11	14	31
22	Dinas Perikanan	5	21	4	30
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	121	11	140
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	24	17	48
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	50	7	63
26	Badan Pelayanan Pajak Daerah	5	71	9	85
27	Badan Kepegawaian Daerah	8	34	24	66
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	10	2	17
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	50	32	88
30	Rumah Sakit Umum Daerah	38	121	1.297	1.456
31	Kecamatan Sidoarjo	55	35	2	92
32	Kecamatan Candi	8	11	1	20
33	Kecamatan Buduran	8	11	2	21
34	Kecamatan Gedangan	8	10	1	19
35	Kecamatan Sedati	7	12	1	20
36	Kecamatan Waru	8	13	2	23
37	Kecamatan Taman	37	27	2	66
38	Kecamatan Sukodono	9	12	1	22
39	Kecamatan Wonoayu	7	13	1	21
40	Kecamatan Krian	8	12	0	20
41	Kecamatan Balongbendo	8	16	1	25
42	Kecamatan Tarik	5	16	1	22
43	Kecamatan Tulangan	8	11	1	20



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

44	Kecamatan Prambon	9	17	2	28
45	Kecamatan Krembung	6	12	1	19
46	Kecamatan Tanggulangin	9	12	1	22
47	Kecamatan Jabon	8	9	1	17
48	Kecamatan Porong	20	16	0	36
49	Rumah Sakit Umum Sidoarjo Barat	13	23	279	315
TOTAL		516	2.000	10.364	12.879

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

F. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut semua daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi yang dapat dipergunakan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Pagu pendapatan dapat didorong melalui penggalian potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah untuk merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Secara umum struktur pendapatan daerah setelah otonomi, sumber penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten berasal dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Dana Alokasi Umum (DAU), (4) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (5) Bagi Hasil Pajak dan Batuan Keuangan dari Propinsi.

Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan :

- 1) Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru.
- 3) Optimalisasi penarikan pendapatan pajak dan retribusi dilakukan melalui pemanfaatan information and communication teknologi (ICT).
- 4) Proyeksi atas perhitungan pendapatan daerah harus berdasarkan pada pemetaan potensi dan kajian akademik.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

5) Penyelesaian pajak dan retribusi terutang dioptimalkan melalui penagihan secara terus menerus dan disertai kajian mengenai cleansing data.

Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai misi Kabupaten Sidoarjo.

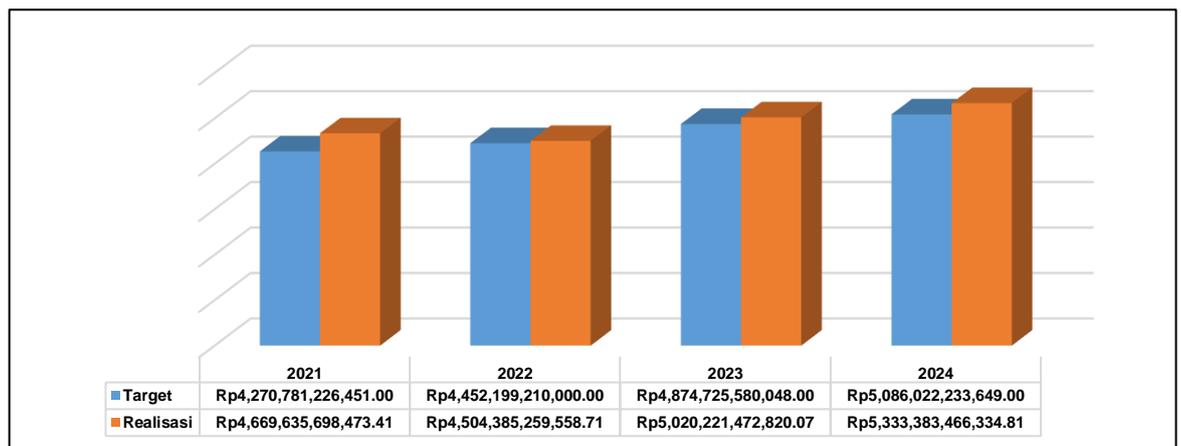
Target dan realisasi pendapatan daerah dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
	(Rp.)	(Rp.)	
2020	Rp. 4.058.099.090.414,00	Rp. 4.422.599.399.218,15	108,98%
2021	Rp. 4.270.781.226.451,00	Rp. 4.669.635.698.473,41	109,34%
2022	Rp. 4.452.199.210.000,00	Rp. 4.504.385.259.558,71	101,17%
2023	Rp. 4.874.725.580.048,00	Rp. 5.020.221.472.820,07	102,98%
2024	Rp. 5.086.022.233.649,00	Rp. 5.333.383.466.334,81	104,86%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2020 s.d 2023 Audited, sedangkan untuk Tahun 2024 Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

Target dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2020 s.d 2023 Audited, sedangkan untuk Tahun 2024 Unaudited per tanggal 31 Januari 2025



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi seluruh pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.333.383.466.334,81 atau 104,86% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.5.086.022.233.649,00.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.118.076.054.462,00	2.353.033.530.419,76	111,09
PENDAPATAN TRANSFER	2.966.872.179.187,00	2.980.250.251.676	100,45
LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.074.000.000,00	99.684.239,05	9,28
JUMLAH PENDAPATAN	5.086.022.233.649,00	5.333.383.466.334,81	104,86

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.353.033.530.419,76 atau tercapai sebesar 111,09% dari seluruh target PAD sebesar Rp. 2.118.076.054.462,00.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pajak Daerah	1.236.250.000.000,00	1.407.663.067.473,40	113,87
Retribusi Daerah	811.670.795.854,00	861.595.661.847,07	106,15
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	38.294.754.513,00	38.107.714.620,50	99,51
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah	31.860.504.095,00	45.667.086.478,79	143,33
JUMLAH	2.118.076.054.462,00	2.353.033.530.419,76	111,09

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

b. Pajak Daerah

Pajak daerah Tahun Anggaran 2024 realisasinya tercapai sebesar Rp.1.407.663.067.473,40 atau 113,87% dari seluruh target Rp.1.236.250.250.000,00 penerimaan pajak daerah.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

JENIS / OBYEK PAJAK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Pajak Daerah	1.236.250.250.000,00	1.407.663.067.473,40	113,87%
Pajak Hotel	0,00	89.991.391,00	0
Pajak Restoran	0,00	984.299.894,00	0
Pajak Hiburan	0,00	4.879.500,00	0
Pajak Reklame	18.000.000.000,00	22.723.683.536,00	126,24
Pajak Penerangan Jalan	0,00	-11.282.695,00	0
Pajak Parkir	0,00	11.199.000,00	0
Pajak Air Tanah	5.500.000.000,00	7.426.394.234,00	135,03
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	282.000.000.000,00	303.732.853.947,00	107,71
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	415.000.000.000,00	509.090.107.338,40	122,67
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	515.750.000.000	563.610.941.328	109,28

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

c. Retribusi Daerah

Retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.861.595.661.847,07 atau tercapai 106,15% dari seluruh target retribusi daerah yang ditetapkan. Seluruh jenis retribusi realisasinya terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Daerah	811.670.795.854,00	861.595.661.847,07	106,15
Retribusi Jasa Umum	785.828.079.854,00	825.516.010.764,07	105,05
Retribusi Jasa Usaha	8.357.325.000,00	9.929.768.721,00	118,82
Retribusi Perizinan Tertentu	17.485.391.000,00	26.149.882.362,00	149,55

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.38.294.754.513,00 dan terealisasi sebesar Rp.38.107.714.620,50 atau tercapai sebesar 99,51%.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	38.294.754.513,00	38.107.714.620,50	99,51
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	28.800.832.359,00	28.575.037.290,50	99,22
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	879.203.017,00	879.203.017,00	100,00



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)			
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	8.614.719.137,00	8.653.474.313,00	100,45

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

e. Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan lain-lain PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.45.667.086.478,79 atau tercapai 143,33%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 31.860.504.095,00.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.000.000.000,00	1.743.144.135,00	43,578,60
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.768.534.911,00	11.511.479.825,00	106,90
Hasil Kerja Sama Daerah	2.269.231.700,00	0,00	0,00
Jasa Giro	3.098.825.376,00	3.358.624.443,29	108,38
Pendapatan Bunga	9.183.333.333,00	13.934.383.561,18	151,74
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00	3.521.655.581,80	234,78
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	73.846.832,18	0
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	483.851.538,86	0
Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.033.129.240,00	8.440.614.675,00	167,70
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	3.969.727,00	0
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	116.003.153,00	0
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	956.102.673,06	0
Pendapatan BLUD	0,00	1.518.290.333,42	0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.449.535,00	3.720.000,00	107,84
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	1.400.000,00	0
JUMLAH	31.860.504.095,00	45.667.086.478,79	143,33

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

f. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.2.980.250.251.676,00 atau 100,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.966.872.179.187,00. Rincian target dan realisasi pendapatan dana perimbangan sebagai berikut :



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.489.180.983.187,00	2.466.654.964.629,00	99,10
Dana Perimbangan	2.149.189.837.187,00	2.138.007.221.629,00	99,48
Insentif Fiskal	11.343.403.000,00	0,00	0
Dana Desa	328.647.743.000,00	328.647.743.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	477.691.196.000,00	513.595.287.047,00	107,52
Pendapatan Bagi Hasil	466.550.000.000,00	502.620.091.047,00	107,73
Bantuan Keuangan	11.141.196.000,00	10.975.196.000,00	98,51
JUMLAH	2.966.872.179.187,00	2.980.250.251.676,00	100,45

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

g. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi atas Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Pendapatan Hibah	1.074.000.000,00	99.015.000,00	9,22
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.074.000.000,00	99.015.000,00	9,22
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	669.239,05	0,00
Lain-lain Pendapatan	0,00	669.239,05	0,00
JUMLAH	1.074.000.000,00	99.684.239,05	9,28

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

G. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing- masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk menadani pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Pada jenis belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan menetapkan belanja dengan model pelaksanaan multi-years dan atau model pembayaran dengan turn-keys, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian misi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana berikut :

- 1) Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, antara lain belanja pegawai dan overhead cost di setiap Perangkat Daerah secara proporsional.
- 2) Belanja Daerah difokuskan pada urusan wajib pelayanan dasar dan 17 (tujuh belas) program prioritas yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi misi pembangunan kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026,
- 3) Kebijakan selektif dalam pembangunan infrastruktur, yang akan diprioritaskan pada pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
- 4) Kebijakan matching program lintas Perangkat Daerah maupun dengan pihak swasta.

Target dan realisasi pendapatan daerah dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
	(Rp.)	(Rp.)	
2021	Rp. 5.376.163.555.617,00	Rp. 4.936.099.885.354,76	91,81%
2022	Rp. 5.291.622.947.330,00	Rp. 4.849.419.407.073,06	91,64%
2023	Rp. 5.367.503.579.233,00	Rp. 5.001.778.673.487,58	93,19%
2024	Rp. 5.648.924.599.197,00	Rp. 5.251.342.990.301,47	92,96%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Perkembangan Belanja Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

Target belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.5.648.924.599.197,00, dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.5.251.342.990.301,47 atau tercapai sebesar 92,96%, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	4.213.238.158.297,00	3.935.999.993.833,47	93,42
BELANJA MODAL	785.236.983.251,00	668.077.999.318,00	85,08
BELANJA TIDAK TERDUGA	28.621.892.293,00	26.568.948.044,00	92,83
BELANJA TRANSFER	621.827.565.356,00	620.696.049.106,00	99,82
JUMLAH BELANJA DAERAH	5.648.924.599.197,00	5.251.342.990.301,47	92,96

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.3.935.999.993.833,47 atau 93,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.4.213.238.158.297,00.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	1.868.510.739.345,00	1.778.430.605.560,10	95,18
Belanja Barang dan Jasa	1.867.987.575.848,00	1.690.376.003.896,45	90,49
Belanja Bunga	600.000.000,00	345.719.188,92	57,62
Belanja Subsidi	2.520.000.000,00	1.767.853.335,00	70,15
Belanja Hibah	365.752.448.104,00	362.111.796.853,00	99,00
Belanja Bantuan Sosial	107.867.395.000,00	102.968.015.000,00	95,46
JUMLAH	4.213.238.158.297,00	3.935.999.993.833,47	93,42

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

b. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.668.077.999.318,00 atau 85,08% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.785.236.983.251,00.

Rincian realisasi belanja langsung sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah	30.200.000.000,00	822.965.280,00	2,73
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	217.952.809.387,00	191.438.182.917,00	87,83
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	226.952.527.940,00	193.594.456.481,00	85,30
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	309.404.932.924,00	281.538.154.853,00	90,99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	156.013.000,00	128.568.760,00	82,41
Belanja Modal Aset Lainnya	570.700.000,00	555.671.027,00	97,37
Jumlah Belanja Modal	785.236.983.251,00	668.077.999.318,00	85,08

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

c. Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.26.568.948.044,00 atau 92,83% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.28.621.892.293,00.

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.620.696.049.106,00 atau 99,82% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.621.827.565.356,00.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Rincian realisasi belanja tidak terduga dan belanja transfer sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
BELANJA TIDAK TERDUGA	28.621.892.293,00	26.568.948.044,00	92,83
Belanja Tidak Terduga	28.621.892.293,00	26.568.948.044,00	92,83
BELANJA TRANSFER	621.827.565.356,00	620.696.049.106,00	99,82
Belanja Bagi Hasil	136.681.078.556,00	136.681.078.556,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	485.146.486.800,00	484.014.970.550,00	99,77

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

H. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah.

Struktur Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	511.902.365.548,00	511.902.365.548,05	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	260.697.900,22	0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	60.000.000.000,00	51.245.044.141,00	85,41
Jumlah	571.902.365.548,00	563.408.107.589,27	98,51
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	9.000.000.000,00	2.672.928.104,41	29,70
Jumlah	9.000.000.000,00	2.672.928.104,41	29,70
JUMLAH PEMBIAYAAN	562.902.365.548,00	560.735.179.484,86	97,45
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	642.775.655.518,20	98,54

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perekonomian nasional terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03% pada Tahun 2024. Meskipun lebih rendah dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai 5,05%, pertumbuhan ini tetap menunjukkan keberlanjutan ekonomi yang diperkirakan akan terus menguat meskipun menghadapi tantangan eksternal. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,43 persen. Sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 4,86 persen dan 0,67 persen. Secara spasial, Pulau Jawa yang menyumbang 57,02% terhadap ekonomi nasional mengalami pertumbuhan sebesar 4,92%.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen untuk mendukung pemulihan ekonomi guna menjaga stabilitas dan produktivitas ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya ini mencakup: 1) pemulihan sektor usaha mikro; 2) pemulihan sektor perdagangan; 3) penguatan ketahanan dan keamanan pangan; 4) pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; serta 5) pemulihan sektor tenaga kerja. Program-program ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam mendukung berbagai program tersebut, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi aspek krusial. Pada Tahun Anggaran 2024, APBD semula sebesar Rp. 4.908.517.240.058,00 bertambah sebesar Rp. 177.504.993.591,00 sehingga menjadi Rp. 5.086.022.233.649,00 sebagaimana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2024 tentang



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan rincian penganggaran sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :	
a. Semula	Rp.4.908.517.240.058,00
b. Bertambah	Rp.177.504.993.591,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	<u>Rp.5.086.022.233.649,00</u>
2. Belanja Daerah :	
a. Semula	Rp.5.258.517.240.058,00
b. Bertambah	Rp.390.407.359.139,00
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp.5.648.924.599.197,00</u>
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp.370.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.201.902.365.548,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 571.902.365.548,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp.20.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp.11.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.9.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto sebelum perubahan	Rp.350.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.562.902.365.548,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.212.902.365.548,00

1. Pendapatan

Pendapatan Daerah dimaksud, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp.1.983.134.798.058,00
2. Bertambah	<u>Rp. 134.941.256.404,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.2.118.076.054.462,00
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula	Rp.2.924.308.442.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.42.563.737.187,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.2.966.872.179.187,00



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPI) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp.1.074.000.000,00
2. Bertambah/berkurang	(Rp.0)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp. 1.074.000.000,00</u>
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud, bersumber dari :	
a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp.1.217.200.000.000,00
2. Bertambah	Rp.19.050.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	<u>Rp.1.236.250.000.000,00</u>
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp.54.529.180.700,00
2. Bertambah	Rp.757.141.615.154,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	<u>Rp.811.670.795.854,00</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp.34.182.565.119,00
2. Berkurang	(Rp.4.112.189.394,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	<u>Rp.38.294.754.513,00</u>
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp.1.074.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	(Rp.0)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp.1.074.000.000,00</u>

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat	
1. Semula	Rp.2.457.758.442.000,00
2. Berkurang	(Rp.31.422.541.187,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	<u>Rp.2.489.180.983.187,00</u>



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

b. Transfer Antar Daerah	
1. Semula	Rp.466.550.000.000,00
2. Bertambah	Rp. 11.141.196.000,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	<hr/> Rp.477.691.196.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud,
bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp.1.074.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	(Rp.0)
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	<hr/> Rp.1.074.000.000,00
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	<hr/> Rp.0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah	Rp.0,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	<hr/> Rp.0,00

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Operasi	
1. Semula	Rp.3.931.253.589.084,00
2. Bertambah	Rp.281.984.569.213,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	<hr/> Rp.4.213.238.158.297,00
b. Belanja Modal	
1. Semula	Rp.711.439.396.611,00
2. Bertambah	Rp.73.797.586.640,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	<hr/> Rp.785.236.983.251,00



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

c. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp.25.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.3.621.892.293,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp.28.621.892.293,00</u>
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp.590.824.254.363,00
2. Bertambah	Rp.31.003.310.993,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	<u>Rp.621.827.565.356,00</u>
Belanja Operasi sebagaimana dimaksud, terdiri dari :	
a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp.1.815.377.875.900,00
2. Bertambah	Rp.53.132.863.445,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp.1.868.510.739.345,00</u>
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp.1.660.452.676.560,00
2. Bertambah	Rp.207.534.899.288,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp.1.867.987.575.848,00</u>
c. Belanja Bunga	
1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah	Rp. 600.000.000,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	<u>Rp. 600.000.000,00</u>
d. Belanja Subsidi	
1. Semula	Rp.2.520.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.2.520.000.000,00)
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
e. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp.356.771.316.624,00
2. Berkurang	Rp.8.981.131.480,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	<u>Rp.365.752.448.104,00</u>



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPI) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.96.131.720.000,00
2. Bertambah	Rp.11.735.675.000,00
Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan	<u>Rp. 107.867.395.000,00</u>

Belanja Modal sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp.30.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.200.000.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	<u>Rp.30.200.000.000,00</u>

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp.160.045.217.764,00
2. Bertambah	Rp.57.907.591.623,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	<u>Rp.217.952.809.387,00</u>

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp.223.596.379.463,00
2. Berkurang	Rp.3.356.148.477,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	<u>Rp.226.952.527.940,00</u>

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. Semula	Rp.297.112.286.384,00
2. Bertambah	Rp.12.292.646.540,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	<u>Rp.309.404.932.924,00</u>

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.135.513.000,00
2. Bertambah	Rp.20.500.000,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	<u>Rp.156.013.000,00</u>



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp.550.000.000,00
2. Bertambah	Rp.20.700.000,00
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	<hr/> Rp.570.700.000,00

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud, yaitu :

1. Semula	Rp.25.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.3.621.892.293,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<hr/> Rp.28.621.892.293,00

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.127.172.918.070,00
2. Bertambah	Rp.9.508.160.486,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	<hr/> Rp.136.681.078.556,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.463.651.336.293,00
2. Bertambah	Rp.21.495.150.507,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	<hr/> Rp.485.146.486.800,00

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.370.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.201.902.365.548,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<hr/> Rp.571.902.365.548,00



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.20.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp.9.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.11.000.000.000,00

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp.310.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.201.902.365.548,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.511.902.365.548,05

b. Pencairan dana cadangan

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula	Rp.60.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.0,00)</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	(Rp.60.000.000.000,00)

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.60.000.000.000,00</u>



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPI) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.60.000.000.000,00
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud, terdiri :	
a. Pembentukan dana cadangan	
1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.0,00
b. Penyertaan Modal Daerah	
1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp.0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pembayaran pokok utang	Rp.0,00
d. Pemberian pinjaman daerah	
a. Semula	Rp.0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
a. Semula	Rp.0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.9.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.9.000.000.000,00

Tema pembangunan Tahun 2024 sebagaimana Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024,



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

adalah “Penguatan Konektivitas Kawasan Strategis sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi Inklusif, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengangguran serta Peningkatan SDM yang Berkarakter”, dimana Prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Prioritas RKPD Tahun 2024	Arah Kebijakan Tahun 2024
Mendorong berkembangnya sektor strategis industri, perdagangan, jasa dan mendorong berkembangnya usaha mikro, koperasi, industri kreatif, pariwisata yang berorientasi pengentasan kemiskinan serta pengangguran	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Output PDRB <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stimulus sektor perdagangan ➤ Stimulus sektor pertanian dan perikanan ➤ Stimulus sektor industri Sisi Pengeluaran PDRB <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konsumsi ➤ Investasi ➤ Pengeluaran Pemerintah ➤ Surplus perdagangan antar daerah
Revitalisasi nilai budaya lokal sebagai spirit pendukung Pembangunan daerah	Penguatan (daya saing) Sumber Daya Manusia (SDM) : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Kesehatan ➤ Peningkatan pendidikan ➤ Peningkatan skill/kompetensi ➤ Peningkatan kesetaraan ➤ Pembentukan etos kerja
Penguatan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter	
Penguatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menciptakan suasana yang setara, toleran, tertib dan nyaman	
Penataan kota, system terpadu pengurai kemacetan dan pemenuhan infrastruktur pendorong konektivitas antar wilayah	Pemenuhan (daya saing) infrastruktur pendukung investasi dan sektor strategis lainnya <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akses dan sarpras pendukung perdagangan ➤ Akses dan sarpras pendukung kegiatan agrobisnis ➤ Akses dan sarpras pendukung industry/manufaktur ➤ Akses dan sarpras pendukung sektor potensial (Usaha Mikro, Koperasi, Industri Kreatif, Destinasi Wisata Unggulan, dan lain-lain)
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan sampah terpadu serta sarana prasarana utilitas lainnya	
Pemenuhan kebutuhan sosial dasar, ketahanan pangan dan energi berkelanjutan	

Pada tahun anggaran 2024 telah ditetapkan paket strategis pengadaan barang / jasa sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/557/438.1.1.3/2023 tentang Paket Strategis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024, yaitu antara lain sebagai berikut :



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Paket Strategis	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Road Waru – Buduran (LJT)	38.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
2	Peningkatan Jalan Mondong – Grabagan (DAK)	21.873.733.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
3	Peningkatan Jalan Masangan Wetan - Sukodono (DAK)	20.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
4	Pembangunan Gedung SMPN 2 Tulangan	6.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pembangunan Gedung SMPN 2 Prambon	6.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Ruangan Nifas dan ICU (DAK)	5.940.000.000	RSUD Sidoarjo Barat
7	Pembangunan Taman Alun - Alun (Lanjutan)	29.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
8	Peningkatan Jalan Banjarsari - Dukuh Tengah (LJT)	12.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
9	Peningkatan Jalan Kludan – Tulangan	15.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
10	Peningkatan Jalan Wonoplintahan - Jedongcangkring (LJT)	12.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
11	Pelebaran Jalan Akses Jabon	11.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
12	Peningkatan Jalan Candinegoro – Terungkulon	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

13	Peningkatan Jalan Dusun Delik Desa Seduri s/d Dusun Girang Desa Wonokupang	9.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
14	Peningkatan Jalan Dukuhsari – Semambung	8.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
15	Peningkatan Jalan Pilang – Sawocangkring	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan ukuran capaian kinerja tertinggi dari tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 terdapat 9 IKU yang menjadi tolak ukur keberhasilan utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang capaian hasil keberhasilan kerjanya pada Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021	2022	2023	2024		Keterangan
						Target	Realisasi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B	B	BB	A	A	TERCAPAI
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,21	7,53	6,16	6,78	5,54	TIDAK TERCAPAI
3	Indeks Gini	Poin	0,347	0,373	0,359	0,345	0,327	TERCAPAI
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,87	8,80	8,05	7,96	6,49	TERCAPAI
5	Tingkat Kemiskinan	%	5,93	5,36	5,00	5,30	4,53	TERCAPAI
6	Indeks Infrastruktur	Poin	0,793	0,792	0,843	0,780	0,850	TERCAPAI
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	59,81	57,54	58,97	59,82	53,35	TIDAK TERCAPAI
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	81,01	81,37	81,88	81,17	82,67	TERCAPAI
9	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	82,03	84,23	85,15	87,30	87,33	TERCAPAI

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencapai *good and clean governance* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25



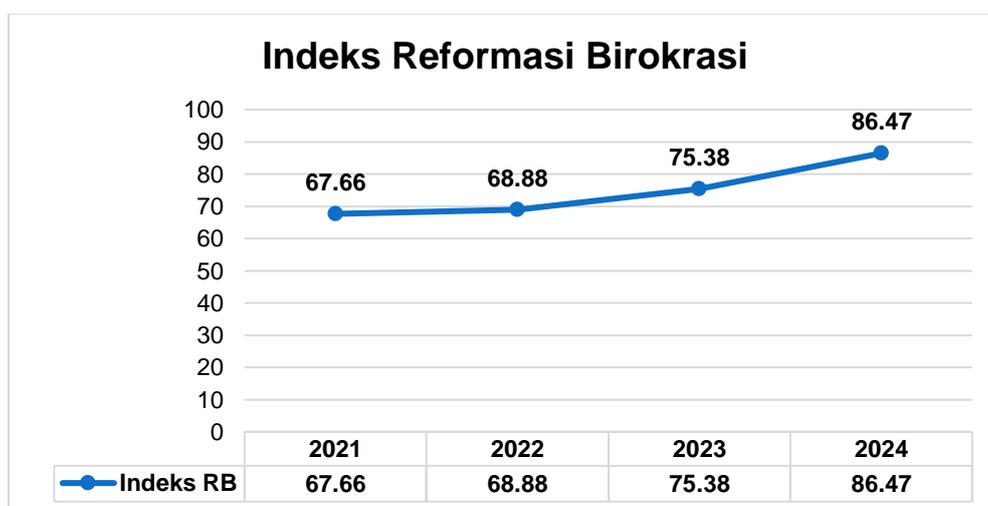
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, Reformasi Birokrasi dibagi menjadi 2 (dua) komponen penilaian, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi General, yang terbagi menjadi sub komponen penilaian, sebagai berikut :
 - a) Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
 - b) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
 - c) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - d) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
 - e) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - f) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - g) Tingkat Digitalisasi Arsip
 - h) Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
 - i) Indeks Kualitas Kebijakan
 - j) Indeks Reformasi Hukum
 - k) Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor
 - l) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang / Jasa
 - m) Indeks Sistem Merit
 - n) Indeks Pelayanan Publik
 - o) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
 - p) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - q) Opini BPK
 - r) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
 - s) Indeks BerAKHLAK
 - t) Survei Penilaian Integritas
 - u) Survey Kepuasan Masyarakat
2. Reformasi Birokrasi Tematik, yang terbagi menjadi beberapa tematik sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut :
 - a) Pengentasan Kemiskinan
 - b) Peningkatan Investasi
 - c) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dengan fokus Penanganan Stunting
 - d) Pengendalian Inflasi
 - e) Penggunaan Produk Dalam Negeri



Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ditargetkan A (Sangat Baik), sedangkan untuk capaiannya adalah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan predikat A (Sangat Baik) dengan Nilai 86,47. Capaian dimaksud meningkat dari Tahun 2023 yang masih berada pada kategori BB (Sangat Baik). Adapun perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2023 sebagaimana grafik berikut :



Sumber data : Kementerian PAN & RB

Komponen penilaian tercapai sebagaimana tabel berikut :

RB General	74,67
RB Tematik	11,8
Total Nilai	86,47

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

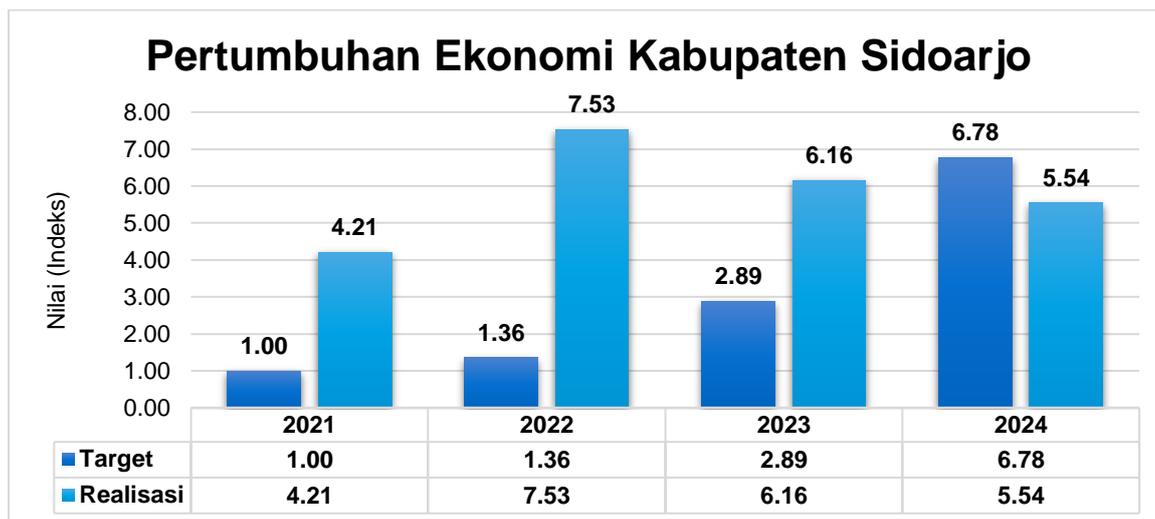
Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu



daerah. Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK mengalami fase peningkatan setelah pemulihan pasca pandemi Covid-19, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Berdasarkan hasil evaluasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo sudah jauh melebihi target sehingga target mengalami penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Pada RPJMD, target pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 adalah sebesar 4,23 namun pada Perubahan RKPD Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ditargetkan sebesar 6,78, dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, angka pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 sebesar 5,54 (81,71% dari target yang telah ditetapkan). Angka ini melebihi capaian nasional yaitu sebesar 5,03 dan Provinsi Jawa Timur sebesar 4,93.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo :



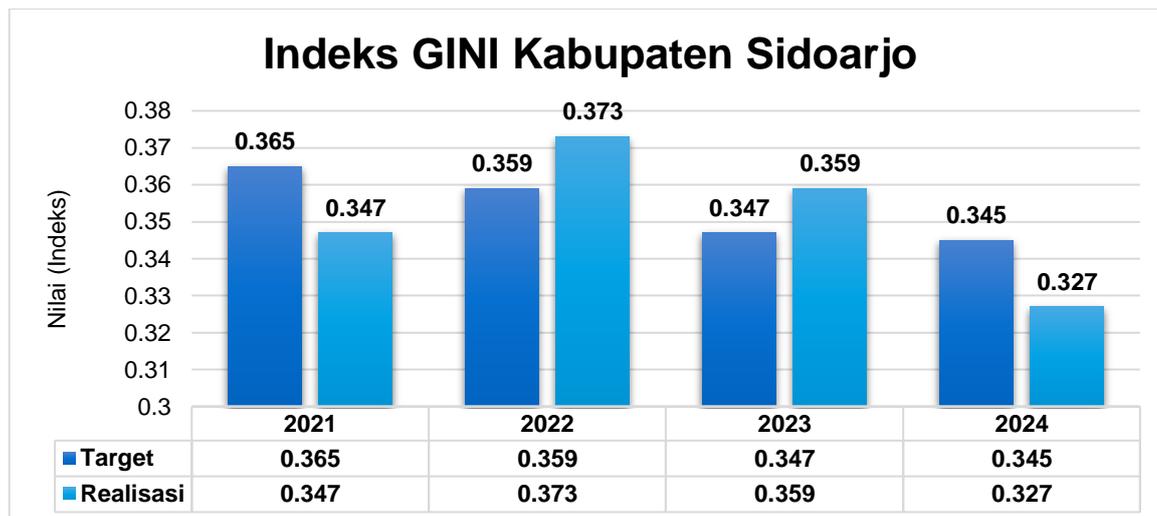
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

3. Indeks GINI

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa – apa.



Berikut perkembangan Disparitas (Indeks GINI) di Kabupaten Sidoarjo :



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1, atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 tercapai 0,327 dari target 0,345 sehingga sudah mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka capaian Tahun 2024 lebih baik, yaitu menurun 0,03 poin atau sekitar 8,91%.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 sebesar 6,49 persen, turun 1,56 poin dibandingkan dengan tahun 2023 yang masih

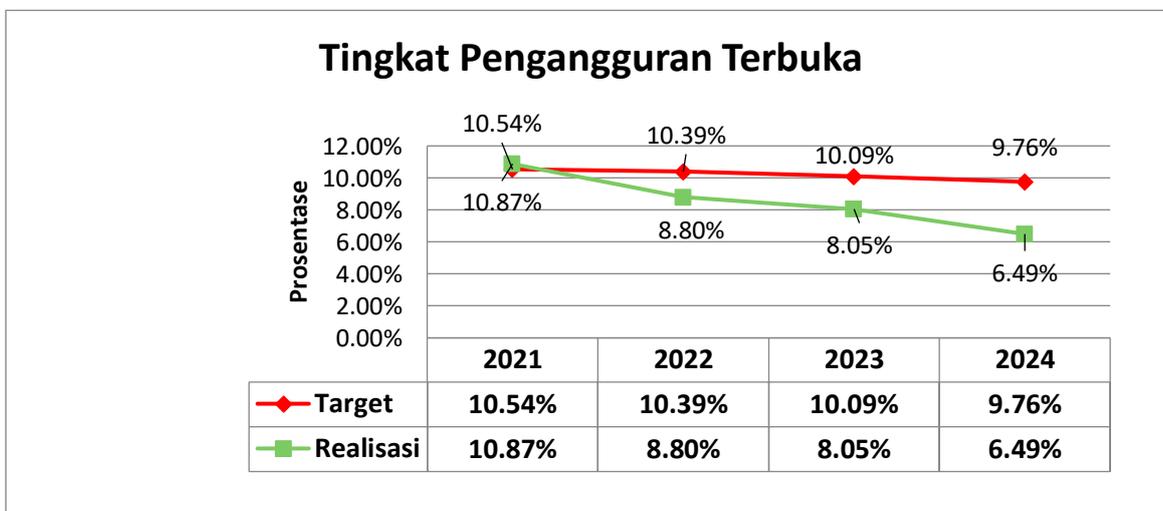


berada pada angka 8,05 persen. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 9,76 persen, maka capaian tahun 2024 jauh melebihi target yang ditetapkan.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 berkurang 3,39 ribu orang menjadi sebanyak 1.172,56 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,37 persen, turun 1,25 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2023 sebesar 69,62 persen.

Penduduk yang bekerja sebanyak 1.096,49 ribu orang atau bertambah 14,77 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Semua sektor pekerjaan utama mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sektor industri merupakan sektor yang paling banyak mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja dibandingkan sektor pertanian dan jasa, yaitu bertambah sebanyak 10,26 ribu orang. Sedangkan sektor jasa bertambah sebanyak 4,50 ribu orang, dan sektor pertanian hanya bertambah 9 orang.

Sebanyak 708,55 ribu orang (64,62 persen) bekerja pada kegiatan formal atau naik 2,28 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Lulusan Universitas memiliki TPT tertinggi di Sidoarjo, yaitu sebesar 7,68 persen, angka ini sama dengan kondisi pada Agustus 2023. Lulusan SMA mengalami penurunan TPT yang cukup tinggi, yaitu sebesar 5,00 persen poin dari 11,10 persen pada 2023 menjadi 6,09 persen. Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran terbuka :



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

5. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.



Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

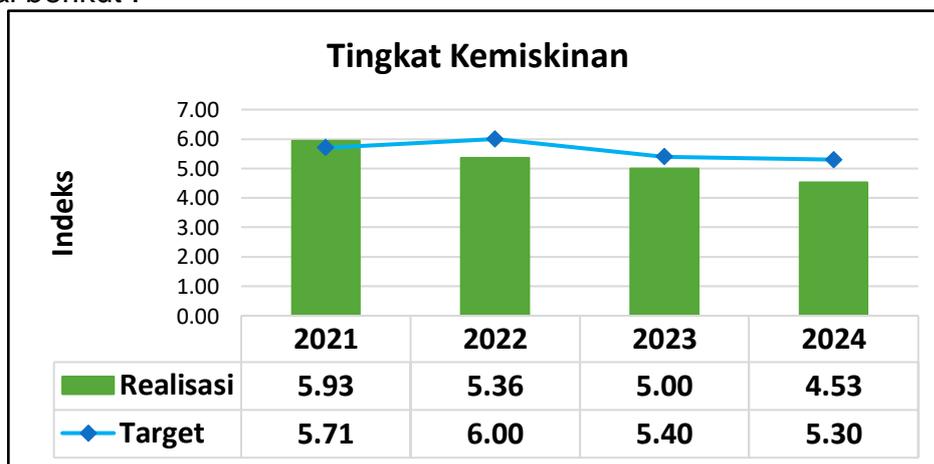
Pada level kabupaten, tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 berada pada posisi terendah, kemudian pada diikuti oleh Kabupaten Tulungagung, Banyuwangi, Blitar dan Kabupaten Jombang. Sedangkan untuk level kabupaten/kota se-Jawa Timur, tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo berada pada urutan ke-5 terendah setelah Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya dan Kota Madiun. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo secara agregasi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2024 Tingkat Kemiskinan mencapai 4,53 persen turun dari tahun 2023 yang masih berada pada angka 5,00 persen. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2023 yang sebesar 5,0% maka capaian tahun 2024 sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2024 mencapai 109,39 ribu jiwa. Berkurang sebesar 9,76 ribu jiwa, dibandingkan kondisi Maret 2023 yang sebesar 119,15 ribu jiwa.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2024 sebesar Rp 597.284 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 25.588 atau meningkat sebesar 4,48 persen, dibandingkan kondisi Maret 2023 yang sebesar Rp 571.696.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidoarjo Maret 2024 sebesar 0,64 mengalami penurunan sebesar 0,08 poin dibandingkan Maret 2023. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidoarjo Maret 2024 sebesar 0,18 mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin dibandingkan Maret 2023.

Perkembangan tingkat miskin di Kabupaten Sidoarjo terlihat sebagaimana grafik sebagai berikut :



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo



6. Indeks Infrastruktur

Indeks pengukuran infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api.

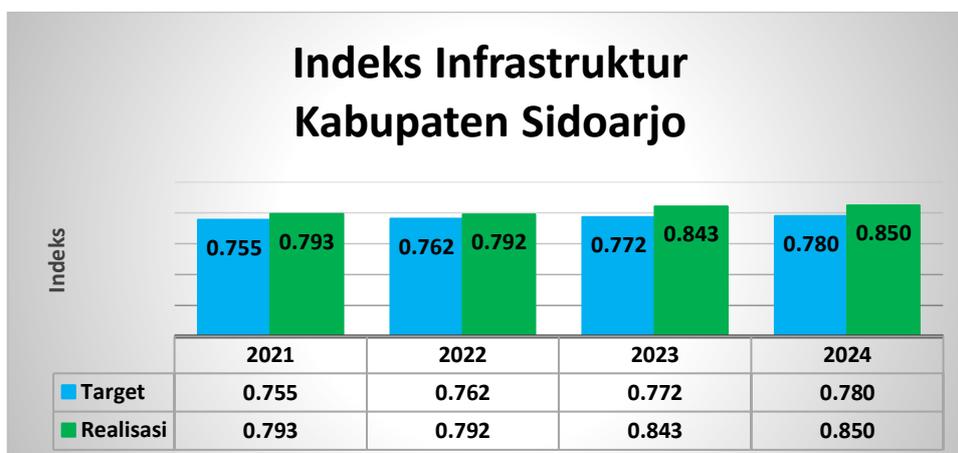
Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Pengukuran dimaksud meliputi dimensi pengukuran sebagai berikut :

- 1) Jalan kondisi mantap, sedang dan baik
- 2) Saluran irigasi dan drainase baik
- 3) Sarana dasar permukiman baik
- 4) Sarpras perhubungan baik
- 5) Fasilitas pendidikan baik
- 6) Fasilitas kesehatan baik

Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 mencapai 0,850 dari target 0,780 sehingga mencapai target dengan capaian 108,97%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 0,843 , maka mengalami kenaikan sebesar 0,01 atau 0,83%.

Berikut perkembangan Indeks Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo :



Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Infrastruktur

Pada Tahun 2024 banyak terdapat penambahan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat yang meliputi : Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage



Road, Peningkatan / Betonisasi Jalan, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan, Pembangunan Unit Sekolah Baru, Revitalisasi Taman, Pembangunan Trotoar Jalan Raya, Rehabilitasi Puskesmas, Peningkatan Afvoer, dan lain sebagainya.

Apabila dijabarkan hasil perhitungan Indeks Infrastruktur untuk setiap aspek, maka dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

No.	Variabel	Target 2024	Realisasi 2024
1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	0,766	0,822
2	Indeks Infrastruktur Kesehatan	72,32	84,82
3	Indeks Infrastruktur Pendidikan	86,64	95,60
Indeks Infrastruktur		0,780	0,850

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Infrastruktur

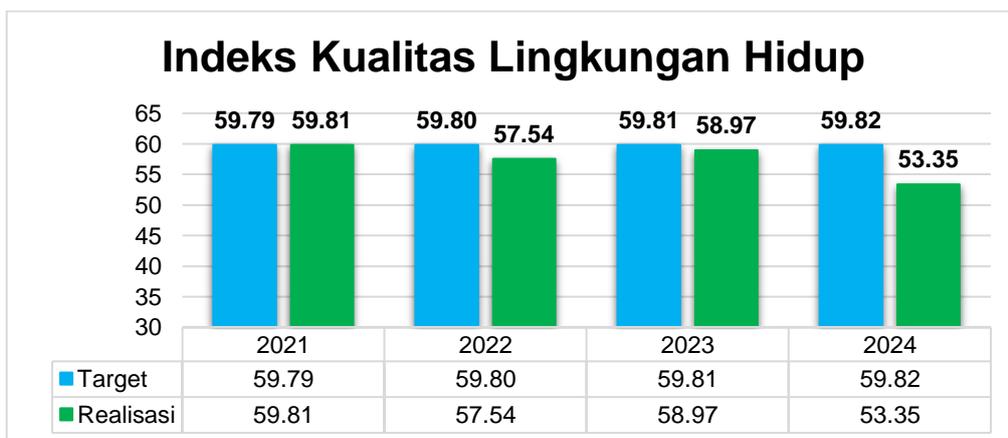
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu : Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2024 mencapai 53,35 dari target 59,82. Nilai Indeks Kualitas Hidup Kabupaten Sidoarjo tersebut termasuk dalam kategori sedang. Jika dibanding dengan capaian Tahun 2023 yaitu 58,99 maka terdapat penurunan 5,64 poin atau sekitar 9,56%.

Adapun perkembangan nilai / skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup setiap tahunnya dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Yang menjadi faktor pengurang dari tidak tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup karena 3 Indikator yang menjadi dasar perhitungan tidak



mencapai target yakni Indeks Kualitas Air senilai 49,71, Indeks Kualitas Udara senilai 71,91 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang masih mencapai angka 25,28.

Hal ini dikarenakan definisi operasional dari Indeks Kualitas Lahan yang harus menunjukkan penghijauan dari tajuk ke tajuk, sedangkan sebagian besar taman di Kabupaten Sidoarjo, pepohonan belum mencapai ketinggian yang sampai menutupi dari tajuk ke tajuk.

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	SKOR
- Indeks Kualitas Air (IKA)	49,71
- Indeks Kualitas Udara (IKU)	71,91
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi (IKL)	25,28

Sumber Data : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and helaty life*)

Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

a. Harapan Lama Sekolah (HLS)

b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

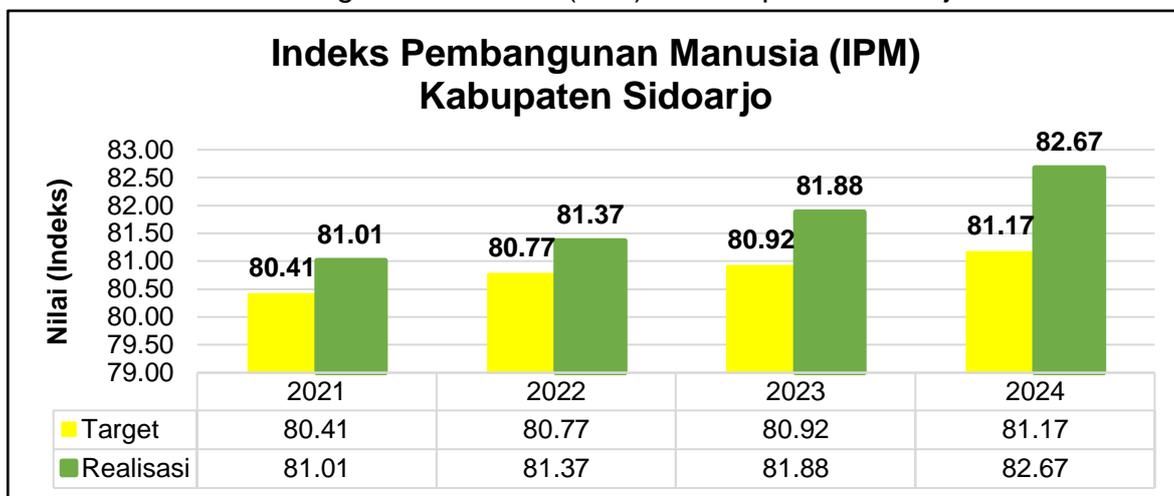
Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 mencapai 82,67 dari target 81,17 atau mencapai target dengan capaian 101,85%. Apabila dibanding dengan capaian tahun 2023 yaitu 81,88 maka terdapat kenaikan 0,79 poin atau sekitar 0,01%.

Apabila dibandingkan dengan seluruh Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Timur, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke-1 untuk Kabupaten dan peringkat ke-4 untuk Kabupaten dan Kota.

Berikut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo :



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

Dimensi/Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
- Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH SPLF 2020)	Tahun	74,80	75,06	75,36	75,63
Pengetahuan					
- Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,94	14,95	14,97	15,22
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,72	10,77	10,78	10,91
Standar Hidup Layak					
- Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	14.578	14.808	15.311	15.710
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		81,01	81,37	81,88	82,67

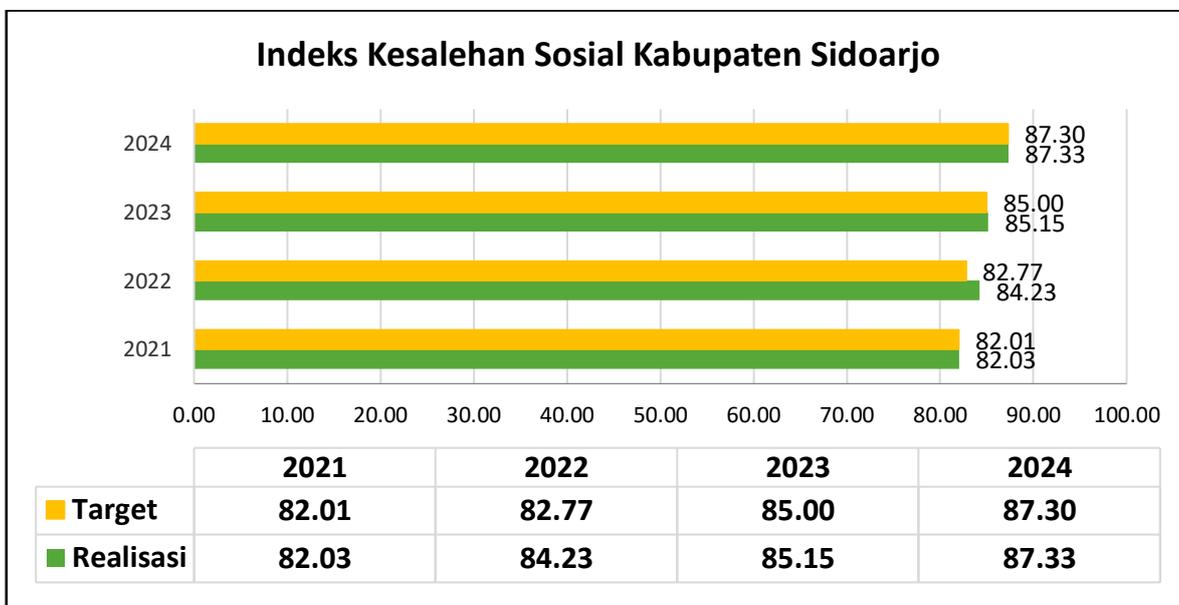
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

9. Indeks Kesalehan Sosial

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan



sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu : sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu : penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan. Berikut perkembangan Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana grafik sebagai berikut :



Sumber Data : Laporan Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2024

Dimensi yang mempengaruhi perhitungan Indeks Kesalehan Sosial, yaitu :

Komposit	Indeks	Bobot	Skor
Indeks Toleransi	86,64	40%	34,66
Indeks Rasa Aman	83,03	30%	24,91
Indeks Pelestarian Budaya	92,55	30%	27,77
		100%	87,33

Sumber Data : Laporan Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2024

Capaian Indeks Kesalehan Sosial tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 yaitu sebesar 87,33 yaitu 2,18 poin atau sekitar 0,02%. Dan apabila diperbandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 87,30 maka tercapai 100,03% atau sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD.



B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) TAHUN 2024

Indikator Kinerja Utama (IKD), merupakan ukuran keberhasilan terhadap penyelenggaraan program Perangkat Daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 IKD yang menjadi tolak ukur keberhasilan Program Perangkat Daerah, capaian hasil keberhasilan kinerjanya pada Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Daerah	Target 2024	Realisasi 2024	Keterangan
1	Harapan Lama Sekolah	15,89	15,22	Tidak Mencapai Target
2	Rata – Rata Lama Sekolah	11,56	10,91	Tidak Mencapai Target
3	Usia Harapan Hidup	75,98 tahun	75,63 tahun	Tidak Mencapai Target
4	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,766	0,822	Mencapai Target
5	Indeks Infrastruktur Pendidikan	88,64	95,60	Mencapai Target
6	Indeks Infrastruktur Kesehatan	72,32	84,82	Mencapai Target
7	Indeks Rasa Aman	80,02	83,03	Mencapai Target
8	Indeks Resiko Bencana	86,98	96,70	Tidak Mencapai Target
9	Indeks Toleransi	81,76	86,64	Mencapai Target
10	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	94,70	95,47	Mencapai Target
11	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di 9 Sektor	91,95	93,51	Mencapai Target
12	Indeks Pembangunan Gender	95,37	<i>Data Belum Release</i>	
13	Indeks Kualitas Air	51,55	49,71	Tidak Mencapai Target
14	Indeks Kualitas Udara	85,17	71,91	Tidak Mencapai Target
15	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,13	25,28	Tidak Mencapai Target
16	Persentase Desa Mandiri	28,88	67,92	Mencapai Target
17	Nilai Indeks SPBE	4,00	3,96	Tidak Mencapai Target
18	Persentase Koperasi Berkualitas	26,39	26,73	Mencapai Target
19	Persentase Usaha Mikro Mandiri	2,04	2,21	Mencapai Target



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

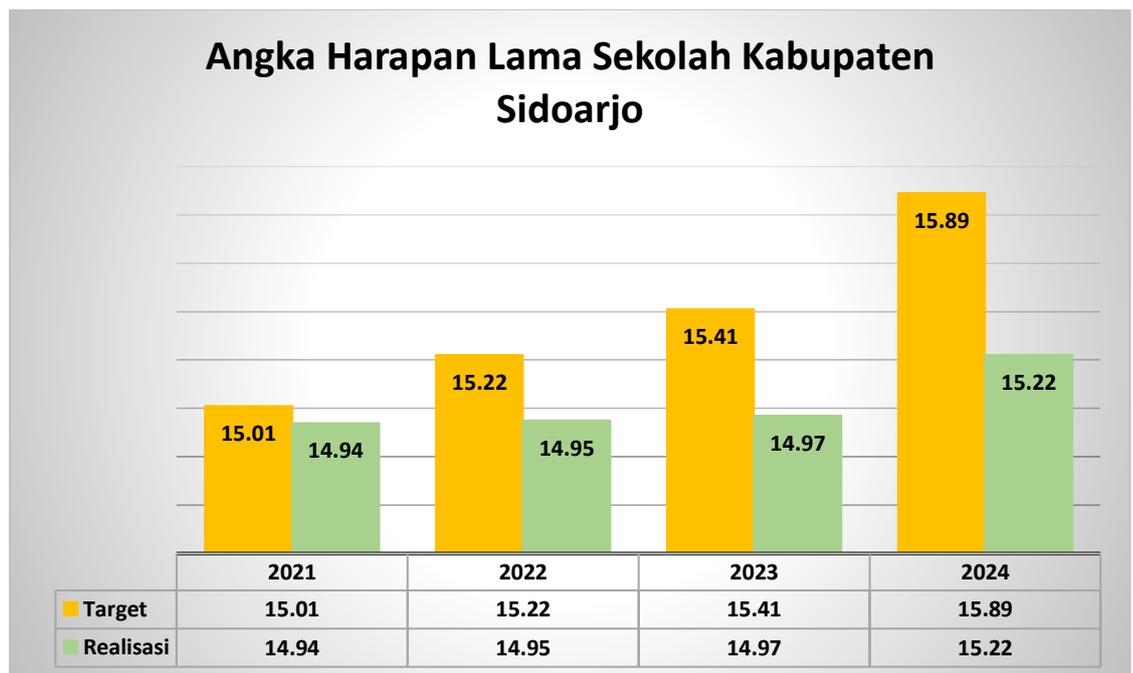
20	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	1,29	24,59	Mencapai Target
21	Indeks Pelestarian Budaya	66,76	92,55	Mencapai Target
22	Indeks Pelayanan Publik	A- (SANGAT BAIK)	A (PRIMA)	Mencapai Target
23	Nilai SAKIP Kabupaten	A	BB	Tidak Mencapai Target
24	Opini atas Laporan BPK	WTP	WTP	Mencapai Target
25	Survey Eksternal Persepsi Korupsi (Indeks Survey Penilaian Integritas)	3,85	67,91	Mencapai Target
26	Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi	<i>Data Belum Release</i>	
27	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Mencapai Target
28	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam Arti Luas	2,95	1,32	Tidak Mencapai Target
29	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,24	15,98	Tidak Mencapai Target
30	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	53,19	48,57	Tidak Mencapai Target
31	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Mencapai Target

1. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 tercapai 15,22 tahun dari target 15,89 tahun sehingga belum mencapai target, namun capaian sudah mencapai 95,78%. Ketidak-tercapaian disebabkan penetapan target yang terlalu tinggi, tidak mempertimbangkan tren angka tahun – tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu 14,97 tahun maka terdapat peningkatan. Dengan realisasi Angka Harapan Lama Sekolah 15,22 tahun ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mencapai jenjang Pendidikan Tinggi.



Adapun tren capaian Angka Harapan Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Angka Harapan Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

- Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
- Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu pendidikan.
- Memfasilitasi masyarakat Sidoarjo dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan 10.000 Beasiswa Kuliah kepada anak-anak muda Kabupaten Sidoarjo

2. Rata – Rata Lama Sekolah

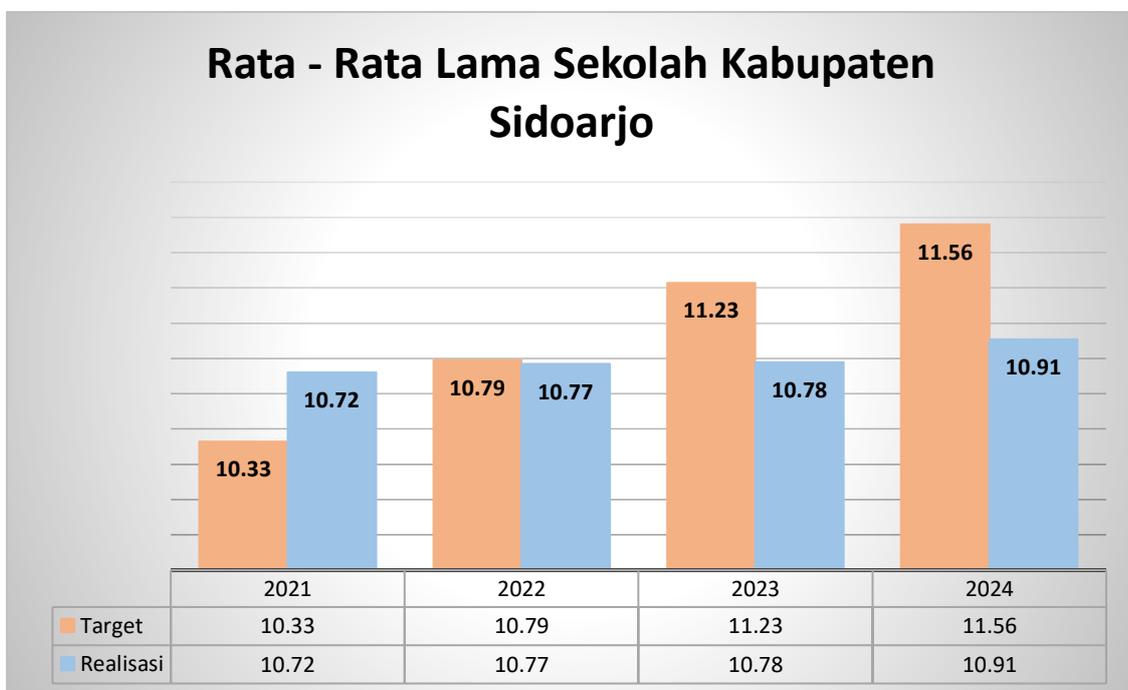
Rata – Rata Lama Sekolah (RTLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.

Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2024 tercapai 10,91 tahun dari target 11,56 tahun sehingga belum mencapai target, namun sudah tercapai 94,38%. Ketidak-tercapaian disebabkan penetapan target yang terlalu tinggi, tidak mempertimbangkan tren angka tahun – tahun sebelumnya. Apabila



dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 10,78 tahun sudah ada peningkatan. rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,13 tahun, dari 10,78 tahun menjadi 10,91 tahun pada tahun 2024.

Adapun tren capaian Rata – Rata Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2024

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Rata – Rata Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

- Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
- Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu pendidikan.
- Memfasilitasi masyarakat sidoarjo dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan 10.000 Beasiswa Kuliah kepada anak-anak muda Kabupaten Sidoarjo.

3. Usia Harapan Hidup

Tolak ukur dari tujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat

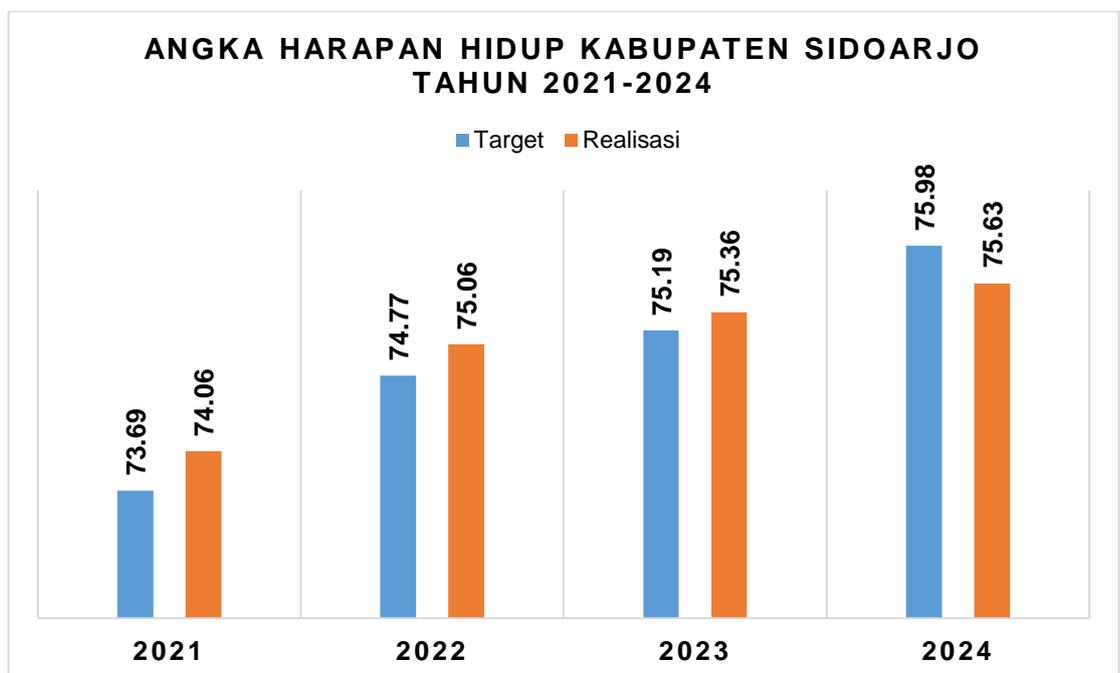


untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 tercapai 75,63 tahun dari target 75,98 tahun atau tercapai sebesar 99,54%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 75,36 tahun (dengan menggunakan dasar penghitungan sensus penduduk 2020), maka capaian AHH tahun 2024 meningkat 0,27 poin atau 0,36%. Pun jika dibandingkan dengan capaian AHH Provinsi Jawa Timur (75,07 tahun), capaian AHH Kabupaten Sidoarjo berada di urutan pertama untuk kategori kabupaten dan berada di urutan ke-5 setelah Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Madiun dan Kota Malang.

Capaian diatas menunjukkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Kesehatan cukup berhasil. Perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan berdampak pada tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Sidoarjo ke arah yang lebih baik.

Adapun tren capaian Angka Harapan Hidup yang dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Angka Harapan Hidup dapat tercapai optimal, yaitu :



- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman pangan lokal;
- Revitalisasi posyandu lansia;
- Optimalisasi posbindu PTM.

Adapun beberapa kinerja yang mendukung pencapaian angka harapan hidup, antara lain :

- Tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas
- Pemantauan dalam peningkatan gizi dan pola hidup yang sehat
- Sanitasi dan kesehatan lingkungan

Angka Kematian Ibu

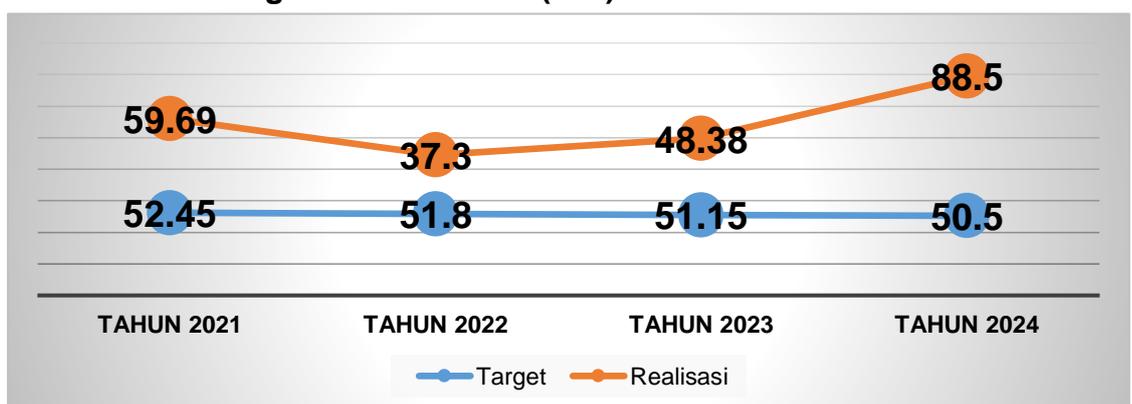
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu Tahun 2024 tercapai 88,5 per 100.000 kelahiran hidup dari target 50,5 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun demikian angka tersebut masih lebih baik dari standart nasional.

Standart Nasional angka kematian ibu adalah 183 per 100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Sidoarjo lebih baik dibandingkan dengan standart nasional.

Adapun tren capaian Angka kematian ibu dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2021 – 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo



Upaya yang telah dilakukan agar Angka Kematian Ibu dapat terus menurun, yaitu antara lain :

- Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (*Ante Natal Care/ ANC* terpadu-10T);
- Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam APN (*Peer Review* Asuhan Persalinan Normal), kelas ibu, kegawatdaruratan;
- Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil;
- Refreshing deteksi risiko tinggi oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, dll)
- Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk dalam Pokja 1 (Pendataan, Penandaan, Pendampingan), Pokja 2 (Tabulin & Dasolin). Pokja 3 (Donor Darah), Pokja 4 (Ambulan Desa);
- Melakukan penilaian tatalaksana pada gawat darurat maternal dan neonatal melalui *skill assesment* dengan sasaran tenaga kesehatan (bidan);
- Optimalisasi sistem rujukan : kolaborasi SI CANTIK dengan SIMANIS RSUD, untuk kasus *emergency/* rujukan darurat persalinan;
- Melakukan pengkajian dan pembelajaran *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan pada perinatal dan neonatal.
- Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah
- Evaluasi dan optimalisasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Penakib) Kabupaten Sidoarjo;
- Aplikasi Software Si Cantik (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak), program bayi sampai dengan anak.

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

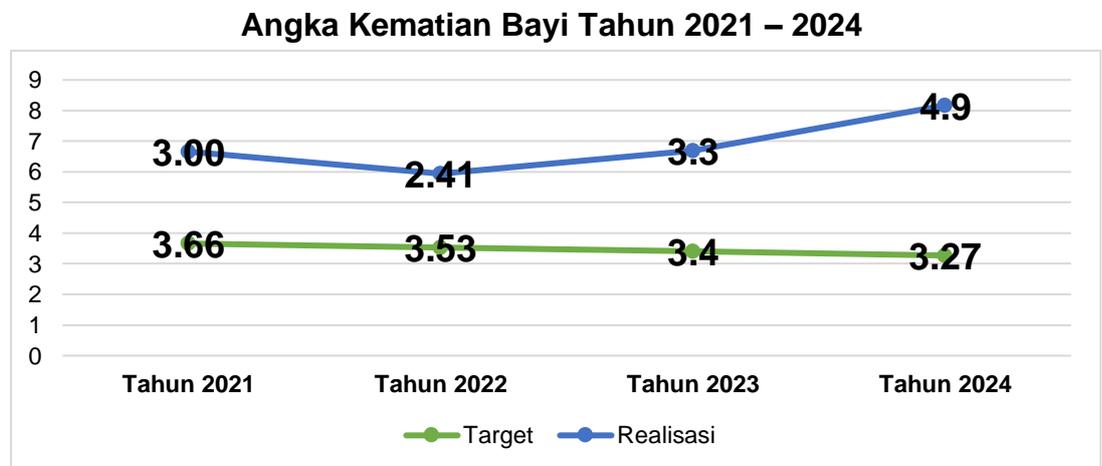
Angka Kematian Bayi Tahun 2024 tercapai 4,9 per 1.000 kelahiran hidup dari target 3,27 per 1.000 kelahiran hidup sehingga belum mencapai target. Namun jika dibandingkan dengan standar nasional Tahun 2024 yakni dibawah 16 per 1.000 kelahiran hidup. Sehingga dapat dikatakan bahwa angka



kematian bayi di Kabupaten Sidoarjo lebih baik dibandingkan dengan standar nasional. Upaya untuk menekan Angka Kematian Bayi, dengan melaksanakan program-program, antara lain :

- Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
- Adanya rujukan dini berencana, maksudnya dari persalinan yang bermasalah (mulai ibu hamil beresiko, ibu bersalin beresiko dan neonatus beresiko) dilakukan monitoring evaluasi untuk kemudian dirujuk ke RS;
- Melaksanakan *skill assesment* pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan;
- Melakukan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian neonatal;
- Pemberian pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) terpadu (10 T);
- Pengembangan aplikasi software si CANTIK (Sidoarjo Cegah Kematian Ibu dan Anak) untuk pemantauan kesehatan anak (mulai dari lahir sampai dengan balita), dipantau tumbuh kembangnya untuk mengantisipasi terjadinya stunting.

Adapun tren capaian Angka Kematian Bayi dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

Persentase Balita Stunting

Stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama.

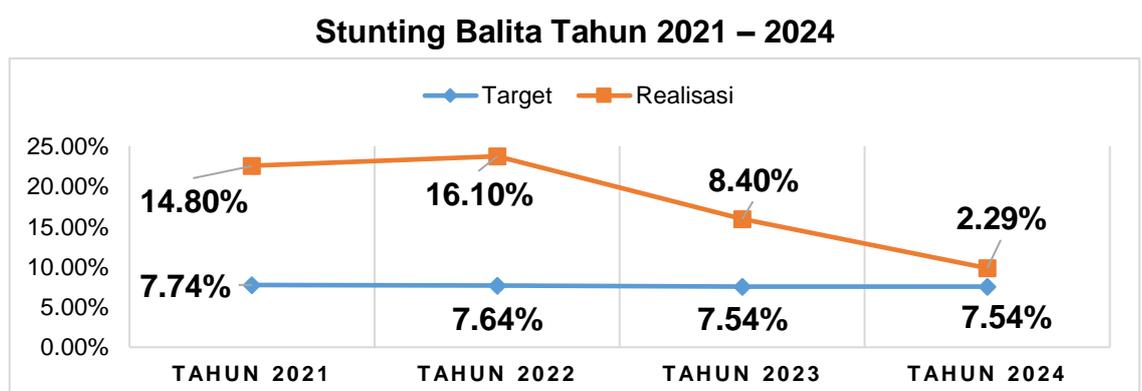


Persentase Balita Stunting Tahun 2024 tercapai 2,29% yang mengalami stunting berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) pengukuran posyandu oleh kader. Apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 yaitu 7,54% maka sudah mencapai target, dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 8,40% maka terdapat penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka penurunan stunting antara lain :

- Mengaktifkan kader pendamping ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) cegah stunting;
- Pemberdayaan masyarakat (toga, kader lansia, toma) deteksi dini percepatan penurunan stunting dengan lebih aktif datang ke posyandu;
- Mengaktifkan konseling PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak).

Standar nasional balita stunting adalah nilai Z-Score kurang dari -2,00 SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -3,00 SD (severely stunted) sehingga dapat dikatakan bahwa persentase balita stunted di Kabupaten Sidoarjo lebih baik jika dibandingkan dengan standar nasional. Angka prevalensi stunting dimaksud diukur berdasarkan data versi E-PPGBM Kementerian Kesehatan.

Adapun tren capaian persentase balita stunted dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

4. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Capaian indeks infrastruktur pekerjaan umum tahun 2024 yaitu 0,822 yang apabila dibandingkan dengan target 0,766 maka sudah melampaui target.



Kinerja yang mendukung pencapaian Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, yaitu antara lain :

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

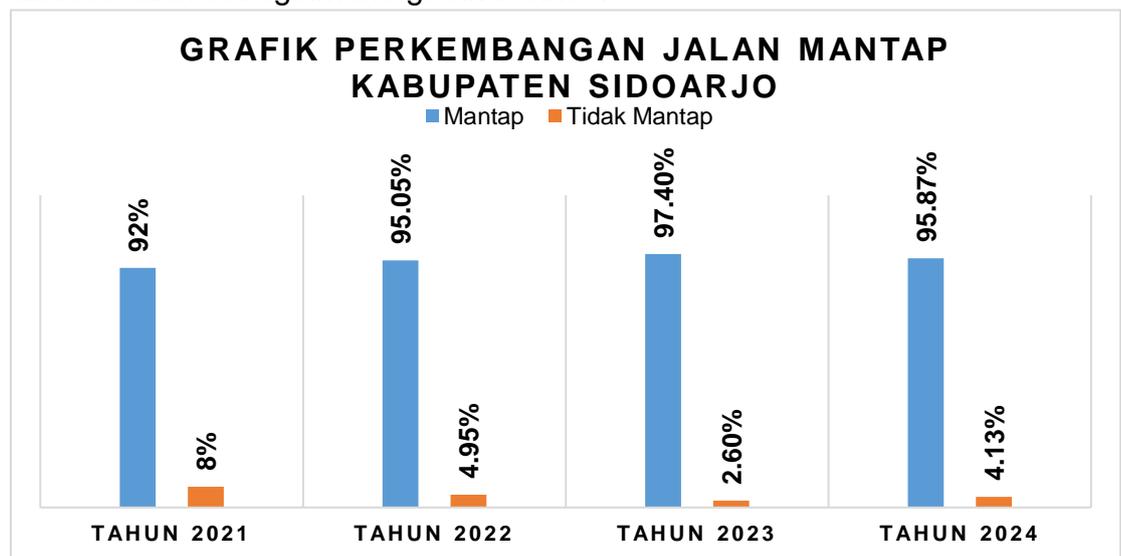
Sampai dengan tahun 2024 telah terbangun ruas jalan Kabupaten sepanjang 1.028, 435 km dengan kondisi jalan sebagai berikut :

No.	Kondisi	Panjang Jalan (km)	%
1	Kondisi Mantap :		
	➤ Kondisi Baik	643.534	62,58
	➤ Kondisi Sedang	342.413	33,29
	Sub Jumlah	985.947	95,87
2	Kondisi Tidak Mantap		
	➤ Rusak Ringan	38.484	3,74
	➤ Rusak Berat	4.005	0,39
	Sub Jumlah	42.489	4,13
	Total Panjang Jalan	1.028,435	100,00

Panjang jalan yang dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan kondisi rusak ringan/sedang, dimana capaian tahun 2024 adalah 95,87% dari target 95,5% sehingga sudah mencapai target dengan capaian 100,39%.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan jalan, peningkatan jalan berupa konstruksi beton maupun aspal, dan pemeliharaan rutin jalan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan sehingga mampu menambah panjang jalan dalam kondisi mantap.

Adapun tren capaian persentase jalan Kabupaten kondisi mantap dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Laporan Kondisi Jalan Kabupaten Sidoarjo



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPI) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Kondisi jalan dimaksud, apabila dijabarkan kondisi setiap Kecamatan, sebagaimana tabel berikut :

No.	Kecamatan	Panjang Ruas (Km)	Panjang Tiap Kondisi			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
			km	km	km	km
1	Jabon	74,063	47,926	22,809	2,278	1,050
2	Tanggulangin	71,727	44,572	23,019	2,860	1,275
3	Sidoarjo	62,882	38,505	24,294	0,083	0,000
4	Candi	68,807	39,638	25,691	3,478	0,000
5	Buduran	57,988	34,591	22,914	0,483	0,000
6	Gedangan	54,429	37,482	16,864	0,083	0,000
7	Porong	48,280	28,755	17,847	1,678	0,000
8	Tulangan	76,687	46,996	26,413	3,278	0,000
9	Krebung	53,115	21,342	25,900	4,673	1,200
10	Prambon	58,595	35,047	20,999	2,549	0,000
11	Tarik	55,528	34,008	17,800	3,720	0,000
12	Balongsendo	49,997	37,709	8,415	3,493	0,380
13	Krian	79,412	56,780	19,654	2,978	0,000
14	Taman	36,505	22,326	14,096	0,083	0,000
15	Wonoayu	51,778	32,249	17,601	1,928	0,000
16	Sukodono	53,252	34,456	18,313	0,483	0,000
17	Waru	40,483	27,404	10,601	2,478	0,000
18	Sedati	34,908	23,747	9,183	1,878	0,100
Total		1028,435	643,534	342,413	38,484	4,005
		100,00 %	62,57 %	33,29 %	3,74 %	0,39 %

Sumber : Laporan Kondisi Jalan Kabupaten Sidoarjo

Pada Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam telah melaksanakan betonisasi jalan sepanjang 28.909,55 meter, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
1	Peningkatan Jalan Bakungpringgondani – Penambangan (DAK)	Balongsendo	2.523,10	4,00 - 5,00
2	Peningkatan Jalan Banjarasri, Tanggulangin	Tanggulangin	1.017,60	5,00



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

3	Peningkatan Jalan Banjarsari - Dukuhtengah (LJT)	Buduran	1.886,00	3,04 - 6,5
4	Peningkatan Jalan Barengkrajan - Ngelom (DAK)	Krian	2.450,00	5,00
5	Peningkatan Jalan Bringinbendo - Sidodadi	Taman	856,00	3,70 - 4,00
6	Peningkatan Jalan Candinegoro - Terungkulon	Wonoayu	1.961,75	5,00
7	Peningkatan Jalan Desa Bakungpringgodani	Balongsendo	893,70	4,00
8	Peningkatan Jalan Dukuhsari - Semambung	Jabon	1.731,00	STA 0+000-0+350 = 4,50 STA 0+350-1+700 = 5,00
9	Peningkatan Jalan dusun delik desa seduri s/d dusun girang desa wonokupang	Balongsendo	1.994,70	3,70 - 4,00
			784,53	4,00
10	Peningkatan Jalan Kludan - Tulangan	Tulangan	1.280,70	8,00
11	Peningkatan Jalan Masanganwetan - Sukodono (DAK)	Sukodono	2.620,00	6,00
12	Peningkatan Jalan Modong - Grabagan (DAK)	Tulangan	3.521,50	3,10 - 4,00
13	Peningkatan Jalan Pabean - Semampir (Jalan. KH. Husein)	Sedati	537,87	3,70 - 5,00
14	Peningkatan Jalan Pilang - Sawocangkring	Wonoayu	1.339,40	5,00
15	Peningkatan Jalan Tebel - Gemurung	Gedangan	937,00	4,00
16	Peningkatan Jalan Wage (Jalan Jeruk dan Jalan Mangga)	Taman	Panjang = 83,7m (Mangga S1), 392,2 (Mangga S2), 378,8 (Jeruk)	4,00
		Gedangan		
17	Peningkatan Jalan Wonoplintahan - Jedongcangkring (LJT)	Prambon	1.720,00	6,00
TOTAL JALAN BETON 2024			28.909,55	3,04 - 8,00

Sumber : Laporan Betonisasi Jalan Kabupaten Sidoarjo

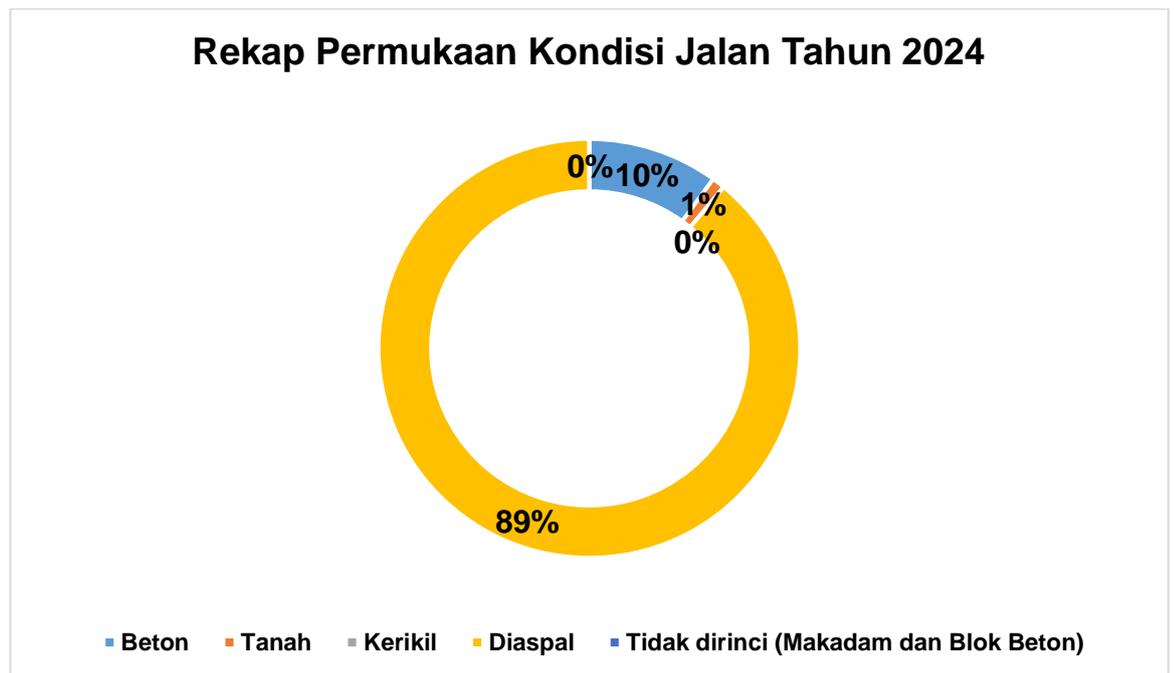
Adapun upaya yang telah dilakukan agar jalan dan jembatan Kabupaten terjaga dalam kondisi mantap, antara lain :

1. Dilaksanakan Pembangunan Jalan pada beberapa ruas
2. Dilaksanakan rekonstruksi jalan dengan menggunakan konstruksi beton maupun aspal pada beberapa ruas yang perlu segera dilaksanakan peningkatan
3. Dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan secara berkala

Berdasarkan data diatas analisa penyebab keberhasilan menjadi meningkat dikarenakan beberapa ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo telah banyak yang dibetonisasi, sehingga mampu meminimalisir kerusakan jalan dan



mempertahankan kondisi jalan tetap baik. Berikut rekap permukaan kondisi jalan yang ada di kabupaten Sidoarjo :



Sumber : Laporan Permukaan Jalan Kabupaten Sidoarjo

Persentase Kecukupan Kebutuhan Air Irigasi

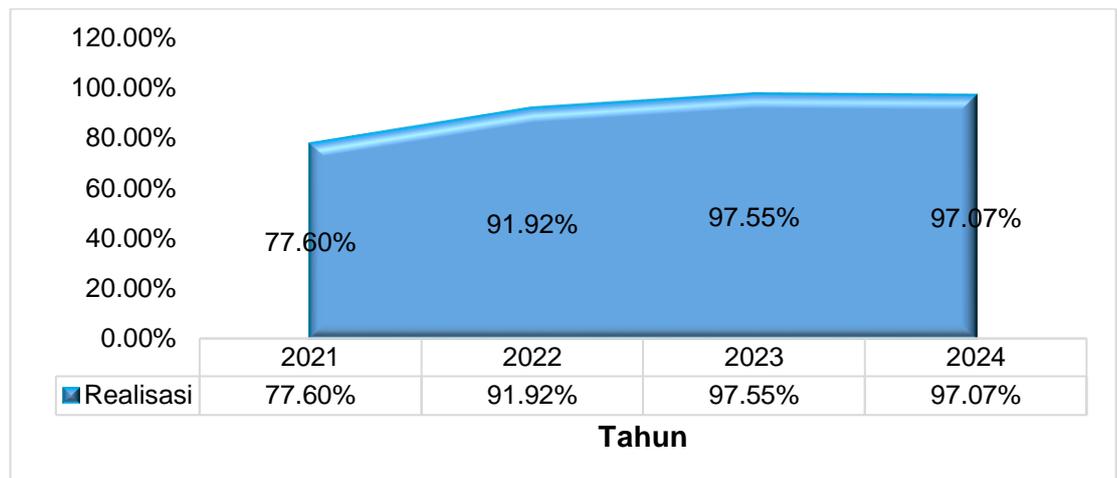
Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Sampai dengan Tahun 2024 baku sawah yang tercukupi kebutuhan air irigasi yaitu 3.840 hektar dari kebutuhan yang seharusnya 3.956 hektar sehingga capaian persentase kecukupan kebutuhan air irigasi tahun 2024 adalah 97,07% dari target 92,5% sehingga sudah mencapai target dengan persentase sebesar 104,94%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra Tahun 2026 dengan target 93,5% maka pada Tahun 2024 sudah tercapai nilai 97,07%, dengan persentase capaian sebesar 103,82%. Adapun rumus untuk menghitung realisasi kecukupan kebutuhan air irigasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas sawah yang dapat diairi}}{\text{Luas sawah yang ada}} \times 100\% = \frac{3.840}{3.956} \times 100\% = 97,07\%$$



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPI) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan air irigasi dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /Prt/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yang menyebutkan bahwa DI (Daerah Irigasi) berada dalam satu Kab/Kota (DI kecil) dibawah 1000 Ha adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga pada saat ini Kabupaten Sidoarjo hanya mengelola 18 DI. Berikut Data Ketersediaan Air yang ada di kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2024 berdasarkan Daerah Irigasi adalah sebagai berikut :

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Baku Sawah yang Ada (Ha)	Luas Baku Sawah yang Diairi (Ha)	Kebutuhan Air (Ltr/Dtk)	Ketersediaan Air (Ltr/Dtk)	Pengambilan Air
1	D.I. Kedunguling Kiri	325	308	278	1.200	Afvoer Kedunguling
2	D.I. Kedunguling Kanan	674	663	740	1.200	Afvoer Kedunguling
3	D.I. Bader	376	360	290	440	Afvoer Bader
4	D.I. Bulubendo	91	80	93	200	Afvoer Bulubendo
5	D.I. Buntung	80	28	33	150	Afvoer Buntung
6	D.I. Kalidawir	440	440	255	550	Afvoer Kedungan
7	D.I. Gedek	140	140	122	275	Afvoer Kedungan
8	D.I. Kedungpandan	233	233	173	700	Kali Bangil Tak
9	D.I. Wilayut II	196	183	206	350	Afvoer Wilayut
10	D.I. Kali Pucang	191	179	165	275	Afvoer Pucang
11	D.I. Bahgepuk	341	341	319	400	Afvoer Bahgepuk
12	D.I. Kragan	45	35	46	120	Afvoer Kragan
13	D.I. Jomblong	41	51	67	125	Afvoer Jomblong
14	D.I. Karangbong I	86	98	129	200	Afvoer Karangbong
15	D.I. Karangbong II	114	114	151	200	Afvoer Karangbong
16	D.I. Wilayut I	29	33	43	75	Afvoer Wilayut
17	D.I. Jatianom	397	397	267	275	Afvoer Jatianom
18	D.I. Kedungan	157	157	179	325	Afvoer Kedungan
JUMLAH		3.956	3.840	3.556	7.060	



Sumber : Laporan Ketersediaan Air Kabupaten Sidoarjo

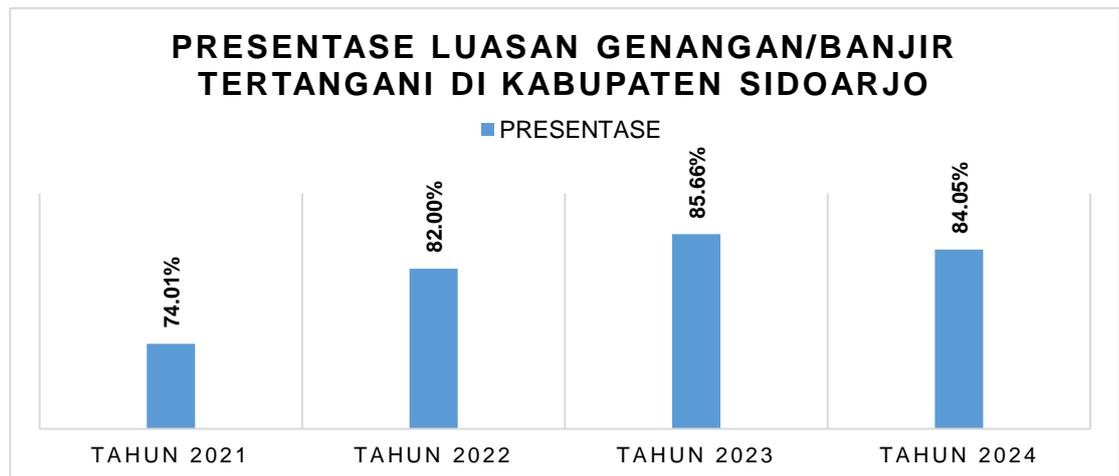
Adapun upaya yang telah dilakukan agar kebutuhan air irigasi dapat tercukupi optimal, antara lain :

1. Pemberian air yang dilakukan secara terus menerus maupun dengan pola giliran sesuai ketersediaan debit yang ada.
2. Pemenuhan air irigasi dari dam/ bendung suplesi yang berada di afvoer maupun bantuan pompa air, sehingga kebutuhan air dapat dicukupi
3. Pengaturan operasional DAM penerus sesuai dengan kebutuhan pola tata tanam

Persentase Luasan Genangan / Banjir Tertangani

Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah delta memiliki resiko yang tinggi terkena genangan / banjir. Persentase luasan genangan / banjir tertangani pada tahun 2024 adalah 84,05% dari target 83,5% atau tercapai dengan capaian 100,66%.

Adapun tren capaian persentase luasan genangan / banjir tertangani dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Adapun rumus untuk menghitung realisasi luasan genangan / banjir tertangani pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas area genangan tertangani}}{\text{Luas area rawan genangan}} \times 100\% = \frac{480 \text{ Ha}}{558 \text{ Ha}} \times 100\% = \mathbf{84,05\%}$$

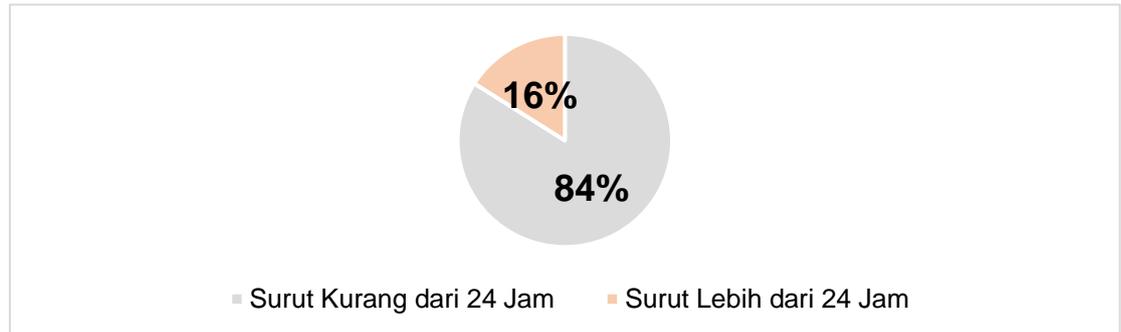
Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menangani genangan / banjir, yaitu antara lain Melakukan pengendalian banjir, pembangunan rumah pompa,



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

pembangunan/rehabilitasi plengsengan dan normalisasi/pengerukan sedimen di saluran/sungai.

Sedangkan grafik kondisi genangan tertangani tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Laporan Genangan Air Tertangani Tahun 2024

Kawasan permukiman yang rawan banjir di Kabupaten Sidoarjo, antara lain :

No	Uraian	Kecamatan	Luas Kawasan Rawan Genangan (Ha)	Luas Kawasan Rawan Genangan (Ha)		Luas Catchment Area Pempa (Ha)
				Surut Kurang dari 24 Jam	Surut Lebih dari 24 Jam	
1	Bringinbendo / Sidodadi	Taman	75	65	10	180
2	Pucanganom	Sidoarjo	30	30	0	38
3	Lemahputro		32	32	0	32
4	Rangkahkidul		40	35	5	25
5	Sidokare		38	38	0	86
6	Bluru Kidul		14	13	1	15
7	Kemiri		7	6	1	7
8	Tambakrejo / Tropodo	Waru	98	57	41	92
9	Tambak Sawah		70	53	17	122
10	Banjarasri	Tanggulangin	30	30	0	121
11	Banjarpanji		10	10	0	38
12	Kalitengah		7	6	1	11
13	Kedungbanteng		17	17	0	52
14	Porong	Porong	30	30	0	0
15	Pesawahan		28	25	3	0
16	Candipari		18	12	6	0
17	Wunut		10	8	2	0
18	Balongdowo	Candi	4	2	2	15
Jumlah			558	469	89	834

Sumber : Laporan Genangan Air Tertangani Tahun 2024

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa ada beberapa wilayah rawan genangan yang belum bisa tertangani kurang dari 24 jam diantaranya sebagian besar merupakan wilayah yang ada pada Kecamatan Waru dan Kecamatan Tanggulangin. Sehingga diharapkan pada tahun mendatang (n+1) dapat teranggarkan alokasi dana penanganan genangan sesuai kebutuhan dalam menangani permasalahan yang ada.



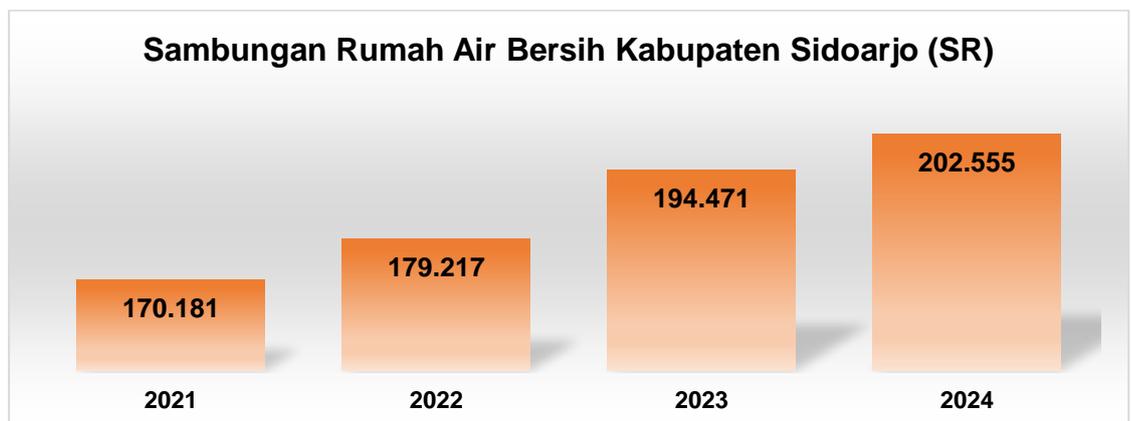
Persentase Pelayanan Air Minum Aman

Persentase pelayanan air minum aman Tahun 2024 dengan realisasi 45,02% dari target 46,86%, dengan persentase capaian sebesar 96,07%. Pada Tahun 2024 dari target sebanyak 8.088 SR dapat tercapai 100%. Sehingga untuk akumulasi capaian air minum perkotaan dan perkotaan adalah sebanyak 202.555 SR dari target 213.618 SR atau sebesar 45,02%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 47,48% maka pada tahun 2024 sudah tercapai nilai 94,82%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu 194.471 dengan persentase kenaikan sebesar 4,16% maka terdapat peningkatan yang cukup tinggi. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, sebagaimana tabel berikut :

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target SR	907	754	697	317
PEMDA	8.805	10.062	10.759	11.076
PDAM	161.376	169.155	183.712	191.479
SR pengguna air bersih (TOTAL)	170.181	179.217	194.471	202.555

Sumber : Presentase Pelayanan Air Minum Aman Tahun 2021-2024

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan air bersih dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Laporan Sumbangan Rumah Air Bersih Tahun 2021-2024

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan akses air bersih, yaitu selain pembangunan akses air bersih, telah dilakukan pendekatan ke masyarakat setempat untuk memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya air bersih bagi keberlangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan akses air minum



akan selalu dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan PDAM serta BAPPEDA sebagai PD pengampu kegiatan terkait anggaran pelaksanaan kegiatan agar menjadi prioritas, agar target RENSTRA dapat dicapai tepat waktu yaitu Tahun 2026.

Persentase Akses Sanitasi Layak

Sampai dengan Tahun 2024 target pembangunan sanitasi sebanyak 2010 rumah tangga dan tercapai sebanyak 2029 rumah tangga atau 100%. Sehingga akumulasi capaian sanitasi hingga saat ini sebanyak 446.584 rumah tangga dari target 449.896 rumah tangga, atau tercapai sebesar 99,26%.

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan sanitasi layak dapat diilustrasikan sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Uraian	2021	2022	2023	2024
Target RT	8.033	557	6.308	2.029
RT bersanitasi sehat	437.694	438.247	444.555	446.584



Sumber : Laporan Persentase Akses Sanitasi Layak Tahun 2021-2024

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan akses sanitasi layak, yaitu selain pembangunan unit jamban untuk peningkatan akses sanitasi layak, telah dilakukan pendekatan ke masyarakat setempat untuk memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi yang layak untuk unit jamban dan juga pengolahan limbah bagi keberlangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan sanitasi layak akan selalu dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan BAPPEDA serta Dinas Kesehatan yang juga sebagai PD pengampu kegiatan terkait anggaran pelaksanaan kegiatan agar menjadi prioritas. Selain itu dapat



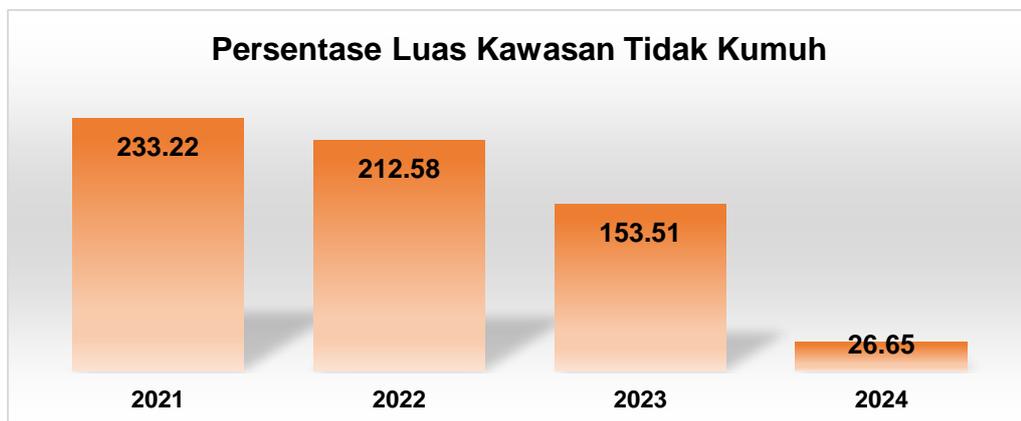
pula dilakukan kerjasama atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan perusahaan dalam bidang yang sesuai, sehingga target RENSTRA dapat dicapai tepat pada waktu yaitu Tahun 2026.

Persentase Luas Kawasan Tidak Kumuh

Sebagaimana SK Kumuh Bupati Nomor 311 Tahun 2021 bahwa Luasan kawasan kumuh sesuai arahan PERMEN PUPR Nomor 14 Tahun 2018 seluas 276,62 Ha dari luas keseluruhan Kabupaten Sidoarjo 71.424,3 Hektar. Sampai dengan Tahun 2024 kawasan kumuh telah terselesaikan seluas 126,86 Hektar, dengan sisa luas tidak kumuh 71.397,65 Hektar.

Adapun tren capaian penanganan kawasan kumuh dapat diilustrasikan sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Luas Kumuh (Ha)
2021	97,4	97,41	233,22
2022	99,72	99,7	212,58
2023	99,79	99,79	153,51
2024	99,86	99,96	26,65



Sumber : Laporan Persentase Kawasan Tidak Kumuh Tahun 2021-2024

Indeks Infrastruktur Perhubungan

Indikator ini menggambarkan tentang kawasan yang tertib dalam berlalu lintas dengan mengutamakan keselamatan dan terminal sebagai tempat parkir untuk angkutan umum dalam mengangkut dan menurunkan penumpang. kecukupan sarpras perkeretaapian sebagai wujud keselamatan dalam berlalu lintas.

Komposit dari indikator infrastruktur perhubungan, antara lain :

- i. Jumlah titik lokasi tertib lalu lintas yang terjaga



- ii. Jumlah terminal angkutan penumpang tipe C terkelola dengan baik
- iii. Jumlah kecukupan sarana dan prasarana perkeretaapian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Capaian dari masing-masing komposit indikator dimaksud, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024
1	Persentase alat penerangan jalan yang layak fungsi	75%	100%
2	Tingkat konektivitas jaringan jalan	3,64	3,64
3	Rasio peningkatan fasilitas pelengkap jalan	0,90	0,86
4	Cakupan pelayanan angkutan umum	92,5%	100%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Upaya untuk peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan, antara lain :

- Menambah kawasan tertib lalu lintas yang terjaga;
- Pengelolaan terminal tipe C yang sesuai dengan standar;
- Ketersediaan prasarana dan sarana serta system regulasi yg efektif, sehingga konektivitas lebih efisien;
- Memperbaiki layanan yang ada di terminal dan monitoring terhadap layanan angkutan umum;
- Pembangunan PJU 848 titik sudah terbangun di seluruh wilayah kabupaten sidoarjo serta tidak ada kendala dalam mencapai realisasi

5. Indeks Infrastruktur Pendidikan

Pada Tahun 2024 Indeks Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 95,60 dengan target 88,64 sehingga sudah mencapai target yang ditetapkan. Adapun kinerja yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Infrastruktur Pendidikan, yaitu :

Persentase Bangunan Ruang Kelas Belajar dalam Kondisi Baik

Kondisi bangunan Ruang Kelas Belajar baik pada jenjang SDN maupun jenjang SMPN, adalah sebagai berikut :

SD Negeri

Persentase Bangunan Ruang Kelas SD Kategori Baik	Target 2024	Realisasi 2024
	95,59%	96%



SMP Negeri

Persentase Bangunan Ruang Kelas SMP Kategori Baik	Target 2024	Realisasi 2024
	95,62%	95,80%

Pada Tahun 2024 terdapat pembangunan lanjutan Unit Sekolah Baru (USB) yaitu SMP Negeri 2 Prambon dan SMP Negeri 2 Tulangan.



Upaya yang telah dilakukan agar bangunan ruang kelas belajar kondisi baik meningkat dan layak fungsi untuk dimanfaatkan proses belajar mengajar, baik untuk jenjang SDN dan SMPN, yaitu :

- Melakukan pendataan terhadap kondisi kerusakan bangunan sekolah/ruang kelas pada sekolah SDN dan SMPN;
- Mengusulkan, mengalokasikan serta menganggarkan dan melaksanakan rehabilitasi terhadap sekolah SDN maupun SMPN dengan kondisi kerusakan Rusak Berat;
- Adapun kerusakan ringan dapat dialokasikan dan di biayai melalui Dana BOS dengan catatan jika kebutuhan operasional sekolah sudah tercukupi;
- Untuk satuan pendidikan SD / Mi swasta dan SMP / MTs swasta telah di fasilitasi oleh mekanisme dana hibah.



6. Indeks Infrastruktur Kesehatan

Pada Tahun 2024 Indeks Infrastruktur Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 84,82 dengan target 72,32 sehingga sudah mencapai target yang ditetapkan. Adapun kinerja yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Infrastruktur Kesehatan, yaitu :

Persentase Bangunan Fasilitas Kesehatan dalam Kondisi Baik

Kondisi bangunan RSUD, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Persentase Bangunan RSU dalam Kondisi Baik

Kabupaten Sidoarjo memiliki 2 Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan Tahun 2024

Kondisi Baik / Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
2 bangunan	0 bangunan	0 bangunan
100 %	-	-

Apabila diproporsi maka RSUD dalam kondisi baik 100% kondisi bangunan RS Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi baik.

Pada Tahun 2024 RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo melakukan pembangunan Gedung Pusat Terpadu II dan Pembangunan Gedung Diagnostik Terpadu (GDT), yang diresmikan oleh Plt Bupati Sidoarjo yaitu Subandi, S.H., M.Kn. Gedung baru ini akan difungsikan sebagai pusat laboratorium, termasuk patologi dan layanan *medical check-up*. Selain itu, Gedung ini akan memperluas layanan farmasi dan menjadi bagian dari pengembangan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Dengan adanya fasilitas baru ini, diharapkan pelayanan kesehatan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dapat meningkat terutama dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat Sidoarjo secara optimal. Penambahan fasilitas penting untuk RSUD Sidoarjo yang sudah menyandang status tipe-A atau rumah sakit rujukan utama. Sidoarjo adalah satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang memiliki RSUD Tipe A. Semua penambahan fasilitas tentunya tujuannya agar masyarakat bisa merasakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan lebih prima.



Persentase Bangunan Puskesmas dalam Kondisi Baik

Kabupaten Sidoarjo memiliki 31 puskesmas sampai dengan Tahun 2024

Kondisi Baik / Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
30 bangunan	1 bangunan	0 bangunan
96,77%	3,23%	-

Upaya yang telah dilakukan agar bangunan fasilitas Kesehatan dalam kondisi baik meningkat dan layak fungsi untuk dimanfaatkan pelayanan kesehatan, yaitu dengan Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin puskesmas, baik bersifat ringan, sedang maupun berat.

7. Indeks Rasa Aman

Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Indeks rasa aman digunakan untuk mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan suatu masyarakat dilihat dari aspek kesejahteraan sosial, aspek ekonomi, dan aspek peristiwa politik.

Indeks Rasa Aman Tahun 2024 tercapai 83,03 dari target 80,02 sehingga sudah mencapai target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 81,86 maka terdapat peningkatan. Dengan realisasi Indeks Rasa Aman sebesar 83,03 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa Aman Sangat Tinggi. Kategori Indeks Rasa Aman dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Nilai Indeks Rasa Aman (IRA)	Keterangan
$0 \leq IRA \leq 20$	Rasa Aman Sangat Rendah
$20 < IRA \leq 40$	Rasa Aman Rendah
$40 < IRA \leq 60$	Rasa Aman Sedang



60 < IRA ≤ 80	Rasa Aman Tinggi
80 < IRA ≤ 100	Rasa Aman Sangat Tinggi

Adapun capaian masing-masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut :

Dimensi	Capaian
Keamanan dari Bencana	81,54
Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	86,34
Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan	87,37
Keamanan dari Kekerasan	76,85
Indeks Rasa Aman	83,03

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Rasa Aman di Kabupaten Sidoarjo dapat tercapai optimal :

- Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang tentram dan aman
- Menertibkan berbagai kasus pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang merusak sistem tata kelola Kota/Kabupaten

8. Indeks Resiko Bencana

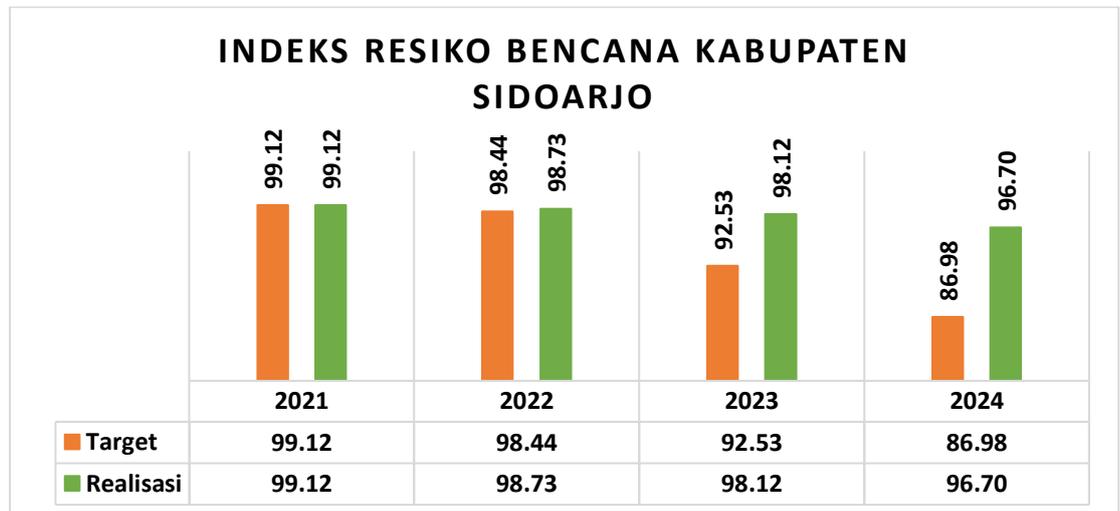
Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Indeks Resiko Bencana atau IRB Tahun 2024 berada pada skor 96,70 dari target skor 86,98 sehingga dapat dikatakan bahwa Indeks Resiko Bencana belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu pada skor 98,12 maka capaian lebih baik karena sudah ada penurunan.

Dengan realisasi Indeks Resiko Bencana (IRB) sebesar 96,70 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat resiko bencana kategori SEDANG.



Adapun tren Indeks Resiko Bencana dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024

Secara umum perhitungan Indeks Risiko Bencana seperti yang tertera dalam grafik diatas didasarkan pada rumus umum Risiko Bencana, yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dari tiga komponen diatas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan representasi dari komponen kapasitas. Dengan asumsi bahwa jika kapasitasnya meningkat maka risiko bencana akan menurun.

Terdapat 7 (tujuh) fokus prioritas utama yang dikembangkan dalam penyusunan IKD antara lain :

- a. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
- b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
- d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana



Hasil pengukuran IKD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1.	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,97	0,79	SEDANG
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,97		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,89		
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,85		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,70		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,72		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,85		

Sumber : Laporan Akhir Pengukuran IRB-IKD Kabupaten Sidoarjo 2024

Tidak tercapainya target dikarenakan untuk penanganan kejadian kebakaran masih belum memenuhi SPM, diantaranya belum terpenuhinya posko dan armada, serta sarpras sudah banyak yang tidak layak fungsi. Perlu disusun mitigasi dan kajian resiko bencana untuk 5 tahunan.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Resiko Bencana dapat tercapai optimal, yaitu :

- Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah untuk penguatan Sistem Peringatan Dini / *Early Warning System* (EWS) bencana;
- Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui Sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana baik di wilayah maupun lingkungan pendidikan;
- Melakukan review SOP / mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak;



- Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana.

9. Indeks Toleransi

Indeks Toleransi adalah cerminan dari situasi kerukunan dan inklusi sosial yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Perkembangan masyarakat yang harmonis dan inklusif tercermin melalui penilaian aspek-aspek kunci dalam Indeks Toleransi. Indeks Toleransi dinilai berdasarkan dari beberapa indikator, antara lain :

- Persepsi terhadap toleransi
- Sikap terhadap toleransi
- Kerjasama antar suku agama berbeda
- Sikap pemerintah dalam dukungan antar umat beragama
- Harapan masyarakat terhadap pemerintah dalam terciptanya toleransi di masyarakat

Indeks toleransi Tahun 2024 tercapai 86,64 dari target 81,76 sehingga telah mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 83,29 maka terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan realisasi Indeks Toleransi sebesar 86,64 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa Toleransi Tinggi.

Adapun capaian masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut :

Faktor/Variabel	Nilai <i>Standardized Factor Loadings</i>	Keterangan
Persepsi terhadap toleransi	0,776	Kuat (dominan)
Sikap terhadap toleransi	0,763	Kuat
Kerjasama	0,745	Kuat
Sikap Pemerintah dalam dukungan antar agama	0,736	Kuat
Harapan masyarakat terhadap Pemerintah	0,728	Kuat

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan data yang tertera, dapat dilihat bahwa nilai-nilai *standardized factor loadings* untuk setiap faktor melebihi angka 0,7, yang mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara faktor-faktor tersebut dengan faktor laten (ITol) yang diukur. Secara rinci, variabel-variabel seperti persepsi terhadap toleransi (0,776), sikap terhadap toleransi (0,763), kerjasama antar kelompok (0,745), sikap pemerintah terhadap dukungan antar agama (0,736, serta



harapan masyarakat terhadap dukungan pemerintah dalam menciptakan toleransi (0,728) semuanya menunjukkan kontribusi yang signifikan dan saling mendukung terhadap konstruk utama Indeks Toleransi.

Nilai-nilai tersebut tidak hanya mencerminkan kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan konstruk yang diukur, tetapi juga mempertegas bahwa item-item yang berkaitan dengan setiap faktor memiliki pengaruh yang besar terhadap tercapainya pemahaman yang menyeluruh tentang toleransi dalam konteks sosial. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai *standardized factor loadings* pada variabel-variabel ini, semakin besar pula pengaruhnya terhadap pembentukan dimensi toleransi secara keseluruhan, yang pada gilirannya memperkuat pentingnya pemahaman terhadap setiap faktor dalam upaya meningkatkan toleransi antar umat beragama serta hubungan harmonis dalam masyarakat.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Toleransi dapat tercapai optimal, yaitu :

- Memfasilitasi optimalisasi pertemuan antar umat beragama untuk melahirkan dialog, diskusi, dan kerjasama dalam rangka membangun toleransi dan mencegah konflik dan perpecahan yang berlatar belakang agama
- Memperbaiki sikap positif masyarakat dalam bertoleransi dan bekerjasama

10. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Yang dimaksud dengan "Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sedangkan yang dimaksud Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang berada di atas suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan.

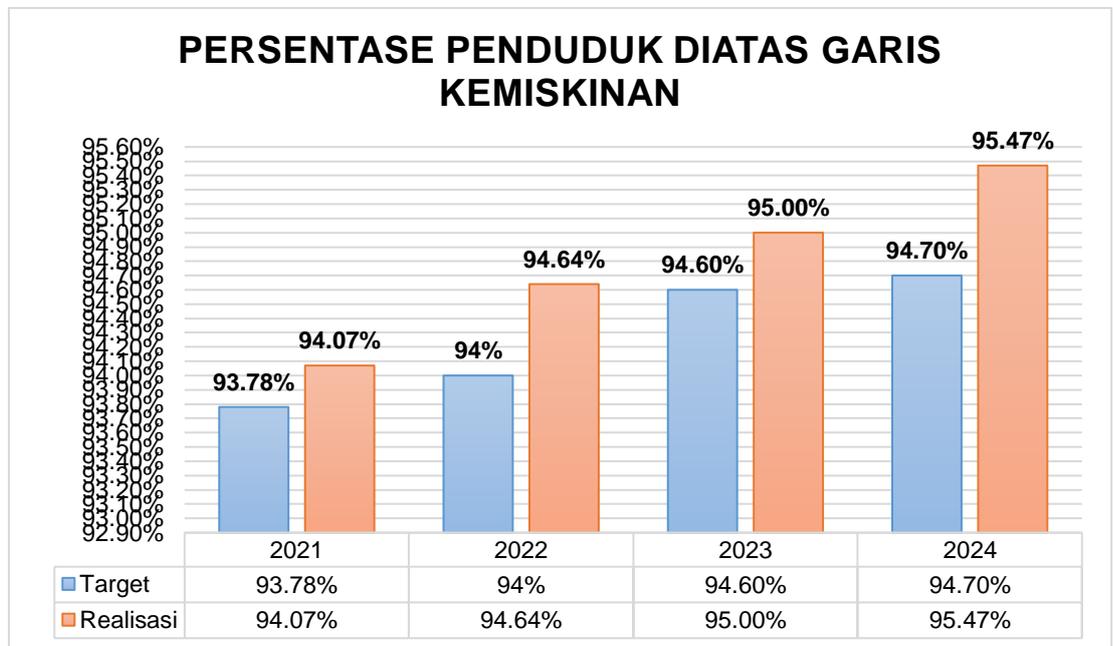
Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2024 mencapai 109,39 ribu jiwa. Berkurang sebesar 9,76 ribu jiwa, dibandingkan kondisi Maret 2023 yang sebesar 119,15 ribu jiwa.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2024 sebesar Rp 597.284 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 25.588 atau meningkat sebesar 4,48 persen, dibandingkan kondisi Maret 2023 yang sebesar Rp 571.696. Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan yang ada di Kabupaten



Sidoarjo pada Tahun 2024 sebanyak 95,47% dari jumlah penduduk dengan target 94,70% sehingga sudah melampaui target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 95,00% maka penduduk yang berada di atas garis kemiskinan semakin meningkat.

Perkembangan persentase penduduk di atas garis kemiskinan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Presentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Tahun 2024

11. Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap Di 9 (Sembilan) Sektor

Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor di Tahun 2024 tercapai 93,51% dari target 91,95% maka capaian sudah melampaui target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 91,95% maka terdapat peningkatan angka 1,56 atau sekitar 1,6%.

Sembilan sektor yang menyerap tenaga kerja dimaksud, yaitu :

- Sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
- Sektor Pertambangan dan Penggalian
- Sektor Industri Pengolahan
- Sektor Listrik, Gas dan Air
- Sektor Bangunan
- Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
- Sektor Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi
- Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, Dan Jasa Perusahaan



➤ Sektor Jasa Kemasyarakatan

Adapun perkembangan persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak tenaga kerja yang terserap di 9 sektor yaitu :

- Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk mempermudah pencari kerja untuk terserap di dunia kerja;
- Penguatan Bursa Kerja Khusus dalam penempatan tenaga kerja lulusan SMK;
- *Link and match* kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri dan usaha;
- Penguatan hubungan industrial dalam upaya menjaga kondusifitas hubungan kerja untuk mengurangi perselisihan yang berdampak PHK.

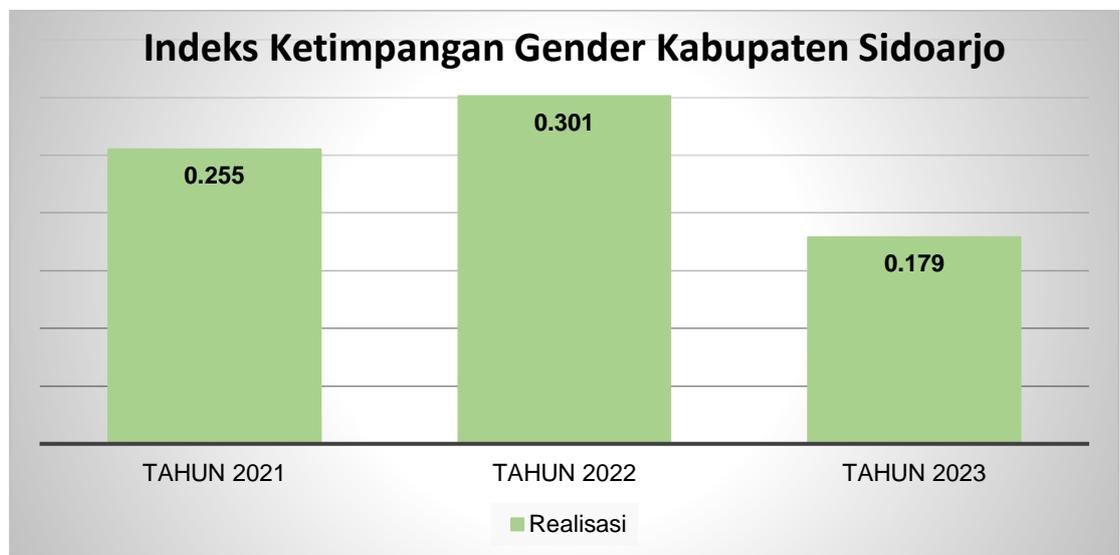
12. Indeks Pembangunan Gender

Indeks pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Pada Tahun 2023, sebagaimana Surat Edaran Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anka dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Desember 2023 Nomor : 400.2.2/2407.109.1.2023 bahwa penggunaan Indeks Pembangunan Gender sudah tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).



Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah adopsi dari GII yang diaplikasikan di tingkat nasional dan daerah, menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah 95,27 sedangkan untuk angka Tahun 2024 sampai dengan bulan Maret 2025, masih belum release dari BPS Provinsi Jawa Timur.

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2023 dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Gender, antara lain :

- Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah
- Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi

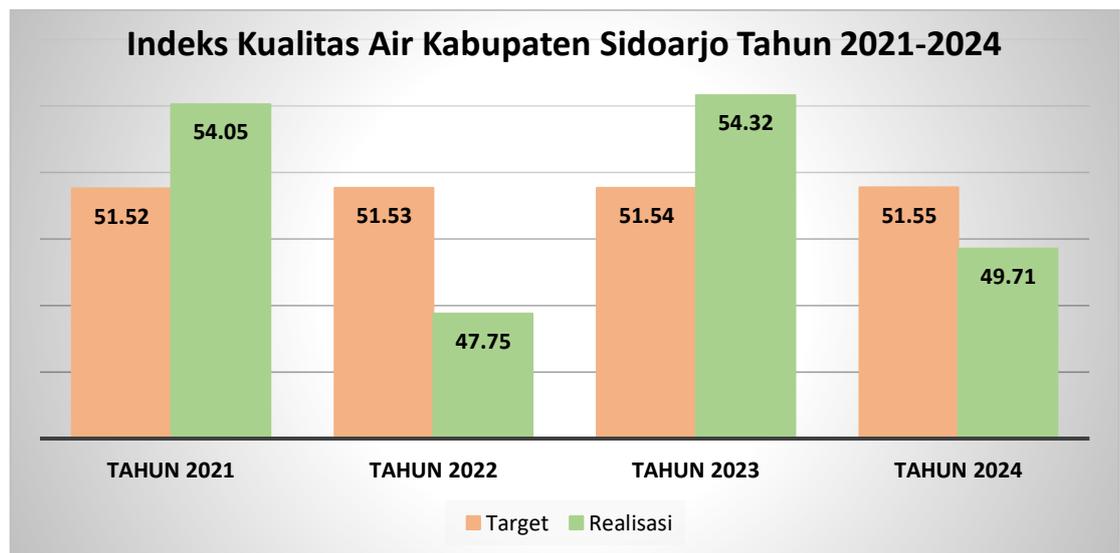
13. Indeks Kualitas Air

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2024 yaitu 49,71. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni 51,55 belum mencapai target dengan presentase capaian yakni 96%. Apabila dibandingkan dengan



realisasi tahun 2023 yaitu 54,32 maka tahun 2024 mengalami penurunan dalam kualitas air. Nilai IKA tidak dapat diprediksi terkait peningkatan maupun penurunan nilai. Hal ini dikarenakan Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama pencemar tinggi dari sumber tidak tentu yakni aktivitas domestik masyarakat) sehingga kualitas air badan air tidak dapat diprediksi dan tiap tahunnya menunjukkan nilai Indeks Kualitas Air yang fluktuatif. Permasalahan yang menjadi kendala peningkatan kualitas air yaitu adanya kemudahan berusaha melalui sistem OSS RBA sehingga terjadi peningkatan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sidoarjo namun tidak dilengkapi dengan Pengelolaan Lingkungan yang baik (termasuk penyediaan sistem pengolahan air limbah yang memadai).

Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Air dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penjelasan kualitatif per kategori indeks dapat dijelaskan untuk nilai indeks mulai tahun 2021 saja sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, karena penjelasan kualitatif indeks dibawah Tahun 2020 hanya pada nilai akhir Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai Pedoman IKLH Tahun 2013. Adapun nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2024 dimaksud (49,71) masuk dalam **kategori sedang** (yakni dalam rentang $50 \leq x < 75$) dan mengalami peningkatan kategori dari tahun sebelumnya.



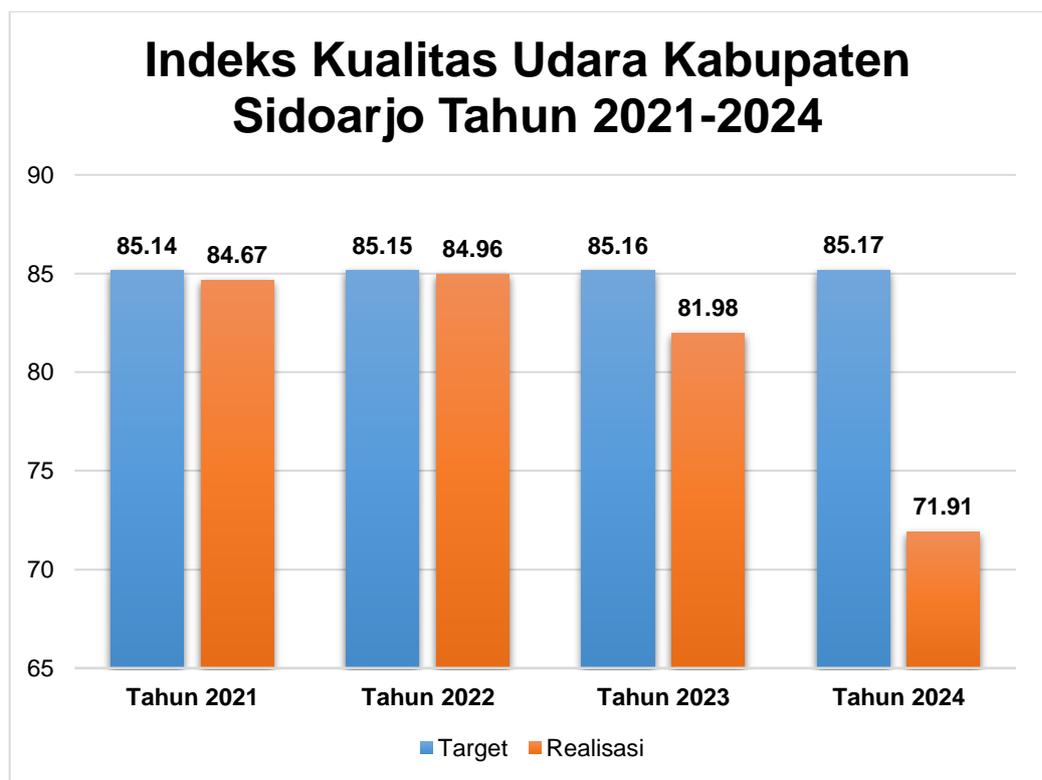
Komposit perhitungan kinerja kualitas air, sebagaimana tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD	6,4 mg/L	11,357 mg/L	8.507 mg/L

14. Indeks Kualitas Udara

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Udara tidak mencapai target Tahun 2024 dan mengalami penurunan dibanding Tahun 2023. Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 sebesar 71,91 dari target 85,17. Apabila dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 yaitu 81,98 maka terdapat penurunan kualitas sebanyak 10,07 poin.

Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Udara dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Meskipun demikian nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 diatas (sebesar 71,91) masuk dalam **kategori baik** (yakni dalam rentang $70 \leq x < 90$).



Komposit perhitungan kinerja kualitas udara, sebagaimana tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter SO ₂	7,82 µg/ m ³	15,52 µg/ m ³	50%
2	Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter NO ₂	13,66 µg/ m ³	17,41 µg/ m ³	78%

15. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Lahan Tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 sebesar 25,28 dari target 27,13. Apabila dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 yaitu 24,42 maka terdapat kenaikan kualitas sebanyak 0,86 poin atau sekitar 3,52%.

Proses verifikasi tutupan lahan dilakukan secara bertahap oleh DLH Provinsi Jawa Timur dan dilanjutkan oleh KLHK dimana hasil verifikasi agar dilakukan pengurangan luas hutan mangrove di daerah pesisir yang dideliniasi karena telah dihitung menjadi luas hutan yang diplotting oleh KLHK serta dilakukan perhitungan ulang. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya luas tutupan lahan yang diperoleh oleh Kabupaten Sidoarjo.

Permasalahan ketidak tercapaian masih sama dengan tahun – tahun sebelumnya, yaitu kurangnya area penghijauan tajuk ke tajuk. Sebenarnya pada Tahun 2024 sudah banyak dilakukan revitalisasi taman, namun pepohonan yang ditanam masih belum memenuhi ketinggian tajuk.

Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Lahan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo



Adapun nilai Indeks Kualitas Lahan Tahun 2024 (sebesar 25,28) diatas lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2023 sehingga dapat naik dalam **kategori kurang** (yakni dalam rentang $25 \leq x \leq 50$) dari kategori sangat kurang. Solusi untuk peningkatan kualitas tutupan lahan, yaitu :

- Menambah SDM atau memanfaatkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk melakukan deliniasi RTH dengan mempertimbangkan karakter daerah Kabupaten Sidoarjo serta kemampuan dalam pencapaian target IKL dan terus berkoordinasi dengan DLH Provinsi ataupun KLHK dan turut serta aktif mengikuti bimbingan teknis yang berkaitan dengan pemetaan atau deliniasi RTH dan Indeks Kualitas Lahan;
- Melakukan pemetaan eksisting RTH secara terpadu melalui deliniasi RTH serta dilakukan verifikasi secara mandiri oleh Pemerintah kabupaten Sidoarjo terhadap kondisi eksisting RTH di lapangan dan bekerjasama meningkatkan penghijauan yang dikembangkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan stakeholder terkait;
- Pengendalian alih fungsi lahan serta mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penambahan RTH atau vegetasi pepohonan, pengayaan dan pemeliharaan RTH maupun tutupan hutan mangrove yang ada, serta mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota/taman lingkungan, ikut aktif menjaga keindahan, keserasian, serta kebersihan taman kota/taman lingkungan;
- Pemerintah dapat membeli / membebaskan lahan terutama di permukiman padat untuk dibangun menjadi taman atau RTH dan penyerahan fasum perumahan;
- Mempertahankan area hijau (*green belt*) yang sudah ada dan menghindari/ meminimalisir untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, meningkatkan kawasan penyangga (*buffer zone*) antara kawasan industri dengan kawasan permukiman dan mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk turut serta menyediakan RTH di lokasi kegiatan, terutama tanaman pelindung yang bertajuk;
- Menertibkan permukiman atau komersial jasa yang berada di bantaran sungai dan memanfaatkannya sebagai Ruang Terbuka Hijau secara optimal sehingga dapat berfungsi sebagai penahan erosi dan resapan air.



16. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Pengukuran status desa diformulasikan melalui Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu sebuah indeks komposit (kombinasi) yang dibentuk dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi.

Desa di Kabupaten Sidoarjo yang berstatus Desa Mandiri di Tahun 2024 sebanyak 216 Desa dari 318 Desa yang ada atau tercapai 25,47% dari target 25,16% sehingga sangat jauh melampaui target yang ditentukan dalam RPJMD.

Jumlah Desa di Kabupaten Sidoarjo turun menjadi 318 Desa, dari sebelumnya 322 Desa dikarenakan penggabungan akibat lumpur lapindo sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa Dalam Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagai berikut :

- 1) Desa Renokenongo digabung dengan Desa Glagaharum menjadi Desa Glagaharum Kecamatan Porong
- 2) Desa Besuki digabung dengan Desa Dukuhsari menjadi Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon
- 3) Desa Pejarakan digabung dengan Desa Kedungcangkring menjadi Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon
- 4) Desa Kedungbendo digabung dengan Desa Ketapang menjadi Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin

Desa yang berstatus Desa Mandiri sampai dengan Tahun 2024, antara lain :

1. Kecamatan Tarik Terdapat 3 Desa
2. Kecamatan Prambon Terdapat 11 Desa
3. Kecamatan Krembung Terdapat 19 Desa
4. Kecamatan Porong Terdapat 5 Desa
5. Kecamatan Jabon Terdapat 4 Desa
6. Kecamatan Tanggulangin Terdapat 9 Desa
7. Kecamatan Candi Terdapat 24 Desa
8. Kecamatan Sidoarjo Terdapat 10 Desa
9. Kecamatan Tulangan Terdapat 9 Desa
10. Kecamatan Wonoayu Terdapat 9 Desa



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

11. Kecamatan Krian Terdapat 19 Desa
12. Kecamatan Balongbendo Terdapat 11 Desa
13. Kecamatan Taman Terdapat 10 Desa
14. Kecamatan Sukodono Terdapat 19 Desa
15. Kecamatan Buduran Terdapat 15 Desa
16. Kecamatan Gedangan Terdapat 15 Desa
17. Kecamatan Sedati Terdapat 7 Desa
18. Kecamatan Waru Terdapat 17 Desa

Perkembangan status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana tabel berikut :

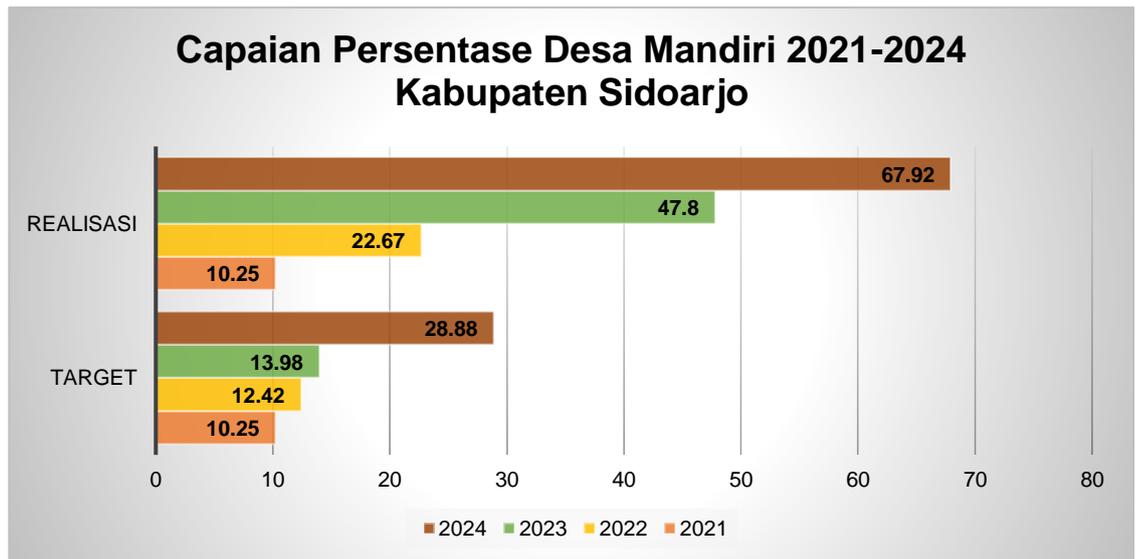
CAPAIAN IDM TAHUN 2024
KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN		STATUS IDM 2024					
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	Total
1	TARIK	0	0	0	17	3	20
2	PRAMBON	0	0	0	9	11	20
3	KREMBUNG	0	0	0	0	19	19
4	PORONG	0	0	0	7	5	12
5	JABON	0	0	2	7	4	13
6	TANGGULANGIN	0	0	0	9	9	18
7	CANDI	0	0	0	0	24	24
8	SIDOARJO	0	0	0	0	10	10
9	TULANGAN	0	0	2	11	9	22
10	WONOAYU	0	0	0	14	9	23
11	KRIAN	0	0	0	0	19	19
12	BALONGBENDO	0	0	0	9	11	20
13	TAMAN	0	0	0	6	10	16
14	SUKODONO	0	0	0	0	19	19
15	BUDURAN	0	0	0	0	15	15
16	GEDANGAN	0	0	0	0	15	15
17	SEDATI	0	0	0	9	7	16
18	WARU	0	0	0	0	17	17
TOTAL		0	0	4	98	216	318
Persentase		0,00	0,00	1,26	30,82	67,92	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo



Adapun capaian persentase desa mandiri dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Upaya yang telah dilakukan agar semakin banyak Desa yang berstatus menjadi Desa Mandiri, yaitu :

- Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas BUMDesa / BUMDesa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa;
- Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa / BUMDesa Bersama;
- Pengembangan Desa Wisata yang dikelola BUMDesa / BUMDesa Bersama;
- Pengembangan usaha ekonomi produktif Desa melalui pemanfaatan TTG yang ramah lingkungan;
- Peningkatan kapasitas RT/RW bertujuan untuk pemahaman tugas dan fungsi dari RT/RW.

17. Nilai Indeks SPBE

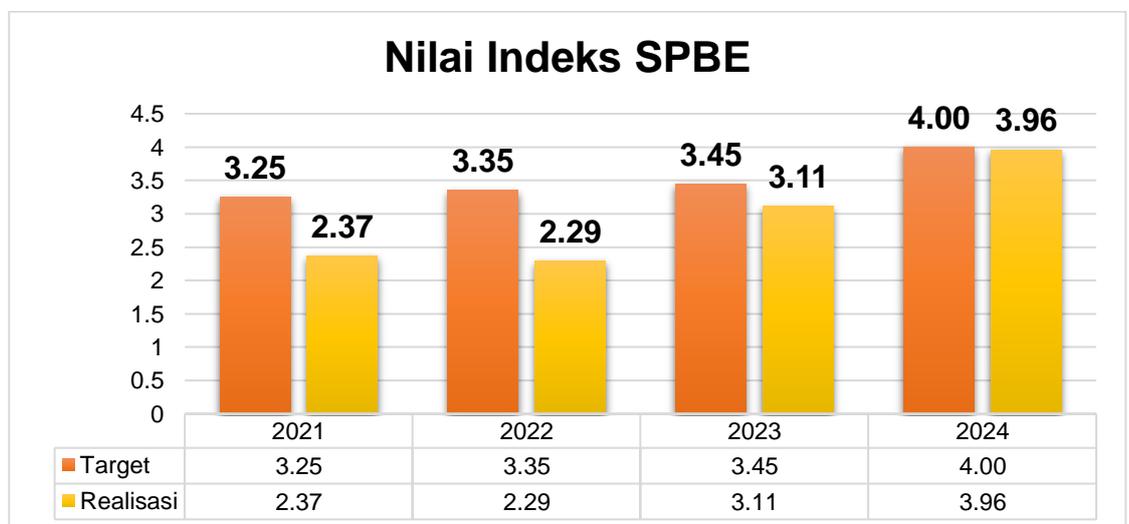
Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, Keandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah



Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 3,96 dari target 4,00, namun apabila dibandingkan dengan capain Tahun 2023 yaitu 3,11 maka terdapat peningkatan yang sangat tinggi yaitu 0,85 poin atau sekitar 27,33%.

Pada Tahun 2024 Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan kategori menjadi Sangat Baik setelah sebelumnya di Tahun 2023 hanya mendapatkan kategori Baik. Berikut perkembangan Nilai SPBE Kabupaten Sidoarjo :



Sumber : LHE Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sebenarnya apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 peningkatan sangat tajam, bahkan mengalami peningkatan kategori, namun masih ada yang perlu dipenuhi oleh Kabupaten Sidoarjo, yaitu informasi dalam pelayanan publik dan pemanfaatan dokumen statistik sektoral yang belum optimal.



Upaya yang dilakukan agar penerapan SPBE di Kabupaten Sidoarjo meningkat, yaitu sebagai berikut :

- Melaksanakan harmonisasi internal untuk seluruh pemangku terkait khususnya Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun data dukung seluruh indikator sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Jika sudah ada rincian terhadap capaian masing-masing indikator, akan segera dilakukan pemenuhan dan optimalisasi data dukung seluruh indikator kepada pemangku terkait
- Memberi data pendukung yang lengkap dan lebih komprehensif lagi dan harus selalu berkoordinasi dengan OPD atau pihak terkait, serta berkolaborasi antar pemangku SPBE untuk optimalisasi pemenuhan data dukung seluruh indikator

18. Persentase Koperasi Berkualitas

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

Parameter yang menjadi dasar koperasi berkualitas adalah apabila memenuhi 5 (lima) aspek yang terdiri dari :

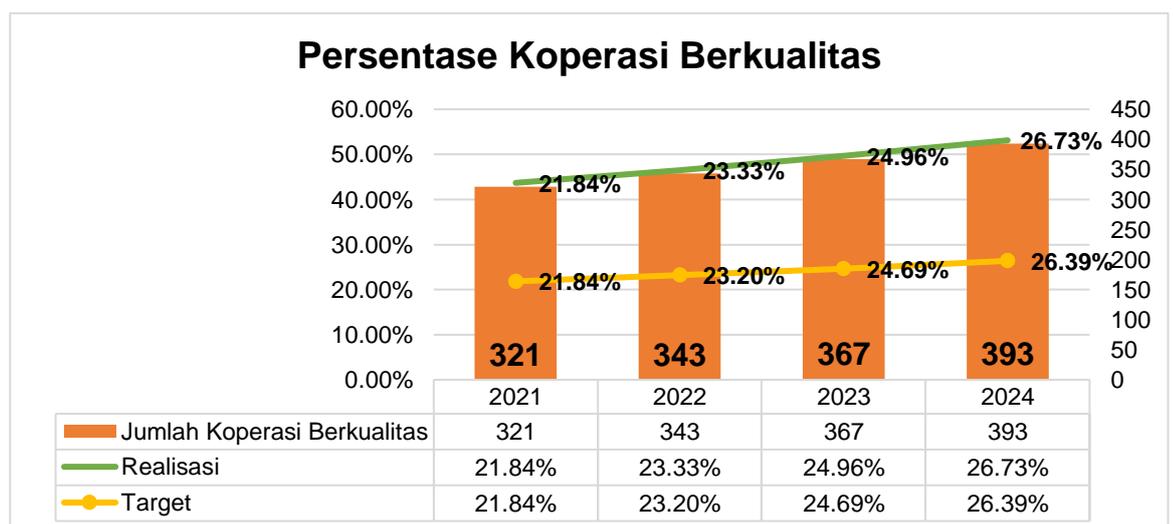
- Aspek Kelembagaan Koperasi, meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota.
- Aspek Usaha Koperasi, ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagi risiko (risk sharing), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan keuntungan.



- Aspek Keuangan Koperasi, ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya seperti prosentase pelunasan simpanan wajib dan prosentase besaran simpanan sukarela.
- Aspek Manfaat Koperasi terhadap Anggota, ditunjukkan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka.
- Aspek Manfaat Koperasi terhadap Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

Pada Tahun 2024 jumlah koperasi yang berkualitas di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 393 koperasi setara dengan 26,73% dari total keseluruhan 1.470 koperasi sehingga sudah tercapai dari target 26,39%. Perbandingan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu 24,96% atau sebanyak 367 koperasi sehingga terdapat peningkatan sebanyak 26 koperasi. Untuk tahun 2025 diperkirakan jumlah koperasi di Kabupaten Sidoarjo akan bertambah. Hal ini seiring dengan dinamika perekonomian regional dan adanya regulasi kemudahan pembentukan koperasi.

Adapun perkembangan jumlah koperasi yang berkualitas dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



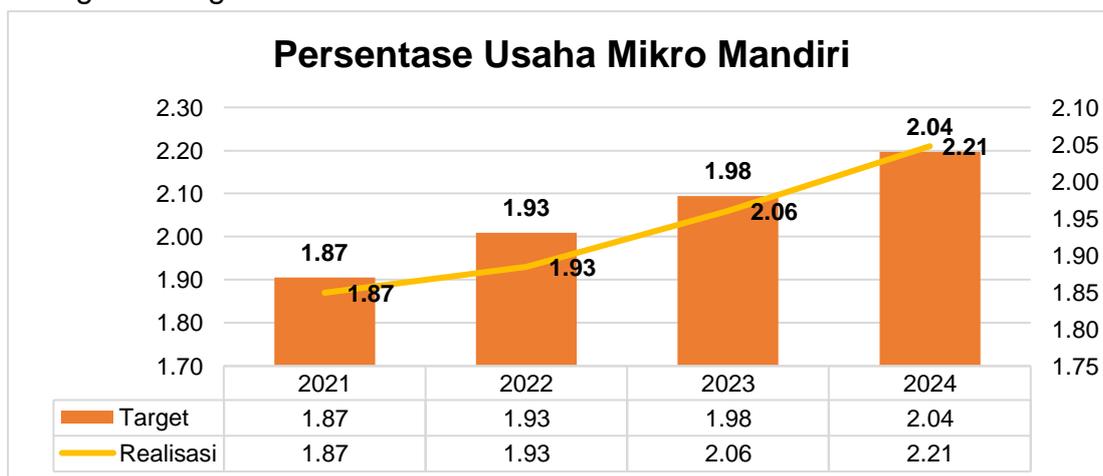
Upaya yang dilakukan agar semakin koperasi yang masuk kategori koperasi berkualitas, yaitu :

- Peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi melalui fasilitasi bimtek/pelatihan perkoperasian dan study benchmarking di koperasi yang lebih maju
- Memberikan fasilitas izin usaha koperasi melalui sosialisasi dan pendampingan usaha
- Meningkatkan kinerja usaha koperasi melalui pelatihan manajemen perkoperasian
- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi

19. Persentase Usaha Mikro Mandiri

Usaha Mandiri merupakan usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berinisiatif dan bekerja keras dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal, menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggung jawabkannya berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri.

Pada Tahun 2024 jumlah usaha mikro yang mandiri di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3.897 usaha mikro setara dengan 2,21% dari total keseluruhan 175.426 usaha mikro sehingga sudah tercapai dari target 1,98%. Perbandingan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 2,04% atau sebanyak 3.637 usaha mikro sehingga terdapat peningkatan sebanyak 260 usaha mikro. Adapun perkembangan jumlah usaha mikro yang mandiri dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



Usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2024, terbanyak adalah dari kelompok usaha mikro, sebagai berikut :

No	Klasifikasi Usaha Mikro	Presentase
1.	Perdagangan	47,77%
2.	Kuliner	30,27%
3.	Jasa	9,42%
4.	Lain-lain	6,95%
5.	Fashion	4,33%
6.	Agribisnis	1,26%

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak usaha mikro yang masuk kategori usaha mikro yang mandiri, yaitu :

- Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan, bimbingan teknis, perizinan, dan pengelolaan usaha.
- Menyediakan pendampingan usaha mikro melalui klinik usaha mikro dan kegiatan non anggaran seperti sedekah ilmu.
- Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk sosialisasi bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan.
- Perluasan akses pasar dalam berbagai bentuk pameran, fasilitasi kemitraan dan jaringan usaha.
- Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS) dan lembaga lainnya.

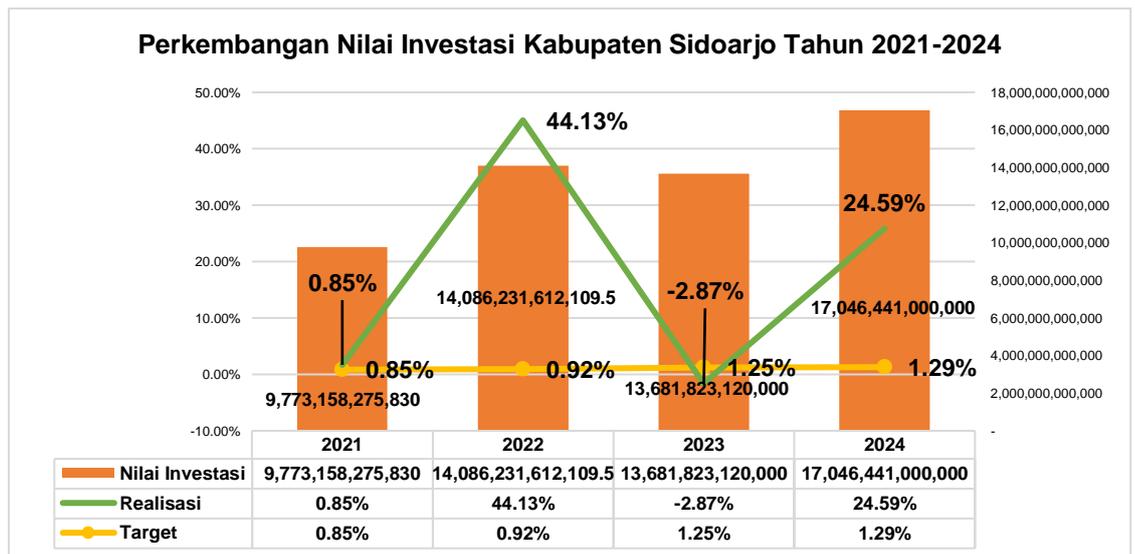
20. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi yang ada di Pemerintah Daerah meliputi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). PMA adalah kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pada Tahun 2024 Nilai Investasi Daerah di Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.17.046.441.000.000,00 dari target Rp.12.000.000.000.000,00 maka tercapai 142,05%. Namun Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 yaitu senilai Rp.13.681.823.120.000,00 maka terdapat kenaikan senilai Rp. 3.364.617.880.000 atau sekitar 24,59%.



Berikut perkembangan nilai investasi di Kabupaten Sidoarjo :



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Upaya yang dilakukan agar nilai investasi semakin meningkat, yaitu :

- Letak geografis kabupaten Sidoarjo yang sangat strategis
- Infrastruktur seperti bandara, jalan tol, pusat perindustrian dan pergudangan
- Regulasi yang mendukung dimulai dari perundang-undangan, peraturan pemerintah, sampai dengan turunannya serta inovasi dalam menerapkan aturan-aturan tersebut
- Adanya regulasi daerah yang mendukung investasi seperti Rencana Umum Penanaman Modal dan Perbup Pemberian Insentif
- Adanya inovasi daerah yang mendukung aplikasi OSS RBA yang berlaku nasional
- DPMPPTSP berinovasi dengan memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha Jemput Bola untuk UMKM di 18 Kecamatan Kabupaten Sidoarjo yang berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Perbankan, KPP Pratama, dan Halal Center; serta Tim Prime Service untuk membantu perusahaan-perusahaan yang dipilih dan diprioritaskan
- Kolaborasi yang baik antara dinas teknis pemangku perizinan berusaha dan instansi teknis terkait penerbitan perizinan, serta komunikasi yang baik dengan Pemprov Jatim dan Kementerian
- Pendampingan yang dilakukan kepada pelaku usaha, berkomunikasi dan hubungan yang baik kepada pelaku usaha, dengan adanya kegiatan Pengawasan Perusahaan secara rutin
- Tim dari DPMPPTSP yang komit dan sangat kompetitif.



21. Indeks Pelestarian Budaya

Indeks Pelestarian Budaya disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Indeks Pelestarian Budaya merupakan komposit perhitungan dari Indeks Kesalehan Sosial yang diukur dari Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan, Jumlah cagar budaya yang dirawat, dan sikap masyarakat terhadap kelestarian budaya dan lingkungan.

Variabel yang menjadi dimensi pengukuran Indeks Pelestarian Budaya, sebagai berikut :

Komposit	Indeks	Bobot	Skor
Pelestarian Seni dan Budaya	87,80	35%	30,73
Pencatatan Cagar Budaya	96,63	35%	33,82
Sikap Masyarakat terhadap Seni Budaya dan Lingkungan	93,34	30%	28,00
		100%	92,55

Capaian Indeks Pelestarian Budaya Tahun 2024 yaitu 92,55 dari target 66,76 sehingga sudah sangat jauh melampaui dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu 90,92 maka capaian lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

22. Indeks Pelayanan Publik

Setiap tahunnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo diupayakan selalu meningkat, hal ini sesuai dengan kebijakan satu OPD satu Inovasi yang ditetapkan oleh Kabupaten Sidoarjo. Selain itu banyak pula inovasi di Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan penghargaan Kompetisi Regional maupun Nasional.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun 2024 mendapatkan nilai 4,65 atau kategori A. Berikut



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024 :

Tahun	Indeks Pelayanan Publik
2021	A- (Sangat Baik)
2022	Pelayanan Prima
2023	A- (Sangat Baik)
2024	A (Prima)

Adapun untuk pengukuran Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sidoarjo tanggal 31 Desember 2024 Nomor : 100.3.3.2/1118/438.3.1.3/2024, berikut hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 :

NO.	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		
KATEGORI KHUSUS ROLE MODEL				
1	RSUD NOTOPURO	4,792	A	PELAYANAN PRIMA
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,767	A	PELAYANAN PRIMA
3	DINAS SOSIAL	4,469	A-	SANGAT BAIK
4	DPMPTSP	4,290	A-	SANGAT BAIK
KATEGORI PERANGKAT DAERAH TEKNIS (DINAS)				
1	DINAS TENAGA KERJA	4,772	A	PELAYANAN PRIMA
2	RSUD SIBAR	4,755	A	PELAYANAN PRIMA
3	DINAS KESEHATAN	4,567	A	PELAYANAN PRIMA
4	DLHK	4,305	A-	SANGAT BAIK
5	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	4,232	A-	SANGAT BAIK
6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4,207	A-	SANGAT BAIK
7	DINAS PERIKANAN	4,168	A-	SANGAT BAIK
8	DINAS PENDIDIKAN	4,125	A-	SANGAT BAIK
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	4,107	A-	SANGAT BAIK



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

10	DINAS KOMINFO	4,106	A-	SANGAT BAIK
11	DINAS PERHUBUNGAN	4,091	A-	SANGAT BAIK
12	DINAS PPPA DAN KB	4,056	A-	SANGAT BAIK
13	DINAS PMD	4,052	A-	SANGAT BAIK
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	4,039	A-	SANGAT BAIK
15	DINAS PERKIM CKTR	4,018	A-	SANGAT BAIK
16	DINAS PU BINA MARGA DAN SDA	4,010	A-	SANGAT BAIK
17	DINAS PEMUDA, OR DAN PARIWISATA	3,521	B	BAIK
18	SATPOL PP	3,076	B-	BAIK (CATATAN)
1	SEKRETARIAT DAERAH	4,294	A-	SANGAT BAIK
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4,240	A-	SANGAT BAIK
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4,223	A-	SANGAT BAIK
4	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	4,122	A-	SANGAT BAIK
5	INSPEKTORAR DAERAH	4,083	A-	SANGAT BAIK
6	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	4,044	A-	SANGAT BAIK
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,587	B	BAIK
8	SEKRETARIAT DPRD	3,560	B	BAIK
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,256	B-	BAIK (CATATAN)
KATEGORI KECAMATAN				
1	KECAMATAN GEDANGAN	4,524	A	PELAYANAN PRIMA
2	KECAMATAN WARU	4,363	A-	SANGAT BAIK
3	KECAMATAN PRAMBON	4,299	A-	SANGAT BAIK
4	KECAMATAN SUKODONO	4,271	A-	SANGAT BAIK
5	KECAMATAN TULANGAN	4,269	A-	SANGAT BAIK
6	KECAMATAN SIDOARJO	4,258	A-	SANGAT BAIK
7	KECAMATAN KRIAN	4,212	A-	SANGAT BAIK



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

8	KECAMATAN TAMAN	4,205	A-	SANGAT BAIK
9	KECAMATAN JABON	4,174	A-	SANGAT BAIK
10	KECAMATAN KREMBUNG	4,165	A-	SANGAT BAIK
11	KECAMATAN PORONG	4,162	A-	SANGAT BAIK
12	KECAMATAN CANDI	4,135	A-	SANGAT BAIK
13	KECAMATAN BALONGBENDO	4,088	A-	SANGAT BAIK
14	KECAMATAN SEDATI	4,075	A-	SANGAT BAIK
15	KECAMATAN TARIK	3,693	B	BAIK
16	KECAMATAN BUDURAN	3,572	B	BAIK
17	KECAMATAN TANGGULANGIN	3,496	B-	BAIK (CATATAN)
18	KECAMATAN WONOAYU	3,252	B-	BAIK (CATATAN)
KATEGORI PUSKESMAS				
1	PUSKESMAS PORONG	4,757	A	PELAYANAN PRIMA
2	PUSKESMAS TULANGAN	4,744	A	PELAYANAN PRIMA
3	PUSKESMAS SIDOARJO	4,658	A	PELAYANAN PRIMA
4	PUSKESMAS TARIK	4,609	A	PELAYANAN PRIMA
5	PUSKESMAS CANDI	4,592	A	PELAYANAN PRIMA
6	PUSKESMAS PRAMBON	4,576	A	PELAYANAN PRIMA
7	PUSKESMAS BALONG BENDO	4,565	A	PELAYANAN PRIMA
8	PUSKESMAS JABON	4,564	A	PELAYANAN PRIMA
9	PUSKESMAS WONOAYU	4,549	A	PELAYANAN PRIMA
10	PUSKESMAS TANGGULANGIN	4,548	A	PELAYANAN PRIMA
11	PUSKESMAS BUDURAN	4,543	A	PELAYANAN PRIMA
12	PUSKESMAS KEDUNGSOLO	4,535	A	PELAYANAN PRIMA
13	PUSKESMAS URANGAUNG	4,535	A	PELAYANAN PRIMA



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

14	PUSKESMAS GANTING	4,533	A	PELAYANAN PRIMA
15	PUSKESMAS KEPADANGAN	4,417	A-	SANGAT BAIK
16	PUSKESMAS SEDATI	4,414	A-	SANGAT BAIK
17	PUSKESMAS TARIK 2	4,327	A-	SANGAT BAIK
18	PUSKESMAS SEKARDANGAN	4,323	A-	SANGAT BAIK
19	PUSKESMAS GEDANGAN	4,271	A-	SANGAT BAIK
20	PUSKESMAS KREMBUNG	4,259	A-	SANGAT BAIK
21	PUSKESMAS KRIAN	4,158	A-	SANGAT BAIK
22	PUSKESMAS TAMAN	4,130	A-	SANGAT BAIK
23	PUSKESMAS SUKODONO	4,041	A-	SANGAT BAIK
24	PUSKESMAS TROSOBO	4,024	A-	SANGAT BAIK
25	PUSKESMAS WARU	4,016	A-	SANGAT BAIK
26	PUSKESMAS WONOKASIAN	3,936	B	BAIK
27	PUSKESMAS MEDAENG	3,844	B	BAIK
28	PUSKESMAS TAMBAKREJO	3,834	B	BAIK
29	PUSKESMAS SIDODADI	3,792	B	BAIK
30	PUSKESMAS BARENGKRAJAN	3,733	B	BAIK
KATEGORI KELURAHAN				
1	KELURAHAN SEPANJANG	4,433	A-	SANGAT BAIK
2	KELURAHAN BULUSIDOKARE	4,411	A-	SANGAT BAIK
3	KELURAHAN CELEP	4,231	A-	SANGAT BAIK
4	KELURAHAN SEKARDANGAM	4,228	A-	SANGAT BAIK
5	KELURAHAN KEMASAN	4,214	A-	SANGAT BAIK
6	KELURAHAN PUCANGANOM	4,210	A-	SANGAT BAIK
7	KELURAHAN SIDOKARE	4,116	A-	SANGAT BAIK
8	KELURAHAN KETEGAN	4,075	A-	SANGAT BAIK
9	KELURAHAN URANGAGUNG	4,061	A-	SANGAT BAIK
10	KELURAHAN KALIJATEN	4,042	A-	SANGAT BAIK
11	KELURAHAN SIDOKUMPUL	3,885	B	BAIK



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

12	KELURAHAN LEMAHPUTRO	3,865	B	BAIK
13	KELURAHAN TAMBAKKEMERAKAN	3,813	B	BAIK
14	KELURAHAN TAMAN	3,804	B	BAIK
15	KELURAHAN GELURAN	3,803	B	BAIK
16	KELURAHAN PORONG	3,748	B	BAIK
17	KELURAHAN NGELOM	3,554	B	BAIK
18	KELURAHAN GEBANG	3,553	B-	BAIK (CATATAN)
19	KELURAHAN JUWETKENONGO	3,476	B-	BAIK (CATATAN)
20	KELURAHAN BEBEKAN	3,334	B-	BAIK (CATATAN)
21	KELURAHAN CEMENKALANG	3,323	B-	BAIK (CATATAN)
22	KELURAHAN MAGERSARI	3,305	B-	BAIK (CATATAN)
23	KELURAHAN SIDOKLUMPUK	3,229	B-	BAIK (CATATAN)
24	KELURAHAN PUCANG	3,172	B-	BAIK (CATATAN)
25	KELURAHAN KRAN	3,139	B-	BAIK (CATATAN)
26	KELURAHAN WONOCOLO	2,970	C	CUKUP
27	KELURAHAN PEKAUMAN	2,879	C	CUKUP
28	KELURAHAN GEDANG	2,666	C	CUKUP
KATEGORI BUMD				
1	BPR DELTA ARTHA	3,709	B	BAIK
2	PERUMDA DELTA TIRTA	2,947	C	CUKUP
3	PT.ANEKA USAHA (PERSERODA)	2,880	C	CUKUP

23. Nilai SAKIP Kabupaten

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2024 Kabupaten



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPI) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

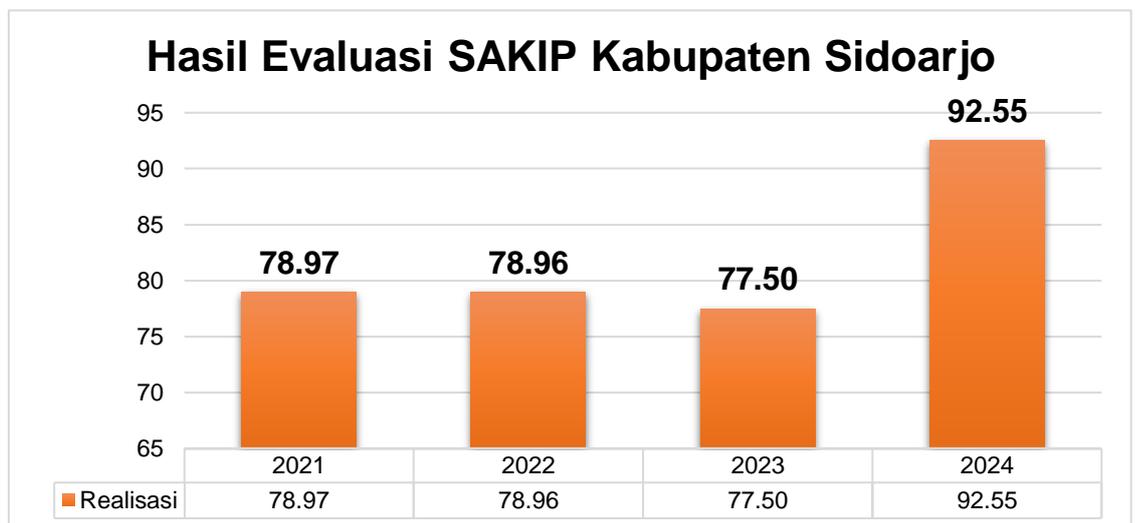
Sidoarjo memperoleh kategori **BB (Sangat Baik)**. Hasil tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu kategori **A (Memuaskan)** dan stagnan dari Tahun 2022.

Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, sebagai berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
	Perencanaan Kinerja	30	26,31	26,09
	Pengukuran Kinerja	30	23,18	21,66
	Pelaporan Kinerja	15	11,45	11,68
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,56	16,21
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,50	92,55
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Sumber : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebenarnya telah menerapkan Akuntabilitas Kinerja sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi. Berikut perkembangan hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo :



Sumber : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Adapun Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Kategori Nilai	Jumlah OPD
AA (Sangat Memuaskan)	1 OPD (2,04%)
A (Memuaskan)	32 OPD (65,31%)
BB (Sangat Baik)	16 OPD (32,65%)

Sumber : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dari Inspektorat Daerah



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH	TARGET 2024	REALISASI 2024	INDEKS
1	SEKRETARIAT DAERAH	85.97	87.51	A
2	SEKRETARIAT DPRD	80.1	80.1	A
3	INSPEKTORAT	84.6	88.22	A
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	81.85	86.13	A
5	BAKESBANGPOL	80.1	75.59	BB
6	BAPPEDA	85.51	86.72	A
7	BPBD	82	81.68	A
8	BPPD	83.26	84.36	A
9	BPKAD	84	84.86	A
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	83.25	85.3	A
11	DINAS PERIKANAN	81	81.81	A
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	84.18	85	A
13	DINAS KESEHATAN	83.31	84.06	A
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	84	84.5	A
15	DINAS PU BINA MARGA DAN SDA	80.05	80.31	A
16	DINAS PERKIM CKTR	80.06	79.82	BB
17	DINAS KOMINFO	80	80.5	A
18	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	80	79.91	BB
19	DINAS PENDIDIKAN	80.01	79.88	BB
20	DINAS PERHUBUNGAN	80	78	BB
21	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	83.75	84.37	A
22	DINAS TENAGA KERJA	82.94	83.71	A
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	82.05	82.58	A
24	DINAS PPPA DAN KB	80.38	81.42	A
25	DPMPTSP	83	83.83	A
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	80.22	82.36	A
27	DINAS SOSIAL	80.01	80.09	A
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	80.05	80.47	A
29	SATPOL PP	81.88	78.11	BB
30	RSUD NOTOPURO	91	91.13	AA
31	RSUD SIBAR	70.05	77.38	BB
32	KECAMATAN SIDOARJO	78	79.07	BB
33	KECAMATAN BUDURAN	80.1	80.22	A
34	KECAMATAN CANDI	80.15	78.85	BB
35	KECAMATAN TANGGULANGIN	80.1	80.03	A
36	KECAMATAN PORONG	80.4	80.4	A
37	KECAMATAN JABON	80.05	80.89	A
38	KECAMATAN TULANGAN	78.8	76.56	BB
39	KECAMATAN KREMBUNG	78.51	76.5	BB
40	KECAMATAN PRAMBON	80.3	80.06	A
41	KECAMATAN WONOAYU	80.05	79.03	BB
42	KECAMATAN KRIAN	78.5	79.07	BB
43	KECAMATAN BALONGBENDO	81	78.3	BB
44	KECAMATAN TARIK	78.8	79.29	BB
45	KECAMATAN SUKODONO	81	81.75	A
46	KECAMATAN TAMAN	83.61	83.2	A
47	KECAMATAN GEDANGAN	80.2	81.94	A
48	KECAMATAN WARU	79.66	79.9	BB
49	KECAMATAN SEDATI	80.06	80.29	A

Sumber : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dari Inspektorat Daerah



Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan dari Tahun 2024. Aspek yang paling kurang sebagaimana LHE SAKIP Kabupaten Sidoarjo dari Kementerian PAN dan RB adalah aspek Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Beberapa rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB telah dituangkan dalam LHE dan akan diperbaiki pada Tahun 2025.

24. Opini Atas Laporan BPK

Opini atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dalam kurun waktu 11 tahun Kabupaten Sidoarjo selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan konsistensi dan komitmen dalam mengelola keuangan yaitu Laporan Keuangan (LK) telah tersaji secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Adapun tren capaian Opini atas Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 4 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Opini atas Audit BPK
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Adapun upaya yang dilakukan agar dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu :

- Bimtek dan asistensi pengelolaan dan penatausahaan laporan keuangan secara berkala kepada seluruh pengelola keuangan pada seluruh OPD dan Desa/Kelurahan
- Bimtek dan asistensi penatausahaan aset daerah secara berkala
- Kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi lainnya terhadap pengelolaan keuangan



25. Survey Eksternal Persepsi Korupsi

Indikator Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi belum dapat dihitung capaiannya sejak tahun 2021 dikarenakan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi nomor : B/324/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi (EPK) tidak rilis sedangkan yang rilis adalah Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Pada Tahun 2023 telah diubah melalui perubahan Renstra Inspektorat 2021-2026 dari Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi (EPK) menjadi Indeks Survey Penilaian Integritas (Indeks SPI), Indeks SPI dikeluarkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan perolehan nilai sebagai berikut :

Tahun	Indeks SPI
2021	75,49
2022	75,90
2023	75,30
2024	67,91

Sumber : Komisi Pemberantas Korupsi

Adapun kinerja yang mendukung pencapaian peningkatan hasil Survey Eksternal Persepsi Korupsi, antara lain :

Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Penilaian atas penerapan tata kelola APIP mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan Layanan APIP (*Services and Role of Internal Auditing*)
2. Pengelolaan SDM (*People Management*)
3. Praktik Profesional (*Professional Practices*)
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)
5. Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)
6. Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)



Berdasarkan hasil quality assurance (QA) BPKP Pusat yang telah ditetapkan dengan Surat BPKP Nomor : PE.09.03/LHP-635/PW13/6/2024 tanggal 4 September 2024, nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 adalah level 3 (*integrated*) dengan skor 3,00 ini mencerminkan bahwa APIP Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan layanan *compliance auditing*, *performance auditing* dan *practice advisory* antara lain :

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan
3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Tren capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Kapabilitas APIP
2021	Level 2 (<i>Infrastruktur</i>)
2022	Level 3 (<i>Integrated</i>)
2023	Level 3 (<i>Integrated</i>)
2024	Level 3 (<i>Integrated</i>)

Adapun upaya yang telah dilakukan agar nilai Kapabilitas APIP lebih optimal, yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat yang berkaitan pengawasan berbasis risiko.
- Memuatkhirkan *risk register* yang disusun OPD sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.

Monitoring Center for Prevention (MCP)

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring, upaya koordinasi, dan



supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.

Tahun 2024 hasil penilaian MCP Kabupaten Sidoarjo adalah 92,05 dari rentang nilai 0 s.d. 100 menempati peringkat ke-116 dari 546 wilayah se-Nasional dan ranking 28 dari 39 wilayah se-Jawa Timur. Adapun nilai masing-masing variabel sebagai berikut :

No.	Variabel	Nilai
1	Perencanaan	100
2	Penganggaran	98,22
3	Pengadaan Barang dan Jasa	97,10
4	Pelayanan Publik	91,96
5	Pengawasan APIP	93,89
6	Manajemen ASN	100
7	Pengelolaan BMD	87
8	Optimalisasi Pajak	100
Nilai 8 Area Intervensi		96,05
Faktor Koreksi		-4
CAPAIAN KABUPATEN SIDOARJO 2024		92,05

Capaian ini sudah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih baik secara administrasi maupun secara regulasi.

Adapun upaya yang dilakukan agar capaian MCP optimal, yaitu Asistensi dan monitoring terhadap 8 area intervensi yang difokuskan pada area intervensi yang nilainya rendah yaitu melalui :

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk area intervensi Perijinan, terutama untuk transparansi tata ruang daerah
- Mengoptimalkan penilaian sistem merit untuk area intervensi Manajemen ASN
- Meningkatkan pendanaan dan sertifikasi BMD untuk pengamanan fisik dan hukum BMD pada area intervensi Pengelolaan BMD

26. Status Kinerja LPPD

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah



satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 belum rilis, berikut hasil EKPPD dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 :

Tahun	Kepmendagri	Nilai	Status Kinerja	Peringkat
2022 (Kinerja Tahun 2021)	Nomor : 100.2.1.3-1109 Tahun 2023	3,6100	Tinggi	Ke-5 Nasional
2023 (Kinerja Tahun 2022)	Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023	3,7800	Tinggi	Ke-2 Nasional
2024 (Kinerja Tahun 2023)	Data Belum Rilis			

Sehubungan dengan perubahan penilaian sebagaimana Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, maka status kinerja LPPD apabila ditargetkan Sangat Tinggi (ST) maka masih kesulitan, dan belum ada Kabupaten / Kota yang sudah mencapai kategori dimaksud. Meskipun demikian Kabupaten Sidoarjo menempati Peringkat ke-2 terbaik Nasional dalam pencapaian indikator LPPD.

27. Tingkat Maturitas SPIP

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control*. Fokus penilaian SPIP ada 5 (lima) unsur yaitu :

1. Unsur Lingkungan Pengendalian
2. Unsur Penilaian Resiko
3. Unsur Aktivitas pengendalian
4. Unsur informasi dan komunikasi
5. Unsur pemantauan pengendalian internal

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.09.03/LHP-1158/PW13/3/2024 telah dilaksanakan evaluasi atas maturitas



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPI) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 3,258 yang berarti bahwa capaian telah mencapai target. Capaian level 3 (terdefinisi) dimaksud mencerminkan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah mampu mengelola kinerja dan merumuskan sasaran kinerja beserta indikator dan target dengan baik, serta mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif. Pengendalian telah dibangun dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh kegiatan organisasi, namun belum pada sasaran strategis OPD maupun Sasaran Strategis Pemerintah Daerah, serta belum pada risiko kecurangan.

Berikut tren capaian Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Level Maturitas SPIP
2021	Terdefinisi
2022	Terdefinisi
2023	Terdefinisi
2024	Terdefinisi

Berikut hasil evaluasi penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/(Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,255	3,258	(0,997)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,497	2,931	(1,566)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,964	2,910	(1,054)

Sumber : Hasil Evaluasi SPIP oleh BPKP Provinsi Jawa Timur

Adapun upaya yang telah dilakukan agar dapat pengendalian intern optimal, yaitu antara lain :

- Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi SPIP



- Meningkatkan kualitas pengawasan melalui reviu, evaluasi, dan pendampingan terhadap manajemen risiko tidak hanya pada tataran operasional tetapi pada tataran sasaran strategis OPD.
- Melaksanakan sosialisasi dan implementasi secara masif terkait kegiatan anti korupsi yang mencakup tiga hal yaitu cegah, deteksi, dan respon.

28. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Dalam Arti Luas

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo bahwa Tahun 2024 laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas adalah 1,32 dari target 2,95 sehingga masih belum mencapai target yang ditentukan.

Adapun kinerja yang mendukung peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas, antara lain :

Produktivitas Pertanian

Perkembangan produktivitas pertanian Tahun 2024, dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut :

No.	Tanaman Pangan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
1	Padi	0,020%	0,0319%	127,5%
2	Jagung	0,100%	0,1106%	110,6%
3	Kacang Hijau	0,200%	0,2040%	102%
4	Kedelai	0,200%	0,3725%	186,25%
5	Sawi	0,010%	0,0104%	104%
6	Bayam	0,010%	0,0121%	121%
7	Kangkung	0,010%	0,0114%	114%
8	Tebu	0,100%	0,11%	110%

Tren realisasi produktivitas pertanian, sebagaimana grafik berikut :





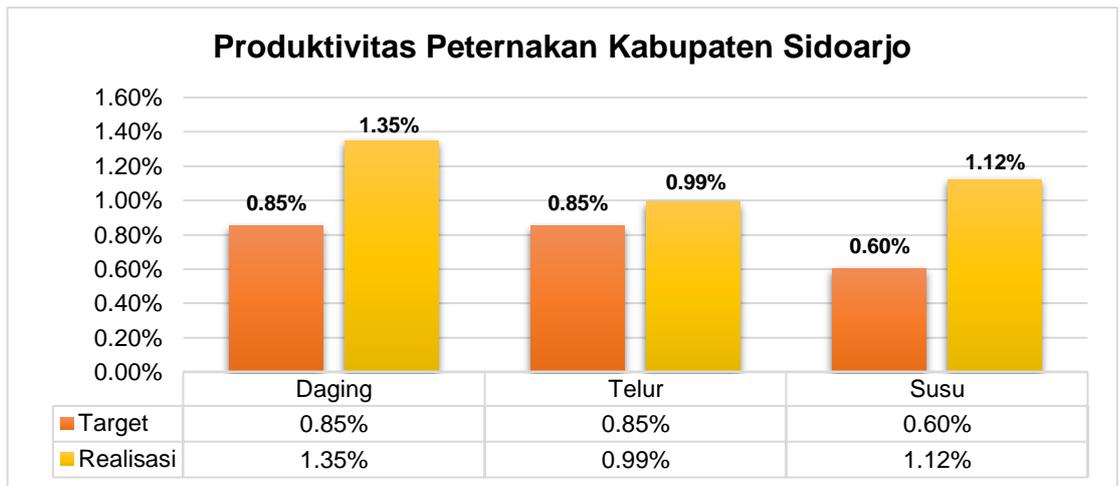
Dari 8 jenis tanaman pangan, telah tercapai semua dari target yang telah ditetapkan.

Produksi Peternakan

Perkembangan produktivitas peternakan Tahun 2024, dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut :

No.	Hasil Peternakan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
1	Daging	0,85%	1,35%	158,82%
2	Telur	0,85%	0,99%	116,47%
3	Susu	0,60%	1,12%	186,67%

Tren realisasi produktivitas peternakan, sebagaimana grafik berikut :



Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan produksi peternakan, antara lain :

- Optimalisasi penyaluran bibit peternakan
- Optimalisasi pelayanan kesehatan hewan

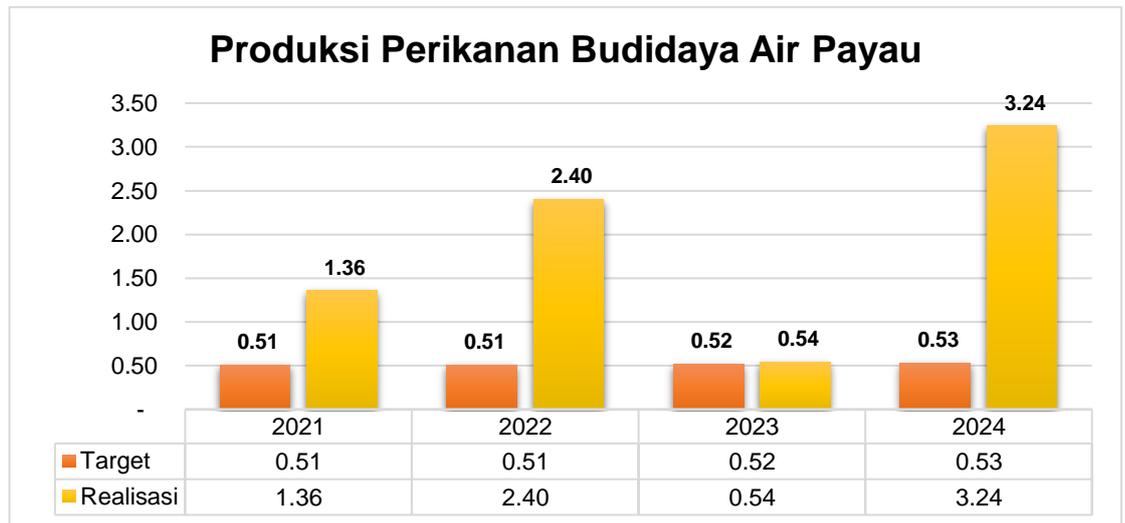
Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Perkembangan hasil produksi perikanan Budidaya air payau, sebagaimana tabel berikut :

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	0,51%	0,51%	0,52%	0,53%
Realisasi	1,36%	2,4%	0,54%	3,24%
Capaian	266,67%	470,59%	103,85%	611,3%



Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan budidaya air payau dapat dilihat sebagai berikut :



Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan budidaya air payau semakin meningkat, yaitu:

- Normalisasi saluran pasok untuk pasang surut air laut yang dipergunakan untuk suplai budidaya tambak.
- Pendangkalan dan penggelondongan sebagai upaya untuk adaptasi terhadap lingkungan
- Melanjutkan pembangunan jalan produksi sebagai akses modalisasi panen dan transport pengangkutan benih.
- Pelatihan dan sekolah lapang sebagai sarana edukasi untuk para pembudidaya
- Pemberian modal dan hibah benih dan sarana prasarana.

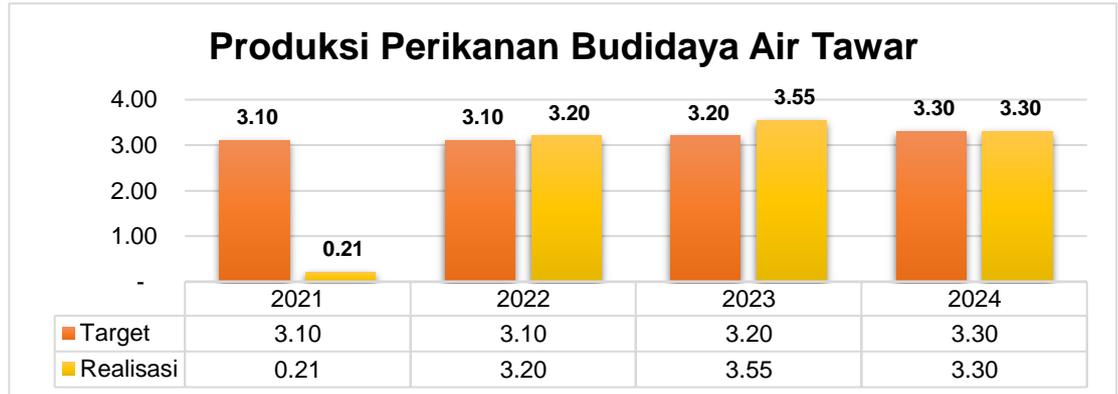
Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Perkembangan hasil produksi perikanan Budidaya air tawar, sebagaimana tabel berikut :

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	3,10%	3,10%	3,2%	3,30%
Realisasi	0,21%	3,20%	3,55%	3,30%
Capaian	6,67%	103,22%	110,94%	100%



Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan budidaya air tawar dapat dilihat sebagai berikut :



Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan budidaya air payau semakin meningkat, yaitu:

- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (Pembudidaya) dengan cara memberikan pelatihan dan sosialisasi cara berbudidaya dengan baik dan benar.
- Pemberian hibah dan bantuan dan diadakannya KURDA

Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Perkembangan hasil produksi perikanan tangkap, sebagaimana tabel berikut :

Tahun	2022	2023	2024
Target	0,55%	0,56%	0,57%
Realisasi	0,77%	0,56%	0,57%
Capaian	139,66%	100%	100%

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan tangkap laut dapat dilihat sebagai berikut :





Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan tangkap laut semakin meningkat, yaitu :

- Pemberian hibah / Bantuan sarana dan prasarana untuk nelayan sehingga dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan para nelayan.
- Pemberian modal / bantuan modal kepada nelayan sehingga memungkinkan nelayan untuk meningkatkan produksi hasil tangkapan para nelayan.

Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers

Perkembangan hasil olahan perikanan kerupuk udang / prawn crackers, sebagaimana tabel berikut :

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	Rp.60.500/Kg	Rp.60.000/Kg	Rp.61.000/Kg	Rp.62.000/Kg
Realisasi	Rp.60.750/Kg	Rp.60.900/Kg	Rp.61.000/Kg	Rp.90.800/Kg
Capaian	101,25%	103,22%	100,16%	146,45%

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil olahan perikanan kerupuk udang / prawn crackers dapat dilihat sebagai berikut :



Upaya yang dilakukan agar Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers semakin meningkat, yaitu:

- Harus memiliki sertifikasi keamanan mutu produksi olahan hasil perikanan
- Melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada para pengolah.
- Melakukan pengawasan yang baik sesuai dengan standart



Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish

Perkembangan hasil olahan perikanan bandeng asap atau some milkfish, sebagaimana tabel berikut :

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	Rp.127.000/Kg	Rp.127.000/Kg	Rp.127.500/Kg	Rp.127.600/Kg
Realisasi	Rp.127.225/Kg	Rp.128.000/Kg	Rp.131.000/Kg	Rp.137.000/Kg
Capaian	100,20%	100,79%	102,74%	107,84%

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil olahan perikanan bandeng asap atau some milkfish, dapat dilihat sebagai berikut :



Upaya yang dilakukan agar Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish semakin meningkat, yaitu:

- Harus memiliki sertifikasi keamanan mutu produksi olahan hasil perikanan
- Melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada para pengolah.
- Melakukan pengawasan yang baik sesuai dengan standart

29. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan adalah 15,98 dari target 16,24 sehingga masih belum mencapai target yang ditentukan.

Adapun kinerja yang mendukung peningkatan Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan, antara lain :

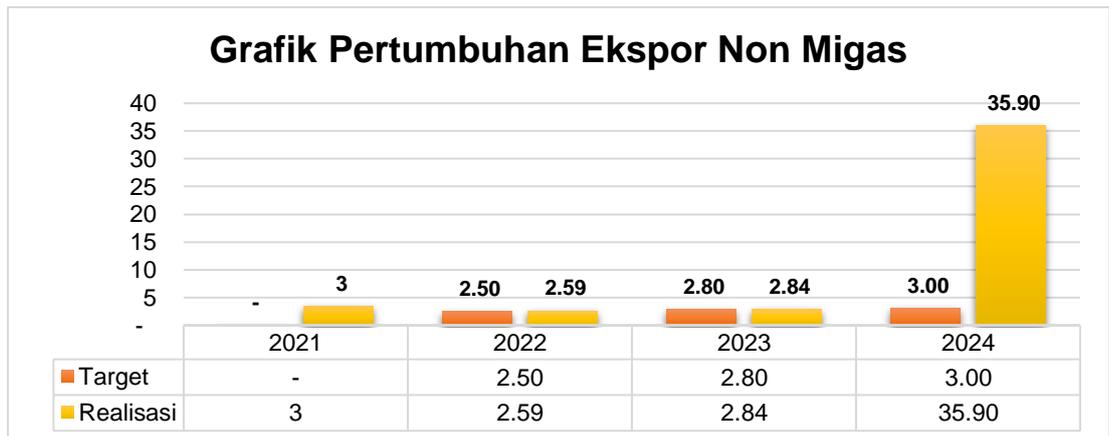


Pertumbuhan Ekspor Non Migas

Pada Tahun 2024, realisasi pertumbuhan ekspor non migas sebesar 35,9%, apabila dibandingkan dengan target 3%, maka tercapai 1.196%. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan. Pelampauan capaian target pertumbuhan Ekspor Non Migas yang signifikan dilatarbelakangi adanya peningkatan permintaan ekspor *Brown Paper* ke Negara Cina dan karena keterbatasan container maka produk dapat langsung diangkut ke kapal tanpa container. Perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, sebagaimana tabel berikut :

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	0	2,5%	2,8%	3%
Realisasi	3,4%	2,59%	2,84%	35,9%
Capaian	0	101,92%	101%	1.196%

Tren realisasi pertumbuhan ekspor non migas, sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya dari data diatas dilakukan analisa penyebab keberhasilan Hal-hal yang mengakibatkan dampak peningkatan Ekspor Non Migas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya permintaan dari negara-negara tujuan
2. Meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor
3. Melaksanakan program promosi produk-produk IKM dalam rangka peningkatan ekspor daerah
4. Pendampingan IKM memperoleh KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)



Upaya optimalisasi pencapai target kinerja meningkatkan ekspor :

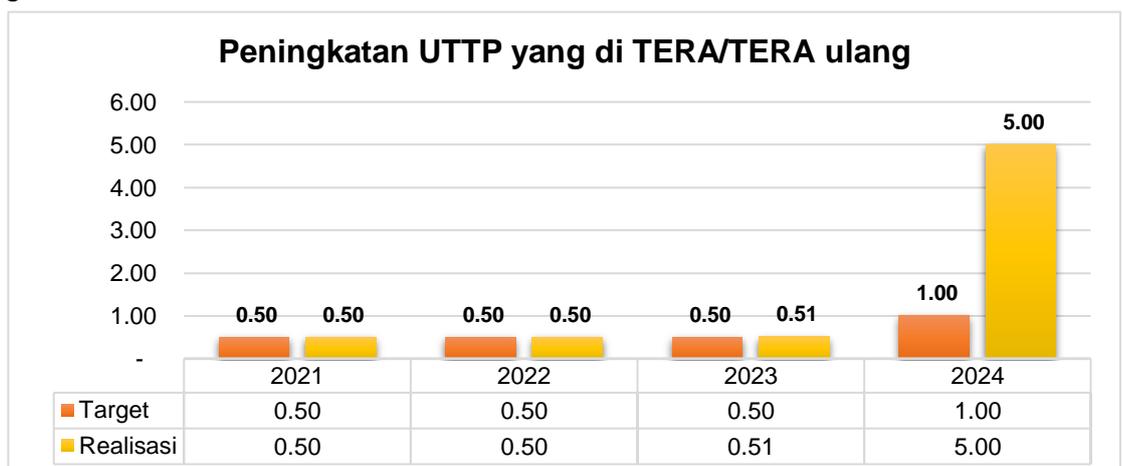
1. Melakukan Pameran dagang ditingkat Nasional Internasional terhadap produk unggulan Sidoarjo;
2. Melakukan pembinaan/pemberdayaan UMKM yang berorientasi Ekspor;
3. Meningkatkan citra produk dalam rangka meningkatkan kualitas produk unggulan ekspor;
4. Memberikan pelatihan ekspor bagi UKM/IKM untuk meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor

Persentase Peningkatan UTTP yang di Tera / Tera Ulang

Persentase peningkatan UTTP yang di tera/tera ulang Tahun 2024 sebesar 5% Dapat diketahui bahwa realisasi UTTP Tera/ Tera Ulang Tahun 2024 sebesar 12.934 UTTP atau meningkat sebesar 0,51% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 12.317 UTTP. Berikut adalah tren realisasi pertumbuhan UTTP yang di tera/tera ulang sebagaimana tabel berikut :

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	0,5%	0,5%	0,5%	1%
Realisasi	0,5%	0,5%	0,51%	5%
Capaian	0	100%	102%	500%

Tren realisasi peningkatan UTTP yang di TERA/TERA ulang, sebagaimana grafik berikut :





Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pasar

Jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 19 Pasar. Dinamakan dengan UPTD Pasar Daerah yang terbagi atas 4 (empat) Wilayah, antara lain :

- Wilayah Sidoarjo
- Wilayah Porong
- Wilayah Taman
- Wilayah Krian

Pada Tahun 2024, hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan pasar mendapatkan hasil **98,31 (Sangat Baik)**. Hal ini mengalami peningkatan dari hasil SKM Pelayanan Pasar Tahun 2023 dengan hasil 97,6 (Sangat Baik). Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan pasar merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan pasar dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan baik dari pengelola pasar maupun pedagang pasar.

Salah satu aspek yang dijadikan tolak ukur adalah perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat yang masuk dalam 44 kriteria pasar SNI, yaitu :

1	Jumlah Pedagang yang terdaftar	23	Tinggi anak tangga
2	Ukuran luas ruang dagang	24	Tinggi meja tempat berjualan
3	Jumlah pos	25	Akses untuk kursi roda
4	Zonasi	26	Jalur evakuasi
5	Area parkir	27	Tabung pemadam kebakaran
6	Area bongkar muat barang	28	Hidran air
7	Akses keluar masuk kendaraan	29	Pengujian kualitas air bersih
8	Lebar koridor	30	Pengujian limbah cair
9	Kantor pengelola	31	Ketersediaan tempat sampah
10	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara laki2 dan perempuan)	32	Alat angkut sampah
11	Jumlah toilet pada satu lokasi	33	TPS sementara
12	Tempat menyimpan bahan pangan basah	34	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R
13	Tempat cuci tangan	35	Sarana telekomunikasi
14	Ruang menyusui	36	Informasi identitas pedagang
15	CCTV	37	Informasi kisaran harga
16	Ruang peribadatan	38	Informasi zonasi pasar
17	Ruang bersama	39	Prosedur kerja / sop
18	Pos kesehatan	40	Struktur pengelola



19	Pos keamanan	41	Jumlah pengelola
20	Area merokok	42	Pelaksanaan sidang tera/tera ulang
21	Ruang disinfektan	43	Program pengembangan pasar
22	Area penghijauan	44	Program pemberdayaan komunitas pasar

Dari 44 parameter kriteria Pasar SNI untuk Kabupaten Sidoarjo pada 19 Pasar Rakyat di Tahun 2020 terdapat 1 pasar yang ditetapkan sebagai Pasar SNI yaitu Pasar Sukodono, dan 2 pasar lainnya yang berparameter sangat tinggi adalah Pasar Porong dan Pasar Gedangan.

Upaya pembenahan pasar kearah pasar dengan para meter tinggi dan sangat tinggi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna pasar.

Pemenuhan Kriteria Pasar SNI

No	Kriteria Pemenuhan Target SNI Tahun	Jumlah Pasar	Rendah (10 Indikator)	Sedang (11-20 Indikator)	Tinggi (21-30 Indikator)	Potensi Sangat Tinggi (31-44 Indikator)
1	2021	19	0	10	6	3
2	2022	19	0	10	6	3
3	2023	19	0	10	6	3
4	2024	19	0	10	5	4

Pasar rakyat dengan parameter rendah adalah pasar rakyat yang memenuhi Kriteria Pasar SNI 1-10 indikator. Pada Tahun 2024 terdapat 10 Pasar yang berada pada parameter sedang, 6 Pasar yang berparameter tinggi, dan terdapat 4 pasar yang berparameter sangat tinggi yaitu Pasar Sukodono, Pasar Porong, Pasar Gedangan, dan Pasar Wonoayu.

Upaya yang dilakukan dalam rangka SKM layanan pasar meningkat:

1. Optimalisasi tertib pasar, keamanan dan kebersihan pasar dalam rangka memberikan kenyamanan pasar bagi para penjual dan pembeli;
2. Peningkatan atau perbaikan kualitas pelayanan
3. Melakukan inovasi-inovasi pelayanan atas masalah yang disampaikan masyarakat dan konsumen



30. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo bahwa Tahun 2024 Persentase kontribusi PDRB sektor industri adalah 48,57 dari target 53,19 sehingga masih belum mencapai target yang ditentukan. Adapun kinerja yang mendukung peningkatan Persentase kontribusi PDRB sektor industri, antara lain :

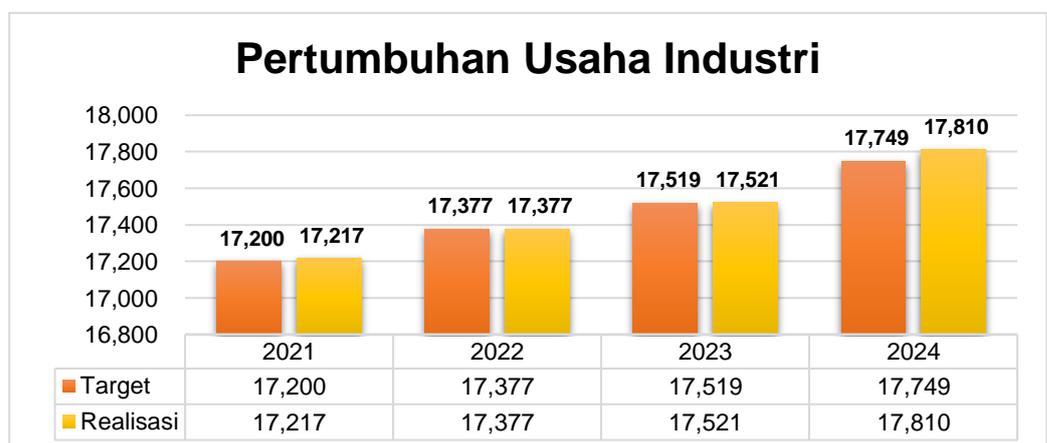
Persentase Pertumbuhan Usaha Industri

Capaian kinerja Persentase Pertumbuhan Usaha Industri pada Tahun 2024 telah mencapai target yaitu sebesar 1.65% atau sebanyak 871 IKM dari target 1.3% atau sebanyak 500 IKM. Presentase capaian sebesar 174%. Hal ini dikarenakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pendampingan IKM dan memberikan kemudahan pengurusan perizinan usaha industri melalui pemberian rekomendasi verifikasi teknis serta fasilitasi standarisasi bagi IKM.

Jumlah Industri Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sebanyak 17.810 unit/usaha. Jumlah ini meningkat 289 unit/usaha atau meningkat sebesar 3,4% dibandingkan dengan jumlah industri pada Tahun 2023 yang sebanyak 17.521 unit/usaha.

Berikut adalah tren realisasi pertumbuhan usaha industri sebagaimana tabel berikut :

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	1,52% (17.200 IKM)	0,93% (17.377 IKM)	1,1% (17.519 IKM)	1,3% (17.749 IKM)
Realisasi	1,98% (17.217 IKM)	0,93% (17.377 IKM)	1,75% (17.521 IKM)	3,4% (17.810 IKM)
Capaian	130.36%	100%	159%	261%



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo



Upaya untuk menumbuhkan usaha industri, yaitu :

- Melakukan fasilitasi pertumbuhan industri kecil dan menengah dalam rangka peningkatan kualitas produk;
- Memetakan pembangunan / pembentukkan *cluster* baru IKM dengan pendampingan dan pembinaan secara memadai serta memfasilitasi promosi/pameran dagang dalam rangka kestabilan produk dan menaikkan omzet;
- Pendekatan program fasilitasi pemerintah dalam standardisasi produk dan peningkatan kompetensi pelaku usaha agar memiliki daya saing yang cukup besar.

Selanjutnya dari data diatas dilakukan analisa penyebab keberhasilan. Upaya untuk menumbuhkan usaha industri, yaitu :

1. Melakukan fasilitasi pertumbuhan industri kecil dan menengah dalam rangka peningkatan kualitas produk;
2. Memetakan pembangunan / pembentukkan cluster baru IKM dengan pendampingan dan pembinaan secara memadai serta memfasilitasi promosi/pameran dagang dalam rangka kestabilan produk dan menaikkan omzet;
3. Pendekatan program fasilitasi pemerintah dalam standardisasi produk dan peningkatan kompetensi pelaku usaha agar memiliki daya saing yang cukup besar.

IKM naik kelas

IKM naik kelas adalah upaya yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendorong dan meningkatkan IKM agar mampu meningkatkan penjualan dan atau modal menjadi lebih tinggi. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing IKM juga agar mampu menembus pasar global serta dapat memenuhi permintaan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Pada Tahun 2024, IKM Naik kelas sebanyak 871 IKM, apabila dibandingkan dengan target 500 IKM, maka tercapai 174%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra Tahun 2026 dengan Target 700 IKM, maka pada Tahun 2024 sudah tercapai nilai 871 IKM dengan persentase capaian sebesar 124,42%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, sebagaimana tabel berikut :



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	-	300 IKM	400 IKM	500 IKM
Realisasi	-	300 IKM	401 IKM	871 IKM
Capaian	-	100%	100,3%	174%



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo

Upaya untuk memperbanyak IKM yang naik kelas, yaitu :

- Fasilitasi pelatihan desain produk, sertifikasi produk, inovasi produk, dan sistem manajemen mutu produk bagi IKM;
- Fasilitasi Standarisasi Produk IKM.

Berikut upaya untuk memperbanyak IKM yang naik kelas Tahun 2024 :

No.	Nama Kegiatan	Realisasi
1	Pendaftaran Merek	92 IKM
2	Pengujian Laboratorium Produk IKM	38 IKM
3	Pemberian Surat Keterangan IKM	90 IKM
Total		220 IKM

31. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Pada Tahun 2024 Indeks Inovasi Daerah ditargetkan mendapat predikat Sangat Inovatif dan berdasarkan hasil penilaian indeks inovasi daerah Tahun 2024,



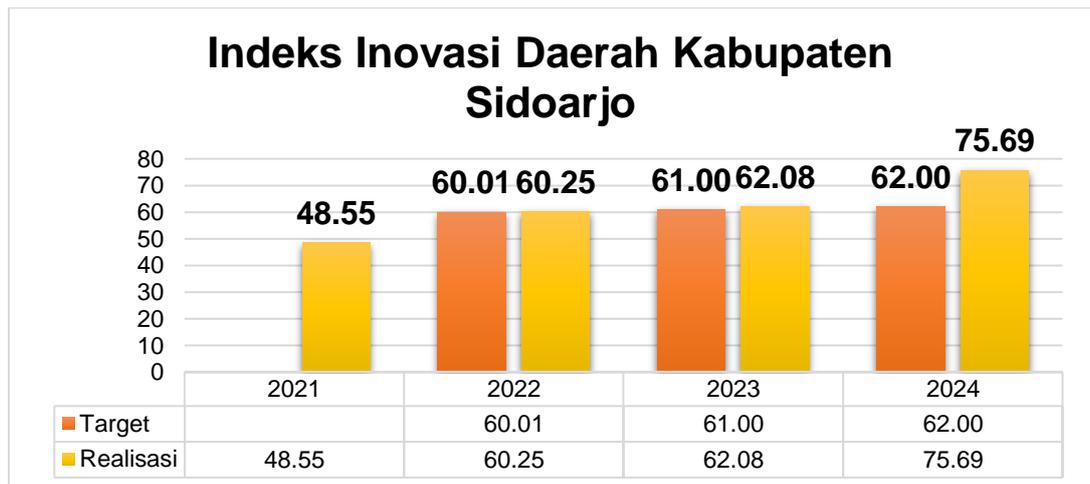
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Kabupaten Sidoarjo mendapatkan kategori Sangat Inovatif. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Kabupaten Sidoarjo mendapat kategori Sangat Inovatif berturut-turut.

Berikut perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo :

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	SANGAT INOVATIF	SANGAT INOVATIF	SANGAT INOVATIF	SANGAT INOVATIF
Realisasi	INOVATIF	SANGAT INOVATIF	SANGAT INOVATIF	SANGAT INOVATIF

Apabila digambarkan dalam grafik, sebagai berikut :



Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Inovasi Daerah Tahun 2024

Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 dengan realisasi nilai 75,69 (Sangat Inovatif) dari target nilai 62,00 (Sangat Inovatif), dengan persentase sebesar 122,08%. Jika dibandingkan dengan target nilai pada akhir periode Renstra Tahun 2026 dengan target nilai 64,00 (Sangat Inovatif), maka pada Tahun 2024 sudah tercapai dengan persentase capaian sebesar 118,27%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena admin daerah terus melakukan pendampingan terhadap inovasi yang dilaporkan melalui aplikasi IID Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.



Sedangkan perkembangan jumlah inovasi melalui partisipasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :



Partisipasi PD dalam pelaporan inovasi meningkat setiap tahun, sebagai berikut :

Tahun	Persentase Partisipasi
2021	75%
2022	85,71%
2023	87,76%
2024	95,92%

Upaya untuk optimalisasi pelaporan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Inovasi
Meningkatkan 16 Kabupaten Terinovatif mengirimkan 200 inovasi
2. Menciptakan Iklim Inovasi yang Kondusif
3. Meningkatkan Partisipasi Inovator
Menjadikan KISI sebagai agenda rutin tahunan dan wadah inovator mengaktualisasikan diri dan menyediakan stok inovasi daerah
4. Menjaga Keberlanjutan Inovasi
Inovasi yang telah diterapkan didorong untuk terus melakukan *update/upgrade*.



C. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2024

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan. Program prioritas dimaksud, merupakan langkah percepatan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026. Adapun Program Prioritas dimaksud, hasil keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru

Prioritas dimaksud bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, baik melalui pencetakan wirausaha baru dari hasil pelatihan kerja, maupun penempatan tenaga kerja melalui lowongan usaha / bursa kerja / perjanjian kerja.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

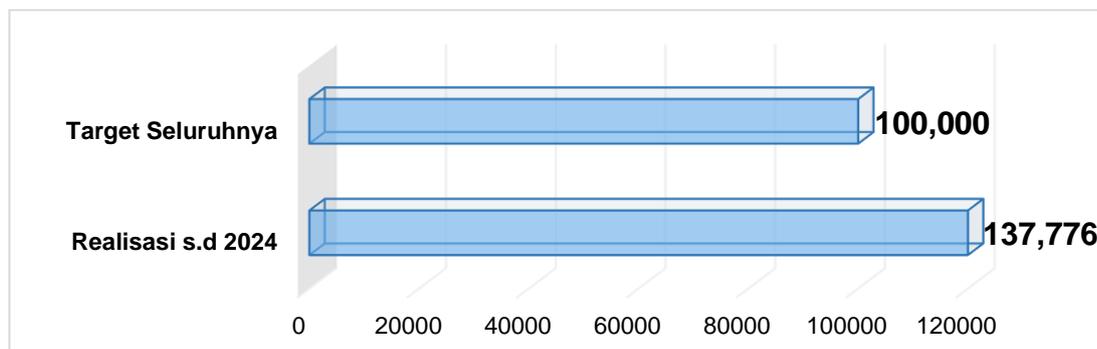
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	AKUMULASI (2021 s.d 2024)	Target Tahun 2025
18.447 Lapangan Kerja	31.701 Lapangan Kerja	41.649 Lapangan Kerja	45.979 Lapangan Kerja	137.776 Lapangan Kerja	25.300 Lapangan Kerja

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :





Pelaksanaan Program Prioritas dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Dengan adanya penciptaan Lapangan Kerja Baru maka berdampak pada menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo yang pada Tahun 2024 mencapai angka 6,49% menurun dari Tahun 2021 10,87%.



Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 100.000 Lapangan Kerja Baru, sampai dengan Tahun 2024 sudah melebihi dari target yakni 137.776 Lapangan Kerja Baru, sehingga Program Prioritas telah tercapai bahkan melebihi dari yang ditargetkan.

Adapun 47.040 Lapangan Kerja Baru di Tahun 2024, meliputi :

- a) Antar Kerja Lokal (AKL)
- b) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
- c) Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga

Prioritas dimaksud bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, serta kemudahan akses pelayanan kesehatan yang merata.

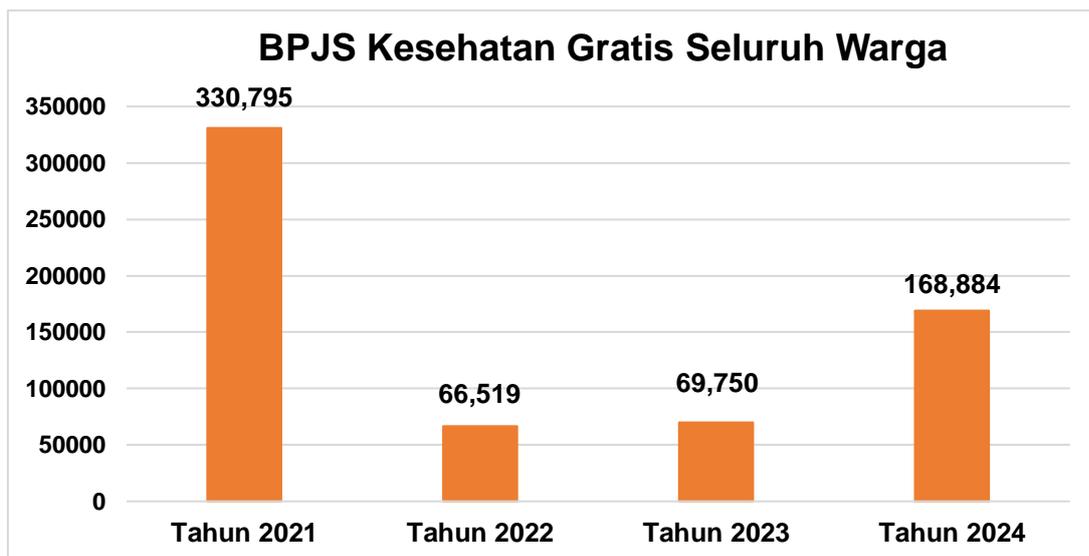
Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
330.795 Orang	66.519 Orang	69.750 Orang	153.085 Orang (UHC non cut off)	168.884 Orang	200.700 Orang

UHC non cut off dimaksud adalah masyarakat yang memiliki KTP Sidoarjo dapat didaftarkan melalui mekanisme yang dilakukan Dinas Sosial dan kepesertaannya bisa langsung aktif tanpa harus melewati masa tunggu.



Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Kesehatan. Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Usia Harapan Hidup, yang pada tahun 2024 mencapai 75,63 tahun meningkat dari Tahun 2021 yang masih mencapai angka 74,06 tahun.

Sebanyak 168.884 jiwa warga Sidoarjo yang tercover BPJS Kesehatan gratis masuk dalam segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBBU) dan bukan pekerja Pemerintah Daerah. Mereka mendapatkan hak rawat kelas tiga di rumah sakit yang menerima pasien BPJS Kesehatan. Pada Tahun 2024 terdapat 23 rumah sakit di Sidoarjo yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dari 32 rumah sakit yang ada.

3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin

Prioritas dimaksud bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu berupa pemberian makanan dan minuman gratis yang diberikan kepada penduduk miskin (PMKS Lansia Terlantar). Dalam pelaksanaan program prioritas ini didukung oleh Dinas Sosial.

Capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
730 orang per hari 2 kali makan	730 orang per hari 2 kali makan	800 orang per hari 2 kali makan	800 orang per hari 2 kali makan	800 orang per hari 2 kali makan



Sebanyak 800 orang miskin di Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan makan gratis dengan gizi lengkap setiap hari 2 kali dalam sehari senilai Rp. 15.000,-. Keberhasilan kinerja berdampak pada menurunnya Angka Kemiskinan, yang selalu menurun dari Tahun 2021 5,93% pada Tahun 2024 menjadi 4,53%

Pemberian makanan gratis diberikan kepada PMKS Lansia Terlantar yang terdata pada database Dinas Sosial melalui BERKAT SAYANG. Makanan yang disajikan sudah memenuhi unsur gizi dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan.

4. 10.000 Beasiswa Kuliah

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pemberian beasiswa untuk : pemuda berprestasi, mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan, dan mahasiswa dari keluarga miskin.

Beasiswa diberikan untuk 3 sasaran, yaitu :

1. Untuk penduduk miskin
2. Untuk penduduk yang berprestasi di bidang keagamaan
3. Untuk pemuda berprestasi.

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan sasaran beasiswa, yaitu untuk pemuda berprestasi yang kuliah di Luar Negeri.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Target	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Akumulasi (2021 s.d 2024)	Target 2025
Jumlah penduduk miskin yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	497 orang	493 orang	503 orang	502 orang*	1.482 orang	530 orang
Jumlah pemuda berprestasi yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	999 orang**	2.999 orang	1.000 orang
Jumlah pemuda berprestasi bidang keagamaan yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	357 orang	650 orang	500 orang	497 orang	1.504 orang	500 orang
Jumlah pemuda berprestasi yang berkuliah di luar negeri, menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	-	-	20 orang	15 orang	35 orang	10 orang
TOTAL	1.854 orang	2.143 orang	2.023 orang	2.028 orang	6.020 orang	2.030 orang

*1 terdapat double name

**1 mengundurkan diri

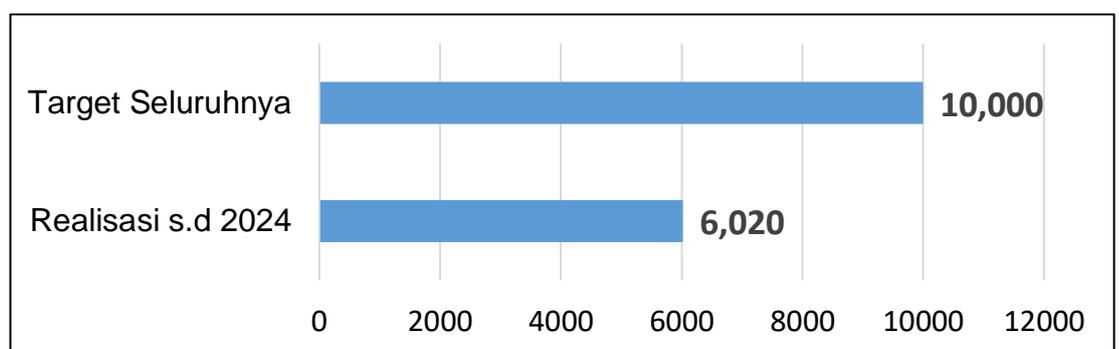
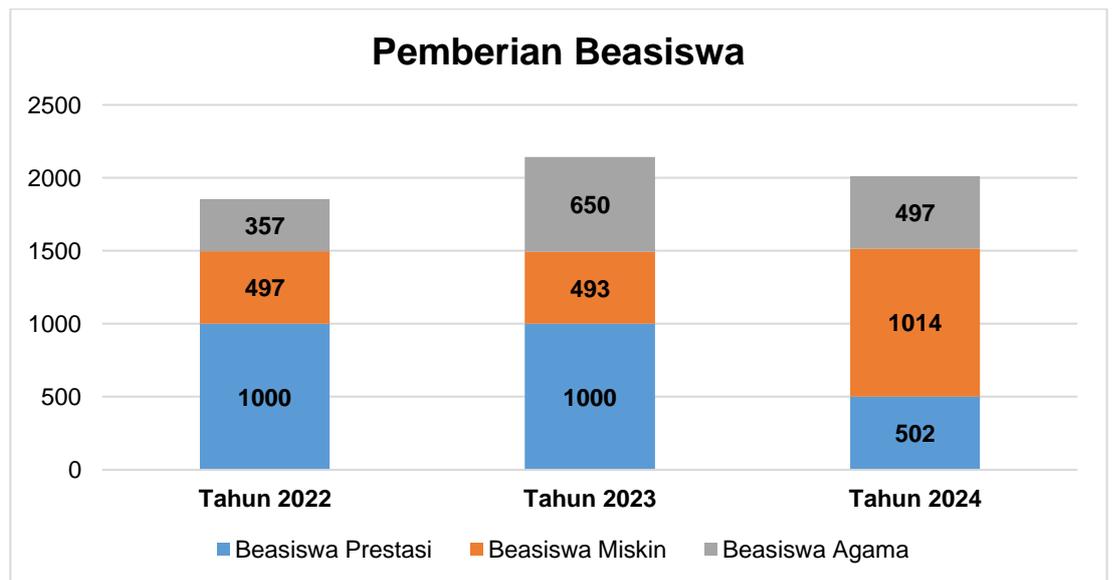


Pelaksanaan program prioritas ini dilaksanakan oleh 3 Perangkat Daerah, yaitu :

- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- Dinas Sosial; dan
- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Tahun 2021 mencapai 80,65 dan pada Tahun 2024 mencapai 82,67 yang merupakan angka tertinggi untuk Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Adapun dari target yang ditetapkan sebanyak 10.000 Beasiswa, sampai dengan Tahun 2024 sudah diberikan 6.020 Beasiswa, sehingga masih ada Gap 3.980 Beasiswa yang akan diberikan pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.



5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama

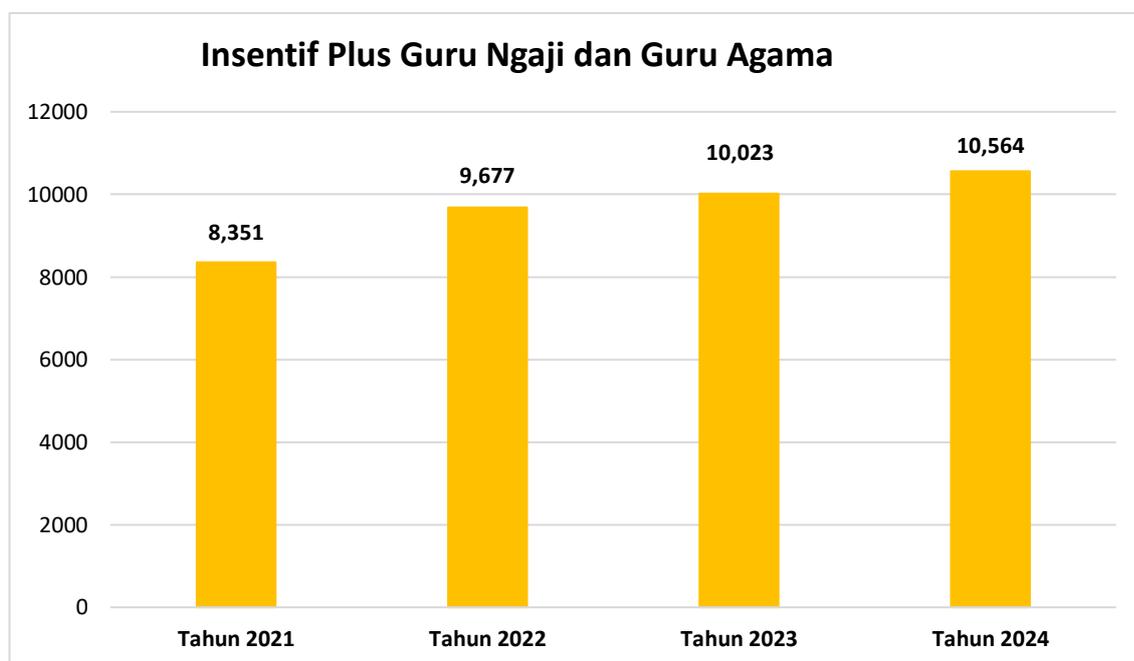
Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan masyarakat Sidoarjo melalui peningkatan kesejahteraan Guru Ngaji dan Guru Agama dengan memberikan insentif / tambahan penghasilan.

Capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
8.351 orang	9.677 orang	10.023 Orang	10.167 Orang	10.564 Orang	8.250 Orang

Pelaksanaan Program Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama, dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut berdampak pada meningkatnya Indeks Kesalehan Sosial, yang pada Tahun 2024 tercapai 87,33 meningkat dari Tahun 2021 yaitu 82,03.

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



6. Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan

Program ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro mandiri melalui pemberdayaan perempuan sebagai penggerak usaha mikro dengan pemberian modal usaha, yaitu dengan Program KURMA (Kartu Usaha Perempuan Mandiri).



Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
18.891 kelompok	2.993 kelompok	2.000 kelompok

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan monitoring tahun sebelumnya, di Tahun 2024 Program KURMA tidak dilaksanakan.

7. Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga Desa / Kelurahan melalui peran aktif RT dengan memberikan anggaran operasional.

Capaian pelaksanaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bulan	Jumlah RT	Jumlah RW	Insenstif RT	Insentif RW
Januari	8,037	1,900	4,018,500,000	950,000,000
Februari	8,040	1,900	4,020,000,000	950,000,000
Maret	8,039	1,900	4,019,500,000	950,000,000
April	8,039	1,899	4,019,500,000	949,500,000
Mei	8,040	1,899	4,020,000,000	949,500,000
Juni	8,040	1,899	4,020,000,000	949,500,000
Juli	8,040	1,900	4,020,000,000	950,000,000
Agustus	8,040	1,900	4,020,000,000	950,000,000
September	8,040	1,901	4,020,000,000	950,500,000
Oktober	8,040	1,902	4,020,000,000	951,000,000
November	8,040	1,902	4,020,000,000	951,000,000
Desember	8,040	1,902	4,020,000,000	951,000,000
Total			48,237,500,000	11,402,000,000



Pada tahun anggaran 2024, alokasi insentif diberikan untuk seluruh RT di Kelurahan se Kabupaten Sidoarjo, dengan memberikan insentif Rp.500.000,- setiap Bulan.

8. 20.000 UMKM Naik Kelas

Prioritas dimaksud bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan IKM agar naik kelas dengan memberi bekal pembinaan dan pelatihan.

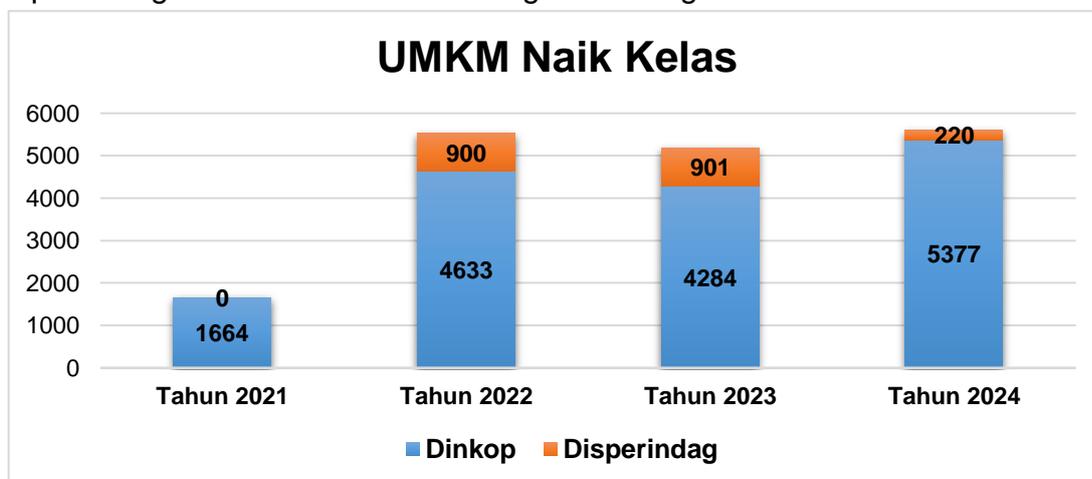
Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Total (2021-2024)	Target 2025
1.664 UMKM	5.533 UMKM Disperindag : 900 UMKM Dinkop : 4.633 UMKM	5.185 UMKM Disperindag : 901 UMKM Dinkop : 4.284 UMKM	4.340 UMKM Disperindag : 220 UMKM Dinkop : 4.000 UMKM	5.597 UMKM Disperindag : 220 UMKM Dinkop : 5.377 UMKM	17.979	5.422 UMKM Disperindag : 45 UMKM Dinkop : 5.377 UMKM

Pelaksana program prioritas ini adalah :

- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 20.000 UMKM yang Naik Kelas, sampai dengan Tahun 2024 sudah ada 17.979 UMKM yang naik kelas, sehingga masih ada Gap 2.021 UMKM yang akan diupayakan untuk naik kelas sampai sampai dengan Tahun 2026.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan UMKM Naik Kelas, diantaranya adalah :

No	Nama Kegiatan
1	Mengelola Bisnis Dengan Bijak : Pelatihan Manajemen Usaha
2	Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
3	Temu Kemitraan Usaha Mikro
4	Membangun Bisnis Sukses Melalui Pelatihan Kewirausahaan Batch 1
5	Membangun Bisnis Sukses Melalui Pelatihan Kewirausahaan Batch 2
6	Membangun Bisnis Sukses Melalui Pelatihan Kewirausahaan Batch 3
7	Membangun Bisnis Sukses Melalui Pelatihan Kewirausahaan Batch 4
8	Membangun Bisnis Sukses Melalui Pelatihan Kewirausahaan Batch 5
9	Strategi Digital Marketing Efektif Melalui Media Sosial
10	Mendongkrak Penjualan Online : Fotografi Produk untuk Pemasaran Digital yang Efektif
11	Pelatihan Manajemen Keuangan dan Promosi Usaha
12	Roadshow Sosialisasi dan Pendampingan Perijinan Usaha
13	Pelatihan Manajemen Usaha
14	Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha PKL
15	Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro Disabilitas
16	Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan bagi Pelaku Wirausaha Baru (WUB) Kecamatan Balongbendo
17	Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan bagi Pelaku Wirausaha Baru (WUB) Kecamatan Candi
18	Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan bagi Pelaku Wirausaha Baru (WUB) Kecamatan Gedangan
19	Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan bagi Pelaku Wirausaha Baru (WUB) Kecamatan Krembung
20	Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan bagi Pelaku Wirausaha Baru (WUB) Kecamatan Krian
21	Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan bagi Pelaku Wirausaha Baru (WUB) Kecamatan Prambon
22	Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan bagi Pelaku Wirausaha Baru (WUB) Kecamatan Tanggulangin
23	Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan bagi Pelaku Wirausaha Baru (WUB) Kecamatan Sidoarjo
24	Bimtek dan Pelatihan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
25	Pelatihan manajemen dan keuangan sederhana bagi usaha mikro dan PKL Kecamatan Jabon
26	Pelatihan WUB Menuju Entrepeneur Unggulan Usaha Mikro (Gelombang 1) Kabupaten Sidoarjo
27	Pelatihan WUB Menuju Entrepeneur Unggulan Usaha Mikro (Gelombang 2) Kabupaten Sidoarjo
28	Pelatihan manajemen dan keuangan sederhana bagi usaha mikro dan PKL Kecamatan Tulangan Kecamatan Tulangan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

29	Pelatihan Kewirausahaan Usaha Mikro dan Peningkatan Mutu Produksi Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
30	Bimtek Pembinaan dan Manajemen Wirausaha Baru dan Pelatihan Batik Klasik
31	Kegiatan Optimalisasi Instagram bagi Mitra Pasar Retail Modern
32	Kurasi Produk Gel I
33	Kurasi Produk Gel II
34	Pelatihan Bahan Tambahan Pangan
35	Pelatihan Bahan Tambahan Pangan Kue Kering/Cookies
36	Pelatihan Bahan Tambahan Pangan Sambal & Bumbu
37	Pelatihan Digital Marketing Kecamatan Sukodono
38	Pelatihan Digital Marketing Kecamatan Sukodono Gel 1
39	Pelatihan Digital Marketing Kecamatan Sukodono Gel 2
40	Pelatihan Inkubasi Bisnis
41	Pelatihan Kurasi Mutu Produk
42	Pelatihan Pemanfaatan Bahan Tambahan Pangan
43	Pelatihan Pemasaran Gelombang 1
44	Pelatihan Pemasaran Gelombang 2
45	Pelatihan Pemasaran melalui Google
46	Pelatihan Pemasaran Online
47	Pelatihan Pemasaran Produk secara Online Gelombang III
48	Pelatihan Pemasaran Produk secara Online Kecamatan Sukodono Gelombang III
49	Pelatihan Pemasaran Produk secara Online Kecamatan Waru Gel III
50	Pelatihan Pemasaran Produk secara Online Kecamatan Waru Gel 1
51	Pelatihan pengemasan dan desain Kec Balongbendo
52	Pelatihan pengemasan dan desain Kec Bbuduran
53	Pelatihan pengemasan dan desain Kec Porong
54	Pelatihan pengemasan dan desain Kec Sedati
55	Pelatihan pengemasan dan desain Kec Tanggulangin
56	Pelatihan Pengemasan Gelombang 1
57	Pelatihan Pengemasan Gelombang 2
58	Pelatihan Pengemasan Gelombang III
59	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro Gel I
60	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro Gel. II
61	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro Melalui Perhitungan HPP bagi usaha Makanan dan Minuman
62	Pemanfaatan Bahan Tambahan pangan untuk frozen food
63	Pemanfaatan Bahan Tambahan pangan untuk Makanan
64	Pemanfaatan Bahan Tambahan pangan untuk Minuman
65	Pemasaran Produk secara Online 11 Juli 2024 (Musrenbang) Kecamatan Sidoarjo & Buduran
66	Pemasaran Produk secara Online 15 Juli 2024 (Musrenbang) Kecamatan Tanggulangin dan Prambon
67	Pemasaran Produk secara Online 18 Juli 2024 (Musrenbang) Kecamatan Krian dan Wonoayu
68	Pemasaran Produk secara Online 22 Juli 2024 (Musrenbang) Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Taman



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

69	Pemasaran Produk secara Online 23 Juli 2024 (Musrenbang) Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Taman
70	Pemasaran Produk secara Online 25 Juli 2024 (Musrenbang) Kecamatan Balongbendo
71	Pengembangan Usaha Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
72	Rapat Koordinasi Pengembangan Usaha Melalui Pelatihan Pemasaran Produk secara Online (Taman)
73	Sedekah Ilmu Pemasaran Digital Menggunakan Tiktok
74	Sedekah Ilmu Pemasaran Produk secara online
75	Sedekah Ilmu Pengemasan/Packaging
76	Sedekah Ilmu Pengemasan/Packaging 2
77	SKKNI Perancangan Pemasaran Online

IKM dari Kabupaten Sidoarjo yang sudah menembus pasar ekspor ada 100 IKM, yaitu :

No	Nama Perusahaan	Perusahaan
1	CV. Anugerah Mitra Abadi	CV
2	PT.AMERTA KARYA NUSANTARA	PT
3	Keripik Pisang Chipmonk	UD / UKM
4	CV Rumah Matahari Pagi	CV
5	Runi's Collection	UD / UKM
6	Berkah Jaya Food	UD / UKM
7	Sambal Mom joun	UD / UKM
8	Glow Kitchen	UD / UKM
9	Batik Azizah	UD / UKM
10	Indra Jaya Sukses	UD / UKM
11	Java Rizky Kurnia	PT
12	KREASI BU KRIS	PT
13	Riki Utama Mandiri	UD / UKM
14	Koperasi Konsumen Mina Raharja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	UD / UKM
15	Madu Sanad	UD / UKM
16	YUGI FAMILY HOME	UD / UKM
17	BeeSmart Solusi Media	CV
18	MIZ TITIN	UD / UKM
19	UD. LAILA	UD / UKM
20	Christi	CV
21	Avidah	UD / UKM
22	PT. SARI BHUWANA NUSAJAYA	PT
23	Mandiri Jaya Prima	PT
24	PT. Agribumi Raya Indonesia	PT
25	Rajawali Mitra Anugerah	UD / UKM
26	Dapur Bunda Vivi	UD / UKM
27	CV. Rumah Matahari Pagi	CV
28	UD zyllan	UD / UKM



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

29	PT. Pitu Ganendra Bhadrika	PT
30	Dapoer naycha	UD / UKM
31	jajanan nda_Sha	UD / UKM
32	Galeri Raditajaya	UD / UKM
33	Nuhaa craft	UD / UKM
34	PT Lemooiin Jaya Abadi	PT
35	UD. Fanka Mandiri	UD / UKM
36	INDRA JAYA SUKSES	UD
37	PT SINAR BAHARI LAUTAN TIMUR INDONESIA	PT
38	PT MANDIRI JAYA PRIMA	PT
39	YAIYA SNACK AND CATERING	UKM
40	TALITHA	UKM
41	CV. SANGKURIANG	CV
42	CV. TRISIP	CV
43	UKM UMMU HAIDAR	UKM
44	UKM ANIS JAYA	UKM
45	UD WONG TANI	UD
46	PT. ANEKA KAKAO	PT
47	PT. LEMOOIN JAYA ABADI	PT
48	UKM AME.PY	UKM
49	UKM LASIFA	UKM
50	UD BADI JAYA	UD
51	UD MEGA BEDDING	UD
52	UKM PAWON YUK TI	UKM
53	UKM MAGUGA JAYA SIDOARJO	UKM
54	UKM BERKAH DALEM	UKM
55	UKM YUGI FAMILY HOME	UKM
56	UKM DAPOR NAYCHA	UKM
57	UKM PENTA FOODIES	UKM
58	UKM DAPUR CAKNING	UKM
59	UKM AMORYS	UKM
60	UKM MADU HONEY SYAIMA	UKM
61	UD GALERI RADITAJAYA	UD
62	UKM BAKULANE BUNBUND	UKM
63	UD. KENOBIE MULTI KARYA	UD
64	UD. TUHU NERO	UD
65	PT. ADI MADYA PANGESTU	PT
66	CV HYUNDHAIFA	CV
67	UKM BU PANOET	UKM
68	PT. RIZTHANA BARAKA ALMADDA	PT
69	PT. FISH CRISPY RIZ	PT
70	UD. KOPERASI SUMBER MULYO 5758	UD
71	PT. TRIKAYARASA JAYA FOOD	PT
72	SEMBILAN SEMBILAN	UD



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

73	PT. LEMOON JAYA ABADI	PT
74	KHANZA COOKIES AND FOOD	UD
75	UD. MBOKSEMI	UD
76	SUGYOOSAY MUTI	UD
77	SILETI	UD
78	D'RACIK	UD
79	SAMBAL ARTHUR	UD
80	INDRAJAYA SUKSES	UD
81	UD LALA SNACK	UD
82	DAPUR CIPTA MAKMUR	UD
83	BENING ASTAGINA	UD
84	MAMAKS BINTANG NUSANTARA	UD
85	PAWON 88	UD
86	UD SAFAAT KUE KERING	EVA NOVITA
87	ELVARETTE.ID	UD
88	WILYAH FOOD	UD
89	AY'S	UD
90	ALESHA	UD
91	UD. AMRIS	UD
92	KUPANG JAYA	UD
93	RAOSE ECO	UD
94	OMAH WEDANG AZZAMIN	UD
95	FISH CRISPY RIZ	UD
96	PAWON ZAF A AFZA	UD
97	USAHA MAK JAYA	UD
98	WANNA B FOOD	UD
99	WAWANG JAYA	UD
100	CV. TRISIP	CV

9. Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang memadai di Kabupaten Sidoarjo melalui : betonisasi jalan, pembangunan jalan pendamping (frontage road), pembangunan fly over, peningkatan sarana prasarana perhubungan, dan lain sebagainya.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Realisasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	1.290 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	16.132,20 meter



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Tahun 2022

Uraian Kegiatan	Realisasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	3.003,9 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	23.305 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	17 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	837 titik

Tahun 2023

Uraian Kegiatan	Realisasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	1.093 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	24.950,72 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	10 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	848 titik
Pembangunan Fly Over	Fly Over Juanda Fly Over Krian Fly Over Tarik

Tahun 2024

Uraian Kegiatan	Realisasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	2.391 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	28.909,55 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	17 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	420 titik



Target Tahun 2025

Uraian Kegiatan	Realisasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	700 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	11.333 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	6 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	604 titik

Pelaksanaan Program Prioritas dilaksanakan oleh :

- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Indeks Infrastruktur, yang pada Tahun 2024 mencapai 0,850 mengalami peningkatan yang tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang masih berada pada angka 0,793.

Pembangunan Frontage Road Waru – Buduran

Total Lahan yang telah dibebaskan adalah 20.181 m², dengan rincian per tahunnya sebagai berikut :

Pembebasan Lahan Frontage	
Tahun 2021	4.772 m ²
Tahun 2022	5.637 m ²
Tahun 2023	9.654 m ²
Tahun 2024	59 m ²

Total dari Tahun 2021 s.d Tahun 2024 telah dibangun Frontage Road sepanjang 7.777,9 meter, dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025
1.290 meter	3.003,9 meter	1.093 meter	2.000 meter	2.391 meter	700 meter



Betonisasi Jalan

Dari Tahun 2021 s.d Tahun 2024 telah dilakukan Pembangunan Betonisasi Jalan sepanjang 93.297,47 meter, dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025
16.132,20 meter	23.305 meter	24.950,72 meter	25.630 meter	28.909,55 meter	33.137 meter

Adapun pembangunan betonisasi jalan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tahun 2021

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
1	Peningkatan Jalan RT.4 dan 8 Desa Tambak Oso	Waru	181,60	4,00
2	Peningkatan Jalan Ruas jalan Banjarasri dari KUD Mina Dwisamudra ke Timur – Banjar Asri	Tanggulangin	250,00	5,00
3	Peningkatan Jalan Desa Tambak Sumur	Waru	259,70	7,00
4	Peningkatan Jalan Ngaban – Kedung Banteng (LJT)	Tanggulangin	602,50	5,00
5	Peningkatan Jalan Ganting – Wage (Desa Bohar) (LJT)	Gedangan - Taman	925,00	4,00
6	Peningkatan Jalan Betro – Damarsi (Desa Kwangsan) Ruas No 047	Sedati	968,00	5,00
7	Peningkatan Jalan Betro – Kalanganyar (LJT) (DAK)	Sedati	980,00	6,00
8	Peningkatan Jalan Kebon Agung – Kemasari (LJT)	Sukodono	1721,00	6,00
9	Peningkatan Jalan Wonoplintahan - Jedongcangkring	Prambon	2026,30	6,00
10	Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Road Waru Buduran	Waru Buduran	1580,00	Segmen 1a : 15; Segmen 1b : 15-10 ; Segmen 2a : 10; Segmen 2b-2d : 4,1 (kiri), 3,9(kanan)
11	Peningkatan Jalan Taruna Desa Wage	Taman	515,00	5,50
12	Peningkatan Jalan Jeruk s/d Jl. Mangga Desa Wage	Taman	352,00	4,00
13	Peningkatan Jalan Dsn Suko Legok RT 15 RW 05 Desa Suko	Sukodono	225,00	5,00
14	Peningkatan Jalan Kebon Agung – Sukodono (LJT) Pajak Rokok	Sukodono	676,00	7,00
15	Peningkatan Jalan Gedangan – Betro (LJT)	Gedangan	518,00	9,00



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

16	Peningkatan Jalan Mandala RW.04 dan RW.05 Desa Semambung	Gedangan	564,00	4,00
17	Pembangunan Jalan RW.5 - 6 Desa Semambung - Gedangan - Semambung	Gedangan	146,20	4,00
18	Peningkatan Jalan Tenggulunan - Sugihwaras (085) - Tenggulunan	Candi	437,50	4,00
19	Peningkatan Jalan Pilang – Sawo Cengkring (Pajak Rokok)	Wonoayu	750,00	5,00
20	Peningkatan Jalan Krembung - Kepadangan (LJT)	Krembung Tulangan	445,00	7,00
21	Peningkatan jalan Ds. Tebel s/d Ds. Kragan – Tebel	Gedangan	456,00	4,00
22	Peningkatan Jalan A. Yani depan Balai desa Medaeng	Waru	200,00	3,00
23	Peningkatan Jalan Aryo Bebahang (Desa Bahang RW 01, 03, 04)	Gedangan	262,00	5,50
24	Peningkatan jalan Sepanjang jalan mangga s/d jl gadung desa wage	Taman	116,90	4,00
25	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Banjarasri s/d Sentul - Sentul	Tanggulangin	765,50	5,00
26	Peningkatan Jalan Wadungasri - Tambaksumur	Waru	209,00	5,00
TOTAL JALAN BETON 2021			16.132,20	3,90 – 9,00

Tahun 2022

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
1	Ruas Jalan Pawindo – Jaticalang	Krian	639,00	5,5;11,33
2	Ruas Jalan Tulangan – Kepadangan, Kepadangan – Bulang, Simpang Tiga Tulangan	Tulangan	6.335,00	8,00
3	Ruas Jalan Betro - Kalanganyar (DAK)	Tulangan	922,40	6,00
4	Ruas Jalan Pilang - Tulangan	Tulangan	1020,10	8;6
5	Ruas Jalan Kebonagung - Kemasari	Sedati	5.099,50	6,00
6	Ruas Jalan Pabean - Wadungasri	Tulangan	532,00	6;8;9
7	Ruas Jalan Krian - Kemangsen	Sukodono	476,20	7,00
8	Ruas Jalan Pabean - Ngingas	Sedati	835,00	5,00
9	Ruas Jalan Wonoayu - Candinegoro	Krian	875,00	5,00
10	Ruas Jalan Panjunan - Suko (DAK)	Waru	1.855,60	3,50-4,00
11	Ruas Jalan Panjunan - Suko	Wonoayu	556,00	4,00
12	Ruas Jalan Krembung - Kepadangan	Sukodono	469,80	7,00
13	Ruas Jalan Semambung -Sedatigede (Ljt)	Sukodono	302,50	4,00
14	Ruas Jalan Tenggulunan - Sugihwaras (Ljt)	Krembung	217,40	3,5-3,9
15	Ruas Jalan Durungbedug - Sidodadi	Gedangan	887,20	5,00
16	Jalan Akses Ex Tol Menuju Tlocor	Candi	150,36	7;8
17	Ruas Jalan Sidorejo - Barengkrajan	Candi	576,9	8;10
18	Ruas Jalan Desa Tambak Sawah RT.03 RT.04 Rw.02, Kab. Sidoarjo, Waru, Tambaksawah	Jabon	1.969,00	5,00



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

19	Ruas Jalan Masanganwetan Menuju Dusun Wagir, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Masanganwetan	Gedangan - Buduran	502,00	5,00
20	Ruas Jalan Sepanjang Jalan RT 13, 14, 15, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Suko	Krian	133,00	3,50
21	Ruas Jalan Sepanjang Jalan Suko RT 15 RW 05, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Suko	Waru	118,75	5,51
22	Pembangunan Gorong-Gorong Desa Kali Tengah RT.01 RW.01, Kab. Sidoarjo, Tanggulangin, Kalitengah	Sukodono	105,00	5,50
23	Jalan Desa Tulangan-Medalem, Kab. Sidoarjo, Tulangan, Tulangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Sukodono	205,00	4,00
24	Jalan Dusun Sangangewu RT 04 RW 01, Kab. Sidoarjo, Tanggulangin	Sukodono	318,30	3,00
25	Jalan Masanganwetan RT 03 Menuju Masangankulon, Kab. Sidoarjo, Masanganwetan	Tanggulangin	183,50	3,52
26	Jalan Ngingas, Waru	Tulangan	81,40	4,03
27	Ruas Jalan Gedangan - Betro	Tanggulangin	924,00	3,20
28	Peningkatan Jalan Gedangan- Betro (Pemenang Kedua)	Sukodono	531,00	8,00
TOTAL JALAN BETON 2022			26.820,91	3 - 11,33

Tahun 2023

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
1	Peningkatan Jalan Kwangsari (Ljt)	Sedati	sgmn1 =475 sgmn2 =391,5	5,00
2	Peningkatan Jalan Banjarsari – Damarsi	Buduran	1.833,42	5,00
3	Peningkatan Jalan Tulangan - Durungbedug	Candi	1.597,70	4,00
4	Peningkatan Jalan Tropodo I	Waru	933,50	4,00
5	Peningkatan Jalan Krembung – Mojaruntut (DAK)	Krembung	sgmn1 =1251,2 sgmn2 =791,3 (aspal), 100,7 (rigid)	5,6
6	Peningkatan Jalan Banjarpanji, Tanggulangin	Tanggulangin	950,00	4,50
7	Peningkatan Jalan Geluran – Suko	Taman	sgmn 1 =1057,1 sgmn2 =498,3	4; 4,4; 6; 7
8	Peningkatan Jalan Bringinbendo – Tanjungsari (DAK)	Taman	705,5	5,00
9	Peningkatan Jalan Tarik – Mlirip	Tarik	5.698,8	5,00
10	Peningkatan Jalan Desa Krembung Kab. Sidoarjo (Ulang)	Taman	29,00	5,00
11	Peningkatan Jalan Semambung I Kab. Sidoarjo	Wonoayu	128,00	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

12	Juwetkenongo – Krembung (Realisasi IJD PJBH JS 2 2023)	Krembung	Krembung 2 = 4+150 S/D 9+578 = 5,428 meter Krembung 1 = 1+383 s/d 4+150 dan 9+578 s/d 10+684 = 3873 meter	7,50
TOTAL JALAN BETON 2023			24.950,72	3,04 - 8,00

Tahun 2024

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
1	Peningkatan Jalan Bakungpringgondani – Penambangan (DAK)	Balongbendo	2.523,10	4,00 - 5,00
2	Peningkatan Jalan Banjarsari, Tanggulangin	Tanggulangin	1.017,60	5,00
3	Peningkatan Jalan Banjarsari - Dukuhtengah (LJT)	Buduran	1.886,00	3,04 - 6,5
4	Peningkatan Jalan Barengkrajan - Ngelom (DAK)	Krian	2.450,00	5,00
5	Peningkatan Jalan Bringinbendo - Sidodadi	Taman	856,00	3,70 - 4,00
6	Peningkatan Jalan Candinegoro - Terungkulon	Wonoayu	1.961,75	5,00
7	Peningkatan Jalan Desa Bakungpringgodani	Balongbendo	893,70	4,00
8	Peningkatan Jalan Dukuhsari - Semambung	Jabon	1.731,00	STA 0+000-0+350 = 4,50 STA 0+350-1+700 = 5,00
9	Peningkatan Jalan dusun delik desa seduri s/d dusun girang desa wonokupang	Balongbendo	1.994,70	3,70 - 4,00
			784,53	4,00
10	Peningkatan Jalan Kludan - Tulangan	Tulangan	1.280,70	8,00
11	Peningkatan Jalan Masanganwetan - Sukodono (DAK)	Sukodono	2.620,00	6,00
12	Peningkatan Jalan Modong - Grabagan (DAK)	Tulangan	3.521,50	3,10 - 4,00
13	Peningkatan Jalan Pabean - Semampir (Jalan. KH. Husein)	Sedati	537,87	3,70 - 5,00
14	Peningkatan Jalan Pilang - Sawocangkring	Wonoayu	1.339,40	5,00
15	Peningkatan Jalan Tebel - Gemurung	Gedangan	937,00	4,00
16	Peningkatan Jalan Wage (Jalan Jeruk dan Jalan Mangga)	Taman	Panjang = 83,7m (Mangga S1), 392,2 (Mangga S2), 378,8 (Jeruk)	4,00
		Gedangan		
17	Peningkatan Jalan Wonoplintahan - Jedongcangkring (LJT)	Prambon	1.720,00	6,00
TOTAL JALAN BETON 2024			28.909,55	3,04 - 8,00

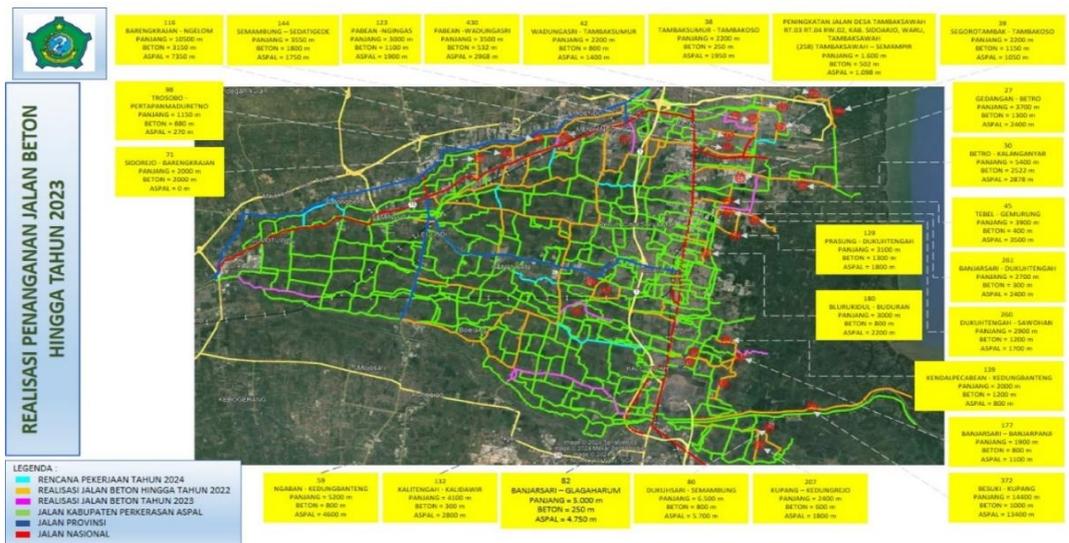
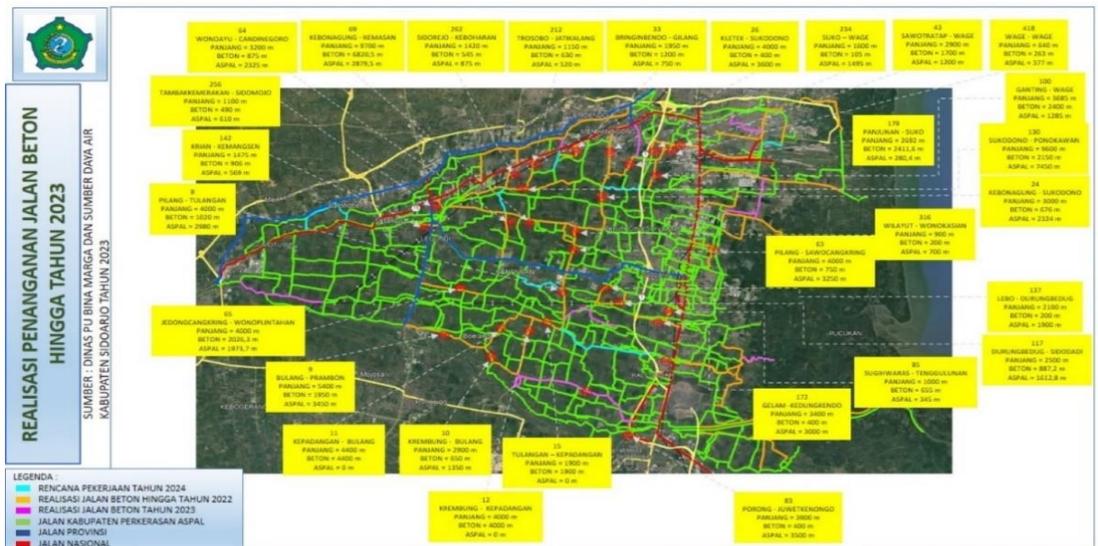


LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Dengan semakin masifnya pembangunan betonisasi jalan, maka persentase jalan dengan kondisi mantap di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2024 mencapai angka 95,87%. Angka tersebut masih akan terus naik dengan adanya target betonisasi jalan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, yang antara lain meliputi :

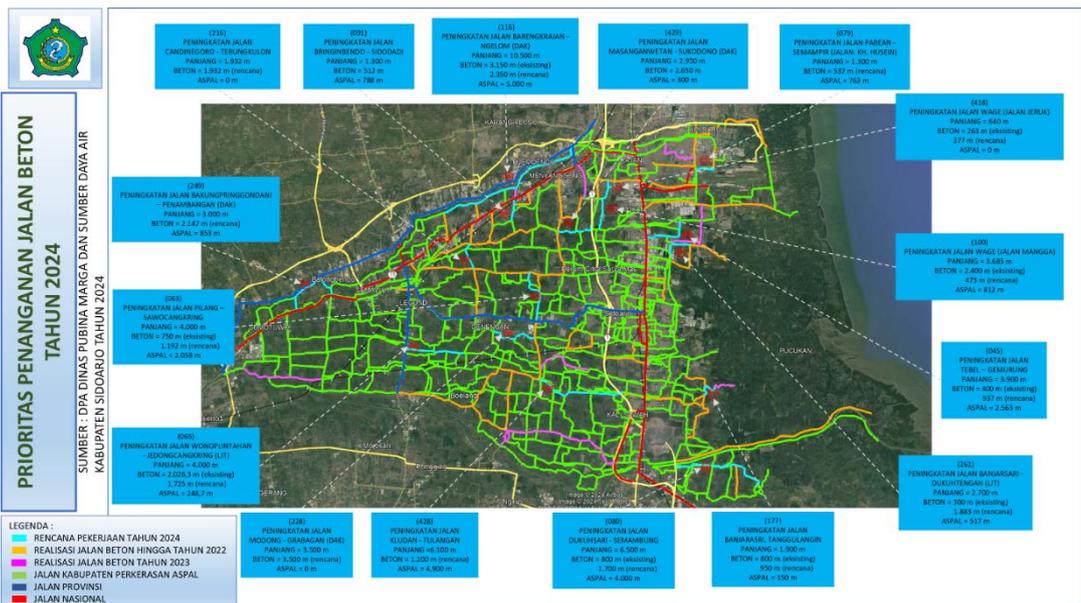
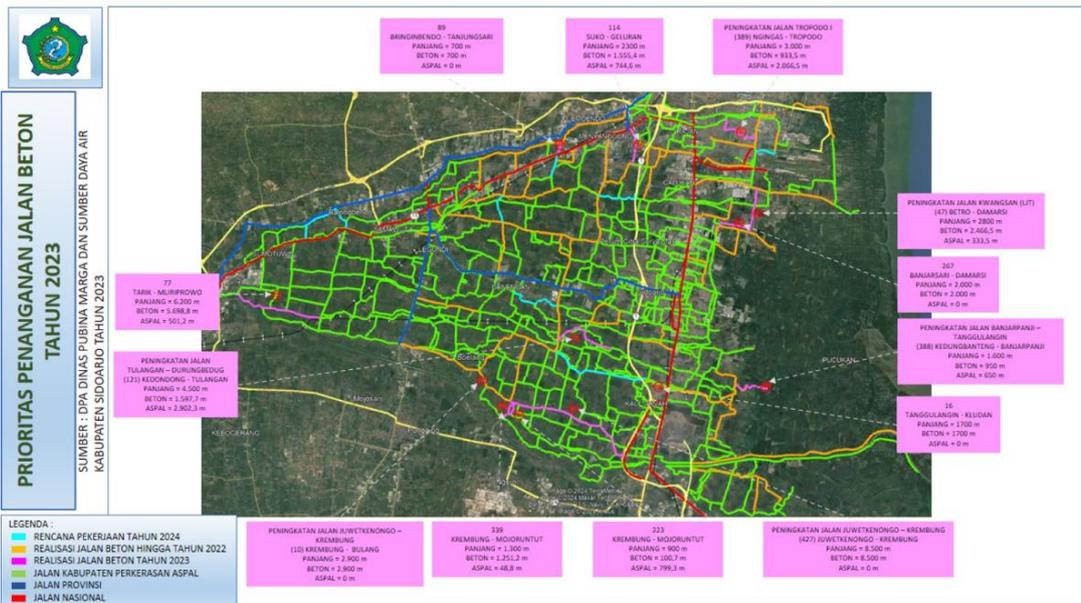
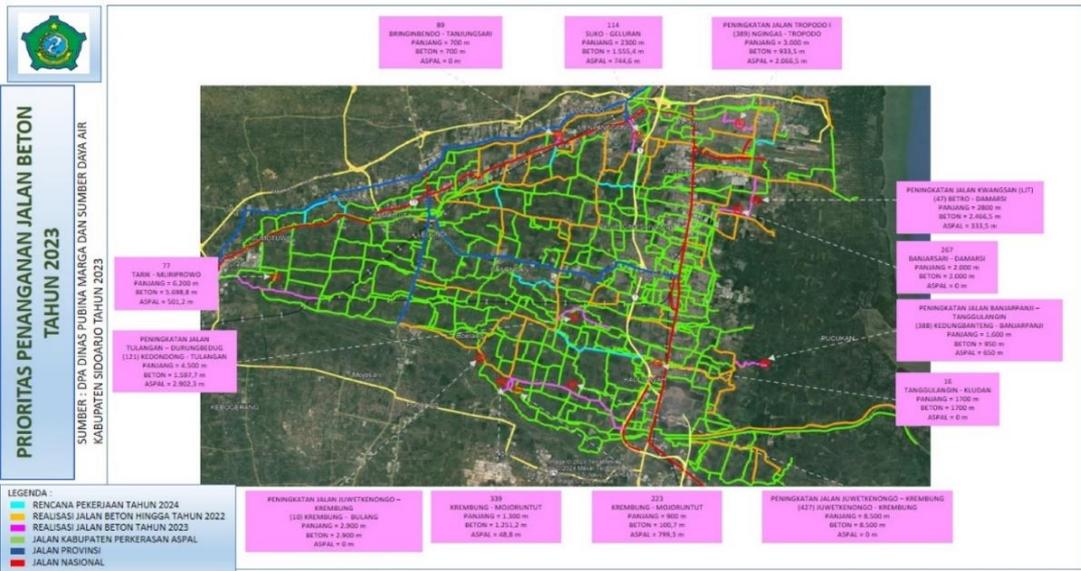
1. Peningkatan Jalan Buduran – Sidokeping
2. Peningkatan Jalan Gedangan – Betro (LJT)
3. Peningkatan Jalan Kureksari - Kepuhkiriman
4. Peningkatan Jalan Pabean - Ngingas (LJT)
5. Peningkatan Jalan Sidodadi - Bringinbendo
6. Peningkatan Jalan Wadungasri - Tambaksawah

Berikut peta Penanganan Jalan Beton sampai dengan Tahun 2024 :



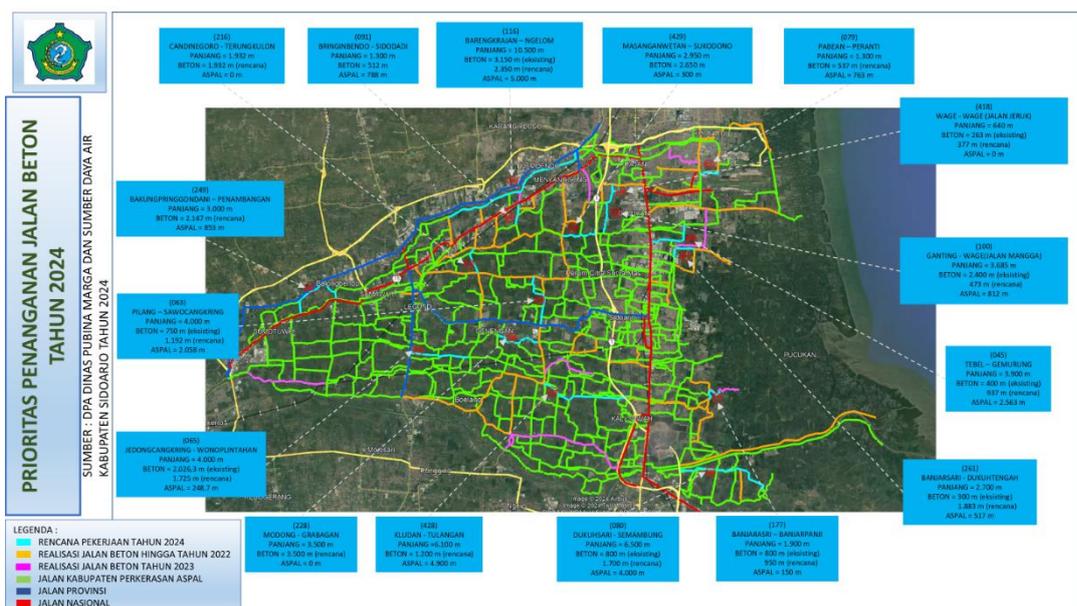


LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024





LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024



10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kader posyandu dengan memberikan honorarium bulanan dan pembinaan.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Kader Posyandu	Tenaga Kesehatan
Tahun 2021	606 kader	(belum ada pemberian)
Tahun 2022	7.198 kader	133 nakes
Tahun 2023	12.579 kader	210 nakes
Target Tahun 2024	12.633 kader	225 nakes
Realisasi Tahun 2024	12.633 kader	185 nakes
Target Tahun 2025	12.794 kader	225 nakes

Penurunan jumlah data penerima Tahun 2024 disebabkan karena tenaga kesehatan yang telah tercatat sebelumnya telah mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintah/ swasta, sehingga mereka tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima insentif tenaga kesehatan di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2024.



Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Usia Harapan Hidup, yang pada Tahun 2024 mencapai 75,63 tahun meningkat dari Tahun 2023 yang masih mencapai angka 75,36 tahun.

Insentif yang diberikan kepada nakes sebesar Rp. 250.000,- per bulan yang diterima langsung per semester sebesar Rp. 1.500.000,-. Sedangkan kader kesehatan posyandu mendapatkan honor Rp. 50.000,- perbulan namun diterima langsung per tribulan.

11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer dengan memberikan honorarium bulanan dan insentif.

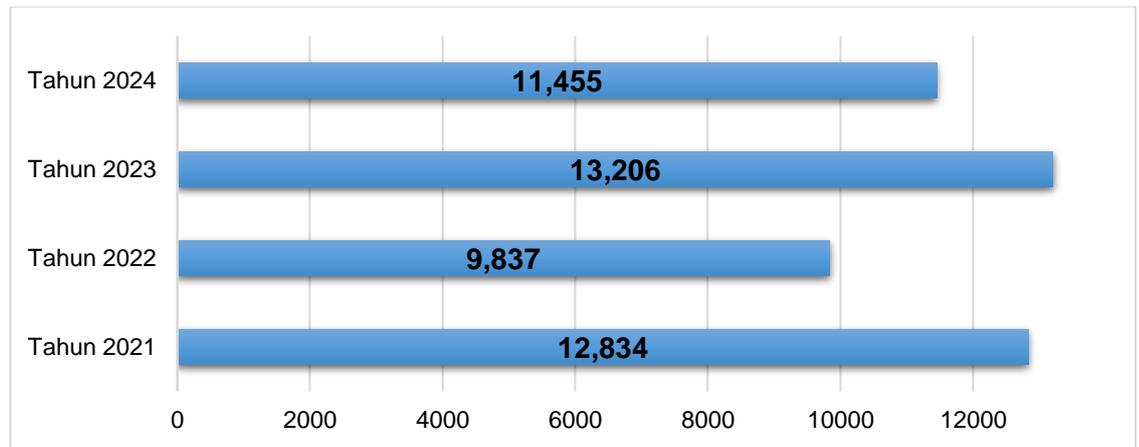
Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025
12.834 orang	9.837 orang	13.206 orang	12.608 orang	11.455 orang	12.608 orang

Capaian peningkatan kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer Tahun 2024 sejumlah 11.455 orang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 12.608 orang. Hal ini disebabkan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer tersebut diterima menjadi P3K.



Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, yang pada Tahun 2024 sudah mencapai 100%.

12. Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dengan memfasilitasi kreativitas para pemuda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik dalam bidang sains, olahraga, maupun seni budaya.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2024 adalah berupa event kepemudaan yang diselenggarakan, sebagai berikut :

Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
<input type="checkbox"/> POPDA XIII & PEPARPEDA I Jawa Timur <input type="checkbox"/> Jayandaru Youth Night Paradise	<input type="checkbox"/> PORPROV VIII Jawa Timur <input type="checkbox"/> Aksi Gemilang (Lomba Inovasi Pemuda Desa)	<input type="checkbox"/> Aksi Gemilang (Lomba Inovasi Pemuda Desa)	<input type="checkbox"/> Aksi Gemilang (Lomba Inovasi Pemuda Desa) <input type="checkbox"/> Pelatihan pembuatan konten youtube <input type="checkbox"/> Pelatihan pembuatan konten youtube level medium <input type="checkbox"/> Pelatihan perkembangan teknologi pemuda <input type="checkbox"/> Peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi pemuda <input type="checkbox"/> 7 Kegiatan dan 2 Organisasi	<input type="checkbox"/> Bimtek kepemudaan kreatif <input type="checkbox"/> Bimtek peningkatan kapasitas SDM organisasi kepemudaan <input type="checkbox"/> Pelatihan generasi muda penggerak digital <input type="checkbox"/> Wirausaha muda dalam dunia digital <input type="checkbox"/> Pelatihan public speaking bagi pemuda <input type="checkbox"/> Youth digital entrepreneur



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya jumlah prestasi pemuda yang diperoleh, sebagai berikut :

- Tahun 2021 : 464 Prestasi
- Tahun 2022 : 613 Prestasi
- Tahun 2023 : 501 Prestasi
- Tahun 2024 : 565 Prestasi

Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tahun 2024, Kabupaten Sidoarjo memperoleh 93 medali, yang terdiri dari :

- Medali Emas : 31 medali
- Medali Perak : 32 medali
- Medali Perunggu : 30 medali

Medali tersebut diperoleh melalui cabang olahraga, sebagai berikut :

NO	CABANG OLAHRAGA	PEROLEHAN MEDALI		
		EMAS	PERAK	PERUNGGU
1	ATLETIK	1	3	2
2	BALAP SEPEDA	2	7	2
3	BOLA BASKET	0	0	0
4	BOLAVOLI	1	1	0
5	BULUTANGKIS	1	0	2
6	CATUR	3	2	1
7	DANCESPORT	1	0	1
8	JUDO	0	0	2
9	KARATE	5	1	0
10	PANAHAN	2	1	5
11	PANJAT TEBING	0	0	0
12	PENCAK SILAT	1	2	1
13	PETANQUE	2	4	3
14	RENANG	4	5	4
15	SENAM	2	3	2
16	SEPAK BOLA	0	0	0
17	SEPAK TAKRAW	0	0	1
18	TAE KWON DO	3	1	2
19	TRIATHLON	1	1	0
20	TENIS LAPANGAN	0	0	1
21	WUSHU	2	1	1
TOTAL		31	32	30



Sedangkan untuk prestasi kepemudaan dari Kabupaten Sidoarjo terdapat :

1. Muchammad Aldian Asmaradana sebagai pemenang Terbaik IV Putra Duta Bahasa Nasional 2024
2. Assyifa sebagai pemenang Top 10 dan Putri Pariwisata Indonesia Best Talent 2024
3. Chistabela Jesselyn sebagai pemenang Top 10 dan Putri Pariwisata Indonesia Photogenic 2024
4. Helena Cornelia Pandelaki sebagai pemenang Raki Intelegensia Jawa Timur 2024 dan Top 10 Raki Berbakat Jawa Timur 2024
5. Ersya Dwi sebagai pemenang Miss Millenium Universe Tourism 2024
6. M. Shalahuddin Khasby sebagai pemenang Top 10 Raka Berbakat Jawa Timur 2024 dan Top 10 Raka Favorit Jawa Timur 2024

Sebagai wadah komunitas pemuda di Kabupaten Sidoarjo dalam mengkoordinasikan kegiatannya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memfasilitasi Youth Center, yang dibangun satu lokasi dengan kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Yang sudah dibangun Youth Center 2024 yaitu rehab pembangunan fasade.



13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi

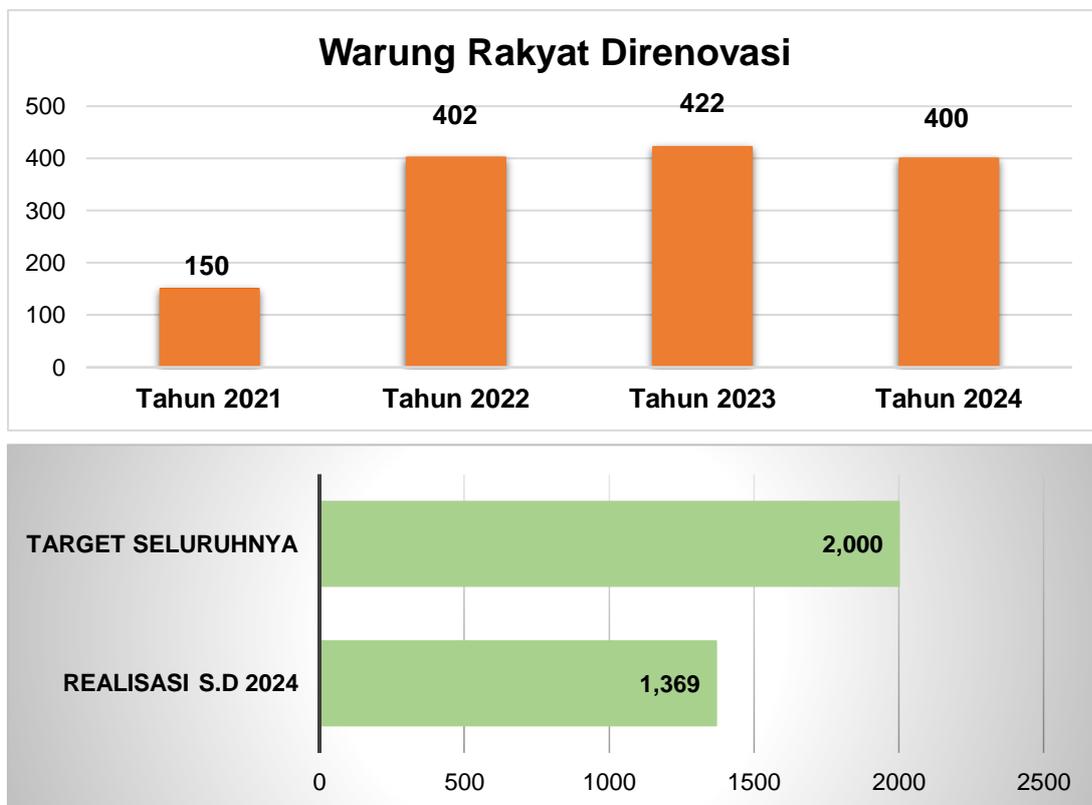
Prioritas dimaksud bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan warung / usaha perdagangan rakyat dengan memberikan pendampingan, bantuan dan renovasi. Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025
150 Warung	402 Warung	422 Warung	400 Warung	395 Warung	800 Warung



Realisasi Tahun 2024 tidak mencapai target karena terdapat 5 calon penerima yang mengundurkan diri. Program prioritas ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 2.000 warung yang akan direnovasi, sampai dengan Tahun 2024 sudah ada 1.369 warung, sehingga masih ada Gap 631 warung yang direnovasi sampai sampai dengan Tahun 2026.

14. Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan status Desa menjadi Desa Mandiri melalui peningkatan operasional ADD (Alokasi Dana Desa).

Capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	ADD SILTAP	ADD Bagi Hasil
Tahun 2021	Rp 120.061.733.364,-	Rp12.528.833.443,-
Tahun 2022	Rp 124.942.712.235,-	Rp13.036.176.834,-
Tahun 2023	Rp 126.403.322.463,-	Rp13.200.275.437,-
Target Tahun 2024	Rp 127.251.512.856,-	Rp13.200.275.437,-
Realisasi Tahun 2024	Rp 130.948.187.475,-	Rp12.665.556.325,-
Target Tahun 2025	Rp 129.764.800.000,-	Rp 20.970.665.700,-



Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat dari penambahan target ADD SILTAP dan ADD Bagi Hasil mulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sidoarjo, yang pada tahun 2024 sudah mencapai 216 Desa atau sekitar 67,92%. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yaitu 152 Desa maka terdapat kenaikan dan tidak ada desa dengan status Sangat Tertinggal dan Tertinggal.

Berikut data status Indeks Desa Membangun Tahun 2024 :

KECAMATAN		STATUS IDM 2024					Total
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	
1	TARIK	0	0	0	17	3	20
2	PRAMBON	0	0	0	9	11	20
3	KREMBUNG	0	0	0	0	19	19
4	PORONG	0	0	0	7	5	12
5	JABON	0	0	2	7	4	13
6	TANGGULANGIN	0	0	0	9	9	18
7	CANDI	0	0	0	0	24	24
8	SIDOARJO	0	0	0	0	10	10
9	TULANGAN	0	0	2	11	9	22
10	WONOAYU	0	0	0	14	9	23
11	KRIAN	0	0	0	0	19	19
12	BALONGBENDO	0	0	0	9	11	20
13	TAMAN	0	0	0	6	10	16
14	SUKODONO	0	0	0	0	19	19
15	BUDURAN	0	0	0	0	15	15
16	GEDANGAN	0	0	0	0	15	15
17	SEDATI	0	0	0	9	7	16
18	WARU	0	0	0	0	17	17
TOTAL		0	0	4	98	216	318
Persentase		0,00	0,00	1,26	30,82	67,92	

15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo melalui tindakan respon cepat terhadap pengaduan, serta peningkatan kualitas pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Pada Tahun 2022 telah diluncurkan Sidoarjo Call Center 112 untuk respon cepat bebas pulsa 24 jam penuh melayani pengaduan masyarakat.



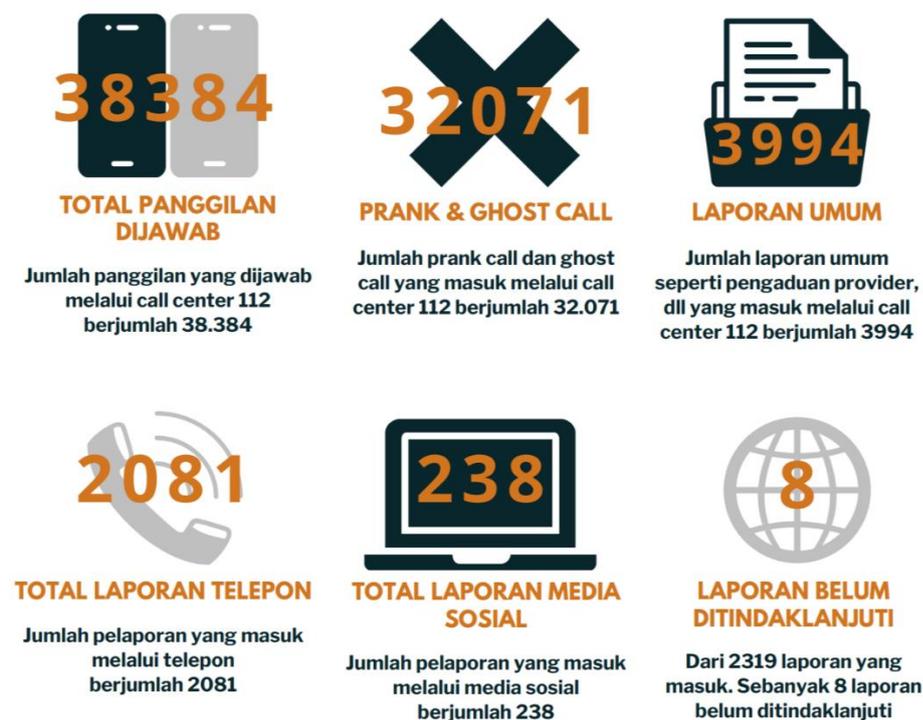
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Akumulasi capaian pelayanan Call Center 112 Sidoarjo, sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	1.949 pengaduan	1.945 pengaduan	1.600 pengaduan	2.311 pengaduan	1.800 pengaduan

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo yang pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari kategori A- (Sangat Baik) menjadi A (Prima).

Laporan pelayanan Call Center 112 sepanjang Tahun 2024, sebagai berikut :



Laporan jumlah telepon prank dan ghost call masih sangat banyak di Tahun 2024, sehingga akan terus dilakukan pembinaan dengan melakukan block nomor kontak dimaksud.

Sedangkan dari total 2.319 aduan yang masuk, seluruh laporan sudah ditindaklanjuti baik itu dalam proses penanganan maupun sudah selesai. Untuk aduan paling banyak adalah seputar perbaikan PJU dengan jumlah 843 aduan. Kemudian OPD paling banyak menangani aduan adalah Dinas



Perhubungan dengan total 969 aduan, diikuti PMI dengan total 571, PSC 544 aduan, BPBD dengan 413 aduan.

16. Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan investasi daerah dengan memberikan kemudahan pelayanan perijinan khususnya untuk pelaku usaha mikro.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai prosedur	Jumlah UM yang diberikan kemudahan dalam pengurusan perijinan
Tahun 2021	-	78
Tahun 2022	1.611	300
Tahun 2023	1.158	300
Target Tahun 2024	1.163	300
Realisasi Tahun 2024	1.507	750

Program prioritas ini dilaksanakan oleh dua perangkat daerah yaitu :

- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya nilai investasi daerah, dimana pada Tahun 2024 Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp.17.046.441.000.000,-. Kegiatan yang mendukung prioritas dimaksud, yaitu pelayanan perijinan jemput bola untuk seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

17. Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui : Revitalisasi RTH (Ruang Terbuka Hijau), Normalisasi Sungai, dan pengelolaan sampah secara terpadu.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	837 ton/hari

Tahun 2022

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah titik pembangunan vertical drain sumur resapan/ biopori	2 titik
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	7 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	905 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	39 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	5 titik

Tahun 2023

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah titik pembangunan vertical drain sumur resapan/ biopori	800 titik
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	2 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	886 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	30 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	9 titik

Target Tahun 2024

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	1 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	975 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	25 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	4 titik



Realisasi Tahun 2024

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	Keterbatasan kompetensi penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan Taman Alun-alun sehingga mengalami gagal tender
Jumlah RTH yang direvitalisasi/ dibangun	<ul style="list-style-type: none">➤ Taman Tara (ASEAN)➤ Taman Segitiga exit tol➤ Taman Fasum Pondok Mutiara➤ Taman Abirupa Krian➤ Taman Fasum Bumi Suko Indah➤ Taman Fasum Puri Indah➤ Taman Fasum Grand Aloha Regency➤ Taman Fasum Wisma Permai➤ Taman Fasum Omah Pesona Buduran➤ Taman Tiara Regency➤ Taman Fasum Citra Sentosa Mandiri
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	913 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	25 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	4 titik

Target Tahun 2025

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	1 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	975 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	25 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	4 titik

Dalam pelaksanaan program prioritas ini, didukung oleh :

- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air;
- Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
- Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang



Perluasan RTH

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2024 sebesar 30,70 hektar. Adapun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 RTH yang dilakukan revitalisasi dan penambahan luas, antara lain :

Kecamatan	Lokasi
Kecamatan Sidoarjo	Puri Indah dan Bumi Suko Indah
Kecamatan Buduran	Omah Pesoda dan Taman Tiara Regency
Kecamatan Candi	Citra Sentosa Mandiri
Kecamatan Taman	Grand Aloha Regency
Kecamatan Waru	Wisma Permai

Revitalisasi Sungai

Tingkat ketersediaan air untuk Jaringan Irigasi di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2024 mencapai 7.060 Liter/Detik jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 6.130 Liter/Detik maka mengalami peningkatan sebesar 930 Liter/Detik yang sudah menunjukkan kecukupan. Selain daripada itu, priortas dimaksud juga untuk mengendalikan banjir dan genangan yang masih sering terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Adapun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 revitalisasi yang sudah dilaksanakan dalam rangka mendukung prioritas dimaksud, antara lain sebagai berikut :

- Pembangunan Rumah Pompa Banjarasri
- Pembangunan Rumah Pompa Banjarpanji
- Pembangunan Rumah Pompa Kedungbanteng
- Pembangunan Rumah Pompa Lippo Raya Jati
- Pembangunan Rumah Pompa Penatarsewu
- Normalisasi Sistem Drainase, Pembangunan Sudetan dan Pintu Air Desa Tropodo
- Pembangunan Rumah Pompa Desa Kepuhkiriman
- Pembangunan - Peningkatan Afvour Kedungpeluk Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin
- Pembangunan – Peningkatan Saluran Anak Afvour Kalialo Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin



- Pembangunan – Peningkatan Saluran Losing Gedangrowo Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin
- Penataan Sungai Kawasan Perkotaan (Afvour Kali Balong)
- Peningkatan afvour Kedungpeluk Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin (atas jembatan besi)
- Peningkatan afvour Kedunguling Desa Kemantren Kecamatan Tulangan (tangkis kiri)
- Revitalisasi sungai penataan sungai wilayah perkotaan afvour Pucang (Ijt)
- Pemeliharaan afvour Pucang (bawah dam sumput)

Revolusi Manajemen Sampah

Pada Tahun 2024 sampah yang terkelola dengan sistem 3R (Reuse, Reduce, Recycle) sebesar 79%. Pada Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan kegiatan, antara lain:

- Kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah kepada pengelola TPS3R, perwakilan RT dan RW, lembaga pendidikan, pondok pesantren, bank sampah dan retail
- Pengadaan komposter dan takakura untuk RT/RW, TPS3R, Desa / Kelurahan dan Bank Sampah
- Pengadaan gerobak sampah untuk RT/RW, TPS3R, Desa / Kelurahan dan Bank Sampah
- Pengadaan CCTV (pengawasan pembuangan sampah liar)
- Mesin pemusnah sampah (untuk di TPS3R)
- Mesin pengolah plastik
- Mesin pengolah sampah terpadu
- Pengadaan mini dump
- Pengadaan ecolindi



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

D. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	100	100	Rp 834.061.439.089	Rp 791.276.935.835		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	8	Rp 8.000.000	Rp 3.849.700		
					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	10	10				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	%	100	95.62	Rp 820.968.439.007	Rp 779.253.083.177		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	96.74	96.28	Rp 872.002.412	828,561,391.00		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	BMD	2	5	Rp 14.413.500	Rp 14.155.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	%	100	100	Rp 11.922.360.870	11,268,979,632		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	%	100	100	Rp 276.223.300	Rp 266.940.032		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	%	100	132,31	Rp 623.624.786.907	Rp 602.095.409.239		
					Rasio Jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SMP	%	90	91				
					Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD	%	94	95				
					Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMP	%	94	95				
					Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SD	%	90	91				
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	%	60	71.92				
					APK SD sederajat	%	100	100.06				
					APK SMP sederajat	%	100	107.13				
					Persentase PAUD yang telah terakreditasi A	%	40	41.1				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Persentase Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang memenuhi standart	%	38	43.75				
					Persentase SD yang telah terakreditasi A	%	74,20	76.81				
					Persentase SMP yang telah terakreditasi A	%	67,50	68.75				
					Persentase bangunan ruang kelas SD kategori baik	%	95,55	95.8				
					Persentase bangunan ruang kelas SMP kategori baik	%	95,70	96.99				
					Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	-	0	0				
					Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	-	0	0				
					Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	-	0	0				
					Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	-	0	0				
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI	%	100	100.06	Rp 269.897.043.408	Rp 261.767.929.260		
					APS (7-15 tahun)	%	99.51	99.67				
					Persentase bangunan ruang kelas SD kategori baik	%	95,55	95.8				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Indeks karakter SD berkembang	indeks	2.21	2.84				
					Indeks Kompetensi Minimum Numerasi SD	indeks	1.81	3.48				
					Indeks Kompetensi Minimum Literasi SD	indeks	2.01	3.68				
					Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat	-	0	0				
					Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori sangat tinggi)	-	0	0				
					Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	-	0	0				
					Persentase SD yang update Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	%	100	100				
					Persentase siswa dengan Nilai AKM Numerasi Sekolah	-	0	0				
					Persentase siswa dengan Nilai AKM Literasi Sekolah	-	0	0				
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	%	100	107.13	Rp 221.888.041.036	Rp 212.650.545.636		
					APS (7-15 Tahun)	%	99.5	99.67				
					Persentase bangunan ruang kelas SMP kategori baik	%	95.7	96.99				
					Indeks karakter SMP membudaya	indeks	2.34	2.8				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Indeks Kompetensi minimum numerasi SMP	indeks	1.86	3.48				
					Indeks Kompetensi Minimum Literasi SMP	indeks	2.09	3.6				
					Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat	-	0	0				
					Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori sangat tinggi)	-	0	0				
					Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	-	0	0				
					Persentase SMP yg update Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	%	100	100				
					Persentase siswa dengan Nilai AKM Numerasi Sekolah	-	0	0				
					Persentase siswa dengan Nilai AKM Literasi Sekolah	-	0	0				
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	%	100	132.31	Rp 76.094.032.326	Rp 74.566.667.383		
					Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat	-	0	0				
					Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	-	0	0				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Persentase PAUD yang telah terakreditasi	-	0	0				
					Persentase Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Anak Usia Dini akurat, terbaru dan berkelanjutan	-	0	0				
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang memenuhi standar	%	38	43.75	Rp 55.745.670.137	Rp 53.108.466.960		
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	%	60	71.92				

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	100	100	Rp 235.289.590.856	Rp 231.870.632.322		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	4	Rp 384.980.200	Rp 381.283.416		
					jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan		1	1				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	%	85	96	Rp 230.070.798.043	Rp 227.340.477.684		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	%	100	100	Rp 19.492.500	Rp 19.292.500		
					Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	%	100	100				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	%	100	100	Rp 30.700.000	Rp 28.162.500		
					Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	%	100	100				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		83	96.59	Rp 1.007.664.737	Rp 772.788.703		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	jenis	10	10	Rp 427.705.400	Rp 424.047.656		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	100	100	Rp 2.308.424.400	Rp 1.889.923.949		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	%	100	100	Rp 1.039.825.576	Rp 1.007.395.394		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk	penduduk	1: 66.329	1:70.048	Rp 167.580.261.184	Rp 153.466.131.614	Pada Permenkes 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan puskesmas, mengamanatkan bahwa rasio jumlah puskesmas terhadap penduduk	Kondisi eksisting di Kabupaten Sidoarjo rasio terhadap penduduk adalah 1 : 70.000 penduduk



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

												adalah 1 : 30.000	
					AKB (Angka Kematian Bayi)	Per 1.000 Kelahiran Hidup	3.27	4.9				- Sidoarjo merupakan daerah dengan mobilitas tinggi, menyulitkan pemantauan tindak lanjut faktor risiko yang ditemukan pada ibu hamil - Jumlah kematian ibu dan kematian bayi didapat dari aplikasi MPDN (<i>Maternal Perinatal Death Notification</i>). Dimana data MPDN didasarkan pada alamat domisili ibu sebelum 6 bulan melahirkan. Meskipun dia meninggal di kab/ kota lain, tapi jika dia berdomisili 6 bulan terakhir sebelum	Pemberdayaan masyarakat yaitu dengan mengadakan Lomba P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) tingkat desa guna meningkatkan peran aktif masyarakat terhadap pencegahan kehamilan beresiko dan terjadinya AKI AKB
					AKI (Angka Kematian Ibu)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	50.5	88.5					



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

												<p>melahirkan di Sidoarjo, maka dianggap sebagai kematian sidoarjo. Selama ini belum ada tim khusus yang beranggotakan dari kecamatan, desa dan puskesmas untuk tracing atas keluarga ibu/ bayi yang meninggal, untuk memastikan apakah kematian ibu/ bayi tersebut benar-benar masuk wilayah Sidoarjo atau bukan.</p> <p>- Bahwa 50% penyebab kematian ibu disebabkan pre eklamsi eklamsi. Dimana penyebab ini merupakan penyakit yang progresnya itu</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

												<p>kematian bayi, sebagian besar disebabkan karena asfiksi dan BBLR. Penjelasaannya seperti ini, bahwa kematian bayi sangat berhubungan dengan kejadian ibu yang terkena eklamsi maupun pre eklamsi. Jadi ibu yang sudah terkena pre eklamsi maupun eklamsi penanganannya adalah dengan melakukan partus lebih awal sehingga karena umur kehamilan belum cukup beresiko bayi lahir prematur. Bayi yg lahir prematur sangat beresiko terjadi asfiksi (sesak nafas)</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

													dalam pelaksanaan akreditasi
					Persentase KLB yang tertangani <24 jam	%	100	100					
					Persentase keluarga yang disurvei KS (Keluarga Sehat)	%	94	94.64					1. Konsep kunjungan rumah sejalan dengan konsep ILP dan juga program lainnya seperti peneyelidikan epidemiologi, sehingga pelaksanaan survei kesehatan keluarga dapat dilakukan bersamaan dengan program lainnya 2. Koordinasi dan kolaborasi antar koordinator program di Puskesmas memudahkan dalam analisis data survei keluarga sehat serta penyusunan rencana tindak lanjutnya
					Persentase pemenuhan kebutuhan sediaan kefarmasian sesuai perencanaan	%	90	90					



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100				
					Persentase penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan	%	95	101.245				
					Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	%	80	74.8			Pengurusan STPT harus disertai dengan rekom asosiasi, dimana untuk mendapatkan rekom tersebut ada biaya yang harus dibayarkan oleh Hattra ke Asosiasi	
					Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	100				
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar di puskesmas (akumulasi 60% sesuai ASPAK)	%	81	81	Rp 33.443.411.622	Rp 32.525.920.279		
					Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	penduduk	1 : 66.329	1 : 70.047			Pada Permenkes 19 Tahun 2024 tentang	Kondisi eksisting di Kabupaten Sidoarjo rasio terhadap



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

											penyelenggara puskesmas, mengamanatkan bahwa rasio jumlah puskesmas terhadap penduduk adalah 1 : 30.000	penduduk adalah 1 : 70.000 penduduk
					Persentase pemenuhan kebutuhan obat sesuai perencanaan	%	90	90				
					Persentase pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai sesuai perencanaan	%	90	90				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/ kelurahan UCI	%	90.5	100	Rp 132.504.495.563	Rp 119.315.374.895		
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	90	88			pasien yg putus berobat sekitar 5% dan yang meninggal kurang lebih 3% hal ini mempengaruh i capaian keberhasilan pengobatan (TSR)	melibatkan kader desa maupun komunitas, serta lintas sektor terkait dalam pelacakan pasien yg mangkir berobat maupun putus berobat.
					Persentase desa ODF	%	85	100				
					Persentase populasi usia 15 - 59 tahun yang dilakukan deteksi dini faktor resiko PTM	%	100	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Persentase puskesmas yang memiliki akreditasi minimal madya	%	77	100				1. Pendampingan intensif dari Tim TPCB (Dinas Kesehatan) dalam persiapan akreditasi 2. Peningkatan mutu pelayanan yang signifikan di Puskesmas dan Klinik 3. Monitoring berkala dari Dinas Kesehatan kepada Klinik dalam pelaksanaan akreditasi
					Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	95	101.22				
					Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	%	80	74.8			Pengurusan STPT harus disertai dengan rekom asosiasi, dimana untuk mendapatkan rekom tersebut ada biaya yang harus dibayarkan oleh Hattra ke Asosiasi	
					Persentase balita stunting yang ditangani (TB/U atau PB/U)	%	100	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sistem informasi kesehatan yang dikelola	%	100	100	Rp 24.127.500	Rp 22.891.940		
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan kelas C dan D memiliki ijin operasional	%	100	100	Rp 1.608.226.499	Rp 1.601.600.400		
					Persentase keluarga yang disurvei KS (Keluarga Sehat)	%	94	94.64				1. Konsep kunjungan rumah sejalan dengan konsep ILP dan juga program lainnya seperti peneyelidikan epidemiologi, sehingga pelaksanaan survei kesehatan keluarga dapat dilakukan bersamaan dengan program lainnya 2. Koordinasi dan kolaborasi antar koordinator program di Puskesmas memudahkan dalam analisis data survei keluarga sehat serta penyusunan rencana tindak lanjutnya



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter terhadap Jumlah Penduduk	per 100.000 penduduk	33	47	Rp 5.552.003.352	Rp 4.725.187.183		
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek	%	100	100	Rp 12.612.752	Rp 11.379.500		
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase fasyankes pemerintah yang tercukupi kebutuhan SDM (ASN) kesehatannya	%	79	79	Rp 2.260.331.600	Rp 1.710.952.683		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis	%	100	100	Rp 3.279.059.000	Rp 3.002.855.000		
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, optikal, dan sertifikat P-IRT yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	%	100	100	Rp 556.386.420	Rp 443.245.000		
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal dan sertifikat P-IRT yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	%	100	100	Rp 16.972.150	Rp 16.704.000		
				Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1	Jumlah pengawasan yang dikeluarkan untuk perusahaan perbekalan kesehatan rumah tangga Alkes / PKRT kelas tertentu	pengawasan	32	32	Rp 13.110.550	Rp 7.778.500		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				tertentu Perusahaan Rumah Tangga								
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga yang bersertifikat	%	100	100	Rp 298.570.000	Rp 223.162.200		
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki sertifikat laik higien sanitasi	%	75	80	Rp 15.000.000	Rp 13.020.000		
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang memiliki stiker pembinaan	%	100	100	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000		
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase produk makanan minuman industri rumah tangga yang diperiksa	%	100	100	Rp 203.133.720	Rp 172.980.300		
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa siaga aktif purnama mandiri	%	60	73.4	Rp 10.408.168.100	Rp 10.400.781.487		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa siaga	%	98.5	100	Rp 10.274.992.800	Rp 10.267.834.100		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS	%	56	65	Rp 66.125.300	Rp 66.057.387		
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu PURI	%	76	93.47	Rp 67.050.000	Rp 66.890.000		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Non Urusan	RSUD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Average Length of Stay (ALOS)	Hari	3-5	5.7	Rp897,476,388,372	Rp792,505,203,219	RSUD sebagai RS kelas A sekaligus RS rujukan regional sehingga sebagian besar pasien yang datang ke RSUD dalam keadaan kritis	a) Optimalisasi dan Pengembangan Instalasi Pelayanan Kanker Terpadu (IPKT), Instalasi Diagnostik dan Intervensi Kardiovaskuler (IDIK), Instalasi Hemodialisis, Instalasi Pelayanan Intensif Terpadu (IPIT), Laparoscopy, Endoscopy, layanan Stroke Unit, layanan Geriatri, dan Pain Center;
					Bed Occupancy Rate (BOR)	persen	60-85%	80.1				
					Bed Turn Over (BTO)	Kali	50-60	53.2				
					Gross Death Rate (GDR)	%	Kurang	97.8				
					Ketepatan Waktu penyusunan laporan keuangan	%	100%	100				
					Net Death Rate (NDR)	%	≤45	86.8				
					Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	94,54 %	95.37				
					Persentase diselesaikannya penelitian	%	80%	90				
					Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang	%	≥80	95				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					memenuhi standar akreditasi.								<p>b) Penggunaan alat-alat kesehatan yang berteknologi canggih untuk menunjang pelayanan seperti USG 4D (Ultrasonografi), Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), Echokardiografi, dan Elektroensefalogram (EEG); dan CT-Scan 128 Slices; dan MRI 3 tesla.</p> <p>c) Monitoring yang berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan sesuai dengan standar (Panduan Praktik Klinik, Clinical Pathway, Daftar Obat Medik dan Audit Medik);</p> <p>d) Optimalisasi PPI (Pengendalian dan Pencegahan Infeksi), K3RS (Kesehatan dan</p>
					Persentase indikator SPM Bagian Keuangan yang mencapai target	%	100%	100					
					Persentase indikator SPM Bagian Perencanaan dan Pemasaran yang mencapai target	%	100%	100					
					Persentase indikator SPM Bagian SDM dan Dilit yang mencapai target	%	100%	100					
					Persentase indikator SPM Bagian Umum yang mencapai target	%	100%	100					
					Persentase indikator SPM Bidang Pelayanan Penunjang yang mencapai target	%	100%	93.94					
					Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang mencapai target	%	85%	87.5					
					Persentase keluhan pelanggan (Number of complain)	%	≤0.1						
					Persentase terlaksananya evaluasi Standar Asuhan Keperawatan dan Kebidanan	%	100%	100					
					Persentase terlaksananya pengukuran parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar akreditasi	%	100%	100					



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Persentase terselesaikannya Dokumen IPP		100%	100			Keselamatan Kerja Rumah Sakit), dan PPRA (Program Pengendalian Resistensi Antimikroba); e) Implementasi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta K3RS yg telah optimal;
					Persentase terselesaikannya Dokumen RB		0	0			
					Persentase terselesaikannya Dokumen SAKIP		100%	100			
					Persentase terselesaikannya Dokumen SKM	%	100%	100			
					Turn Over Interval (TOI)	Hari	1-3	1.4			
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase elemen penilaian Kelompok Manajemen RS (TKRS, MFK, KPS, PMKP, MRMK, PPI, PPK)	%	80	94	Rp897,476,388,372	Rp792,505,203,219	
					Persentase elemen penilaian kelompok Pelayanan Berfokus pada pasien yang memenuhi standar (AKP, HPK, PP, PAP, PAB, PKPO, KE)	%	80	96			
					Persentase elemen penilaian Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) dan Kelompok Program Nasional (PROGNAS)	%	80	99			
					Persentase indikator SPM jenis pelayanan gawat darurat yang mencapai target	%	85	85.71			
					Persentase indikator SPM pelayanan rawat jalan yang mencapai target	%	85	100			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Persentase indikator SPM pelayanan rekam medis yang mencapai target	%	85	75				
					Persentase perolehan pasien baru (Customer Acquisition)	%	2	1.46				
					Persentase perolehan pasien lama (Customer Loyalty)	%	75	64.54				
					Persentase indikator SPM pelayanan rawat inap yang mencapai target	%	85	84.62				
					Persentase indikator SPM pelayanan bedah sentral yang mencapai target	%	85	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan persalinan, perinatologi dan KB yang mencapai target	%	85	81.82				
					Persentase indikator SPM pelayanan intensif yang mencapai target	%	85	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan GAKIN yang mencapai target	%	85	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang mencapai target	%	85	100				
					Kepatuhan dalam pengisian Clinical Pathway (CP)	%	70	70				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Persentase komponen Laporan Analisa Rawat Inap yang telah dilaporkan secara berkala	%	100	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan radiologi yang mencapai target	%	100	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan Laboratorium Patologi Klinik yang mencapai target	%	100	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan Rehabilitasi Medik yang mencapai target	%	100	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan Farmasi yang mencapai target	%	100	60				
					Persentase indikator SPM pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi yang mencapai target	%	100	100				
					Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler	%	100	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah yang mencapai target	%	100	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan Pemulasaran Jenazah yang mencapai target	%	100	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Persentase indikator SPM pelayanan Gizi yang mencapai target	%	100	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan Transfusi Darah yang mencapai target	%	100	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan Laundry yang mencapai target	%	100	100				
					Evaluasi SAK (Standar Asuhan Keperawatan dan Kebidanan) Rawat Jalan dan Khusus	Kali	4	4				
					Evaluasi SAK (Standar Asuhan Keperawatan dan Kebidanan) Rawat Inap	Kali	4	4				
					Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan yang mencapai target	%	100	100				
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	%	100	100				
					Jumlah perusahaan yang diprospek untuk bekerjasama dibidang pelayanan kesehatan	Perusahaan	24	25				
					Jumlah perusahaan yang diprospek untuk bekerjasama dibidang pelayanan kesehatan	Perusahaan	28	28				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	94.54	95.37				
					Penyusunan laporan number of complain	%	100	100				
					Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi yang mencapai target	%	100	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Pendapatan yang mencapai target	%	100	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Perbendaharaan yang mencapai target	%	100	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga yang mencapai target	%	100	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan Pengelolaan Limbah yang mencapai target	%	100	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan	%	100	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit yang mencapai target								
					Persentase indikator SPM pelayanan Pemeliharaan Elektromedik Rumah Sakit yang mencapai target	%	100	100					
					Persentase Laporan Pengelolaan Dokumen Aset yang telah disusun	%	100	100					
					Penyusunan draft rancangan Peraturan Direktur	%	90	90					
					Penyusunan draft rancangan Keputusan Direktur	%	90	90					
					Penyusunan draft perjanjian kerjasama di bidang non klinis (perusahaan)	%	90	90					
					Penyusunan draft perjanjian kerjasama di bidang klinis (non perusahaan)	%	90	90					
					Penyusunan draft perjanjian kerjasama di bidang institusi pendidikan	%	90	90					
					Penyusunan draft perjanjian kerjasama di bidang manajerial	%	90	90					
					Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian SDM yang mencapai target	%	100	100					



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Persentase penelitian yang berhasil diselesaikan	%	100	100				
					Persentase parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang diukur	%	100	100				
					Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan yang mencapai target	%	100	100				
					Persentase pegawai mendapat minimal 1 pelatihan dalam setahun	%	55	96.4				
					Persentase terlaksananya pelatihan 20 JP	%	30	86.02				
					Penyusunan Dokumen SAKIP	%	100	100				
					Penyusunan Dokumen RB		100	0				
					Penyusunan Dokumen SKM	%	100	100				
					Penyusunan Dokumen IPP		100	100				
		RSUD		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Paket	100%	100	Rp 25.328.513.800	Rp 24.300.054.879		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Paket	1	1	Rp 25.328.513.800	Rp 24.300.054.879		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		RSUD SIDOARJO BARAT		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%	100	100	Rp 118.953.186.481	Rp 109.646.884.523		
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal di Bawah Bidang Layanan yang Mencapai Target	%	96	98.44	Rp 118.953.186.481	Rp 109.646.884.523		
		RSUD SIDOARJO BARAT		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AKB (Angka Kematian Bayi)	per 100.000 Kelahiran Hidup	3,27	0	Rp 38.977.400.070	Rp 38.098.429.019		
					AKI (Angka Kematian Ibu)	per 1000 Kelahiran Hidup	50,5	1				
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sediaan Kefarmasian Sesuai Perencanaan	%	90	91.06				
					Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100				
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Habis Pakai Sesuai Perencanaan	%	80	96.72	Rp 38.977.400.070	Rp 38.098.429.019		
					Persentase Pemenuhan	%	80	85.4				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Kebutuhan Obat Sesuai Perencanaan								
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	100	100	20,442,402,534	18,823,079,432		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	17,250,000	1,515,750		
					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	4	4				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	85	83.11	13,758,372,382	13,141,400,094		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	%	100	100	4,750,000	4,500,000		
					Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	%	100	100				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	90	96.33	1,759,148,768	1,475,398,206		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	%	100	100	3,834,693,000	3,217,894,272		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	%	100	100	1,068,188,384	982,371,110		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	%	90	90.54	10,479,432,201	10,044,271,406		
					Persentase Saprasi Pengelolaan SDA yang dikelola dan dipelihara	%	100	100				
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	km	256.02	256.18	10,479,432,201	10,044,271,406		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	%	29	30.52	31,656,486,506	28,646,471,712		
				Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	km	138	139.6	31,656,486,506	28,646,471,712		
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	%	92	95.87	314,720,869,396	256,063,461,870		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	km	979.14	985.947	314,720,869,396	256,063,461,870		
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target	%	46,86	45.02	Rp 18.396.800.735	Rp 14.337.382.300		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang	SR	1400	8088	Rp 18.396.800.735	Rp 14.337.382.300		
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target	%	98,69	98.81	Rp 16.789.239.143	Rp14,742,850,714		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target	RT	2900	2029	Rp 16.789.239.143	Rp 14.662.424.714		
		Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase infrastruktur kawasan permukiman yang tersedia	%	93	93	Rp 26.086.655.390	Rp 24.405.838.761		
				Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya infrastruktur kawasan permukiman yang tersedia	Kawasan	131	131	Rp 26.086.655.390	Rp 24.405.838.761		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung wilayah yang sesuai ketentuan	%	66,5	66.5	Rp 7.153.801.823	Rp 5.947.073.560		
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung wilayah yang sesuai ketentuan	Bangunan	35	213	Rp 7.153.801.823	Rp 5.947.073.560		
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase implementasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	%	70	70	Rp 752.375.000	Rp 500.872.205		
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah implementasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Lokasi	3	3	Rp 752.375.000	Rp 500.872.205		
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi sesuai target tahun berkenaan	%	90	90	Rp 4.750.000	Rp 0		
					Prosentase terlaksananya sertifikasi pekerja konstruksi terampil sesuai target tahun berkenaan	%	100	100				
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pekerja konstruksi yang mengikuti pelatihan		0	0	Rp 4.750.000	Rp 0		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					dan pembinaan Jasa Konstruksi							
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	PERDA NO 04 TAHUN 2024	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	%	69	71.28	Rp 1.946.200.934	Rp 1.823.036.600		
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Ruang yang diterbitkan	Dokumen	1	27	Rp 32.200.000	Rp 30.800.000		
				Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Koordinasi Penataan Ruang yang dilaksanakan	Kegiatan	4	9	Rp 1.684.441.600	Rp 1.646.365.730		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah yang diterbitkan	Dokumen	35	86	Rp 229.559.334	Rp 145.870.870		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	100	100	Rp 11.923.373.526	Rp10,746,722,333.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	5	Rp 21.360.000	Rp 13.690.000	
						Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	5			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	90	88.6	Rp 8.545.422.561	Rp 8.211.380.183	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	95	97.64	Rp 777.042.550	Rp 625.097.423	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	9	9	Rp 85.148.000	Rp 75.475.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi	%	100	100	Rp 2.084.797.408	Rp 1.359.226.556	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	%	100	100	Rp 409.603.007	Rp 321.203.945	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban pasca bencana dan Rumah susun yang tersedia	%	88	88	Rp 3.936.405.005	Rp3,815,219,703		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah korban pasca bencana yang ditangani	Unit	0	0	Rp 45.612.409	Rp 42.664.015			
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun yang dikelola	Lokasi	5	5	Rp 3.890.792.596	Rp3,772,555,688			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penyelesaian luasan kawasan kumuh	%	63,73	90.4	Rp 14.000.000	Rp 0			
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditingkatkan	Kawasan	1	1	Rp 14.000.000	Rp 0			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase luas kawasan yang tidak kumuh	%	99,86	99,96	Rp 2.065.800.000	Rp 2.055.607.619		
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kawasan	2	2	Rp 2.065.800.000	Rp 2.055.607.619		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	Rp 16.655.387.295	Rp 15.780.196.337	nihil	
				Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang	Dokumen	5	5	Rp 7.186.284	Rp 1.134.000	nihil	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	disusun sesuai ketentuan								
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	92	96.48	Rp 13.048.845.498	Rp 12.903.049.884	nihil		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	Persen	90	100	Rp 406.931.550	Rp 370.158.000	nihil		
					Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	Persen	90	20			kurangnya minat pada asn untuk mengikuti pelatihan	mengusulkan asn untuk mengikuti pelatihan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	85	98.48	Rp 1.776.772.585	Rp 1.274.481.221	nihil		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	2	2	Rp 13.880.000	Rp 13.100.000	nihil		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	85	85	Rp 1.026.771.378	Rp 913.051.532	nihil		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	Persen	80	80	Rp 375.000.000	Rp 305.221.700	nihil		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Hasil SKM terhadap layanan tibusmtranmas	Persen	82	98.48	Rp 11.776.747.375	Rp 11.216.209.032	nihil		
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah titik lokasi yang dilakukan operasiketertiban umum dan	Titik	40	40	Rp 9.347.309.836	Rp 9.190.870.452	nihil		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ketentraman masyarakat							
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase terfasilitasinya penegakan Perda/Perbup yang ditemukan atau ditangani	Persen	100	100	Rp 2.309.850.339	Rp 1.906.014.688	nihil	
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase PPNS yang terfasilitasi pembinaan atau pengembangan karir	Persen	100	50	Rp 119.587.200	Rp 119.323.892	sebagian ppns diluar instansi satpol pp	melakukan koordinasi ke instansi yg memiliki anggota ppns

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	Rp 5.839.346.091	Rp5,554,316,532	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan Pelaporan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	5	Rp 3.356.474	Rp 2.501.500		
					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	5	5				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	85	98.9	Rp 3.939.699.797	Rp 3.820.099.951		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	90	96.48	Rp 915.535.611	Rp817,624,975		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	7	7	Rp 45.634.450	Rp 40.610.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	100	Rp 806.284.573	Rp762,093,980		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Rp 128.835.186	Rp 111.386.126		
2	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Perpres Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 2. Perpres Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan	Orang	100	100	Rp 1.495.802.800	Rp 1.445.922.949	TIDAK ADA	TIDAK ADA
					Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Orang	180	180				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	Orang	100	100				
				Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah buku panduan teknis sosialisasi ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Buku Pedoman	2	2	Rp 1.495.802.800	Rp 1.445.922.949		
3	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	Persen	65	70.28	Rp 13.222.857.000	Rp 12.853.355.000	Meskipun mencapai target namun tingkat partisipasi PILKADA Tahun 2024 turun sekitar 1% dari PILKADA Tahun 2020 yang disebabkan karena adanya kejenuhan akan pemilihan di tahun yang sama.	Merangkul pemilih terutama dari kalangan generasi muda untuk berperan aktif dalam politik
					Persentase partisipasi peserta terhadap pendidikan politik dan etika budaya politik	Persen	83	83				
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah buku pedoman teknis sosialisasi pendidikan politik, etika, budaya politik	Buku Pedoman	2	2	Rp 13.222.857.000	Rp 12.853.355.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman								
						Jumlah pedoman bantuan keuangan Partai Politik	Buku Pedoman	2	2				
4	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Ormas yang didata	Ormas	364	364	Rp 134.187.072.020	Rp133,285,618,213	TIDAK ADA	TIDAK ADA
						Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan pengawasan Ormas	Kegiatan	5	5				
						Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	Proposal	12	12				
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah buku pedoman teknis pemberdayaan dan pengawasan Ormas	Buku Pedoman	2	2	Rp 134.187.072.020	Rp 133.285.618.213		
5	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kegiatan	3	3	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	TIDAK ADA	TIDAK ADA



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			Kebangsaan di Daerah										
						Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan	12	12				
				Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah buku pedoman fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Buku Pedoman	2	2	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000			
6	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Nomo 09 Tahun 2006 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang terselesaikan	Persen	100	100	Rp 1.236.914.970	Rp 1.126.412.702	TIDAK ADA	TIDAK ADA	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			Umat Beragama , Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama , dan Pendirian Rumah Ibadah 2. Permendagri Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah 3. Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor									
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			Narkotika 4. Permenda gri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantau an Orang Asing dan Organisasi Masyarak at Asing di Daerah									
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik yang tertangani	Konflik	100	100	Rp 1.236.914.970	Rp 1.126.412.702		
					Jumlah laporan deteksi dini potensi konflik	Laporan	12	12				
					Jumlah Notulen Rapat yang dihasilkan	Notulen	12	12				

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BPBD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	100	100	14,731,918,446	13,581,302,891		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	2	2	27,460,572	5,775,000		
						2. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	10	10				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	%	90	91.06	10,923,308,787	10,313,904,465		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kategori Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	nilai	90	97.08	913,320,857	788,853,443		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	100	100	2,235,870,716	1,997,482,105		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	%	90	90	392,829,662	249,988,428		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	jenis	10	10	150,998,850	144,412,700		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin	%	90	90	88,129,002	80,886,750		
						2. Persentase ASN yang mengikuti	%	80	80				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

						pelatihan yang bersertifikat							
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BPBD		Program Penanggulangan Bencana		1. Persentase Logistik Kebencanaan yang Tersalurkan Tepat Sasaran dan sesuai Kebutuhan	%	100	100	1,759,076,570	981,570,109		
						2. Persentase Korban Bencana yang Terehabilitasi	%	100	100				
						3. Persentase Bantuan Pasca Bencana yang Terealisasi Berdasarkan Laporan Jitupasna	%	100	100				
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga di daerah rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	%	100	100	509,275,000	459,676,669	keterbatasan SDM dan pendanaan	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1. Persentase peserta peningkatan kapasitas masyarakat/aparatur di daerah rawan bencana	%	100	100	97,500,000	66,144,350		
						2. Persentase warga yang mendapat peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana	%	100	100				
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1. Persentase logistik yang disalurkan sesuai kebutuhan	%	100	100	376,000,000	325,856,090	keterbatasan logistik	
						2. Persentase petugas dan relawan yang aktif dalam masa status Siaga dan darurat bencana	%	100	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Persentase dokumen PB dan regulasi PB yang dilegal / formalkan	%	100	100	776,301,570	129,893,000		
					2. Persentase laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PB yang terselesaikan	%	100	100				
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Persentase Satuan Petugas PMK yang memiliki Sertifikasi sesuai Standar Kualifikasi	%	50	70.66	7,562,772,407	7,343,576,260		
					2. Persentase Mobil PMK dengan Kondisi Layak Fungsi	%	80	80				
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo	%	100	100	7,339,081,567	7,207,365,620		
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1. Persentase sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah rawan kebakaran	%	20	20	223,690,840	136,210,640		
					2. Persentase relawan kebakaran dilatih dan dibentuk	%	15	15				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	90	90	Rp 8.025.394.915	Rp 7.086.139.296		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Disusun Sesuai Ketentuan	Dokumen	6	6	Rp 3.480.000	Rp 2.773.600		
					Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun Sesuai Ketentuan	Laporan	13	13				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	90	95.79	Rp 5.369.497.546	Rp 4.972.319.941		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	90	97.15	Rp 1.022.358.851	Rp 834.684.123		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	Rp 1.231.776.792	Rp 891.606.556		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	Persen	85	85	Rp 398.281.726	Rp 384.755.076		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Berpartisipasi Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	60	60	Rp 7.260.086.774	Rp 6.621.827.637		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Dibina	PSKS	6	6	Rp 7.260.086.774	Rp 6.621.827.637		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terlayani	Persen	61.51	61.51	Rp 8.316.233.342	Rp 8.116.471.328		
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar diluar panti yang terlayani	Orang	1185	1185	Rp 8.230.427.842	Rp 8.034.665.828		
					Jumlah lansia terlantar yang terlayani	Orang	5	5				
					Jumlah Penyandang Disabilitas yang terlayani	Orang	115	115				
					Jumlah PPKS Klien Liposos yang terlayani	Orang	960	960				
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di luar Panti Sosial	Orang	150	150	Rp 85.805.500	Rp 81.805.500		
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	98	98.04	Rp 23.031.850.719	Rp 22.665.208.461		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan	Orang	682948	694627	Rp 23.031.850.719	Rp 22.665.208.461		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan dan Jaminan Sosial							
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	Persen	100	100	Rp 943.692.504	Rp 890.536.400		
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	Persen	100	100	Rp 625.795.000	Rp 573.195.400		
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TAGANA yang Dibina	Orang	50	50	Rp 317.897.504	Rp 317.341.000		
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarpras dalam kondisi yang baik	Persen	100	100	Rp 17.392.590	Rp 7.200.000		
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Unit	1	1	Rp 17.392.590	Rp 7.200.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	persen	88.5	25	Rp 8.459.953.937	Rp 7.899.193.399		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan		4	4	Rp 8.910.000	Rp 8.910.000		
					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan		4	4				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	90	90.46	Rp 6.545.981.990	Rp 6.333.282.577		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi		100	100	Rp 630.000	Rp 630.000		
					Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi		60	60				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)	nilai	94	94.27	Rp 494.178.695	Rp 316.594.370		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan		2	2	Rp 95.476.650	Rp 94.725.000		
					Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	25				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhi jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	100	Rp 1.072.164.716	Rp 908.157.763		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak dan fungsi		70	95	Rp 242.611.886	Rp 236.893.689		
2	Non Urusan	Dinas Tenaga Kerja		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	persen	53	56	Rp 107.482.000	Rp 105.106.000		
					Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	100	100				
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	dokumen	17	17	Rp 107.482.000	Rp 105.106.000		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi	persen	54	61.36	Rp 3.856.953.461	Rp 3.276.873.980		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	persen	21	24				
					Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki Perizinan	persen	44.5	48				
					Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	83	94.7				
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang meningkatkan pengetahuannya setelah mengikuti pelatihan	persen	83	94.7	Rp 3.825.005.551	Rp 3.249.116.980		
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase peserta pembinaan lembaga pelatihan kerja yang memahami materi pembinaan	persen	81	81	Rp 11.447.910	Rp 7.257.000		
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami bimtek produktivitas	Persen	53	62.2	Rp 20.500.000	Rp 20.500.000		
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya	persen	60	55.31	Rp 858.007.369	Rp 814.805.300		
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui perantaraan kerja	persen	61	65.74	Rp 186.120.000	Rp 166.362.500		
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui sistem	orang	61	62.77	Rp 651.587.369	Rp 629.942.800		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					informasi pasar kerja (bursa kerja)							
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CPMI yang telah dilakukan verifikasi sesuai ketentuan dalam rangka pemberangkatan secara legal	persen	100	100	Rp 20.300.000	Rp 18.500.000	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	persen	24	25.28	Rp 2.561.382.139	Rp 2.467.957.200		
					Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit	persen	26	27.3				
					Persentase perusahaan yang menerapkan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	persen	39	42.01				
					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		78	80	Rp 416.914.783	Rp 383.359.500		
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja		78	80	Rp 2.144.467.356	Rp 2.084.597.700		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	yang memahami materi							
--	--	--	--	---------------------------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi, sosial	indeks	67.3	67.53	Rp 196.970.749	Rp 196.132.500		
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina/diberdayakan	Lembaga	270	295	Rp 24.461.025	Rp 24.075.000		
					Jumlah program, kegiatan yang di evaluasi PUG nya	program	60	84				
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam partisipasi bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi yang di bina	orang	160	160	Rp 145.356.974	Rp 145.236.850		
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Jumlah Lembaga perlindungan	lembaga	150	295	Rp 27.152.750	Rp 26.820.650		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	perempuan dan anak yang diadvokasi							
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah tindak lanjut rekomendasi tindak lanjut peningkatan perlindungan perempuan dan anak	rekomendasi	0	0	Rp 703.532.142	Rp 668.075.247		
					Jumlah Lembaga Perlindungan perempuan yang diadvokasi dan dibina	Lembaga	220	295				
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk tppo (per 100.000 penduduk perempuan	prosentase	0.56	0				
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga perlindungan perempuan & anak yang melaksanakan kebijakan program dan kegiatan pencegahan terhadap perempuan dan anak	lembaga	225	295	Rp 380.720.000	Rp 353.997.500		
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan	kasus	160	215	Rp 322.812.142	Rp 314077747		
3	URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Pemberday		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Kecamatan, desa/kelurahan	lembaga	0	0	Rp 261.320.000	Rp 243.203.925		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	aan Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana			menuju layak anak yang diadvokasi dan dibina							
					Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang diadvokasi dan dibina	Lembaga	110	190				
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang di advokasi	lembaga	110	110	Rp 261.320.000	Rp 243.203.925		
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberday aan Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		-	0	0	Rp 182.855.000	Rp 179.925.000		
					Terlaksananya layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	prosentase	100	100				
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		lembaga	80	120	Rp 182.855.000	Rp 179.925.000		
5	Non Urusan	Dinas Pemberday aan Perempuan,		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap	%	90	90	Rp 7.362.957.493	Rp 6.989.101.232		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			elayanan kesekretariatan							
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	5	7	Rp 1.747.855	Rp 1.614.700		
					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	4	6				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah	prosentase	90	90	Rp 4.787.581.822	Rp 4.555.034.213		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin		90	90	Rp 38.300.000	Rp 36.337.500		
					Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat		90	90				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	prosentase	92,5	93,13	Rp 650.595.273	Rp 618.611.191		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	prosentase	90	90	Rp 1.550.917.352	Rp 1.453.285.983		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	prosentase	90	90	Rp 333.815.191	Rp 323.931.645		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Persen)	%	100	99	Rp 32.867.960.094	Rp 31,408,326,303		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	8	8	Rp 106,065,300	Rp 103,726,000		
					b. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	laporan	2	2				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi anggaran PD	%	100	96.15	Rp 25.411.195.273	Rp 24.363.677.230		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	angka	86	95.51	Rp 1,119,289,188	Rp 1,066,863,675		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	90	100	Rp 5,404,421,393	Rp 5,104,984,422		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	unit	20	31	Rp 826,988,940	Rp 769,074,976		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase infrastruktur Kemandirian Pangan dalam kondisi baik.	%	10	12.5	Rp 5.000.000	Rp4,650,000		
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kemandirian pangan yang dibina	lembaga	25	25	Rp 5,000,000	Rp4,650,000		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Konsumsi Beras perkapita perhari <= dari 275 gr	gr/kapita/hari	236	235.62	Rp 1.144.856.325	Rp 1.063.258.200		
					Prosentase Peningkatan Cadangan Pangan (stok pangan yang dikordinasikan)	%	0.02	0.08				
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah lembaga penyedia dan penyalur bahan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah yang dibina	lembaga	25	25	Rp 534,736,700	Rp 495,991,000		
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah orang yang diberdayakan untuk konsumsi pangan (Kelompok)	orang	120	288	Rp 610,119,625	Rp 567,267,200		
		Dinas Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase desa rawan pangan yang ditangani	%	10	10	Rp 175.000.000	Rp 168.498.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jml laporan pemutakhiran dan analisa ketahanan dan kerentanan pangan	laporan	1	1	Rp 175.000.000	Rp 168.498.000		
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase pangan segar yang aman dikonsumsi	%	84.6	89.32	Rp 146.200.000	Rp 125.659.500		
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	sampel	100	117	Rp 146.200.000	Rp 125.659.500		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terfasilitasinya permasalahan pertanahan sesuai prosedur	%	100	100	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000		
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian permasalahan pertanahan sesuai prosedur yang terfasilitasi	Kegiatan	2	2	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000		
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terfasilitasinya pengadaan tanah pemerintah non Perangkat Daerah sesuai prosedur	%	100	100	Rp 21.110.000	Rp 0		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		dan Tata Ruang										
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lahan pendukung kebutuhan daerah yang sudah dibebaskan	Dokumen	0	0	Rp 21.110.000	Rp 0		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	87	86	Rp85,937,221,793	Rp74,854,739,177	Tidak ada kendala	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	5	Rp79,181,600	Rp66,590,168		
					Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	8	8				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	%	91	83.2	Rp30,560,720,677	Rp29,991,612,188		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	90	95.27	Rp917,285,993	Rp719,458,635		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Jenis	2	2	Rp220,503,720	Rp193,103,900		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	%	100	100	Rp2,258,734,078	Rp1,912,880,493		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persen	70	73	Rp1,236,780,197	Rp1,017,607,379		
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Target Pendapatan BLUD	Rp	1.3E+10	1.14E+10	Rp50,664,015,528	Rp40,953,486,414		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemantauan air badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD	%	47	21	Rp2,917,373,299	Rp2,526,349,176	Penurunan kualitas BOD dimungkinkan karena peningkatan pembuangan limbah domestik ke air badan air, yang merupakan pencemar tinggi dari sumber tidak tentu yakni aktivitas domestik masyarakat. Selain itu, posisi Kabupaten Sidoarjo yang	Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan aksi nyata serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan pencemaran air
					Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2	%	46	80				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

												berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai sehingga kualitas air badan air tidak dapat diprediksi dan tiap tahunnya menunjukkan nilai yang fluktuatif	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan	%	81	91	Rp2,917,373,299	Rp2,526,349,176			
					Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	83	86					
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH yang dikelola	%	2,44	2.5	Rp43,115,093,792	Rp31,665,440,395	Tidak tercapainya target luasan RTH sesuai dengan target Indeks Kualitas Lahan yang ditetapkan	1. Melaksanakan dengan pihak aset terkait Aset Pemda yang dapat dijadikan Ruang Terbuka Hijau 2. Melaksanakan koordinasi dengan pelaku usaha dan kegiatan untuk menyediakan	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

													lahan ruang terbuka hijau di lokasi usaha
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH yang dimonitor	Titik Lokasi	12	12	Rp43,115,093,792	Rp31,665,440,395			
					Jumlah RTH Taman Aktif yang dikelola	RTH	23	23					
					Jumlah taman aktif yang dipelihara ornamennya	Taman Aktif	7	7					
					Lokasi ruas jalan Kabupaten yang bersih	Ruas Jalan	232	232					
					Persentase layanan data yang disediakan	%	100	100					
					Persentase permohonan perantingan dan penebangan yang tertangani	%	100	100					
					Persentase RTH Taman Aktif yang dikelola	%	56	61					
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan	Persen	100	100	Rp131,359,200	Rp92,428,036	Tidak ada kendala		
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah surat rincian teknis Limbah B3	Rincian Teknis	125	100	Rp131,359,200	Rp92,428,036			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang dikeluarkan/ disetujui							
					Persentase arahan rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan	%	75	89				
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan	Persen	4	7.6	Rp236,355,740	Rp211,880,336	1. Terbitnya regulasi baru terkait pengelolaan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab usaha/ kegiatan. 2. Kurangnya pemahaman penanggung jawab pelaku usaha/ kegiatan terhadap regulasi terbaru di bidang pengelolaan lingkungan hidup 3. Kondisi perekonomian yang menyebabkan pelaku usaha tidak memprioritaska	1. Dilakukan sosialisasi terkait regulasi terbaru di pengelolaan lingkungan hidup kepada para pelaku usaha/ kegiatan. 2. Dilakukan komunikasi dan koordinasi secara masif berupa konsultasi secara langsung maupun secara daring melalui forum grup WA, dan lain lain kepada para pelaku usaha/ kegiatan 3. Menginformasikan bahwa kewajiban pengelolaan lingkungan tetap harus dilakukan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

												n biaya pengelolaan lingkungan hidup.	sesuai dengan regulasi yang berlaku.
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundangundangan lingkungan hidup	%	91	84	Rp236,355,740	Rp211,880,336			
					Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	%	0.8	1					
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa / kelurahan peduli lingkungan hidup	%	1	0.6	Rp310,671,000	Rp240,461,704	1. Banyaknya kegiatan yang harus diikuti oleh sekolah 2. Kurangnya apresiasi berupa hadiah untuk sekolah yang memperoleh penghargaan adiwiyata dan desa yang memperoleh penghargaan	1. Melakukan sosialisasi terkait pentingnya kegiatan adiwiyata bagi pihak sekolah yang nantinya akan memberikan banyak manfaat 2. Merencanakan pemberian apresiasi berupa hadiah untuk	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

											desa berseri 3. Kurangnya minat desa pada program desa berseri	sekolah adiwiyata dan desa berseri 3. Mengusulkan pemberian apresiasi pada peserta program desa berseri
					Persentase sekolah peduli lingkungan hidup	%	0,8	1.6				
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	5	15.44	Rp310,671,000	Rp240,461,704		
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelembagaan / pokmas yang menerima penghargaan lingkungan hidup	%	0.7	1.1	Rp4,750,000	Rp4,750,000	1. Terbatasnya anggaran untuk penyelenggara an program penghargaan lingkungan hidup ; 2. Kurangnya reward/hadiah yang diberikan kepada peserta program pengelolaan lingkungan (adiwiyata dan desa berseri)	1. Pengajuan anggaran untuk program penghargaan lingkungan hidup agar bisa menyelenggarak an acara untuk memberikan apresiasi penerima program penghargaan ; 2. Pengajuan reward/hadiah kepada peserta program pengelolaan lingkungan (adiwiyata dan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

												desa berseri) baik melalui anggaran pemerintah atau pun CSR
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menerima penghargaan menjadi sekolah adiwiyata	Sekolah	4	20	Rp4,750,000	Rp4,750,000		
					Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diberi penghargaan SKPL/Green Industry	Usaha dan atau Kegiatan	5	8				
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	Rp295,102,239	Rp213,743,568	1. Kurangnya personal PNS yang bertugas sebagai tim verifikasi lapangan; 2. Adanya beberapa data pelapor pencemaran lingkungan yang tidak lengkap sehingga kesulitan mencari titik Lokasi pencemaran; 3. Kurangnya / terbatasnya kendaraan operasional	1. Melakukan pengawasan dengan personil THL yang ada di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; 2. Melakukan koordinasi dengan perangkat desa untuk mencari pihak yang melapor guna menemukan titik lokasi pencemaran; 3. Telah melakukan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

												apabila bersamaan dengan pengawasan terkait dengan penataan lingkungan	koordinasi dengan bidang lain terkait peminjaman kendaraan operasional
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	Rp295,102,239	Rp213,743,568			
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah di TPA	Persen	53	46	Rp8,321,866,308	Rp7,701,107,212	1. Belum optimalnya pemilahan sampah dari tingkat sumber ; 2. Belum optimalnya kegiatan pembatasan dan pemanfaatan kembali seperti di fasilitas pendidikan, kesehatan, industri dan fasilitas umum lainnya; 3. Belum optimalnya pengolahan sampah di TPS3R; 4. Terbatasnya	1. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah dari tingkat sumber; 2. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah di fasilitas pendidikan, kesehatan, industri dan fasilitas umum lainnya; 3. Melakukan pendampingan dan pembinaan pengolahan sampah kepada pengelola TPS3R / Desa; 4. Mengajukan	
					Persentase pengurangan sampah di TPST	Persen	29	33					



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

												sarpras angkutan sampah dikarenakan umur teknis yang sudah habis sehingga menyebabkan pelayanan angkutan sering terganggu karena kerusakan armada.	penambahan anggaran sarpras angkutan sampah serta memaksimalkan pelayanan dengan menggunakan sarpras angkutan sampah yang tersedia.
				Pengelolaan Sampah	Jumlah berat sampah yang dikelola	ton / hari	975	913	Rp8,321,866,308	Rp7,701,107,212			

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	Rp 14.994.186.351	14,285,960,629		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	5	Rp 54.700.000	50,885,800		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	8	8				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Persen	93.5	93.88	Rp 8.499.928.364	8,264,729,293		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	Persen	100	100	Rp 104.800.000	104,000,000		
					Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	Persen	100	100				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	87.5	94.72	Rp 2.698.070.868	2,528,763,343		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	Persen	100	100	Rp 578.012.004	510,847,000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	Persen	100	100	Rp 2.588.954.059	2,397,498,186		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Persen	100	100	Rp 469.721.056	429,237,007		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase layanan kepemilikan KK yang sesuai ketentuan	Persen	100	100	Rp 204.817.569	Rp 101.510.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	DAN PENCATATAN SIPIL											
					Persentase pelaporan penduduk rentan yang dapat diselesaikan	Persen	100	100				
					Persentase pelayanan pindah datang / keluar yang dapat diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100				
					Persentase penduduk ber KTP-EI	Persen	99.6	99.67				
					Persentase penduduk usia 0 s/d 17 tahun ber-KIA	Persen	60	52.16			Perpindahan penduduk keluar sehingga capaian KIA semakin berkurang	Menerapkan integrasi layanan, pembuatan akta kelahiran sekaligus KIA
											Data dihitung sesuai SIAK terpusat (tidak ada perhitungan manual) (Data Konsolidasi Bersih)	Menerapkan pembuatan KIA kolektif dan mensosialisasikan kepada masyarakat/stakeholder terkait serta kerjasama terkait pemanfaatan KIA
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan identitas penduduk (KTPEL, KIA, KK, & Surat Pindah) yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	Rp 125.017.569	Rp 87.400.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kegiatan Jemput Bola yang dilaksanakan	Persen	100	100	Rp 79.800.000	Rp 14.110.000		
					Persentase Kegiatan Layanan Peduli Dilan yang dilaksanakan	Persen	100	100				
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk status cerai hidup ber-akta perceraian	Persen	100	100	Rp 321.809.030	Rp 234.436.000		
					Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	Persen	100	100				
					Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	Persen	98.5	97.69			Perpindahan penduduk keluar sehingga capaian akta kelahiran semakin berkurang	Melaksanakan konversi arsip akta kelahiran untuk meningkatkan capaian
											Data dihitung sesuai SIAK terpusat (tidak ada perhitungan manual) (Data Konsolidasi Bersih)	Menambah kerjasama layanan dengan lembaga/stakeholder terkait (Rumah sakit, puskesmas dsb)
					Persentase penerbitan akta kematian	Persen	100	100				
				Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan akta	Persen	100	100	Rp 235.200.000	Rp 216.750.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					kelahiran yang dapat diselesaikan							
					Persentase pelayanan akta kematian yang dapat diselesaikan	Persen	100	100				
					Persentase pelayanan Akta perceraian yang dapat diselesaikan	Persen	100	100				
					Persentase Pelayanan Akta perkawinan yang dapat diselesaikan	Persen	100	100				
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Prosentase Kegiatan Jemput Bola Pelayanan Pencatatan Sipil yang dapat dilaksanakan	Persen	100	100	Rp 86.609.030	Rp 17.686.000		
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase Sarpras SIAK yang layak fungsi	Persen	100	100	Rp 974.839.224	Rp 870.759.180		
					Prosentase pelayanan kebutuhan data kependudukan yang tepat waktu	Persen	100	100				
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase laporan data kependudukan rutin yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	Rp 173.480.375	Rp 117.590.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Jumlah Perjanjian kerjasama yang dihasilkan	Laporan	4	4				
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah media informasi, komunikasi dan edukasi yang tersampaikan pada masyarakat	Jenis	5	5	Rp 643.558.849	Rp 620.944.180		
					Jumlah MOU pemanfaatan data yang dilaksanakan	MoU	5	5				
					Jumlah sarpras SIAK yang tersedia dan terpelihara	Paket	9	9				
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang ditindaklanjuti;	Persen	100	100	Rp 157.800.000	Rp 132.225.000		
5	Non Urusan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase rekomendasi pengelolaan profil kependudukan terhadap kebijakan daerah	Persen	100	100	Rp 6.725.000	Rp 0		
				Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan yang disusun	Buku	1	1	Rp 6.725.000	Rp 0		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	92	92	Rp7,353,734,178	Rp6,495,704,151		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	9	9	Rp57,391,930	Rp49,331,550		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	90	97.95	Rp5,562,641,576	Rp4,839,140,636		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	94	95.19	Rp817,169,772	Rp783,245,639		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	88	88	Rp793,880,400	Rp702,184,380		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persen	85	85	Rp122,650,500	Rp121,801,946		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa yang terfasilitasi	Persen	2,8	2.48	Rp19,526,080	Rp17,244,000	Kabupaten Sidoarjo tidak melakukan penataan dan penggabungan	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	MASYARAKAT DAN DESA	at Dan Desa										desa karena belum ada urgensi lagi, terakhir dilakukan saat lumpur lapindo	
				Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penataan desa yang terfasilitasi	Persen	2.8	2.48	Rp19,526,080	Rp17,244,000			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat at Dan Desa		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerjasama	Persen	22,36	23.29	Rp260,256,053	Rp218,910,203		Desa dalam hal ini melalui BUMDESma di Kabupaten Sidoarjo belum ada lagi yang memiliki kesamaan tujuan dan AD/ART nya, sehingga belum ada kerjasama antar desa lagi, hanya 4 kecamatan saja	
				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama	Persen	22.36	23.29	Rp260,256,053	Rp218,910,203			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat at Dan Desa		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki Bumdes	Persen	74,53	84.28	Rp10,276,005,215	Rp9,897,424,065		1. aset desa masih belum terdata semua di aplikasi karena aplikasi terkait aset masih dalam proses	1. mempercepat pengembangan aplikasi aset desa 2. melakukan pendampingan dalam pembentukan BUMDesa



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

												<p>pembuatan BUMDesa di Kabupaten Sidoarjo belum terbentuk semua dari 318 desa hanya ada keaktifan bumdes di 26 desa saja</p> <p>3. kebingungan SDM perangkat desa dalam memahami aplikasi terkait desa dikarenakan umur yang sudah tidak produktif</p> <p>3. merekrut perangkat desa sampai dengan batas maksimal usia produktif bekerja saja</p>
					Persentase peningkatan status desa	Persen	34,16	34.28				
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelengkapan administrasi desa	Persen	100	100	Rp10,276,005,215	Rp9,897,424,065		
					Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	Persen	100	100				
					Persentase desa yang memiliki Bumdes	Persen	74.53	84.28				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga desa yang diberdayakan	Persen	83,85	83.85	Rp65,807,933,882	Rp65,373,743,074		
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga desa yang dibina	Persen	83.85	83.85	Rp65,807,933,882	Rp65,373,743,074		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja 15 - 19 tahun (ASFR 15-19)	angka	31	10	Rp 811.199.421	Rp 799.541.421		
					Persentase hasil kajian yang	%	100	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					ditindaklanjuti sebagai kebijakan							
					TFR (Angka Kelahiran Total)	indek	1.9	1.84				
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kajian Analisa Dampak isu-isu kependudukan yang difasilitasi	dokumen	1	1	Rp 49.999.906	Rp 49.399.906		
					Jumlah Lembaga Siaga Kependudukan Yang Difasilitasi	SSK	42	42				
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Data Kependudukan yang terupdate	Prosentase	100	100	Rp 761.199.515	Rp 750.141.515		
					Jumlah Peserta Bintek/Sosialisasi Isuisu Kependudukan	lembaga	42	42				
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Pravalensi Modern (modern kontrasepsi pravalensi rate/MPcr)	persen	67,20	71,17	Rp 26.259.978.249	Rp 25.786.615.936		
					Prosentase UNMEETNEED	persen	7.11	7.1				
					Prosentase tingkat putus pemakaian kontrasepsi (DO)	Persen	19.3	19,07				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang diadvokasi	mitra	100	100	Rp 12.596.258.450	Rp 12.467.408.200		
					Jumlah KIE yang tersedia dan diistribusikan	unit	20	20				
					Jumlah peserta yang mendapatkan KIE	orang	200	234				
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat yang di bina	orang	36	36	Rp 9.823.465.599	Rp 9.646.770.086		
					Jumlah PPKBD yang dibina	orang	349	349				
					Jumlah Sub PPKBD yang dibina	orang	4051	4100				
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan	orang	80	234	Rp 2.975.104.750	Rp 2.860.853.000		
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah peserta kegiatan pembinaan kampung KB	kampung kb	84	346	Rp 865.149.450	Rp 811.584.650		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Dinas Pemberdayaan		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Prosentase Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	%	1.37	0.66	Rp 379.074.400	Rp 358.049.400		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang di latih	orang	250	250	Rp 379.074.400	Rp 358.049.400		
					Jumlah Peserta Bina Keluarga yang dilatih	orang	300	252				

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	100	100	Rp 17.619.534.929	Rp 16.394.885.741		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	.1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	4	4	Rp 2.467.620	Rp 2.222.000		
					2. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	4	4				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	80	88.54	Rp 12.895.692.164	Rp 12.701.616.151		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Perangkat Daerah							
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	94	92.95	Rp 1.743.807.723	Rp 1.081.478.786	Sarana dan prasarana yang ada belum optimal mendukung pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	%	100	100	Rp 2.660.635.650	Rp 2.301.216.019		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	%	80	80	Rp 316.931.772	Rp 308.352.785		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	%	80	60	Rp 99.936.161.337	Rp 89.094.484.268		
					Persentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	%	85	75				
					Prosentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	%	73.5	73.5				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	Titik	2412	3876	Rp 92.112.167.230	Rp 81.973.000.058		
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Penumpang Tipe C yang dikelola sesuai Standar	Terminal	2	2	Rp 77,926,800.00	Rp 77,342,853.00		
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan terhadap titik parkir yang diawasi dan difasilitasi dalam pemenuhan standart pengelolaan dan pelayanan perpakiran	Laporan	12	12	Rp 721.070.800	Rp 564.895.022		
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	%	85	85	Rp 2.286.745.800	Rp 2.117.539.342		
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	Rp 1,141,014,465.00	Rp 1,045,897,579.00		
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi andalalin yang dilaksanakan	%	100	100	Rp 50.250.000	Rp 36.750.000		
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Lap pelaksanaan Inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	Laporan	12	12	Rp 3.052.362.000	Rp 2.862.157.913		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan pedesaan yang melakukan perpanjangan kartu pengawasan ijin trayek	Unit	55	55	Rp 394.624.242	Rp 317.382.200		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase perlengkapan transportasi sungai yang tersedia	%	20	20	Rp 28.210.000	Rp 28.136.000		
				Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha	Jumlah Perlengkapan keselamatan angkutan Sungai yang Terpasang	Unit	4	4	Rp 28.210.000	Rp 28.136.000		
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase titik perlintasan kereta api wewenang kabupaten yang telah dibangun fasilitas pengamanan	%	48.9	51.22	Rp 5.882.685.910	Rp 5.806.690.615		
				Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Perencanaan Induk Perkeretaapian yang telah ditetapkan	Dokumen	1	1	Rp 5.882.685.910	Rp 5.806.690.615		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap	persentase	100%	100	Rp 12.731.119.413	Rp 11.747.591.934		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				elayanan kesekretariatan							
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	4	4	Rp 40.645.625	Rp 38.728.250		
					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	4	4				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	persentase	100	96,70	Rp 9.896.889.612	Rp 9.591.726.286		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	91	96	Rp 975.883.675	Rp 791.315.713		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan		-	0	Rp 0	Rp 0		
					Nilai RB		0	0				
					Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan pelayanan kesekretariatan		-	0				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	persentase	100	100	Rp 1.392.624.501	Rp 923.416.484		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase	100	100	Rp 425.076.000	Rp 402.405.201		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Daerah yang layak fungsi								
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi	Nilai	89	94	Rp 4.627.499.762	Rp 4.398.802.488	<p>1. Keterbatasan SDM bidang PIKOM baik secara kuantitas maupun kualitas.</p> <p>2. Belum Optimalnya pengelolaan media komunikasi publik di sektor media sosial, dikarenakan hard tools digital yang belum memadai</p> <p>3. Mindset SDM lama yang sangat URGENT reformasi birokrasi dan reformasi mindset</p> <p>4. Mindset dan reorientasi pimpinan terkait URGENSI digitalisasi disemua sektor layanan digital serta efisiensi alur birokrasi</p>	<p>1. Rolling dan Refresment Pegawai</p> <p>2. Penempatan Pegawai sesuai dengan Kompetensi SDM (tidak asal dalam penempatan)</p> <p>3. Perbaikan tata kelola penyelenggaraan dan pengelolaan layanan informasi publik dan Kanal Media Komunikasi Publik</p>	
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	persentase	100%	100						
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	Informasi	2	2	Rp 4.627.499.762	Rp 4.398.802.488			
					Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Pengaduan	3	3					



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persentase	100	100	Rp 13.531.879.038	Rp 13.340.591.569	1. Perangkat jaringan yang digunakan OPD kurang memadai 2. Tidak seluruh OPD memiliki SDM pengelola jaringan	1. Pembaruan perangkat jaringan pada OPD 2. Penyediaan SDM Pengelola jaringan pada OPD
					Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persentase	80	67.1875				
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama dan sub domain perangkat daerah yang ditetapkan	Domain	180	160,25	Rp 12.635.321.001	Rp 12.479.388.850	Keterbatasan SDM untuk pengelolaan domain dan sub domain perangkat daerah	peningkatan kualitas serta kuantitas SDM
					Jumlah up-time dalam 1 tahun	persentase	98	99,98			- Perangkat UPS sudah tidak optimal - Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan	Pemeliharaan secara menyeluruh perangkat UPS
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator tingkat kematangan layanan yang mencapai nilai >4	persentase	60	100	Rp 896.558.037	Rp 861.202.719	Dari 16 Indikator pada Domain Layanan SPBE, terdapat 5 indikator yang mendapat nilai level 4 dimana berdasarkan hasil evaluasi,	Menyusun rencana aksi perbaikan penerapan Layanan SPBE yang relevan dengan hasil revidu dan evaluasi untuk tujuan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

											rencana aksi tindaklanjut perbaikan terhadap 4 indikator tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan hasil revidu sehingga diperlukan upaya tindaklanjut perbaikan Layanan secara komprehensif dan relevan berdasarkan hasil revidu dan evaluasi	peningkatan kualitas Layanan SPBE
					Persentase indikator tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen yang mencapai nilai >4	persentase	60	41,93			Dari 31 Indikator pada domain Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen, terdapat 20 Indikator yang mendapat nilai level dibawah 4 berdasarkan hasil evaluasi	1. Menyusun rencana aksi dan program kerja peningkatan nilai Indikator pada ketiga domain tersebut yang masih berada dibawah level 4 2. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait untuk penerapan rencana aksi dan program kerja



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

													SPBE khususnya terkait Indikator dengan nilai level rendah (dibawah 4)
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area kontrol keamanan informasi yang terpenuhi berdasar ISO 27001:2013	Lokasi	8	8	Rp 1.093.371.730	Rp 1.036.624.230			
					Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Buah	8	8					

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Tidak ada	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	87	92.48	Rp 8.207.099.034	7,873,427,963		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	5	Rp 114.758.180	Rp 112.332.807		
					2. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang	Dokumen	8	8				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					disusun sesuai ketentuan								
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Persen	90	95.4	Rp 5.548.674.829	Rp 5.368.084.030			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	Persen	85	100	Rp 452.107	Rp 396.000			
					2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	Persen	85	75					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Persen	90	96.64	Rp 880.843.308	844,719,156			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Jenis	1	1	Rp 34.632.000	Rp 34.600.000			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	95	100	Rp 1.304.042.800	1,197,770,284			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persen	90	96.8	Rp 323.695.810	Rp 315.525.686			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Tidak ada	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase koperasi yang mendapat fasilitasi pendampingan ijin usaha simpan pinjam	Persen	0.88	0.99	Rp 26.380.160	Rp 26.205.000	Sebagian besar koperasi bergerak di bidang usaha simpan pinjam yang memiliki risiko sangat tinggi dan belum memiliki	Memfasilitasi permohonan izin usaha simpan pinjam	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

												izin usaha simpan pinjam sesuai permenkop no 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi
				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase surat keterangan kelengkapan persyaratan izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	Persen	20	24	Rp 26.380.160	Rp 26.205.000		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Tidak ada	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Koperasi Aktif	Persen	84.1	84.1	Rp 26.380.160	Rp 26.205.000		
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	Persen	20	20	Rp 26.380.160	Rp 26.205.000		
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Tidak ada	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Persen	45.82	56.8	Rp 10.966.850	Rp 10.859.000		
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	Persentase koperasi simpan pinjam/ USP yang	Persen	20	20.5	Rp 10.966.850	Rp 10.859.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dinilai kesehatannya							
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Tidak ada	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang di diklat	Persen	74.26	74.82	Rp 189.039.100	Rp 181.660.770	Rendahnya kualitas kelembagaan dan daya saing koperasi	Memperbanyak bimtek/pelatihan perkoperasian dan study benchmarking di koperasi yang lebih maju
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola koperasi yang terlatih	Persen	19.51	19.51	Rp 189.039.100	Rp 181.660.770		
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Tidak ada	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang direvitalisasi	Persen	3.31	3.33	Rp 849.320.325	Rp 804.543.126		
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang terupdate	Koperasi	1486	1515	Rp 849.320.325	Rp 804.543.126		
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Peraturan Bupati no. 14 tahun 2024 tentang PEDOMAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	Persen	9.09	9.45	Rp 4.778.802.876	Rp 4.511.706.060		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			OK USAHA PEREMPUAN MANDIRI MELALUI PEMBERIAN PENGHARGAAN									
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi usahanya	Usaha Mikro	810	816	Rp 4.778.802.876	Rp 4.511.706.060		
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Peraturan bupati sidoarjo no 52 tahun 2024 tentang PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM WARUNG RAKYAT DIRENOVASI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	2.04	2.05	Rp 2.964.212.312	Rp 2.833.879.819	1.Perlu peningkatan kontrol dan monitoring yang efektif terhadap pelaku usaha mikro yang telah mengikuti pelatihan. 2.Kurangnya pelatihan menggunakan marketplace, terbatasnya narasumber serta belum terkelolanya materi pelatihan	1.Melakukan postest dan pretest selama pelatihan 2.Pelatihan lanjutan dengan berdasar pada hasil pelatihan sebelumnya 3.Peningkatan pelatihan menggunakan aplikasi marketplaceden dengan metode perencanaan materi silabus yang lebih terarah dan terencana



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			TAHUN 2024 2. Peraturan Bupati No 51 tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM WARUNG RAKYAT DIRENOVASI								3. Kurang terkelolanya pelatihan secara berkesinambungan Kurangnya jenis pelatihan SKKNI	dengan baik 4. Penerapan metode pelatihan melalui silabus yang telah tersusun Perlu peningkatan pelatihan SKKNI
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	Usaha Mikro	110	125	Rp 2.964.212.312	Rp 2.833.879.819		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	persen	100	100	Rp 12.818.921.646	Rp 12,095,219,444	Tidak ada kendala	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran PD	Persen	92	93.17	Rp 6.675.000.150	Rp 6,373,315,075		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	97.4	94.08	Rp 630.782.611	Rp 592,880,802	Secara nilai yang telah didapatkan, nilai termasuk dalam kategori sangat baik, namun nilai turun dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan jumlah responden pada semester II yang melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) jumlahnya cukup sedikit sehingga nilai	Menautkan SKM pada sistem aplikasi pelayanan perizinan (aplikasi SIPPADU) sehingga pemohon dapat langsung mengisi survey kepuasan sebelum pelayanan selesai dilakukan dan untuk layanan tatap muka, customer service dihimbau untuk memberikan isian SKM setelah melayani pemohon.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

												yang dihasilkan masih belum memenuhi target.
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	100	Rp 4.201.104.876	Rp 3,870,249,453		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persen	80	80	Rp 1.312.034.009	Rp 1,258,774,114		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perka BKPM RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Kebijakan Penanaman Modal Daerah yang Disusun	Persen	100	100	Rp 633.912.000	Rp 625,679,866	Tidak ada kendala	-
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi Penanaman modal yang dikelola	Sistem Informasi	0	0	Rp 633.912.000	Rp 625,679,866		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Jumlah kebijakan pelayanan penanaman modal yang disusun	Kebijakan	1	1				
					Jumlah laporan pengembangan penanaman modal yang disusun	Laporan	4	4				
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Kepeminatan Investasi	Persen	100	100	Rp 562.000.000	Rp 534,500,000	Keterbatasan sumber daya anggaran dalam hal melakukan kegiatan promosi investasi secara efektif, luas, dan mengikuti perkembangan teknologi.	Menggunakan platform digital dan media sosial seperti Instagram, YouTube, Tiktok untuk melakukan promosi secara luas. Selain itu dapat diusulkan untuk penganggaran tahun berikutnya.
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan	Kali	2	4	Rp 562.000.000	Rp 534,500,000		
					Jumlah workshop investasi	Kali	1	1				
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kontribusi Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu terhadap Total Retribusi	Persen	20.53	35.49	Rp 2.381.499.350	Rp 2,076,794,700	Adanya perubahan kewenangan terkait perizinan yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah menjadi	Koordinasi secara aktif kepada instansi terkait.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			Perizinan Berusaha di Daerah									kewenangan pusat menyebabkan daerah sulit mengontrol perizinan sesuai dengan kearifan lokal.	
					Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	Persen	97.11	99.45					
					Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	Persen	94.22	96.9					
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang difasilitasi Pemrosesannya	Izin	1500	3948	Rp 2.381.499.350	Rp 2,076,794,700			
					Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	Laporan	24	24					
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase Pelaku Usaha yang Memiliki Tingkat Kepatuhan Berusaha Minimal Baik	Persen	100	165	Rp 1.298.389.900	Rp 1,167,258,600	Terbatasnya petugas lapangan untuk melakukan pengawasan di lapangan pada pelaku usaha.	Melakukan pengawasan secara maksimal dengan tim pengawasan yang tersedia dan menggandeng	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			n Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024									OPD teknis terkait untuk melakukan pengawasan bersama
					Presentase Pelaku Usaha yang Taat Melaporkan Penanaman Modal sesuai Ketentuan Periode Pelaporan	Persen	100	174.53				
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Izin Secara Berkala	Pelaku Usaha	110	192	Rp 1.298.389.900	Rp 1,167,258,600		
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi PMA	Rupiah	Rp 2,400,000,000,000	Rp 3,566,940,000,000	Rp 36.000.000	Rp 19,500,000	Realisasi yang disajikan adalah nilai investasi daerah sampai dengan triwulan III. Realisasi Investasi diperoleh dari	Koordinasi secara aktif dengan instansi terkait.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			2021 tentang SISTEM Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik									pelaporan LKPM secara mandiri oleh pelaku usaha. Untuk Triwulan IV menunggu rilis nilai dari Kementerian Investasi dan Hilirisiasi/BKPM . Sampai dengan saat ini, nilai realisasi investasi belum dirilis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisiasi/BKPM dikarenakan masih dalam tahap pelaporan LKPM oleh pelaku usaha		
					Nilai realisasi investasi PMDN	Rupiah	Rp 9,600,000,000,000	Rp 8,937,129,000,000						
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Monitoring Penanaman Modal yang Disusun	Kegiatan	10	10	Rp 36.000.000		Rp 19,500,000			
					Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN yang di Monev	Perusahaan	39	53						



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan LKPM	Perusahaan	50	126				
					Workshop LKPM	Kali	0	0				

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%	90	90	10,892,191,970.00	10,297,548,012.00		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	6	6				
					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen	7	7	3,875,000.00	3,875,000.00		
				WWA	Persentase realisasi anggaran PD	%	88	97.15	8,084,632,301.00	7,854,250,680.00		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	%	80	80	3,875,000.00	2,925,000.00		
					Persentase BMD SKPD yang telah bersertifikasi	%	80	80				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	88	94.82	943,263,075.00	847,219,224.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	2	2	8,547,000.00	8,000,000.00		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	90	90	899,624,832.00	837,080,855.00		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi*	%	80	80	948,374,762.00	744,197,253.00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Jumlah Pemuda Yang Berprestasi	Orang	30	86	8,042,974,080.00	7,857,371,216.00		
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Even dan Kompetisi di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Orang	45	77	6,971,477,800.00	6,837,885,368.00		
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang melakukan kemitraan dengan dunia usaha	Organisasi	2	2	1,071,496,280.00	1,019,485,848.00		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Dinas Kepemudaan, Olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Prestasi	90	479	32,808,518,771.00	32,114,654,153.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	dan Pariwisata										
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	Unit	8	8	5,287,693,111.00	4,814,047,291.00		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah even olahraga prestasi yang diselenggarakan	Event	1	1	16,915,553,400.00	16,796,194,294.00		
					Jumlah event Olahraga di Tingkat Provinsi yang Diikuti	Event	1	2				
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi keolahragaan yang dikembangkan	Organisasi	2	3	10,300,000,000.00	10,287,377,568.00		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah even olahraga rekreasi yang diselenggarakan	Even	6	5	305,272,260.00	217,035,000.00		
4	Non Urusan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	prosentase organisasi kepramukaan yang berkembang	Organisasi	1	1	1,000,000,000.00	999,999,874.00		
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina		1	1	1,000,000,000.00	999,999,874.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah	persentase	100%	100	Rp 172.000.000	Rp 170.682.500		
					Persentase data statistik yang digunakan sebagai bahan informasi	persentase	60%	60				
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang diolah dan dianalisa	Data	4	4	Rp 172.000.000	Rp 170.682.500	1. Keterbatasan SDM bidang statistik baik secara kuantitas maupun kualitas. 2. Kurangnya tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral dalam mendukung Satu Data Kabupaten Sidoarjo	1. Peningkatan kompetensi pegawai statistik. 2. Perbaikan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral dengan menyusun kebijakan untuk mendukung Satu Data Kabupaten Sidoarjo



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	INDEKS KAMI (Indeks Keamanan Informasi)	Nilai	494	551	Rp 1.093.371.730	Rp 1.036.624.230	Keterbatasan SDM bidang keamanan informasi baik secara kuantitas maupun kualitas	Peningkatan kompetensi pegawai dibidang keamanan informasi dan melakukan analisa serta usulan kebutuhan SDM bidang keamanan informasi
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area kontrol keamanan informasi yang terpenuhi berdasar ISO 27001:2013	Lokasi	8	8	Rp 1.093.371.730	Rp 1.036.624.230		
					Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Buah	8	8				

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase guru mengikuti uji kemahiran Bahasa Indonesia	%	14.05	14.2	743,910,000	731,870,000		
					Cakupan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	73.02	81.82				
					Jumlah penutur muda bahasa daerah	Orang	10	10				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	objek budaya	72.11	81.82	105,325,000	100,995,000		
				Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok seni yang dibina	%	65	65	638,585,000	630,875,000		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kelompok seni yang melestarikan seni dan budaya daerah	kelompok	9	9	218,690,000	216,637,500		
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok seni yang memenuhi Standarisasi	kelompok	65	65	218,690,000	216,637,500		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
No.	Usuran Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur SKPD terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100%	100%	Rp 10.245.481.416	Rp 9.483.256.879		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	5	Rp 2.085.000	Rp 2.085.000		
					Jumlah dokumen laporan evaluasi	Dokumen	7	7				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan							
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	93	95.21	Rp 6.047.399.963	Rp 5.873.867.664		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	Persen	100	100	Rp 10.800.000	Rp 9.923.820		
					Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	Persen	0	0				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	93.91	95.55	Rp 725.257.021	Rp 689,629,298		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	2	2	Rp 296.572.020	Rp 283.550.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	100	Rp 2.216.644.112	Rp 2,205,549,905		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persen	90	98	Rp 946.723.300	Rp 661.486.937		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah koleksi perpustakaan	Eksemplar	142125	152457				
					Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	180000	180569				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	Eksemplar	500	1194	Rp 1.011.183.278	Rp 994.041.183		
					Jumlah perpustakaan yang berkategori baik	Perpustakaan	115	115				
					Sensus pembangunan literasi masyarakat	Kali	1	1				
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	Kegiatan	6	6	Rp 122.659.800	Rp 99.665.000		
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	Judul	1	1	Rp 4.990.000	Rp 4.961.500		
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Kegiatan	1	1	Rp 4.990.000	Rp 4.961.500		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Pengguna layanan arsip	Orang	76	84	Rp 520.655.646	Rp 510.566.150		
					Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	Berkas	1750	5340				
					Jumlah lembaga yang telah	Perangkat Daerah	9	15				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					mengelola arsip dengan baik								
			Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Arsip di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	Berkas	250	4948	Rp 129.480.000	Rp 128.470.000			
			1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan 2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2022 Tentang	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	Berkas	1750	5340	Rp 237.805.490	Rp 232.324.850			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			Tata Kelola Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo										
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten yang dikelola	Laporan	1	1	Rp 153.370.156	Rp 149.771.300			
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terselamatkan	Laporan	1	1	Rp 4.986.608	Rp 4.033.750			
				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan akibat bencana	Laporan	1	1	Rp 4.986.608	Rp 4.033.750			
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah (SKKAD) Sistem Klasifikasi Keamanan akses Arsip Dinamis yang diterbitkan	Laporan	1	1	Rp 4.964.233	Rp 4.702.500			
				Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilayankan	Laporan	1	1	Rp 4.964.233	Rp 4.702.500			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

3. URUSAN PILIHAN

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan pilihan di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	100	90	Rp 7.378.664.240	Rp 7.012.384.796		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	Dokumen	12	12	Rp 193.063.000	Rp 190.699.400		
					Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	tahun	1	1				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD	Persen	90	97	Rp 5.435.292.640	Rp 5.283.471.460		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang Telah Teregistrasi	Persen	96	96	Rp 6.750.000	Rp 6.750.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berkinerja Baik Pada Perangkat Daerah	persen	96	0	Rp 37.275.000	Rp 36.275.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Laporan	1	1	Rp 623.996.899	Rp 554.526.975		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	Laporan	1	2	Rp 42.889.700	Rp 39.903.155		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran	Persen	100	100	Rp 773.803.332	Rp 641.265.543		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	Persen	100	100	Rp 265.593.669	Rp 259.493.263		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perairan umum daratan (PUD)	Ton	563	563.3	Rp 87.596.000	Rp 83.831.600		
					Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	15.88	16042.1				
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Penangkapan Ikan yang Disediakan	Unit	2	2	Rp 43.350.000	Rp 43.297.500		
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan Kecil yang Menerapkan Pembinaan/ Pelatihan	Persen	10	10	Rp 44.246.000	Rp 40.534.100		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya Air Tawar dan Air Payau (kg/ha/th)	kg	101630000	109405126	Rp 7.880.899.593	Rp 7.249.641.606		
					Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	0,02	0.22				
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Menerapkan Hasil Pelatihan	Kelompok	5	5	Rp 2.139.521.790	Rp 2.025.507.618		
					Jumlah Pembudidaya Ikan yang Diusulkan Bersertifikat CBIB	Orang	7	7				
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Benih yang terjual	ekor	152000	176248	Rp 5.741.377.803	Rp 5.224.133.988		
					Jumlah produksi ikan yang dihasilkan tambak dinas (Bandeng, Udang)	Kg	9421	48444700				
					Hasil Pengujian Sampel yang Memenuhi Syarat Usaha Budidaya dan Bebas Residu	Kali	8	8				
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran di Lingkungan Perairan.	Persen	50	50	Rp 119.554.800	Rp 96.360.852		
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Jumlah Monev yang Dilaksanakan di Wilayah Sungai	Dokumen	4	4	Rp 119.554.800	Rp 96.360.852		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota									
					Jumlah POKMASWAS yang dibina/ dilatih	Kelompok	4	4					
					Jumlah sungai yang diawasi	Sungai	4	4					
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produksi Hasil Olahan Perikanan Bandeng Asap	Rp/kg	127600	2570200	Rp 1.165.090.647	Rp 1.024.648.491			
					Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Kg	8635000	8635600					
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	jumlah SKAI yang dikeluarkan	berkas	40	48	Rp 7.597.220	Rp 7.193.000			
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha olahan yang memenuhi jaminan mutu (bersertifikat)	Orang	2	3	Rp 189.150.312	Rp 157.565.232			
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peredaran ikan yang melalui Depo Ikan	ton	6635	11612	Rp 968.343.115	Rp 859.890.259			
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu)	ton	0	0					



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Daerah Kabupaten/Kota							
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Sidoarjo	Orang	904.86 2	1132048	1,534,135,600.00	1,478,620,718.00		
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Wisata yang diadakan		2	2	1,393,615,600.00	1,346,700,736.00		
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan		1	1	140,520,000.00	131,919,982.00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-Rata Lama Tinggal	Hari	2	2.07	104,996,450.00	102,371,893.00		
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi		1	2	104,996,450.00	102,371,893.00		
		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN	Presentase Produk Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Atas kekayaan intelektual (HAKI)	%	7	7	5,000,000.00	-		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		1	1	5,000,000.00	-		
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Industri / Usaha Kreatif Pendukung Pariwisata	Organisasi	31	39	179,830,000.00	159,651,000.00		
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	100	170	179,830,000.00	159,651,000.00		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase infrastruktur Kemandirian Pangan dalam kondisi baik.	%	10	12.5	Rp 5.000.000	Rp4,650,000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kemandirian pangan yang dibina	lembaga	25	25	Rp 5,000,000	Rp4,650,000		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	a. Produktivitas Tanaman Pangan dan hortikultura	Kw/Ha	426.75	1209.467	Rp 2.697.923.200	Rp 2.588.574.005		
					b. Produktivitas tanaman tebu	Kw/Ha	752	752.11				
					c. Produksi peternakan Susu	Kg	2840000	1647131				
					c. Produksi peternakan Telur	Kg	11786000	2206022				
					d. Prosentase peningkatan populasi ternak	%	1.25	1.31				
					e. Prosentase penyaluran pupuk bersubsidi	%	94.4	94			Persyaratan penebusan PPK subsidi hrs pakai KTP yang jelas baik teks maupun fotonya namun dilapangan byk KTP petani rusak shg TDK bisa tebus PPK subsidi	Memfasilitasi petani yang tidak memiliki KTP untuk berkoordinasi dengan DISPENDUKC APIL
					c. Produksi peternakan Daging	Kg	36787000	49779531				
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	a. Jumlah luasan lahan yang menggunakan bibit	ha	18900	18953	Rp 1.731.146.950	Rp 1.626.666.505		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					unggul tanaman pangan							
					b. Jumlah luasan lahan yang menggunakan bibit unggul perkebunan	ha	550	557.3				
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah populasi ternak	ekor	112000	176117	Rp 966.776.250	Rp 961.907.500		
					Jumlah kelompok ternak yang dibina	kelompok	5	4				
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	84	89	Rp 328.418.635	Rp 312.177.780		
				Pengembangan Prasarana Pertanian	a. Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) yang siap untuk diusulkan	ha	0	0	Rp 242.437.500	Rp 235.443.600		
					b. Jumlah prasarana pendukung pertanian dalam kondisi baik	unit	10	10				
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Pertanian	unit	1	0	Rp 85.981.135	Rp 76.734.180		
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase hewan yang mendapatkan indakan penjaminan kesehatan hewan	%	30	37.71	Rp 2.046.322.522	Rp 1.965.350.020		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet	%	86	86.95				
					Prosentase unit usaha yang telah menghasilkan produk pangan dan non pangan asal hewan yang dinyatakan ASUH	%	10	10.3				
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah Pelayanan jasa laboratorium	sampel	425	543	Rp 273.430.752	Rp 262.604.500		
					b. Jumlah jasa pelayanan Medik Veteriner	ekor	470	557				
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit Usaha yang didampingi dan diawasi	unit usaha	17	15	Rp 1.300.066.770	Rp 1.244.892.420		
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan penerapan pengawasan teknis kesejahteraan hewan	unit usaha	11	10	Rp 472.825.000	Rp 457.853.100		
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi dari serangan OPT pada tanaman	%	13	24.16	Rp 344.592.318	Rp 307,818,000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					pangan dan hortikultura							
					Prosentase lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi dari serangan OPT pada tanaman perkebunan	%	10	11.72	Rp 344,592,318	Rp 307,818,000		
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	a. Luas lahan yang dikendalikan dari serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura	ha	3950	7247.77	Rp 344.592.318	Rp 307.818.000		
					b. Luas lahan yang dikendalikan dari serangan OPT pada tanaman perkebunan	ha	450	468.72				
		Dinas Pangan dan Pertanian		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi izin usaha yang dibina	rekomendasi	14	14	Rp 5,000,000	Rp 4,687,500		
				Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah monitoring obat hewan di tingkat pengecer	monitoring	28	28				
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani ke kelas madya	%	2.6	2.65	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000		
					Jumlah kelembagaan petani yang mendapatkan pelayanan penyuluhan pertanian	unit	135	144	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	96	96.12	Rp 27.151.606.904	Rp 26.351.744.380		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	7	7	Rp 6.300.000	Rp 6.239.400		
					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	8	8				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Persen	90	93.93	Rp 21.947.687.341	Rp 21.347.754.556		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	Persen	94	100	Rp 16.725.000	Rp 10.825.000		
					Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	Persen	75	88				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	Persen	90	95.2075	Rp 197.900.000	Rp 190.215.000		
					Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	Persen	90	97				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	82	98.31	Rp 1.986.664.931	Rp 1.886.620.941		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Jenis	6	6	Rp 86.919.660	Rp 83.235.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	80	100	Rp 1.397.138.186	Rp 1.340.237.860		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persen	80	100	Rp 1.512.271.786	Rp 1.486.616.623		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar SNI	Persen	15.78	21.05	Rp 25.932.469.360	Rp 23.820.224.484		
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang memenuhi 50% kriteria SNI	Pasar	4	4	Rp 24.882.185.860	Rp 23.770.924.484		
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar dengan kategori pelayanan baik	Unit	4	4	Rp 1.050.283.500	Rp 49.300.000		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Nilai	<9	0.07	Rp 66.575.000	Rp 54.575.000		
					Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	80	92				
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di	Jumlah Barang kebutuhan pokok yang terupdate harga dan stoknya	Jenis	15	15	Rp 2.375.000	Rp 2.375.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								
					Persentase operasi Pasar yang terealisasi dalam satu tahun	Persen	100	100				
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan pestisida bersubsidi yang tersalurkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan	Jenis	2	2	Rp 64.200.000	Rp 52.200.000		
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Non migas	USD	1.400.000.000	1,835,419,112.00	Rp 2.572.252.600	Rp 2.484.668.900		
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk unggulan yang difasilitasi ekspor melalui promosi dan misi dagang	Persen	5	80	Rp 2.572.252.600	Rp 2.484.668.900		
					Persentase produk unggulan yang difasilitasi dengan mitra strategis perdagangan	Persen	5	20				
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang terstandarisasi	Persen	95	100	Rp 298.803.541	Rp 278.017.352		
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera dan ditera ulang dalam tahun berjalan / tahun berkenaan	Persen	3	43	Rp 298.803.541	Rp 278.017.352		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Persentase UTTP yang terawasi	Persen	10	61				
--	--	--	--	--	-------------------------------	--------	----	----	--	--	--	--

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yg di bina/dikembangkan	Persen	3.24	6.8	Rp 6.907.622.139	Rp 6.170.554.473		
					Persentase pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk turunan indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	100	100				
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah indikator pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	Indikator	6	6	Rp 6.907.622.139	Rp 6.170.554.473		
					Jumlah IKM yang terstandarisasi	IKM	385	662				
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persen	0.51	0.73	Rp 153.000.000	Rp 97.150.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan/dikeluarkan	IKM	95	130	Rp 153.000.000	Rp 97.150.000		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Database IKM yang terupdate	Persen	1.38	2.34	Rp 5.225.000	Rp 2.592.500		
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang terupdate datanya	IKM	280	417	Rp 5.225.000	Rp 2.592.500		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang diberangkatkan	persen	100	0	Rp 7.450.000	Rp 6.450.000		
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang difasilitasi penempatannya	KK	2	0	Rp 7.450.000	Rp 6.450.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

3. Unsur Penunjang Pemerintahan

Hasil kinerja penyelenggaraan unsur penunjang pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

UNSUR PENUNJANG SEKRETARIAT DAERAH												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	indeks	80.98	94.77	Rp 77.097.058.737	Rp 69.718.451.813	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A belum tercapai dikarenakan belum optimalnya perangkat daerah dalam mengimplemen tasikan SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	1.Melakukan monitoring dan pendampingan ke OPD sesuai dengan pemangku masing-masing bagian 2.Melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat agar dapat diberikan LKE PD sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan
					Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	%	100	100				
					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	%	78	67.35				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	tahapan	5	5	Rp 44.247.824	Rp 38.842.762		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

						Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	rekomen dasi	1	1				
						Indeks Kualitas Kebijakan (BPKAD, BPPD)	indeks	80.98	95.22				
						Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A (BPKAD, BPPD)	%	100	100				
						Persentase kinerja urusan tercapai (BPKAD, BPPD)	%	100	100				
						Nilai Optimalisasi Pajak Daerah (Area Intervensi MCP)	nilai	95	100				
						Nilai Pengelolaan BMD (Area Intervensi MCP)	nilai	82	87				
						Nilai SAKIP PD	nilai	84.7	87.51				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	%	89	91.3	Rp 32.845.043.526	Rp 32.232.628.685		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kategori Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	nilai	91.5	97.47	Rp 12.433.426.857	Rp 10.805.605.920		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	100	100	Rp 14.367.113.087	Rp 12.953.193.505		
						Nilai IPP	nilai	4.2	4.29				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	jenis	10	10	Rp 865.768.084	Rp 860.658.540		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Pemerintahan Daerah	daerah yang dilakukan pemeliharaan							
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12	Rp 3.817.312.609	Rp 2.515.894.871		
					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	%	100	100	Rp 2.770.000.000	Rp 1.905.000.000		
					Penataan Organisasi	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang Organisasi (Setda, Inspektorat, BKD, Disperpusarsip)	indeks	80.98	84.63	Rp 577.014.000	Rp 558.349.000		
						Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang organisasi (Setda, Inspektorat, BKD, Disperpusarsip)	%	100	100				
						Persentase kinerja urusan yang tercapai di bidang organisasi (Setda, Inspektorat, BKD, Disperpusarsip)	%	100	100				
						Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	%	100	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

						Nilai Pengawasan APIP (Area Intervensi MCP)	nilai	85	94				
						Nilai Manajemen ASN (Area Intervensi MCP)	nilai	90	100				
						Persentase unit kerja yang pelayanan publik yang prima	%	14	18				
						Persentase Unit Kerja yang tingkat kepatuhan berkategori Zona Hijau	%	85	98.05				
						Persentase PD yang nilai PMPRB berkategori B	%	70	70				
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokolan	nilai	83	91	Rp 9.377.132.750	Rp 7.848.278.530		
						Indeks Kualitas Kebijakan (Setwan, Diskominfo)	indeks	80.98	93.87				
						Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A (Setwan, Diskominfo)	%	100	100				
						Persentase kinerja urusan tercapai	%	100	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					(Setwan, Diskominfo)								
2	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	indeks	80.98	84.5	Rp 19.253.411.146	Rp 17.066.045.234			
					Persentase Kinerja Urusan tercapai	%	100	100					
				Administrasi Tata Pemerintahan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan	indeks	80.98	80.69	Rp 432.551.968	Rp 400.997.060			
					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pemerintahan (Dispendukcapil, Bakesbang, Satpol PP, Kecamatan)	%	62	47.62					
					Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pemerintahan	%	100	100					
					Nilai Tata Kelola Keuangan Desa (Area Intervensi MCP)	Nilai	94	100					
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	indeks	80.98	89.5	Rp 17.499.000.000	Rp 16.183.635.924			
					Persentase PD dengan Nilai SAKIP	%	80	70					



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

						A di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)							
						Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	%	100	100				
						Jumlah mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan yang mendapatkan beasiswa	orang	500	497				
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi	%	100	100	Rp 607.658.968	Rp 385.831.250		
						Persentase permasalahan	%	100	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

						hukum yang difasilitasi								
						Persentase penyuluhan hukum yang difasilitasi	%	100	100					
						Persentase doktasi informasi produk hukum daerah yang dipublikasikan	%	100	100					
						Jumlah Kajian produk hukum daerah	kajian	5	6					
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama daerah	%	100	100	Rp 714.200.210	Rp 95.581.000			
3	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	indeks	88	88.53	Rp 4.579.034.794	Rp 3.921.866.854				
					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	indeks	80.98	81.57						
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian	indeks	80.98	88.26	Rp 81.199.942	Rp 79.561.142				
					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	%	100	100						



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

						Dinas Koperasi dan UM, DPMPTSP)							
						Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, DPMPTSP)	%	100	100				
						Nilai Perijinan (Area Intervensi MCP)	Nilai	100	100				
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan bidang pembangunan	indeks	80.98	75.84	Rp 1.786.738.700	Rp 1.397.952.135		
						Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pembangunan (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda, DLHK)	%	80	60				
						Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pembangunan (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda, DLHK)	%	100	100				
						Nilai Perencanaan (Area Intervensi MCP)	nilai	95	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

						Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan standarisasi (SSH, ASB, HSPK)	%	100	100				
						Persentase Permasalahan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100				
						Persentase Program Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	%	90	92.88				
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Pengadaan Barang dan Jasa (Area Intervensi MCP)	nilai	90	97	Rp 2.441.096.152	Rp 2.236.689.316		
						Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	indeks	71	82.45				
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang SDA	indeks	80.98	88.26	Rp 270.000.000	Rp 207.664.261		
						Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	%	100	100				
						Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan	%	100	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

						Pertanian, Dinas Perikanan)								
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

UNSUR PENUNJANG SEKRETARIAT DPRD												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	nilai	87	87	Rp 62.626.204.836	Rp55,433,120,422	Tidak ada kriteria keberhasilan capaian kinerja dalam SK Reward dan tidak ada instansi pembanding yang linear dalam Laporan Kinerja SKPD	Menyusun SK Reward dilengkapi dengan kriteria keberhasilan capaian kinerja serta menampilkan data instansi pembanding yang linear dalam Laporan Kinerja SKPD
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	5	5	Rp 13.212.948	Rp 12.776.400		
					2. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	7	7				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase realisasi anggaran perangkat daerah	persen	80	78.29	Rp 8.423.278.591	Rp 8.234.007.625		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Prosentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	persen	80	80	Rp 200.000.000	Rp 196.121.533		
					2. Prosentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	persen	80	80				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	nilai	86.5	96.44	Rp 2.601.605.298	Rp2,246,816,438		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	unit	58	58	Rp 4.611.023.745	Rp 3.229.894.800		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	persen	90	110.98	Rp 4.821.741.744	Rp4,377,756,923		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		80	80	Rp 2.252.933.300	Rp 1.599.075.013		
			Perbup No. 57 Tahun 2024 tentang Tunjangan Transportasi dan Perbup No. 58 Tahun 2024	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian realisasi administrasi keuangan Anggota DPRD	persen	92.31	89.08	Rp 35.989.965.000	Rp 32.091.716.840		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			tentang Tunjangan Perumahan										
					Layanan Administrasi DPRD	Survey kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan administrasi keuangan	nilai	86.3	96.44	Rp 3.712.444.210	Rp 3.444.954.850		
2	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	persen	100	100	Rp 69.601.828.399	Rp 48.088.847.974	Sekretariat DPRD bertindak sebagai fasilitator sedangkan pelaksana kegiatan adalah Anggota DPRD	Konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan DPRD pada saat penyusunan Renja DPRD sehingga kegiatan DPRD dapat terlaksana sesuai target	
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase pembentukan, pembahasan dan penetapan Perda dan produk hukum DPRD yang difasilitasi	persen	100	100	Rp 577.900.000	Rp 115.947.806		
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	persen	100	100	Rp 1.950.000.000	Rp 1.142.975.498		
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang difasilitasi	persen	100	100	Rp 356.000.000	Rp 270.351.550		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kebutuhan peningkatan kapasitas DPRD	nilai	6	6	Rp 6.581.580.000	Rp 4.687.157.417		
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase jumlah aspirasi masyarakat yang diserap dan dihimpun difasilitasi	persen	100	100	Rp 4.608.750.000	Rp 2.821.815.040		
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	persen	100	100	Rp 21.000.000	Rp 1.862.500		
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	Prosentase jumlah Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	persen	100	100	Rp 2.400.000	Rp 0		
				Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase Tugas DPRD yang difasilitasi	persen	100	100	Rp 55.504.198.399	Rp 39.048.738.163		

UNSUR PENUNJANG PENGAWASAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	persen	80	80.95	Rp 19.422.686.451	Rp18,813,164,677		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	4	4	Rp 3.792.025	Rp3,342,500		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	9	9				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	persen	91	95.82	Rp 15.416.911.482	Rp15,184,170,199		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	persen	86	96.36	Rp 438.425.005	Rp306,165,000		
					Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	persen	81	100				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	nilai	91	97.04	Rp 1.771.390.446	Rp1,590,642,684		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan dengan tepat guna	buah	37	37	Rp 371.195.800	Rp347,535,000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	persen	100	100	Rp 958.158.800	Rp952,683,190		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	persen	81	94.5	Rp 462.812.893	Rp428,626,104		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

2	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal A	persen	35	67	Rp 1.054.922.504			
					Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi	persen	93	97.38				
					Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi	persen	88	88.39				
					Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	persen	100	100				
					Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	persen	100	100				
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun tepat waktu	laporan	259	259	Rp 724.757.504	Rp587,521,090		
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun tepat waktu	laporan	27	45	Rp 330.165.000	Rp220,702,500		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	86	86	Rp 13,882,518,894.00	Rp 13,386,866,930.00		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	4	4	Rp 168,270,000.00	Rp 156,544,000.00		
					Jumlah Dokumen Laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	8	8				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	95	96.43	Rp 10,000,688,255.00	Rp 9,767,817,318.00		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	Persen	92	100%	Rp 1,360,284,491.00	Rp 1,233,498,509.00		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	24	24	Rp 275,998,576.00	Rp 222,000,000.00		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhi jasa penunjang	Persen	100	100	Rp 1,475,533,020.00	Rp 1,452,324,003.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					perkantoran Perangkat Daerah								
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persen	100	100	Rp 601,744,552.00	Rp 554,683,100.00		
2	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen RKPD terhadap dokumen RPJMD	Persen	100	100	Rp 2,361,453,302.00	Rp 2,193,810,788.00			
					Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran daerah	Persen	100	100					
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	3	3	Rp 1,001,306,222.00	Rp 957,178,550.00		
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisa data dan informasi pemerintah daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikelola		1	0	Rp 414,579,020.00	Rp 362,779,000.00		
					Pengendalian, Evaluasi dan	Persentase konsistensi antara	Persen	97	100	Rp 945,568,060.00	Rp 873,853,238.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen RKPD terhadap dokumen KUA-PPAS dan APBD									
					Persentase kesesuaian dokumen RKPD terhadap RKP Provinsi dan RKP	Persen	100	100						
3	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	Rp 3,617,793,179.0 0	Rp 3,492,443,579.00				
					Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100						
					Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100						
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang	%	100	100	Rp 1,234,766,975.0 0	Rp 1,171,147,465.00				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Pembangunan Manusia	Pemerintahan dan pembangunan manusia							
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	Rp 1,217,537,922.00	Rp 1,188,040,656.00		
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Prosentase Kesesuaian Dokumen Renja terhadap Dokumen Renstra PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	Rp 1,165,488,282.00	Rp 1,133,255,458.00		

UNSUR PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase PD yang memiliki kegiatan mendukung IID	%	74	83.67	Rp 778,196,858.00	Rp 740,761,665.00		
					Persentase penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	%	94	94.44				
				Penelitian dan Pengembangan Bidang	Persentase hasil penelitian/kajian bidang	%	94	94.44	Rp 487,371,858.00	Rp 461,861,465.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief							
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Penelitian/ Pengembangan/ Perekayasaan Bidang Inovasi dan Teknologi yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	%	94	94.44	Rp 290,825,000.00	Rp 278,900,200.00		

UNSUR PENUNJANG KEUANGAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	80	80	Rp18,915,921,861	Rp18,094,097,468		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	5	Rp7,750,000	Rp7,162,000		
					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	8	8				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Persen	90	90	Rp12,674,769,931	Rp12,363,429,097		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	Persen	80	80	Rp500,000	Rp0		
					Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	Persen	80	80				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	Persen	90	90	Rp2,371,029,875	Rp2,095,802,556		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Jenis	3	3	Rp1,409,843,966	Rp1,261,755,216		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	100	Rp1,549,185,512	Rp1,506,891,510		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang layak fungsi	Persen	100	100	Rp902,842,577	Rp859,057,089		
2	KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Keputusan terbaru nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Rancangan KUA-PPAS /Perubahan KUA-PPAS	%	100	100	Rp654,876,632,724	Rp646,056,991,341		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

						Prosentase PD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100 %	100	100				
						Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	%	100	100				
						Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperda APBD/PAPBD	%	100	100				
						Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperbup APBD/PAPBD	%	100	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen kebijakan yang tersusun	Persen	100	100	Rp1,111,129,575	Rp997,473,890		
						Persentase Dokumen anggaran daerah yang tersusun	Persen	100	100				
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	Persen	100	100	Rp153,550,500	Rp148,002,500		
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	100	Rp638,505,000	Rp585,356,966		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	Persen	100	100	Rp652,973,447,649	Rp644,326,157,985		
3	KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepmendagri terbaru nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset tetap tanah yang telah bersertifikat;	%	82.81	100.52	Rp3,748,635,158	Rp3,338,697,632		
					Prosentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum	%	100	100				
					Prosentase pemanfaatan BMD yang diproses	%	100	100				
					Prosentase PD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	%	100	100				
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase permohonan penerbitan sertifikat tanah yang diproses oleh BPN	Persen	100	100	Rp3,748,635,158	Rp3,338,697,632		
					Persentase permohonan pemindahtanganan BMD yang diproses	Persen	100	100				
					Jumlah PD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	Jumlah	48	48				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Persentase permohonan pemanfaatan BMD yang diproses	Persen	100	300				
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------	--------	-----	-----	--	--	--	--

UNSUR PENUNJANG KEUANGAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KEUANGAN	Badan Pelayanan Pajak Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	90	95	Rp 39.675.815.903	Rp 33.438.717.402		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	2	2	Rp 336.000.000	Rp 311.702.533		
					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	1	1				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	90	78	Rp 34.335.087.792	Rp 28.765.684.028		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana yang dibutuhkan		Rp0,00	0	Rp 11.655.000	Rp 10.500.000		
					Persentase ASN yang disiplin		95%	97%				
					Persentase ASN yang mengikuti		100%	100%				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

						pelatihan yang bersertifikat							
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	nilai	93.5	92.69	Rp 1.112.094.378	Rp882,979,245.00		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana yang dibutuhkan		Rp0,00	0	Rp 282.287.579	Rp 257.200.000		
						Jumlah BMD yang diadakan	jenis	2	2				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhi jasa penunjang perkantoran perangkat daerah	%	90	100	Rp 3.263.317.630	Rp2,948,537,496.00		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	%	80	89	Rp 335.373.524	Rp 262.114.100		
2	KEUANGAN	Badan Pelayanan Pajak Daerah	- PERDA 1 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - Perbup 3 Tahun 2024	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Penerimaan PDL (pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, reklame, Penerangan Jalan dan Air Tanah)	%	100	110.31		Rp 11.546.151.630	Rp6,467,068,744	a) Masih adanya WP dan OP yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak daerah b) Kurangnya kesadaran serta	a) Meningkatkan sistem pelayanan pajak daerah secara daring sehingga akses oleh wajib pajak lebih mudah b) Bekerja sama dengan BUMDes memberikan pelayanan
					Prosentase penerimaan BPHTB	%	100	122.67					
					Prosentase penerimaan PBB-P2	%	100	107.71					



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			tentang Besar Persentase Nilai		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah WP/OP PBB P2 yang terverifikasi	WP/OP	6000	10472	Rp 11.546.151.630	Rp 6.467.068.744	pemahaman pemilik usaha terhadap regulasi pajak daerah yang harus dilaksanakan c) Adanya perbedaan data tunggakan PBB-P2 berdasarkan sistem pajak daerah dan hasil konfirmasi Wajib Pajak d) Kurangnya kesadaran WP untuk melakukan pembaruan data, sehingga membayar pajak tidak sesuai dengan kondisi riil wajib pajak pembayaran PBB-P2 hingga ke tingkat RW c) Mendorong berdirinya BUMDes untuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak; d) Melaksanakan penagihan aktif atas tunggakan dengan menyampaikan himbauan, surat tagihan, dan bekerja sama dengan pihak lain e) Melakukan pemasangan tax monitoring system f) Membuat aplikasi yang dapat diakses oleh desa maupun kecamatan atas WP yang sudah dan yang belum membayar PBB-P2
			Jual Objek Pajak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; - Perbup 6 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame; - Perbup 19 Tahun 2024 tentang Besar Nilai Perolehan Air Tanah dan Insentif Fiskal Pajak Air Tanah; - Perbup Nomor 37			Jumlah WP/OP PDL yang terverifikasi	WP/OP	11300	17741			
						Jumlah WP/OP BPHTB yang terlayani	WP/OP	48000	50799			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.										
--	--	--	-------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UNSUR PENUNJANG KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	persen	79,75	92.04	Rp 13.609.791.313	Rp. 13.191.623.199		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Persen	85	92.07	Rp 10.825.929.870	Rp 10.631.419.150		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SKM	Nilai	86	92.04	Rp 1.134.031.697	Rp.1.076.749.645		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	Rp 1.180.948.027	Rp.1.030.753.395		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi	Persen	70	70	Rp 468.881.719	Rp 452.701.009		
2	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase pegawai berkinerja minimal baik	persen	85	99.29	Rp 3.019.670.081	Rp 2.134.711.179		
					Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai	persen	49,2	49.5				
					Prosentase penempatan ASN sesuai kompetensinya	persen	82	95.21				
					Prosentase penempatan PNS sesuai kualifikasi	persen	100	100				
					Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian)	persen	85	85				
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai	Persen	49.2	49.5	Rp 1.106.567.960	Rp 557.390.300		
				Mutasi dan Promosi ASN	Prosentase Penempatan ASN	Persen	82	95.21	Rp 763.282.349	Rp 548.577.766		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Sesuai Kompetensinya							
					Prosentase penempatan PNS sesuai kualifikasi	Persen	100	100				
				Pengembangan Kompetensi ASN	Prosentase Penilaian Kompetensi Sesuai Standar dan Terselesaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	Rp 672.398.375	Rp 586.213.879		
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai	Persen	80	95.96	Rp 477.421.397	Rp 442.529.234		
					Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian)	Persen	85	85				
3	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian Daerah		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20JP per tahun	persen	60	85.1	Rp 2.445.393.031	Rp 2.236.129.997		
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase PNS Yang Berdayaguna Setelah Mengikuti Diklat Diukur Dari Evaluasi Dampak Diklat	Persen	85	99.38	Rp 1.706.163.040	Rp 1.534.667.607		
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Prosentase ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya Setelah Mengikuti Diklat	Persen	81	84.69	Rp 739.229.991	Rp 701.462.390		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Sidoarjo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	Rp23,461,992,570	Rp22,588,657,984		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Persen	92	93	Rp15,587,481,413	Rp 15.020.563.293		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	89.5	98	Rp1,883,398,079	Rp1,703,666,393		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	0	0	Rp8,796,476	Rp 0		
					Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Unit	0	0				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	100	Rp4,582,463,200	Rp4,561,046,435		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	Rp792,629,648	Rp771,363,430		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pemerintahan Daerah	daerah yang layak fungsi								
2	KECAMATAN	Kecamatan Sidoarjo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	Persen	0	0	Rp 386.105.000	Rp 357.305.000			
					b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	100	100					
					c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	100	100					
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama, kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan hidup, pemerintahan, dan perekonomian yang disusun	Laporan	7	7	Rp 386.105.000	Rp 357.305.000			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	a. Jumlah permohonan IMB rumah tinggal 1 dan 2 luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan ;	pemohon	0	0	Rp 0	Rp 0			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

3	KECAMATAN	Kecamatan Sidoarjo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	Rp 21.500.000	Rp 19.625.000		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan masyarakat yang tersusun	Laporan	12	12	Rp 21.500.000	Rp 19.625.000		
4	KECAMATAN	Kecamatan Sidoarjo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	Persen	100	100	Rp 164.250.000	Rp 143.225.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	Kegiatan	17	17	Rp 164.250.000	Rp 143.225.000		
5	KECAMATAN	Kecamatan Sidoarjo		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	Rp 6.300.000	Rp 6.300.000		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan sesuai	Persen	100	100	Rp 6.300.000	Rp 6.300.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pemerintahan Desa	dengan ketentuan dan tepat waktu							
6	KECAMATAN	Kecamatan Sidoarjo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	Persen	100	100	Rp7,581,789,310	Rp7,434,083,088		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mendapat pemberdayaan	kelurahan	14	14				

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Candi		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	90	100.58	Rp 4.852.003.985	Rp4,706,772,088		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD	Persen	87	95.59	Rp 3.639.694.658	Rp 3.569.275.826		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan Candi	Nilai	80.15	78.88	Rp 294.568.400	Rp271,511,199		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang Diadakan	Unit	2	2	Rp 44.733.000	Rp 39.673.750		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase terpenuhinya jasa	Persen	95	95	Rp 678.078.100	Rp639,205,363		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pemerintahan Daerah	penunjang perkantoran								
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang	60	60	Rp 194.929.827	Rp187,125,950			
2	KECAMATAN	Kecamatan Candi		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	100	81.43	Rp 452.167.481	Rp 368.210.000			
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan	Laporan	32	32	Rp 437.167.481	Rp354,035,000			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					perekonomian yang disusun								
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan b. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat, agama dan masyarakat; c. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	Laporan	0	0	Rp 15.000.000	Rp14,175,000		
3	KECAMATAN	Kecamatan Candi		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	Rp 93.200.000	Rp 84.480.000			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan	Laporan	8	8	Rp 93.200.000	Rp 84.480.000			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					kemasyarakatan yang tersusun								
4	KECAMATAN	Kecamatan Candi		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	Rp 32.700.000	Rp 31.080.000			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Laporan	1	1	Rp 32.700.000	Rp 31.080.000			
5	KECAMATAN	Kecamatan Candi		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	Rp 4.465.000	Rp 4.465.000			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Desa	24	24	Rp 4.465.000	Rp 4.465.000			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Buduran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	88.5	91.7675	Rp 5.030.307.928	Rp4,903,136,055		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	7	7	Rp 1.548.000	Rp 1.548.000		
					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	6	6				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	%	91	95.81	Rp 3.536.682.216	Rp 3.453.264.992		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	89	94.5525	Rp 316.066.928	Rp298,761,360		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Jenis	4	4	Rp 72.123.372	Rp 64.690.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase terpenuhinya jasa	%	90	100	Rp 947.905.912	Rp934,370,502		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Usuran Pemerintahan Daerah	penunjang administrasi perkantoran								
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	%	80	80	Rp 155.981.500	Rp 150.501.201			
2	KECAMATAN	Kecamatan Buduran		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	%	90	100	Rp 355.518.000	Rp 269.262.500			
					Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	%	90	100					
					Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	%	0	0					
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan	Laporan	4	4	Rp 296.285.000	Rp 215.032.500			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

						perekonomian yang disusun							
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	berkas	2200	4045	Rp 49.950.000	Rp 45.000.000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	5	6	Rp 9.283.000	Rp 9.230.000		
						Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	Laporan	2	2				
3	KECAMATAN	Kecamatan Buduran		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	%	75	100	Rp 375.920.000	Rp 355.221.000			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan	Laporan	8	8	Rp 375.920.000	Rp 355.221.000			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					kemasyarakatan yang tersusun								
4	KECAMATAN	Kecamatan Buduran		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	%	90	100	Rp 58.309.000	Rp 58.150.000			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	Rp 58.309.000	Rp 58.150.000			
5	KECAMATAN	Kecamatan Buduran		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	Rp 293.680.000	Rp 271.975.000			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Desa	15	15	Rp 293.680.000	Rp 271.975.000			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Gedangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	100	100	Rp 5,133,210,432	Rp 4,969,490,876		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	7	7	Rp 1,510,000	Rp 1,261,600		
					b. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	6	6				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	90	90	Rp 3,494,529,004	Rp 3,396,552,004		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	a. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	%	90	90	Rp 354,000	Rp 270,000		
					b. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	%	0	0				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	89.1	98.44	Rp 454,291,250	Rp 416,077,105		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	90	90	Rp 1,052,585,200	Rp 1,027,740,152		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	%	80	80	Rp 129,940,978	Rp 127,590,015		
2	KECAMATAN	Kecamatan Gedangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase Izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	%	0	0	Rp 166,325,000	Rp 125,065,000		
					b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	%	85	85				
					c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	%	100	100				
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan	Laporan	8	8	Rp 128,700,000	Rp 97,810,000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun								
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Berkas	9800	10794	Rp 19,175,000	Rp 10,305,000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan	Berkas	0	0	Rp 18,450,000	Rp 16,950,000		
						b. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	16	16				
						c. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	Laporan	4	4				
3	KECAMATAN	Kecamatan Gedangan		PROGRAM KOORDINASI	Persentase pelanggaran Perda	%	100	100	Rp 119,626,250	Rp 116,940,000			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	dan Perkada yang ditangani							
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan masyarakat yang tersusun	Laporan	4	4	Rp 119,626,250	Rp 116,940,000		
4	KECAMATAN	Kecamatan Gedangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	Rp 39,904,500	Rp 39,792,500		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	Rp 39,904,500	Rp 39,792,500		
5	KECAMATAN	Kecamatan Gedangan		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	Rp 264,707,500	Rp 249,712,350		
				Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai	Desa	15	15	Rp 264,707,500	Rp 249,712,350		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Pemerintahan Desa	dengan ketentuan dan tepat waktu							
--	--	--	--	--	-------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Sedati		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Nilai	90	90	Rp 5.069.387.164	Rp4,756,001,645		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	7	7	Rp 1.050.171	Rp 1.015.500		
					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	6	6				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	80	93.19	Rp 3.451.212.949	Rp 3.288.964.633		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	91.37	91.37	Rp 278.713.252	Rp203,748,004		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah BMD yang diadakan	Jenis	2	2	Rp 78.909.900	Rp 73.250.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pemerintah Daerah								
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	100	Rp 1.002.923.721	Rp948,854,570		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persen	100	100	Rp 256.577.171	Rp 240.168.938		
2	KECAMATAN	Kecamatan Sedati		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	74,55	74,55	Rp 240.292.840	Rp 199.878.500		
					Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	100	100				
					Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	Persen	75	75				
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan	Laporan	14	14	Rp 235.637.500	Rp 196.362.500		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Tingkat Kecamatan	kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan; dan perekonomian yang disusun							
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Berkas	21500	21500	Rp 2.131.200	Rp 1.320.000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan	Berkas	0	0	Rp 2.524.140	Rp 2.196.000		
						Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	12	12				
						Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	Laporan	1	1				
3	KECAMATAN	Kecamatan Sedati		PROGRAM KOORDINASI	Persentase pelanggaran Perda	Persen	100	100	Rp 93.700.000	Rp 90.955.000			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	dan Perkada yang ditangani							
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan masyarakat yang tersusun	Laporan	5	5	Rp 87.425.000	Rp 84.730.000		
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	Permasalahan	1	1	Rp 6.275.000	Rp 6.225.000		
4	KECAMATAN	Kecamatan Sedati		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	Rp 124.994.000	Rp 99.993.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	Rp 124.994.000	Rp 99.993.000		
5	KECAMATAN	Kecamatan Sedati		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai	Persen	100	100	Rp 102.950.000	Rp 101.060.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					dengan ketentuan dan tepat waktu							
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Desa	16	16	Rp 102.950.000	Rp 101.060.000		

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Waru		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	88.08	98.85	Rp 5.347.210.447	Rp 5.188.128.566		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	7	7	Rp 18.419.596	Rp 18.419.569		
					b. Jumlah dokumen laporan evaluasi PD kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	6	6				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	90	93	Rp 3.708.746.301	Rp 3.643.518.240		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	88.08	98.85	Rp 566.497.190	Rp 511.787.663		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	jenis	3	3	Rp 107.922.060	Rp 98.955.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	%	100	100	Rp 867.139.600	Rp 844.554.190		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	%	100	100	Rp 78.485.700	Rp 70.893.904		
3	KECAMATAN	Kecamatan Waru		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	%	80	80	Rp 422.880.713	Rp 390.971.935		
					c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	%	100	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	8	8	Rp 405.361.250	Rp 373.752.500		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Berkas	17000	17000	Rp 7.428.660	Rp 7.128.660		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan	Berkas	0	0	Rp 10.090.803	Rp 10.090.775		
						2. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat, pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	16	16				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

						3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	Laporan	4	5				
4	KECAMATAN	Kecamatan Waru		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	%	100	100	Rp 54.438.145	Rp 52.963.805		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan masyarakat yang tersusun	Laporan	4	4	Rp 54.438.145	Rp 52.963.805		
5	KECAMATAN	Kecamatan Waru		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	Rp 71.082.120	Rp 70.782.120		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Rp 71.082.120	Rp 70.782.120		
7	KECAMATAN	Kecamatan Waru		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	Rp 20.552.783	Rp 16.665.821		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu		17	17	Rp 20.552.783	Rp 16.665.821		
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	----	---------------	---------------	--	--

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Taman		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	91	91	Rp 12.157.159.137	Rp 11.860.669.053		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	6	6	Rp 1.100.000	Rp 210.200		
					b Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	7	7				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	%	93	97.63	Rp 10.391.439.013	Rp 10.249.585.785		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	91	95.85	Rp 474.991.460	Rp 400.618.533		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	%	100	100	Rp 1.181.628.664	Rp 1.103.455.022		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	%	100	100	Rp 108.000.000	Rp 106.799.513		
2	KECAMATAN	Kecamatan Taman		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	%	0	0	Rp 413.327.500	Rp 335.980.000		
					b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	100				
					c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	%	100	100				
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan	Laporan	16	16	Rp 413.327.500	Rp 335.980.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

						lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun							
3	KECAMATAN	Kecamatan Taman		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	%	100	100	Rp 75.475.000	Rp 74.637.500		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	Laporan	10	10	Rp 75.475.000	Rp 74.637.500		
4	KECAMATAN	Kecamatan Taman		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	Rp 106.725.000	Rp 86.775.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	Rp 106.725.000	Rp 86.775.000		
5	KECAMATAN	Kecamatan Taman		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , panganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	Rp 3.325.000	Rp 3.325.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					dan tepat waktu							
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Desa	16	16	Rp 3.325.000	Rp 3.325.000		

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Krian		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	Rp 7.694.926.357	Rp 7.359.355.253		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	6	6	Rp 2.953.008	Rp 2.952.440		
					b. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	7	7				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Persen	90	92.395	Rp 5.804.053.316	Rp 5.722.296.540		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	89	97.75	Rp 451.889.454	Rp 309.319.044		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	Jenis	1	1	Rp 71.855.900	Rp 68.450.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	98	97	Rp 1.104.317.175	Rp 1.008.442.383		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persen	98	97	Rp 259.857.504	Rp 247.894.846		
2	KECAMATAN	Kecamatan Krian		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	100	100	Rp 360.550.837	Rp 286.973.822		
					Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	100	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	Persen	0	0					
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	10	10	Rp 349.523.135	Rp 276.374.400		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Berkas	24500	24500	Rp 0	Rp 0		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	5	5	Rp 11.027.702	Rp 10.599.422		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

3	KECAMATAN	Kecamatan Krian		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	98	98	Rp 83.992.227	Rp 82.386.975		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	Laporan	20	20	Rp 78.716.752	Rp 77.111.525		
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi		30	31	Rp 5.275.475	Rp 5.275.450		
4	Non Urusan	Kecamatan Krian		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	%	98	98	Rp 50.967.588	Rp 49.209.938		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	Rp 50.967.588	Rp 49.209.938		
5	KECAMATAN	Kecamatan Krian		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan	Persen	100	100	Rp 15.543.820	Rp 15.143.500		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu							
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Desa	19	19	Rp 15.543.820	Rp 15.143.500		

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Wonoayu		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	91	98	Rp 4,726,163,641.00	Rp 4,632,104,921.00		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	96	97	Rp 3,219,127,511.00	Rp 3,163,395,563.00		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	97	98	Rp 374,804,240.00	Rp 364,495,412.00		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	1	1	Rp 3,595,290.00	Rp 3,500,000.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	%	100	100	Rp 916,746,400.00	Rp 893,286,567.00		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	66	66	Rp 211,890,200.00	Rp 207,427,379.00		
2	KECAMATAN	Kecamatan Wonoayu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administasi Terpadu Kecamatan	Nilai	97	98	Rp 368,419,420.00	Rp 307,713,200.00		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang di tindaklanjuti	%	100	100	Rp 366,730,000.00	Rp 306,025,000.00		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	%	100	100	Rp 1,689,420.00	Rp 1,688,200.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Daerah yang Ada di Kecamatan								
3	KECAMATAN	Kecamatan Wonoayu		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentasi Permasalahan trantibum yang difasilitasi	%	100	100	Rp 56,539,000.00	Rp 55,639,000.00		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	%	100	100	Rp 10,450,000.00	Rp 10,450,000.00		
					b. Persentase lembaga sosial, agama, dan masyarakat yang dibina	%	100	100	Rp 46,089,000.00	Rp 45,189,000.00		
4	KECAMATAN	Kecamatan Wonoayu		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administasi Terpadu Kecamatan	Nilai	97	98	Rp 94,525,000.00	Rp 93,006,000.00		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional	Kegiatan	1	1	Rp 94,525,000.00	Rp 93,006,000.00		
5	KECAMATAN	Kecamatan Wonoayu		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai	Nilai	97	98	Rp 4,750,000.00	Rp 4,750,000.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					dengan ketentuan dan tepat waktu							
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	Rp 4,750,000.00	Rp 4,750,000.00	

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Sukodono		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	nilai	86	86	Rp 5,636,073,558	Rp 5,351,702,367		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	persen	80	94.83	Rp 3,796,222,545	Rp 3,695,366,973		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		98.25	92.5	Rp 307,129,311	Rp 286,853,493		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan		2	2	Rp 129,119,108	Rp 126,695,622		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	persen	100	100	Rp 1,298,208,237	Rp 1,276,888,954		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	persen	100	100	Rp 105,394,357	Rp 100,107,670		
2	KECAMATAN	Kecamatan Sukodono		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	100	Rp 297,997,500	Rp 271,921,700		
					Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	%	100	100				
					Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	Persen	0	0				
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan	laporan	24	24	Rp 297,997,500	Rp 271,921,700		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

						lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun							
3	KECAMATAN	Kecamatan Sukodono		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	persen	100	100	Rp 60,150,000	Rp 59,090,000		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan masyarakat yang tersusun	laporan	14	14	Rp 60,150,000	Rp 59,090,000		
4	KECAMATAN	Kecamatan Sukodono		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	persen	84	100	Rp 117,647,500	Rp 100,790,000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	kegiatan	1	1	Rp 117,647,500	Rp 100,790,000		
5	KECAMATAN	Kecamatan Sukodono		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai	persen	100	100	Rp 7,600,000	Rp 7,520,000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					dengan ketentuan dan tepat waktu							
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Desa	19	19	Rp 7,600,000	Rp 7,520,000		

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Balongbendo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	persen	91,50	100	5,647,688,506.00	5,463,164,657.00		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Persen	87	95.34	3,892,007,183.00	3,769,685,050.00		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	Persen	100	100	500,000.00	500,000.00		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	98.13	98.37	349,066,246.00	331,184,063.00		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah BMD yang diadakan	Jenis	2	2	215,074,169.00	202,549,000.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Usuran Pemerintah Daerah								
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	Persen	100	100	681,358,053.00	675,674,641.00		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persen	100	100	509,682,855.00	483,571,903.00		
2	KECAMATAN	Kecamatan Balongbendo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	100	100	274,167,500.00	199,718,000.00			
						Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	Persn	0	0				
						Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	100	100				
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan	Laporan	12	12	271,292,500.00	196,843,000.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun							
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	Berkas	4900	4900	1,687,500.00	1,687,500.00		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup ;pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	4	4	1,187,500.00	1,187,500.00		
					Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	Laporan	4	4				
					Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan	Berkas	0	0				
3	KECAMATAN	Kecamatan Balongbendo		PROGRAM KOORDINASI	Persentase pelanggaran Perda	Persen	100	100	85,256,200.00	81,145,000.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	dan Perkada yang ditangani							
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan masyarakat yang tersusun	Laporan	2	2	82,381,200.00	78,320,000.00		
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	Permasalahan	4	4	2,875,000.00	2,825,000.00		
4	KECAMATAN	Kecamatan Balongbendo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	99,725,000.00	79,468,500.00		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	99,725,000.00	79,468,500.00		
5	KECAMATAN	Kecamatan Balongbendo		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Persen	100	100	5,250,000.00	4,062,500.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					dan tepat waktu							
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Desa	20	20	5,250,000.00	4,062,500.00		

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Tarik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	89.56 %	95.8	4,692,141,977.00	4,519,241,181.00		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	87	98.82	3,525,009,953.00	3,443,857,815.00		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	nilai	89.56	95.8	242,819,180.00	176,874,070.00		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	jenis	4	4	181,664,820.00	177,841,900.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	100	664,896,742.00	651,735,214.00		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persen	100	100	77,751,282.00	68,932,182.00		
2	KECAMATAN	Kecamatan Tarik		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Prosentase Izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan;	Persen	0	0	372,590,000.00	301,212,750.00		
					c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL;	Persen	100%	100				
					b. Prosentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar;	Persen	100%	100				
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan	laporan	10	10	336,490,000.00	272,966,000.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun								
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti		7	7	3,337,500.00	3,157,500.00		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan	berkas	0	0	32,762,500.00	25,089,250.00		
						b. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan hidup, pemerintahan dan perekonomian yang disusun	laporan	1	3				
						c. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	laporan	1	4				
3	KECAMATAN	Kecamatan Tarik		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang ditangani	Persen	100%	100	270,387,500.00	250,027,500.00			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang tersusun	laporan	2	2	270,387,500.00	250,027,500.00		
4	KECAMATAN	Kecamatan Tarik			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100%	100	45,976,400.00	42,390,000.00		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	kegiatan	2	2	45,976,400.00	42,390,000.00		
5	KECAMATAN	Kecamatan Tarik			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100%	100%	8,875,000.00	4,260,000.00		
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	desa	20	20	8,875,000.00	4,260,000.00		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Tulangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Nilai	93,2	169	Rp 5.532.878.981	Rp 5.252.414.643		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Persen	80	167.91	Rp 3.801.141.086	Rp 3.714.168.797		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	93.2	381.54	Rp 694.045.699	Rp 613.916.507		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	Unit	4	4	Rp 0	Rp 0		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	0	Rp 860.034.896	Rp 751.387.019		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	85	0	Rp 177.657.300	Rp 172.942.320		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pemerintahan Daerah	Daerah yang layak fungsi							
2	KECAMATAN	Kecamatan Tulangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Nilai	93,2	169	Rp 5.532.878.981	Rp 5.252.414.643		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Persen	80	167.91	Rp 3.801.141.086	Rp 3.714.168.797		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	93.2	381.54	Rp 694.045.699	Rp 613.916.507		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	Unit	4	4	Rp 0	Rp 0		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	0	Rp 860.034.896	Rp 751.387.019		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persen	85	0	Rp 177.657.300	Rp 172.942.320		
3	KECAMATAN	Kecamatan Tulangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN	b. Prosentase pelayanan	persen	100	175	Rp 409.825.000	Rp 371.066.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar								
					c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	persen	100	175					
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	4	4	Rp 396.850.000	Rp 358.466.000			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Laporan	3000	3000	Rp 3.225.000	Rp 3.225.000			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan,	Laporan	1	4	Rp 9.750.000	Rp 9.375.000			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun								
					b. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	Laporan	4	4					
4	KECAMATAN	Kecamatan Tulangan		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran perda dan perkara yang ditangani;	Persen	100	175	Rp 12.975.000	Rp 11.100.000			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	Laporan	4	4	Rp 8.100.000	Rp 6.975.000			
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	Laporan	1	12	Rp 4.875.000	Rp 4.125.000			
5	KECAMATAN	Kecamatan Tulangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	Persen	100	175	Rp 16.935.800	Rp 16.935.000			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	Rp 16.935.800	Rp 16.935.000		
6	KECAMATAN	Kecamatan Tulangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	Persen	100	175	Rp 16.935.800	Rp 16.935.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	Rp 16.935.800	Rp 16.935.000		
7	KECAMATAN	Kecamatan Tulangan		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	175	Rp 6.450.000	Rp 6.450.000		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Desa	22	22	Rp 6.450.000	Rp 6.450.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Prambon		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	95	95	Rp 5.905.810.000	Rp5,790,580,967		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah dokumen Perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	8	Rp 1.664.985	Rp 1.582.500		
					b. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	8	6				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Persen	89	87.41	Rp 4.491.656.029	Rp 4.412.359.066		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	81	98.45	Rp 302.731.127	Rp295,588,639		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	2	2	Rp 29.595.930	Rp 27.545.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase terpenuhinya jasa	Persen	100	100	Rp 700.190.955	Rp 680.356.203		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pemerintahan Daerah	penunjang perkantoran								
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persen	80	80	Rp 379.970.974	Rp 373.149.559			
2	KECAMATAN	Kecamatan Prambon		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase Izin yang menjadi kewenangan Kecamatan Yang diterbitkan	Persen	0	0	Rp 317.172.500	Rp 247.342.500			
					b. Persentase Pelayanan Kewenangan Kecamatan Yang dilaksanakan sesuai Standart	Persen	100	100					
					c. Persentase Desa yang mendapat Pembinaan tentang Lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat dan PKL	Persen	100	100					
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	12	10	Rp 317.172.500	Rp 247.342.500			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

3	KECAMATAN	Kecamatan Prambon		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	Rp 43.400.000	Rp 35.607.000		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	Laporan	6	6	Rp 43.400.000	Rp 35.607.000		
4	KECAMATAN	Kecamatan Prambon		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	99.99	Rp 30.137.500	Rp 29.727.500		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	Rp 30.137.500	Rp 29.727.500		
5	KECAMATAN	Kecamatan Prambon		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	Rp 6.200.000	Rp 5.409.000		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan ,	Desa	20	20	Rp 6.200.000	Rp 5.409.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu							
--	--	--	--	--	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Krembung		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur OPD terhadap Pelayanan Kesekretariatan	nilai	90	100	Rp 4.954.529.670	Rp 4.550.555.687		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD		90	93.56	Rp 3.629.030.284	Rp 3.403.007.758		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	nilai	74.5	76.5	Rp 415.882.018	Rp 326.770.790		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	unit	4	4	Rp 50.000.000	Rp 47.086.400		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	persen	100	100	Rp 726.456.968	Rp 643.949.489		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	persen	80	100	Rp 133.160.400	Rp 129.741.250		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

2	KECAMATAN	Kecamatan Krembung		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur OPD terhadap Pelayanan Kesekretariatan	nilai	90	100	Rp 4.954.529.670	Rp 4.550.555.687		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD		90	93.56	Rp 3.629.030.284	Rp 3.403.007.758		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	nilai	74.5	76.5	Rp 415.882.018	Rp 326.770.790		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	unit	4	4	Rp 50.000.000	Rp 47.086.400		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	persen	100	100	Rp 726.456.968	Rp 643.949.489		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	persen	80	100	Rp 133.160.400	Rp 129.741.250		
3	KECAMATAN	Kecamatan Krembung		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	persen	100	100	Rp 324.910.000	Rp 277.985.000		
					b. Persentase Pelayanan kewenangan	persen	88	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar								
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	laporan	4	4	Rp 321.035.000	Rp 274.110.000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan	laporan	0	0	Rp 3.875.000	Rp 3.875.000		
						2. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	laporan	4	4				
						3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	laporan	4	4				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

4	KECAMATAN	Kecamatan Krembung		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	persen	100	100	Rp 85.925.000	Rp 83.040.000		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	laporan	4	4	Rp 85.925.000	Rp 83.040.000		
5	KECAMATAN	Kecamatan Krembung		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	persen	100	100	Rp 66.730.000	Rp 66.424.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	kegiatan	2	2	Rp 66.730.000	Rp 66.424.000		
6	KECAMATAN	Kecamatan Krembung		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	persen	100	100	Rp 66.730.000	Rp 66.424.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	kegiatan	2	2	Rp 66.730.000	Rp 66.424.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

7	KECAMATAN	Kecamatan Krembung		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	persen	100	100	Rp 4.750.000	Rp 4.750.000		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	desa	19	19	Rp 4.750.000	Rp 4.750.000		

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Tanggulangin		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	98.24	95.33	Rp 5.513.702.533	Rp 5.257.375.254		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	%	93	93.98	Rp 3.926.109.968	Rp 3.766.557.749		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	88.45	95.33	Rp 371.376.900	Rp 358.924.738		
				Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Jenis	1	1	Rp 8.769.000	Rp 8.500.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	%	84	95	Rp 807.446.665	Rp 767.252.448		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	%	80	89	Rp 400.000.000	Rp 356.140.319		
2	KECAMATAN	Kecamatan Tanggulangin		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	100	Rp 329.270.000	Rp 229.315.000		
					Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	%	100	100				
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	4	4	Rp 329.270.000	Rp 229.315.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

3	KECAMATAN	Kecamatan Tanggulangin		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	%	100	100	Rp 38.750.000	Rp 38.750.000		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	Laporan	4	4	Rp 38.750.000	Rp 38.750.000		
4	KECAMATAN	Kecamatan Tanggulangin		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	Rp 63.988.000	Rp 62.100.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	kegiatan	1	1	Rp 63.988.000	Rp 62.100.000		
5	KECAMATAN	Kecamatan Tanggulangin		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan	Desa	18	18	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Pengawasan Pemerintahan Desa	pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu							
--	--	--	--	------------------------------	---------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Jabon		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Nilai	91.3	91.3	Rp 4.122.387.319	Rp 3.935.984.002		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	7	7	Rp 2.803.912	Rp 2.367.110		
					b. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	6	6				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Persen	90.5	90.5	Rp 2.835.315.403	Rp 2.771.978.910		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	86.5	98.52	Rp 308.979.449	Rp 282.714.488		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	1	1	Rp 97.853.160	Rp 85.750.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	Persen	100	100	Rp 760.269.695	Rp 720.388,874		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persen	100	100	Rp 117.165.700	Rp 72.784.620		
2	KECAMATAN	Kecamatan Jabon		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Prosentase Izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	Persen	78.95	78.95	Rp 221.410.000	Rp 177.542.500		
					b. Prosentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standart	Persen	96.53	96.53				
					c. Persentase desa yang mendapat pembinaan Lingkungan hidup, Usaha ekonomi dan PKL	Persen	100	100				
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan		11	11	Rp 206.525.000	Rp 164.332.500		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					perekonomian yang disusun								
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti		8600	8600	Rp 5.045.000	Rp 4.845.000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	a. Jumlah Laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang dilaksanakan		4	4	Rp 9.840.000	Rp 8.365.000		
						b. Jumlah Laporan kegiatan pembinaan yang tersusun		2	2				
3	KECAMATAN	Kecamatan Jabon			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pelanggaran perda dan perkada yang ditangani	Persen	100	100	Rp 78.917.500	Rp 76.015.000		
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan Lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang tersusun	Laporan	6	1	Rp 78.917.500	Rp 76.015.000		
4	KECAMATAN	Kecamatan Jabon			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase penyelenggaraan	Persen	100	100	Rp 176.795.000	Rp 147.670.000		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik							
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	5	5	Rp 176.795.000	Rp 147.670.000		
5	KECAMATAN	Kecamatan Jabon		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	Rp 4.017.000	Rp 3.413.800		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Desa	13	13	Rp 4.017.000	Rp 3.413.800		

UNSUR KEWILAYAHAN												
No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KECAMATAN	Kecamatan Porong		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	92	98.89	Rp 7.757.735.326	Rp 7.256.325.292		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan		5	5	Rp 9.614.579	Rp 9.155.252		
					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan		4	4				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		82	96.97	Rp 5.860.765.350	Rp 5.656.106.244		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	nilai	93.285	98.89	Rp 667.467.231	Rp 517.527.400		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran		100	100	Rp 861.994.484	Rp 724.940.080		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100	100	Rp 357.893.682	Rp 348.596.316		
2	KECAMATAN	Kecamatan Porong		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	100	100	Rp 472.095.000	Rp 364.202.500		
					Persentase desa yang mendapat	Persen	100	100				



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

					pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL								
					Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	Persen	-	0					
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	laporan	8	8	Rp 472.095.000	Rp 364.202.500			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	berkas	8100	6460	Rp 0	Rp 0			
3	KECAMATAN	Kecamatan Porong		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	Rp 5.000.000	Rp 4.275.000			
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	permasalahan	1	1	Rp 5.000.000	Rp 4.275.000			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

4	KECAMATAN	Kecamatan Porong		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	Rp 63.575.000	Rp 63.515.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan		3	3	Rp 63.575.000	Rp 63.515.000		
5	KECAMATAN	Kecamatan Porong		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	Rp 5.000.000	Rp 4.992.500		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	desa	12	12	Rp 5.000.000	Rp 4.992.500		
5	KECAMATAN	Kecamatan Porong		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	Pokmas	1	1	Rp 1,146,333,000	Rp 1,134,390,916		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	Pokmas	1	1	Rp 1,146,333,000	Rp 1,134,390,916		



E. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan strategis berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan sepanjang Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut :

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Pajak dan Retribusi Daerah	PERDA Nomor 01 Tahun 2024	Memberikan kepastian huruf besaran tarif Pajak dan retribusi bagi masyarakat serta menjadi pedoman pemungutan bagi penyelenggara pemerintahan
2	Fasilitasi Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah Serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya	PERDA Nomor 02 Tahun 2024	Sebagai pedoman pelaksanaan fasilitasi Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah Serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya
3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PERDA Nomor 03 Tahun 2023	Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sosial, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
4	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044	PERDA Nomor 04 Tahun 2024	Mewujudkan Sidoarjo sebagai pendukung pusat kegiatan nasional berbasis



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			perdagangan jasa, industri, manajemen logistik, perikanan dan pertanian melalui pemerataan pembangunan yang harmoni dan berkelanjutan
5	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PERDA Nomor 05 Tahun 2024	Bentuk akuntabilitas capaian kinerja Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2023
6	Pengarusutamaan gender	PERDA Nomor 06 Tahun 2024	Pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender
7	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	PERDA Nomor 07 Tahun 2024	Memberi Kepastian hukum pagu dan rincian Anggaran dalam penyelenggaraan program kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2024
8	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045	PERDA Nomor 08 Tahun 2024	Sebagai Acuan dalam perencanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan	PERDA Nomor 08 Tahun 2024	Memberikan Kepastian hukum bagi pemberian Hak-Hak Keuangan DPRD dan Sinkronisasi regulasi sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
10	Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah	PERDA Nomor 10 Tahun 2024	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian pembangunan Daerah
11	Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	PERDA Nomor 11 Tahun 2024	Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah untuk menjamin upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas
12	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	PERDA Nomor 12 Tahun 2024	Memberi Kepastian hukum pagu dan rincian Anggaran dalam penyelenggaraan program kegiatan Pemerintah Daerah pada Tahun 2025
13	Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah	PERBUP Nomor 01 Tahun 2024	Untuk menjamin pemerataan pendidikan dan layanan yang berkualitas, serta dalam rangka tertib administrasi penyediaan dan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Luar Biasa di Kabupaten Sidoarjo		
14	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 02 Tahun 2024	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat beradaptasi dengan dinamika penyelenggaraan pelayanan publik dan perkembangan teknologi, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam kinerja Penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala
15	Besaran Presentase Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	PERBUP Nomor 03 Tahun 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
16	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 TAHUN 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	PERBUP Nomor 05 Tahun 2024	Untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor 976/44625/021.3/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Pagu Indikatif DBH CHT Kabupaten/Kota T.A. 2024, Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Nomor 900/2892/438.6.5/2023 tanggal 11



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			Desember 2023, perihal Permohonan Penambahan Anggaran Hibah Bawaslu 2024, Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 050/9515/438.5.2/2023, tanggal 31 Desember 2023 perihal Permohonan Bantuan BTT, serta surat-surat permohonan pergeseran dari OPD
17	Perhitungan Nilai Sewa Reklame	PERBUP Nomor 06 Tahun 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
18	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 - 2028	PERBUP Nomor 07 Tahun 2024	Dalam rangka menerapkan standar pelayanan minimal
19	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 08 Tahun 2024	Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan satu data di Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Satu Data



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			Kabupaten Sidoarjo
20	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 09 Tahun 2024	Dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sidoarjo, perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD PALD) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan prinsip efektif, efisiensi, dan produktivitas
21	Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat	PERBUP Nomor 10 Tahun 2024	dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, dan sebagai upaya pemerataan kesempatan serta meningkatkan akses memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat, maka perlu pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo
22	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja	PERBUP Nomor 11 Tahun 2024	Untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Daerah Tahun Anggaran 2024		Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, dan surat-surat permohonan pergeseran dari Perangkat Daerah
23	Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2024	PERBUP Nomor 12 Tahun 2024	Sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah
24	Pedoman Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi Pelaku Olahraga Berprestasi	PERBUP Nomor 13 Tahun 2024	Dalam rangka menghargai prestasi dan sebagai upaya peningkatan prestasi keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, Lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga
25	Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri melalui Pemberian Penghargaan	PERBUP Nomor 14 Tahun 2024	Untuk peningkatan pendapatan masyarakat (khususnya perempuan) dan mendukung ketahanan ekonomi keluarga, sehingga upaya pemberdayaan perlu dilakukan secara berkelanjutan
26	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	PERBUP Nomor 15 Tahun 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024
27	Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah	PERBUP Nomor 16 Tahun 2024	Untuk mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah
28	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor	PERBUP Nomor 17 Tahun 2024	Untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024		Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kab/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/181/KPTS/013/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, serta surat-surat permohonan pergeseran dari Perangkat Daerah
29	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024	PERBUP Nomor 18 Tahun 2024	Sehubungan hasil evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa
30	Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dan Insentif Fiskal Pajak Air Tanah	PERBUP Nomor 19 Tahun 2024	Untuk mengantisipasi gejolak di masyarakat perlu memberikan Insentif Fiskal Pajak Air Tanah, untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi kepada pelaku usaha berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak
31	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 TAHUN 2022	PERBUP Nomor 20 Tahun 2024	Melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo		kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada bidang tertentu diantaranya bidang seni budaya sebagaimana amanat ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
32	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 21 Tahun 2024	Sehubungan dengan perubahan nama dan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo sesuai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 91200098509610001, serta adanya penyesuaian tugas dan fungsi
33	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di	PERBUP Nomor 22 Tahun 2024	Sehubungan dengan adanya perubahan nama pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta penyesuaian pada titelatur



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo		
34	Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo	PERBUP Nomor 23 Tahun 2024	Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit yang baik, tata kelola klinis yang baik, menjamin efektifitas, efisiensi, dan mutu layanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit, perlu disusun pedoman berupa Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws)
35	Tata Cara Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri serta Kawasan Perdagangan dan Jasa	PERBUP Nomor 24 Tahun 2024	Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan Industri dan Kawasan Perdagangan/ Jasa
36	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam	PERBUP Nomor 25 Tahun 2024	Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif,



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
37	Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	PERBUP Nomor 26 Tahun 2024	Untuk menindaklanjuti surat-surat permohonan pergeseran dari OPD
38	Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025	PERBUP Nomor 27 Tahun 2024	Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas Pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu menyusun Analisis Standar Belanja



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
39	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	PERBUP Nomor 28 Tahun 2024	Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
40	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	PERBUP Nomor 29 Tahun 2024	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 perlu disesuaikan dengan perkembangan dalam tahun berjalan antara lain berupa perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
41	Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	PERBUP Nomor 30 Tahun 2024	Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
42	Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 110 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 31 Tahun 2024	Untuk meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang lebih efektif dan efisien, maka Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Urangagung 2 yang didirikan pada tahun 2023 akan menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2025
43	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	PERBUP Nomor 32 Tahun 2024	Sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia khususnya dibidang pendidikan, perlu adanya pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
44	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	PERBUP Nomor 33 Tahun 2024	Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa di Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan penyesuaian kewajiban perangkat desa



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
45	Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo	PERBUP Nomor 34 Tahun 2024	Dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Bupati dan Wakil Bupati
46	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	PERBUP Nomor 35 Tahun 2024	Sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
47	Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo	PERBUP Nomor 36 Tahun 2024	Bahwa pelaksanaan tugas Bupati dapat dilaksanakan oleh Wakil Bupati dalam hal Bupati berhalangan sementara dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
48	Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	PERBUP Nomor 37 Tahun 2024	Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
49	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	PERBUP Nomor 38 Tahun 2024	Bahwa sesuai dengan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
50	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PERBUP Nomor 39 Tahun 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
51	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	PERBUP Nomor 40 Tahun 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
52	Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	PERBUP Nomor 41 Tahun 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
53	Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 42 Tahun 2024	Dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi
54	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024	PERBUP Nomor 43 Tahun 2024	Adanya perubahan besaran pada pendapatan transfer serta target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
55	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	PERBUP Nomor 44 Tahun 2024	Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Sidoarjo, serta Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perkembangan peraturan perundangundangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan
56	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 45 Tahun 2024	Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tambahan penghasilan kinerja pegawai, serta sehubungan dengan penyempurnaan substansi pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
57	Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 46 Tahun 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			<p>Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan untuk menyesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.31/7010/SJ tertanggal 2 November 2017 Perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional</p>



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
58	Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Menengan Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa dia Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 47 Tahun 2024	Dalam rangka tertib administrasi penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Sidoarjo
59	Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa	PERBUP Nomor 48 Tahun 2024	Terdapat perubahan rumusan pengaturan terkait Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan hukum saat ini
60	Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo	PERBUP Nomor 49 Tahun 2024	Adanya pemberian jaminan sosial di bidang



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa		ketenagakerjaan pada anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa
61	Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah	PERBUP Nomor 50 Tahun 2024	Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa
62	Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi	PERBUP Nomor 51 Tahun 2024	Adanya perubahan kebijakan pelaksanaan program Warung Rakyat direnovasi yang dilaksanakan oleh Desa dan Kelurahan melalui Kecamatan
63	Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus	PERBUP Nomor 52 Tahun 2024	Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo, perlu



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Program Warung Rakyat Direnovasi Tahun 2024		dilakukan pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya bagi pelaku usaha warung, melalui penyediaan tempat yang memadai baik dari aspek layanan, kebersihan dan kenyamanan, serta kebijakan pelaksanaan program Warung Rakyat direnovasi tahun 2024 dilaksanakan oleh Desa melalui pemberian Bantuan Keuangan Khusus
64	Tata Cara Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan	PERBUP Nomor 53 Tahun 2024	Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan Industri dan Kawasan Perdagangan/ Jasa, dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			Perumahan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum Daerah dalam pelaksanaan penyerahan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, sehingga perlu diganti
65	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	PERBUP Nomor 54 Tahun 2024	Untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4295/SJ tanggal 3 September 2024 perihal Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta surat-surat permohonan pergeseran dari OPD
66	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 55 Tahun 2024	Sehubungan dengan adanya kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan prestasi kerja untuk tribulan IV pada bulan Desember tahun berkenaan serta kebijakan terkait perhitungan penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta sehubungan dengan penyempurnaan substansi pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
67	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	PERBUP Nomor 56 Tahun 2024	Untuk menindaklanjuti surat-surat permohonan pergeseran dari Perangkat Daerah dan adanya kebijakan untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			berdasarkan prestasi kerja untuk tribulan IV pada bulan Desember tahun berkenaan
68	Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 57 Tahun 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
69	Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 58 Tahun 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
70	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	PERBUP Nomor 59 Tahun 2024	Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
71	Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Belanja Rumah Tangga	PERBUP Nomor 60 Tahun 2024	Pengaturan pelaksanaan tugas Bupati dapat dilaksanakan oleh Wakil Bupati dalam hal Bupati



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo		berhalangan sementara dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
72	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	PERBUP Nomor 61 Tahun 2024	Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti
73	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	PERBUP Nomor 62 Tahun 2024	Dalam rangka kelancaran dan ketertiban proses akuntansi guna mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo
74	Penyelenggaraan Sentra Industri Hasil Tembakau Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 63 Tahun 2024	Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			Persampahan/Kebersihan, pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah
75	Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2025	PERBUP Nomor 64 Tahun 2024	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah
76	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	PERBUP Nomor 65 Tahun 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
77	Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2025	PERBUP Nomor 66 Tahun 2024	Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
78	Besaran BKK, ADD, BHP, dan BHR Tahun Anggaran 2025	PERBUP Nomor 67 Tahun 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
79	Perubahan Kedua Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2023	PERBUP Nomor 68 Tahun 2024	Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 terkait uji materiil Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dengan hasil Putusan yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bertentangan dengan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum
80	Peta Jabatan	PERBUP Nomor 69 Tahun 2024	Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peta Jabatan di Kabupaten Sidoarjo
81	Kelas Jabatan	PERBUP Nomor 70 Tahun 2024	Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1255/M.SM.02.00/2024, tanggal 23 September 2024, hal; Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN SEBELUMNYA

1. Bagian Pemerintahan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Melakukan analisis guna mencari penyebab gagal mencapai target yaitu Status Kinerja LPPD, DPRD merekomendasikan untuk mengurangi tunjangan (TPP / Tukin) ASN di OPD terkait	Terdapat regulasi yang tidak sinkron antara PermenPANRB 89 Tahun 2021 yang mengatur indikator kinerja renstra perangkat daerah bersifat ramping, kuat, dan high level. Sementara pada Permendagri 18 Tahun 2020 yang mengatur tentang LPPD merupakan list indikator umum yang tidak seluruhnya dipergunakan dalam RENSTRA. Hal ini menyebabkan pada saat Kabupaten Sidoarjo fokus peningkatan nilai SAKIP yang mengacu pada PermenPANRB 89 Tahun 2021 maka isian LPPD tidak dapat terakomodir secara keseluruhan. Dilema ini yang menyebabkan status kinerja LPPD tidak tercapai dari target Tahun 2023 (capaian sebesar 3,78), namun capaiannya meningkat jika dibandingkan dari Tahun 2022 (capaian sebesar 3,61)	Penilaian status kinerja LPPD meningkat
2.	Untuk meningkatkan pelayanan publik maka harus ada keterlibatan semua pihak mulai dari tingkat RT serta adanya ketersediaan anggaran yang mencukupi	Kebijakan percepatan peningkatan pelayanan publik telah dilakukan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kewenangannya meliputi : 1. Pemangkasan birokrasi untuk mendukung kemudahan usaha dan layanan publik melalui review terhadap 1.300 SP dan SOP 2. Penguatan koordinasi pelayanan publik daerah telah dilakukan sedemikian rupa sehingga layanan publik di semua level hingga tingkat RT telah dilaksanakan secara efektif dan efisien	Peningkatan Pelayanan Publik



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

3.	Belum adanya Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Camat sehingga masalah yang ada di wilayah seperti banjir, normalisasi sungai dan jalan banyak yang tidak terselesaikan dan lama penanganannya (perlu ada evaluasi Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat). Sedangkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah dan cepat terselesaikan maka harus didukung dengan SDM, anggaran dan sarana prasarana yang cukup	Telah ada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang diantaranya pelimpahan kewenangan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari Pemeliharaan Jalan dan Pemeliharaan Saluran. Kedepan akan dilaksanakan penguatan koordinasi TAPD dan Banggar untuk penguatan SDM dan daya dukung lainnya agar Perbup dimaksud dapat diimplementasikan mulai tahun berjalan 2024.	Mempercepat Pelayanan Kepada Masyarakat
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

2. Bagian Hukum

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Bagian Hukum segera melakukan evaluasi terhadap Perda-Perda yang sudah tidak sesuai dengan regulasi saat ini	<p>1. Bagian hukum telah melakukan kegiatan evaluasi dan ditemukan sebanyak 6 Produk Hukum Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian, serta ditindak lanjuti dengan menyampaikan hasil evaluasi produk hukum daerah kepada Perangkat Daerah terkait. Enam Produk hukum sebagai yang dimaksud antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERDA No 3 Tahun 2011 - PERDA No 7 Tahun 2012 - PERDA No 9 Tahun 2012 - PERDA No 10 Tahun 2012 - PERDA No 13 Tahun 2019 - <p>2. Data yang dimaksud akan dikirim paling lambat tanggal 9 Desember 2024</p>	<p>1. Tidak adanya produk hukum daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi</p> <p>2. Terciptanya produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p>



3. Bagian Perekonomian

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD, BLUD, pertambangan dan lingkungan hidup	<p>Bagian Perekonomian telah melakukan langkah penyehatan BUMD dan BLUD berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDAM berupa evaluasi Sambungan Rumah (SR) yang masih 40% 2. PDAU berupa rencana perluasan unit jenis usaha baru yang memiliki profit margin lebih besar 3. Pelaksanaan rapat kerja penyehatan kinerja BUMD yang difokuskan pada peningkatan SDM, evaluasi kinerja, dan pembahasan rencana kerja di tahun 2025 4. Penyusunan Raperda pembinaan dan pengawasan kinerja BUMD dan BLUD akan dilakukan di Tahun 2025 5. Telah disusun Rancangan Perbup pengelolaan keuangan BLUD 6. Telah dilakukan fasilitasi terkait sosialisasi pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga oleh Kementerian ESDM di Kabupaten Sidoarjo 7. Monitoring dan evaluasi penggunaan LPG tabung 3 kg bersubsidi tepat sasaran 	Peningkatan kinerja BUMD dan BLUD

4. Bagian Administrasi Pembangunan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Bagian AP Lebih meningkatkan lagi pengawasan dan berperan lebih Aktif lagi dalam memonitoring dan mengevaluasi progam kegiatan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh semua OPD karena selama ini pelaporan di aplikasi e-kenda dengan kenyataan di lapangan tidak sesuai	<p>Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan, khususnya paket fisik/konstruksi yang dilaksanakan OPD melalui aplikasi E-Kenda maupun kunjung langsung ke lapangan, hal ini untuk membandingkan inputan target dengan</p>	Paket fisik/konstruksi telaksana tepat waktu



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		realisasi fisik yang ada di lapangan yang diinput oleh konsultan pengawas	
2.	Lebih menyempurnakan lagi Aplikasi e-Kenda agar lebih bisa mengontrol Laporan pekerjaan yang di lakukan oleh OPD, karena selama ini Laporan yang ada di Aplikasi e-kenda sudah 100% tapi kenyataan di lapangan tidak sesuai	Untuk menjawab permasalahan pengendalian paket fisik/konstruksi, aplikasi E-Kenda terus mengupdate fitur-fitur, sehingga meminimalisir ketidak konsistenan konsultan pengawas dalam input target, realisasi dan bukti fisik	Paket fisik/konstruksi telaksana tepat waktu

5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	UKPBJ supaya mendukung OPD, terkait pengajuan pekerjaan lelang kegiatan perencanaan proyek proyek strategis untuk di lakukan di tahun sebelumnya sehingga SPK bisa selesai di bulan Maret dan pekerjaan fisiknya tidak selalu terlambat di akhir tahun (seperti pekerjaan trotoar di GOR)	1. Untuk proyek strategis tahun 2025, telah dilakukan tender dini telah dilakukan di tahun 2024 untuk mengantisipasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan 2. Bagian PBJ telah menyusun timeline dan melakukan koordinasi lintas OPD untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis tetapi dalam pelaksanaannya terhambat oleh kesiapan teknis dari OPD yang bersangkutan dan Pihak penyediannya	Memastikan proyek strategis dapat terlaksana sesuai dengan target
2.	Menghimbau kepada PPKom untuk lebih selektif lagi dalam memilih konsultan perencana dan konsultan Pengawas	1. Bagian PBJ telah menerapkan seleksi ketat berdasarkan SOP terhadap Penyedia Jasa Konsultan di Tahun 2024 2. Pada saat pengajuan DPP, Bagian PBJ memberikan saran dan revidi untuk selektif memilih konsultan melalui kroscek penilaian kinerja penyedia	Mendapatkan konsultan yang sesuai kebutuhan Paket fisik/konstruksi telaksana tepat waktu



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

3.	Melakukan blacklist terhadap kontraktor/penyedia yang kualitas pekerjaannya sangat tidak memenuhi standarisasi/tidak sesuai dengan kontrak	1. Bagian PBJ telah melakukan prosedur blacklist sesuai kewenangan yang dimiliki, dan melakukan sosialisasi prosedur blacklist kepada Perangkat Daerah 2. Bagian PBJ sudah melakukan pendampingan atau monitoring evaluasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di OPD	Bagian PBJ telah melakukan sosialisasi Prosedur Blacklist terhadap Perangkat Daerah Tahun 2024
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Bagian Organisasi

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Melakukan analisis guna mencari penyebab gagal mencapai target yaitu Nilai SAKIP Kabupaten, DPRD merekomendasikan untuk mengurangi tunjangan (TPP / Tukin) ASN di OPD terkait	Salah satu penyebab tidak tercapainya nilai SAKIP adalah implementasi penjenjangan kinerja (Pokin) sesuai Permenpan 89 Tahun 2021 belum dapat terselesaikan di Tahun 2023. Selanjutnya Pokin tersebut telah dapat terselesaikan di Tahun 2024	Tercapainya Nilai SAKIP Kabupaten sesuai target
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan agar Nilai SAKIP Daerah, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terus meningkat lebih baik	Bagian Organisasi telah melakukan konsultasi perihal upaya peningkatan Nilai SAKIP, IPK, dan IPKD di Tahun 2024 dan direncanakan dilakukan pendampingan intensif oleh Kementerian terkait di Tahun 2025	Peningkatan Nilai SAKIP, IPK, dan IPKD
3.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah; agar Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah terus meningkat	1. Bagian Organisasi telah melakukan revitalisasi terhadap 1.300 SP dan SOP kemudahan berusaha dan pelayanan publik di tahun 2023 dan akan terus ditingkatkan penerapannya di tahun 2024 2. Bagian Organisasi telah melakukan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) kepada seluruh unit kerja pelayanan (111 unit kerja termasuk Puskesmas dan Kelurahan) di tahun 2024	Peningkatan kualitas pelayanan publik



7. Badan Kepegawaian Daerah

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Kekosongan jabatan yang terjadi mulai tingkat Kelurahan sampai dengan eselon II yang hingga saat ini masih juga belum terisi oleh pejabat definitif untuk segera diisi agar layanan masyarakat bisa berjalan dengan baik dan efektif	Telah melaksanakan pengisian jabatan di tahun 2024 hingga level Kelurahan.	Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat
2.	Agar BKD menjalankan SOP secara serius dan konsisten terkait mutasi internal yang meliputi rotasi dan promosi maupun mutasi masuk dan keluar Kabupaten Sidoarjo	Seluruh kebijakan rotasi dan mutasi baik internal maupun eksternal telah sesuai dengan SOP	
3.	Meningkatkan koordinasi antar OPD, agar sinkronisasi dengan program pembangunan yang dilaksanakan	Telah melaksanakan pengisian jabatan di tahun 2024 hingga level Kelurahan.	

8. Badan Pelayanan Pajak Daerah

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Terkait pajak daerah, OPD teknis masih kurang matang terkait penentuan potensi, target dan realisasi sehingga lampauan terlalu tinggi dan berdampak pada SILPA. Sehingga perlu dilakukan kajian potensi pendapatan oleh pihak ketiga.	Telah dilakukan review target pendapatan berdasarkan analisis potensi pajak yang bertujuan agar penentuan target pajak kedepan lebih presisi	Penentuan potensi, target, dan proyeksi penerimaan pajak daerah sehingga diharapkan menjadi lebih akurat/ presisi
2.	Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan pajak daerah, yaitu : 1. Penerbitan e-SPPT PBB-P2 dengan menampilkan informasi tunggakan PBB; 2. Adanya penangguhan ketetapan atas objek yang terdapat piutang di atas 5 tahun untuk ketetapan dibawah Rp2.000.000 dan 10 tahun untuk ketetapan di atas Rp2.000.000; 3. Mendorong berdirinya BUMDes untuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak;	Atas upaya dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah telah dilaksanakan sejak Tahun 2022, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Penerbitan SPPT PBB-P2 dengan menampilkan informasi tunggakan PBB - P2 tahun-tahun sebelumnya telah dilaksanakan sejak Tahun Pajak 2022. Wajib Pajak juga dapat melaksanakan proses cetak mandiri SPPT PBB-P2 dan cetak informasi pembayaran (e-CT) melalui website BPPD Kabupaten Sidoarjo. Pada	Untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	<p>4. Bekerja sama dengan APH dalam rangka penindakan kepada wajib pajak;</p> <p>5. Pemasangan alat perekam transaksi untuk memudahkan pengawasan transaksi objek pajak;</p> <p>6. Meningkatkan sistem pelayanan pajak daerah secara daring sehingga akses kepada Wajib pajak lebih mudah</p>	<p>Tahun 2023, dalam rangka memperluas dan mempercepat proses penyampaian SPPT PBB-P2, BPPD Kabupaten Sidoarjo juga telah melaksanakan inovasi penyampaian SPPT PBB-P2 secara virtual melalui Whatsapp kepada nomor Wajib Pajak yang telah terdaftar.</p> <p>2. Pelaksanaan penangguhan ketetapan atas objek yang terdapat piutang di atas 5 tahun untuk ketetapan di atas Rp2.000.000,00 dan 10 tahun untuk ketetapan di bawah Rp2.000.000,00 telah dilaksanakan pada Tahun Pajak 2022 dan 2023. Namun kegiatan ini tidak dilaksanakan lagi pada Tahun 2024 karena adanya temuan pada Laporan Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2022.</p> <p>3. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada Desa ataupun melalui Kecamatan, BPPD Kabupaten Sidoarjo telah menghimbau masing-masing Desa untuk menyelenggarakan BUMDes untuk dapat menerima pembayaran PBB-P2 dari masyarakat. Atas rekomendasi Saudara, kami akan menindaklanjuti dan meningkatkan pelaksanaan himbauan dan sosialisasi kepada Desa dengan lebih masif.</p> <p>4. 5, 6 Upaya-upaya tersebut akan ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih intensif sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Tahun 2024</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Melakukan analisis guna mencari penyebab gagal mencapai target yaitu Indeks Resiko Bencana DPRD merekomendasikan untuk	1. Berdasarkan nilai IRB yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Timur, maka kinerja tahun 2023 telah mencapai target sebesar 69,88	Peningkatan capaian nilai IRB



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	mengurangi tunjangan (TPP / Tukin) ASN di OPD terkait	(Sedang) sedangkan berdasarkan perhitungan mandiri oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo tercapai sebesar 98,12 (Sedang). Dua poin penyebab belum tercapainya target IRB adalah masih rendahnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana serta belum optimalnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Upaya yang telah dilakukan BPBD di tahun 2024 adalah penguatan Desa Tangguh Bencana (DESTANA dan implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). 2. Faktor penting yang belum dapat dipenuhi adalah penyediaan/penambahan gudang logistik dan sarana prasarana kedaruratan.	
2.	Perlu adanya penambahan Pos Damkar	1. Pada Tahun 2023 BPBD telah mengajukan anggaran penambahan pos damkar namun terkena refocussing karena ada fokus prioritas pembangunan lainnya. 2. Prioritas untuk mendekati angka response time berdasarkan pemetaan BPBD adalah di Kecamatan Sukodono	Penambahan Pos Damkar Unit baru
3.	Langkah-langkah untuk tetap menjaga penanganan bencana kebakaran dengan cepat, tidak jauh dari respond time, dengan pos damkar yang terbatas, dengan bantuan relawan dan masyarakat untuk menunjang masyarakat tanggap bencana kebakaran seharusnya di setiap kelurahan atau desa ada motor/dorkas APAR	1. BPBD telah melakukan pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran di tahun 2023 sejumlah 40 orang, namun terkendala daya dukung berupa dorkas APAR yang belum tersedia. 2. BPBD telah koordinasi dengan Bagian Pemerintahan Setda untuk penyediaan sarpras dorkas APAR di masing-masing Desa melalui anggaran Desa.	Ketersediaan Motor / Dorkas APAR pada setiap kelurahan / desa
4.	Setiap gedung/kantor baik pemerintah/swasta dan kantor Desa/Balai Desa di seluruh Kabupaten Sidoarjo harus mempunyai Alat Pemadam Kebakaran (APAR)	1. Berdasarkan instruksi BPBD, maka setiap tempat usaha telah dilengkapi dengan APAR sejak 10 tahun terakhir 2. Sebagian besar kantor OPD telah dilengkapi dengan APAR, namun mekanisme inspeksi kelayakan alat belum berjalan secara menyeluruh, akan diintensifkan di tahun 2024	Ketersediaan APAR pada gedung / kantor pemerintah / swasta



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		melalui SK Bupati dimana setiap OPD harus menyediakan secara mandiri dan menjamin kelayakan APAR.	
5.	Agar dinas terkait bisa meningkatkan/melakukan mitigasi bencana	Hingga tahun 2024, BPBD telah melayani simulasi mitigasi bencana dan kebakaran dari berbagai lembaga antara lain sekolah, klinik, puskesmas, pelaku usaha, dan perangkat daerah	Peningkatan Mitigasi bencana

10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Dari sisi Perencanaan terus melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2024 agar realisasi anggaran tahun 2024 lebih maksimal	<ol style="list-style-type: none"> PAPBD Tahun 2024 telah mengalami percepatan perubahan yang ditetapkan pada 26 Agustus 2024 yang bertujuan optimalisasi realisasi anggaran dan efektivitas pencapaian target tahun berjalan Sesuai dengan Permendagri No 15 Tahun 2023, Timeline penyusunan APBD dan Perubahan APBD Mengacu RKPD Provinsi dan RKP. Bahwa timeline Perubahan APBD bukan kewenangan daerah. 	Penyerapan Anggaran OPD untuk Tahun 2024 agar lebih optimal
2.	Dari sisi pelaksanaan APBD melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi yang lebih ketat per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah dan reward bagi yang tinggi serapannya	<p>Upaya mendorong percepatan penyerapan anggaran telah dilaksanakan, dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat Surat Edaran terkait percepatan penyerapan anggaran setiap Triwulan. Terkait Reward dan Punishment juga sudah diterapkan sesuai Perbup No 21 Tahun 2023 Tentang TPP Prestasi Kerja dengan pemberian punishment pengurangan pembayaran TPP Kinerja sesuai dengan realisasi penyerapan anggaran Pada tahun 2023, telah dilakukan pemberian reward kepada OPD yang berkinerja baik 	Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2024 dengan adanya Monev Pertriwulanan
3.	Terus melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (idle cash) atas Silpa tahun 2023 pada kas daerah dengan deposito pada Bank	Permendagri No 77 Tahun 2020 penempatan cash (idle cash) atas SILPA dengan deposito dilakukan pada Bank persepsi yang sama dengan RKUD dengan tetap	Penempatan cash (idle cash) atas SILPA



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar	mempertimbangkan Suku Bunga yang ditawarkan oleh Bank Umum	
4.	Didalam upaya menjaga kredibilitas manajemen keuangan daerah, dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Pemerintah daerah tentang, sejauhmana progres penyelesaian piutang daerah netto (setelah dikurangi piutang macet) sesuai neraca tahun 2022 sebesar Rp 307.188.023.226,14 (saldo awal tahun anggaran 2023) sedang piutang macet Rp 301.804.789.372,20	Upaya yang telah dilakukan untuk penyelesaian piutang daerah antara lain : 1. Melakukan penagihan piutang terhadap piutang yang belum terbayar. 2. Melakukan penghapusan terhadap piutang yang tidak tertagih melalui mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (pengusulan penghapusan piutang di KPKNL)	Penyelesaian Piutang yang tak tertagih

11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Pemerintah daerah dalam menyusun/menjalankan kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan dan tahun 2025 agar disamping melalui penguatan industry dan perdagangan sebagai penyumbang terbesar PDRB, pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada pengembangan usaha mikro, koperasi pertanian dan perikanan melalui kebijakan perlindungan (pembentukan regulasi) dan pengembangan teknologi tepat guna untuk Intensifikasi Pertanian dan Perikanan	Implementasi yang menunjukkan integrasi sektor industri perdagangan dengan usaha mikro, koperasi, perikanan, dan pertanian sebagai berikut : 1. Kontribusi BAPPEDA dalam penetapan Perda RTRW Tahun 2024-2044 terutama untuk perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan perikanan. 2. Penetapan LP2B ditindaklanjuti dengan penyusunan Raperda pemberian insentif dan kemudahan-kemudahan lainnya bagi petani. 3. Pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan dengan memberikan bantuan sarana prasarana dan pelatihan-pelathan pemanfaatan teknologi tepat guna. 4. Pemetaan usaha mikro dan memberikan pendampingan manajemen serta pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas usaha mikro	Terciptanya pembangunan yang terintegrasi antara sektor potensial (industri perdagangan) dengan sektor strategis (usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, serta ekonomi kreatif dan pariwisata
2.	Mengupayakan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dengan menyusun Langkah-langkah strategis (Rencana Aksi Daerah) dalam upaya meningkatkan peluang mendapatkan reward dari Pemerintah Pusat	BAPPEDA telah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memastikan Kabupaten Sidoarjo dapat memperoleh insentif fiskal pusat secara berkesinambungan	Meningkatnya DID Kabupaten Sidoarjo



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

3.	Melakukan pemetaan terkait tanggung jawab/ kewenangan OPD – OPD yang selama ini masih sering tumpang tindih dalam melakukan kegiatan pekerjaan di lapangan	Pada tahun 2024 Bappeda berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk memastikan SOTK ideal di tahun 2025, selanjutnya Bappeda akan menyusun hirarki indikator kinerja yang sesuai SOTK ideal tersebut mulai tahun 2024	Terdapat SOTK yang efektif mendukung kinerja daerah
4.	Lebih berinovasi lagi dalam peningkatan perencanaan Pembangunan daerah pada pengelolaan tata kota	Pengembangan inovasi dalam perencanaan pengelolaan tata kota dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut : 1. Perumusan implementasi regulasi/kebijakan terkait penataan kota diantaranya : RPJMN, Perda RPJMD, Perda RTRW dan regulasi teknis sektoral. Regulasi teknis sektoral diantaranya : Rencana Induk Persampahan, Rencana Induk Transportasi, Rencana Induk Drainase, Rencana Induk Pengelolaan Air Minum, Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik, Rencana Induk RTH, Rencana Induk Smart City dan Rencana Induk lainnya. 2. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral dgn Perangkat Daerah Teknis untuk menyamakan persepsi 3. Kebijakan pengalokasian anggaran, penentuan prioritas lokasi 4. Monitoring dan evaluasi 5. Pelaporan	Terdapat integrasi perencanaan pengelolaan tata kota yang telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan

12. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata terutama wisata air yang ada di Sidoarjo khususnya wilayah Tlocor	Pada tahun 2024 Disporapar telah menyusun kebutuhan sarana dan prasarana rencana pengembangan destinasi berupa : 1. Peningkatan kualitas TIC 2. Program Wisata edukasi Geowisata	Terciptanya pembangunan yang terintegrasi antara sektor potensial (industri perdagangan) dengan sektor strategis (usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, serta ekonomi kreatif dan pariwisata



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		<p>3. Susur sungai dan tempat pelelangan ikan</p> <p>Pengembangan sarana prasarana lebih lanjut yang terkait dengan dermaga dan Pulau Lusi membutuhkan koordinasi dengan instansi vertikal karena bukan kewenangan Kabupaten</p>	
2.	Untuk mengkaji lagi perencanaan revitalisasi GOR karena adanya pembangunan Stadion dari Kementrian	Penataan PKL	PKL di GOR menjadi lebih tertata
3.	Pemerintah daerah harus memperhatikan dan penambahan anggaran untuk mewujudkan Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang lebih baik sehingga menjadikan atlit unggul di kabupaten sidoarjo. Siswa yang lulus dari KKO diupayakan bisa prioritas masuk ke SMANOR	Sudah dibuka di 2 (dua) SMP, yaitu SMPN 2 Sidoarjo dan SMP PGRI 9 Sidoarjo yang sudah berjalan selama 2 tahun , dan pada tahun ajaran 2024/2025 menambah 1 (satu)	Tercipta bibit unggul olahraga dari usia sekolah

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan agar tidak terjadi antrian khususnya permasalahan ketersediaan blanko dan ada tempat khusus/prioritas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan	Sejak Tahun 2023, layanan administrasi kependudukan sudah tidak menimbulkan antrian. Karena Dikendukcapil telah memberikan hibah ke Ditjen Dukcapil Kemendagri RI untuk pengadaan Blangko KTP el sejumlah 120.000 keping blanko (sesuai jumlah KTP el yang dicetak dalam 1 tahun). Anggaran yang diperlukan senilai Rp 1.380.000.000,00 (estimasi harga 1 keping blanko 11.500 sudah termasuk pajak). Selanjutnya, untuk tempat khusus/prioritas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan sudah kami sediakan, termasuk layanan di kecamatan. Penyediaan tempat khusus/prioritas bagi penyandang Disabilitas, Lansia dan ODGJ	Penyediaan layanan KTP Elektronik tepat waktu bagi seluruh masyarakat Sidoarjo (inklusif)



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

2.	Pengadaan alat perekam KTP di setiap Kecamatan untuk melayani lansia, disabilitas dan ODGJ	Dipendukcapil telah melakukan berbagai upaya mengatasi ketidak adanya alat perekam mobile di Kecamatan, antara lain : 1. Pengusulan pengadaan mobile enrollment bagi 18 kecamatan, merupakan 1 set alat perekaman KTP-el (terdiri dari perekam sidik jari, iris mata, kamera, laptop, dan lain-lain) yang dapat dipakai untuk melakukan layanan jemput bola Disabilitas, Lansia dan ODGJ 2. Dipendukcapil merekomendasikan pada Kecamatan untuk pengusulan anggaran dengan estimasi harga 1 set mobile enrollment ± Rp 120.000.000 pada renja tahun 2025 3. Dipendukcapil memberikan spesifikasi teknis pengadaan 1 set mobile enrollment, serta melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam implementasinya.	Pengadaan alat perekam KTP elektronik mobile di setiap Kecamatan
----	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

14. Dinas Kesehatan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, melalui pemenuhan tuntas paripurna SPM Kesehatan dan peningkatan kemampuan Rumah Sakit dan Puskesmas, pemberian reward and punishment inovasi Kesehatan baik kepada Lembaga Masyarakat maupun institusi Kesehatan	1. Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2023 sudah memenuhi capaian SPM 100% 2. Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai inovasi, dimana ada inovasi yang masuk Top 99 KIPP yaitu KOPIPAHIT, serta inovasi perijinan tenaga medis dan tenaga kesehatan paling kolaboratif dan inovatif.	Mempertahankan capaian SPM 100% dan mereplikasi KOPIPAHIT ke 30 Puskesmas lainnya
2.	Menerapkan 4 (empat) prinsip tata kelola BLUD, antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi	4 (empat) prinsip tata kelola BLUD sudah diimplementasikan oleh Puskesmas dan tetap akan dilaksanakan di tahun mendatang	Meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan prinsip tata kelola BLUD
3.	Agar Dinas Kesehatan untuk tetap merencanakan dan mengupayakan Pembangunan puskesmas Baru di Sidoarjo agar kebutuhan tiap tahun bisa membangun 1 puskesmas	1. Berdasarkan Permenkes 43 Tahun 2019, menunjukkan bahwa ketersediaan puskesmas ditingkat kecamatan telah mencukupi dalam pelayanan kesehatan masyarakat.	Ketersediaan puskesmas ditingkat kecamatan telah mencukupi



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		2. Namun demikian, jika memungkinkan untuk membangun puskesmas baru, Dinas Kesehatan telah melakukan telaah dan menyiapkan readiness criteria untuk realisasi pembangunan puskesmas baru.	
4.	Melakukan pemenuhan tuntas sarana dan prasarana Standar Pelayanan Minimal kesehatan untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2023 sudah memenuhi capaian SPM 100%, orientasi layanan kesehatan Sidoarjo adalah peningkatan kualitas yang terus menerus menuju pencapaian usia harapan hidup 75,98	Pemenuhan sarana prasarana SPM bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat
5.	Harapan dari RSUD Sibar ada Perbub yang mengatur tentang tenaga kesehatan / SK penugasan mutasi dari puskesmas	Langkah untuk penyusunan Perbub yang mengatur tentang pengelolaan SDM akan dirumuskan ditahun berjalan 2024 yang akan dikoordinasikan dengan Bagian Perekonomian sebagai pengampu BLUD	1. Pemetaan dan Penataan SDM tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki 2. Kekurangan kebutuhan SDM tenaga kesehatan dapat terpenuhi sesuai hasil pemetaan dan penataan kualifikasi dan kompetensi tenaga kesehatan
6.	Harus ada rumah sakit lagi tipe B di sidoarjo, karena rujukan dari faskes pertama tidak bisa ke kelas rumah sakit tipe A (RSUD R.T Notopuro Sidoarjo) harus ke rumah sakit tipe C atau B, kecuali pasien HD	Sistem rujukan berjenjang yang sudah diterapkan secara nasional tidak mengurangi kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo, karena : 1. Layanan BPJS sudah tidak didasarkan atas lokasi tempat tinggal, sehingga warga dapat berobat ke fasilitas kesehatan manapun sesuai pilihan dan jenjang; 2. Jaminan atas layanan berjenjang justru berdampak pada pemerataan layanan kesehatan kepada masyarakat; 3. Seluruh fasilitas kesehatan pada tiap jenjang telah terakreditasi, sehingga secara kualitas telah memenuhi standar pelayanan nasional Rujukan berjenjang harus tetap diikuti mengingat adanya resiko tidak dibayarkannya claim BPJS	Rujukan pasien peserta BPJS sesuai kasus dan tingkat fasilitas pelayanan kesehatannya



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		bagi fasilitas kesehatan yang melayani pasien tidak sesuai dengan kategori tipe kelas rumah sakit	
7.	Untuk memberikan layanan kesehatan bagi daerah terpencil, perlu pengadaan ambulans air	Perlu penelaahan lebih lanjut apakah ambulans air merupakan jawaban atas peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Ambulans air bukan solusi utama, yang justru diperlukan adalah tambahan tenaga kesehatan dan poskesdes.	Peningkatan akses layanan dengan membuka layanan kesehatan pada hari-hari tertentu di tempat terpencil di Sidoarjo

15. Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Melakukan analisis guna mencari penyebab gagal mencapai target yaitu Nilai Indeks SPBE, DPRD merekomendasikan untuk mengurangi tunjangan (TPP / Tukin) ASN di OPD terkait	Penyebab tidak tercapainya nilai Indeks SPBE : Terdapat perubahan metode penilain indeks SPBE oleh Kementerian PANRB dimana pada tahun sebelumnya jumlah indikator adalah 35 (tiga puluh lima) indikator sedangkan pada tahun 2020 dan seterusnya jumlah indikator menjadi 47 (empat puluh tujuh) indikator dengan tambahan 1 (satu) domain baru yaitu domain Manajemen SPBE yang terdiri dari 12 (dua belas) indikator mencakup Audit TIK yang terdiri dari Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE Upaya yang dilakukan untuk mencapai indeks SPBE : 1. Menyusun lembar komitmen SPBE untuk pimpinan Perangkat Daerah terkait pemenuhan realisasi data dukung indikator SPBE sesuai kewenangannya 2. Pendampingan langsung oleh KemenPANRB dalam pelaksanaan evaluasi SPBE Tahun 2024.	Pencapaian target nilai Indeks SPBE
2.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	Upaya yang dilakukan : 1. Penyusunan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Percepatan pencapaian target SPBE



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		<p>Upaya tersebut merupakan pijakan untuk pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE 3. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/932/438.1.1.3/2024 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE Kabupaten Sidoarjo 4. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/946/438.1.1.3/2024 Tahun 2024 tentang Peta Rencana SPBE Kabupaten Sidoarjo 5. Dalam verifikasi renja dan verifikasi RKA, seluruh perangkat daerah terkait belanja TIK (SPBE) 	
3.	Diperlukan payung hukum/Peraturan Bupati agar semua aplikasi yang ada terpusat di Dinas Kominfo	Telah terbit payung hukum integrasi sistem yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan penyusunan Perbup tersebut daya dorong integrasi sistem aplikasi oleh Diskominfo lebih kuat	Memperkuat pola koordinasi dan sinergi lintas Perangkat Daerah dalam integrasi aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Keberadaan call center 112 hendaknya diimbangi dengan respon yang cepat oleh OPD teknis sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan masyarakat serta ada pengembangan menjadi aplikasi berbasis android/sejenisnya agar masyarakat bisa melihat tindak lanjut/respon atas pengaduan yang mereka sampaikan.	Penyebab lambatnya respon Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti laporan Call Center 112 yang sudah sesuai dengan SOP antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya daya dukung SDM di tiap Perangkat Daerah 2. Belum optimalnya koordinasi dengan antar Perangkat Daerah 3. Adanya kendala koordinasi dengan lembaga vertikal (PLN, Polres, Telkom, dan PDAM) 	Terlayannya kebutuhan informasi yang akurat, cepat dan berkualitas dalam bentuk jawaban pengaduan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan (Pemkab Sidoarjo dan DPRD) akan meningkat
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika diminta untuk memasang CCTV pada ruas jalan – jalan protokol seperti di arteri Porong, by pass Krian dan di JL. Jenggolo diminta agar dapat memantau kondisi lalu lintas, dikarenakan pada ruas – ruas jalan tersebut, sering dipergunakan untuk balap liar dan untuk memudahkan	Diskominfo telah bekerja sama dengan OPD terkait dalam pemasangan CCTV : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Komunikasi dan Informatika diminta untuk memasang CCTV pada ruas jalan – jalan protokol seperti di arteri Porong, by pass Krian dan di JL. Jenggolo diminta agar dapat memantau kondisi lalu lintas, dikarenakan 	Meminimalisasi tindak kejahatan dan kegiatan balap liar dilokasi tersebut



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	monitoring apabila terjadi kemacetan, kecelakaan dan tindak kejahatan	pada ruas – ruas jalan tersebut, sering dipergunakan untuk balap liar dan untuk memudahkan monitoring apabila terjadi kemacetan, kecelakaan dan tindak kejahatan 2. Rencana penambahan CCTV pada tahun 2025 : 125 titik (25 titik di daerah rawan dan 100 titik di OPD dan kecamatan)	
6.	Untuk OPD agar tidak mengalokasikan pengadaan server/mainframe dikarenakan untuk penanganan server membutuhkan tempat khusus dan SDM yang berkompeten kecuali ada peraturan perundang- undangan yang mengamanatkan harus memiliki server sendiri	Diskominfo telah melakukan upaya pencegahan dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 yang mengamanatkan adanya integrasi server OPD menjadi satu di Diskominfo, kecuali Perangkat Daerah yang mempunyai peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya Dpendukcapil	Integrasi aplikasi kedalam satu pusat data/server yang dikelola oleh Kominfo
7.	Sarana dan prasana gedung/kantor Dinas Kominfo agar ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat	Mencermati peran dan fungsi Kominfo kedepan yang semakin urgent (transformasi digital) maka perlu daya dukung sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dengan relokasi ke tempat yang lebih representatif	Memenuhi daya dukung sarana dan prasarana perkantoran yang lebih representatif
8.	Masih rendahnya kinerja SPBE mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat di dalam layanan online, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Sidoarjo tentang layanan berbasis online	Upaya percepatan pelibatan masyarakat dalam layanan digital : 1. Sosialisasi melalui media elektronik inovatif yakni Tiktok, Instagram, X, Facebook, dan media sosial lainnya 2. Kerjasama dengan insan pers (media cetak yang ada di Kabupaten Sidoarjo) 3. Pelibatan influencer untuk menjangkau seluruh kalangan yang lebih luas	Masyarakat terlibat aktif dalam layanan berbasis digital/online



16. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Khusus untuk program KURMA, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo wajib melaporkan kepada DPRD dalam LKPJ Tahun berikutnya, berapa banyak penerima KURMA yang sampai saat ini masih aktif dalam pengembangan usahanya guna mengetahui efektivitas adanya program ini dan memberikan hasil kajian terkait impact program KURMA atas penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari segmen perempuan, dikarenakan sasaran dari program KURMA adalah kaum perempuan, sehingga dimungkinkan kedepannya sasaran program KURMA tidak hanya pada pelaku usaha mikro perempuan namun juga korban PHK / pengangguran perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan melakukan pendampingan dan pelatihan terhadap penerima KURMA 2023 yang lebih spesifik dan sesuai dengan bidang masing-masing 2. Melakukan monitoring dan evaluasi lanjutan 3. Membentuk portal khusus promosi produk UM khususnya produk KURMA 2023 yang terintegrasi dengan ekspedisi, perbankan, dan marketplace 4. Perlunya dibangun sistem informasi terkait segala bentuk permasalahan dan hambatan dalam rangka pengembangan usaha mikro utamanya penerima Program KURMA 5. Jika KURMA masih dilaksanakan di tahun 2024 maka akan memberi kuota kepada korban PHK dan pengangguran perempuan 	Kebutuhan pendampingan dan pelatihan kepada penerima KURMA, fasilitasi promosi produk KURMA, dan pembinaan bagi usaha mikro khususnya penerima KURMA.
2.	Memperbaiki kebijakan dalam fasilitasi Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melaksanakan bimtek peningkatan kapasitas usaha mikro disabilitas 2. Melaksanakan sedekah ilmu bagi usaha mikro yang rata-rata didominasi dengan perempuan 	Optimalisasi fasilitasi usaha mikro

17. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Melakukan analisis guna mencari penyebab gagal mencapai target yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan DPRD merekomendasikan untuk mengurangi tunjangan (TPP / Tukin) ASN di OPD terkait	<p>Penyebab Target IKu dan IKL tidak tercapai antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsekuensi dari target peningkatan investasi menyebabkan Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah industri dan perdagangan memiliki tantangan pencemaran udara yang terus bertambah setiap tahun. 2. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, aktivitas pembakaran 	Target Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan tercapai



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		<p>sampah masyarakat, dan belum semua industri menerapkan pengelolaan lingkungan dengan baik</p> <ol style="list-style-type: none">3. Integrasi pengelolaan lingkungan hidup lintas perangkat daerah belum berjalan secara optimal4. Luas RTH publik yang relatif terbatas dan cenderung tertekan oleh pengembangan infrastruktur perkotaan <p>Berbagai upaya yang telah dilakukan di Tahun 2024 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Percepatan penambahan RTH melalui pengelolaan vasum perumahan (Bumi Suko, Puri Indah, Grand Aloha Regency, Wisma Permai, Citra Mandiri Sentosa, Omah Pesona, Pondok Mutiara, Taman Tiara Regency)2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dengan pembakaran sampah dan permasalahan lingkungan hidup lainnya	
2.	Memperkuat peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Sampai dengan Tahun 2023 Total TPS3R di Kabupaten Sidoarjo yang aktif sebanyak 156 TPS3R. Kedepannya akan dilakukan koordinasi dengan pihak wilayah (Kecamatan dan Desa) untuk mendorong operasional TPS3R dikarenakan kewenangan pengelolaan TPS3R berada di wilayah (Kecamatan dan Desa) tersebut2. DLHK Tahun 2024 telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dan masyarakat	Pengurangan sampah di tingkat sumber
3.	Mengingat tahun 2023 UPTD TPA Griyo Mulyo sudah menjadi BLUD berdasarkan perbup nomor 117 tahun 2022 tentang tarif layanan pada BLUD UPTD tempat pemrosesan akhir griyo mulyo dan perbup nomor 116 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidoarjo,	<ol style="list-style-type: none">1. DLHK telah berkoordinasi dan sosialisasi terhadap stakeholder persampahan antara lain lembaga penyedia, masyarakat, dan unsur lainnya untuk menerapkan tarif persampahan.2. DLHK telah mengedukasi masyarakat agar beban pembayaran retribusi sampah tidak naik maka harus dilakukan pemilahan dan pengolahan sampah	<ol style="list-style-type: none">1. Mencapai target finansial dan non finansial2. Tercapainya retribusi pelayanan kebersihan non finansial3. Terwujudnya penanganan dan pengurangan sampah mendekati sumbernya pada level TPS / TPS3R. Dengan adanya pengurangan sampah yang optimal mendekati sumbernya diharapkan dapat memperpanjang umur teknis TPA



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	perhitungannya melalui rumus tonase	mulai dari rumah tangga secara berkelanjutan. 3. Bahwa dasar perhitungan tarif sampah berdasarkan tonase sudah menjadi kelaziman di berbagai daerah. Adanya gejolak di masyarakat diatasi dengan penguatan sosialisasi dan penerapan tarif secara bertahap.	
4.	Pemerintah Daerah perlu menyusun masterplan dan actionplan untuk penanganan sampah dari hulu sampai dengan hilir	Telah disusun Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044	Untuk meningkatkan kinerja sistem pengelolaan sampah agar dapat terstruktur dan sistematis serta menjadi panduan dalam penyusunan program dan pembiayaan
5.	Mempertahankan area hijau (green belt) yang sudah ada dan menambah area hijau dengan membebaskan lahan di permukiman padat untuk di bangun taman atau RTH guna meningkatkan indeks kualitas udara dan tutupan lahan yang belum mencapai target	Hingga Tahun 2023 terdapat potensi RTH milik fasum perumahan dan kecamatan sebesar 4 hektar, namun hingga tahun berjalan 2024 yang sudah menyerahkan ada 8 titik fasum meliputi Bumi Suko, Puri Indah, Grand Aloha Regency, Wisma Permai, Citra Mandiri Sentosa, Omah Pesona, Pondok Mutiara, Taman Tiara Regency. Pengelolaan fasum perumahan terkendala pada minimnya anggaran.	Keberadaan ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah guna menjaga ketersediaan lahan untuk resapan air dan menyeimbangkan lingkungan alam dan lingkungan binaan untuk kesejahteraan masyarakat.
6.	Untuk memfungsikan kembali TPST yang ada di desa-desa dan meningkatkan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan kepada Masyarakat dalam penanganan sampah di tingkat Desa	1. DLHK telah berkoordinasi dan sosialisasi terhadap stakeholder persampahan antara lain lembaga penyedia, masyarakat, dan unsur lainnya untuk menerapkan tarif persampahan.	Mengoptimalkan pengolahan sampah di TPS3R sehingga mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA
7.	Lebih memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan	2. DLHK telah mengedukasi masyarakat agar beban pembayaran retribusi sampah tidak naik maka harus dilakukan pemilahan dan pengolahan sampah mulai dari rumah tangga secara berkelanjutan. 3. Terdapat 4 TPS3R Kawasan antara lain TPS3R Lingkar Timur, TPS3R Taman, TPS3R Barengkrajan Krian dan TPS3R Banjarbendo Sidoarjo yang dapat dijadikan percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selanjutnya tahun berjalan 2024 akan diperluas ke berbagai kawasan yang lain.	Pengurangan sampah di tingkat sumber



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		4. Adanya penambahan sarana dan prasarana pada tahun 2024 untuk mendukung pengurangan sampah	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------	--

18. Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) pada kawasan yang memiliki produktifitas tinggi, Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), Lahan sawah dilindungi (LSD), Lahan baku sawah (LBS) dan Menetapkan kawasan pertanian beritegrasi teknis sebagai lahan abadi pertanian pangan	Dinas Pangan dan Pertanian telah berkoordinasi dengan Bappeda terkait pengelolaan KP2B. Sedangkan kewenangan untuk penetapan kawasan KP2B oleh Bappeda bersama OPD teknis terkait. Jika terdapat kebijakan daerah terkait dengan pengelolaan KP2B Dinas Pangan dan Pertanian menyiapkan roadmap Tahun 2026	Untuk bisa mewujudkan LP2B harus tercantum dalam RTRW Kabupaten dan karena Revisi Perda RTRW Kabupaten baru ada di tahun 2024 yang didalamnya tercantum KP2B untuk selanjutnya akan di breakdown menjadi LP2B. Dan di tahun 2024 tidak di dukung anggaran
2.	Untuk meningkatkan produktifitas pangan dan pertanian maka Dinas Pangan dan Pertanian agar memperhatikan permasalahan pupuk dan hama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pangan dan Pertanian setiap tahun melakukan peningkatan kapasitas dan bantuan saprodi untuk mendukung produktivitas pangan dan pertanian. Kegiatan pelatihan pupuk organik di Kecamatan Wonoayu, Sukodono, Prambon, Krian, Jabon dan Candi 2. Pengadaan rodentisida (klerat untuk membasmi tikus) 3. Melakukan gerakan pengendalian OPT 4. Penerapan pengendalian hama terpadu PPHT 5. SLPHT (sekolah lapang pengendalian hama terpadu) tikus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi penggunaan pupuk kimia dan mengembalikan kesuburan tanah melalui pengolahan limbah pertanian menjadi pupuk organik padat dan pupuk organik cair 2. Membantu petani untuk mengatasi serangan hama tikus 3. Gerakan pengendalian OPT secara serempak dan bersama sama dapat menekan populasi OPT sampai pada batas ambang ekonomi, sehingga keberadaan OPT tidak lagi mengganggu produktivitas komoditas tanaman pertanian 4. PPHT merupakan salah satu kegiatan edukasi yang dilaksanakan Dinas Pangan dan Pertanian untuk petani dalam rangka meningkatkan SDM petani, agar petani menjadi faham terhadap pengendalian OPT secara Terpadu 5. SL-PHT Tikus merupakan salah satu kegiatan edukasi yang dilaksanakan Dinas Pangan dan Pertanian untuk petani dalam rangka meningkatkan SDM petani, agar petani menjadi faham terhadap pengendalian OPT secara Terpadu



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			terutama OPT Tikus (Kegiatan ini di khususkan untuk daerah endemis tikus)
3.	Melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyakit hewan menular dan pemotongan hewan/unggas liar	<p>Upaya pengawasan ketat terhadap penyakit hewan menular dan pemotongan hewan liar antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seluruh hewan yang masuk ke Kabupaten Sidoarjo sudah di lengkap SKKH dari daerah asal Dan telah di vaksin2. Menyiapkan petugas yang kompeten untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan3. Optimalisasi fungsi Puskesmas <p>Koordinasi lebih lanjut dengan pihak Kecamatan yang ada pemotongan liar untuk dilakukan sosialisasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi Pemotongan di TPH tidak berijin2. Sosialisasi Halal sesuai UU 33/2014 tentang jaminan Produk Halal3. Produk yang masuk dan beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, kegiatan tersebut dilaksanakan di 18 kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Menjamin kesehatan ternak, ternak yang masuk ke Sidoarjo dalam keadaan sehat dan tidak terjangkiti penyakit sehingga mengurangi resiko penyebaran penyakit hewan2. Mengurangi angka kejadian penyakit melalui pengawasan diagnosis dan pengobatan yang efektif3. Mencegah penularan zoonosis
4.	Karena keterbatasan lahan petani di Sidoarjo, Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian harus melakukan inovasi, yaitu dengan menggalakkan program urban farming (menanam buah atau sayur dalam green house)	DPP telah menganggarkan urban farming : Pekarangan Pangan Lestari (P2L), pengembangan tanaman buah dalam pot (tabulampot), dan Pelatihan Kebun B2SA melalui konsep hidroponik	<ol style="list-style-type: none">1. Memanfaatkan lahan pekarangan dalam pemenuhan gizi rumah tangga maupun masyarakat. dilaksanakan pada Desa Locus Stunting. Sehingga diharapkan dapat memperbaiki gizi untuk tumbuh kembang anak maupun keluarga beresiko stunting2. Mengoptimalkan lahan pekarang untuk lebih produktif3. Maksud dari kegiatan Pelatihan Kebun B2SA ini untuk meningkatkan kemampuan dan minat masyarakat terkait dengan budidaya pangan melalui tanam kebun B2SA sebagai



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			salah satu upaya pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri dalam skala keluarga dan atau masyarakat desa.
5.	Memberikan bantuan premi asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) kepada petani	Melakukan penelaahan terhadap urgensi pemberian premi asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) kepada petani karena sebagian besar pengelola lahan dan pekerja teknis dari luar kota Sidoarjo. Jika dukungan APBD terhadap premi petani kurang tepat sasaran berpotensi menjadi temuan aparat terkait	Memberikan ganti rugi/kompensasi kepada petani karena kerugian akibat kerusakan tanaman padi akibat banjir, sehingga petani mendapatkan kembali biaya produksi yang telah digunakan dan didukung oleh anggaran pusat

19. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Menjaga kualitas Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi Masyarakat yang Merata seluruh wilayah	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan pendukung kegiatan ekonomi dan pengembangan wilayah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sepanjang 587,5 km dari total panjang jalan Kabupaten pada tahun 2023 sepanjang 1.022,864 (57,44%) yang tersebar merata di 18 Kecamatan. Jalan tersebut menghubungkan antara pusat kota dengan daerah pengembangan kawasan KAPUK (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi Perikanan) dan SIBONTARRIAN (Sidoarjo Jabon Tarik Krian)	Terwujudnya kualitas Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi Masyarakat yang merata seluruh wilayah
2.	Masih banyak pengaduan masyarakat terkait jalan rusak maka dari itu Dinas PUBMSDA harus bisa berinovasi untuk percepatan pemeliharaan jalan karena setiap tahun selalu menjadi permasalahan di masyarakat	1. Inovasi percepatan pemeliharaan jalan berupa: 2. Membangun media informasi berbasis digital sebagai layanan pengaduan masyarakat di bidang jalan, saluran pematusan, dan irigasi (saat ini masih dalam tahap uji keamanan akses) dalam rangka integrasi dengan media aduan	Tercapainya percepatan penanganan aduan masyarakat terkait jalan rusak



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		<p>kabupaten Sidoarjo melalui Aplikasi Si-BIMASAKTI</p> <p>3. Membentuk tim satgas pemeliharaan jalan berbasis kewilayahan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung (penambahan kendaraan pengangkut material dan petugas, peralatan berat, dan peralatan ringan).</p> <p>4. Memanfaatkan sosial media aduan sebagai sarana peningkatan respon cepat penanganan pemeliharaan jalan.</p>	
3.	Agar mendeteksi wilayah yang rawan genangan/ banjir yang tidak bisa tertangani dengan cepat, sehingga dapat mengalokasikan dana anggaran penanganan genangan sesuai kebutuhannya	Membangun Early Warning System (EWS) di titik yang sudah terdeteksi rawan banjir, sehingga sebelum banjir terjadi pompa air sudah kondisi siap untuk penanganan genangan tepat waktu.	Terwujudnya penanganan genangan secara cepat
4.	Melakukan menormalisasi saluran irigasi dari hulu ke hilir (jabon, porong, tanggulangin) dan Avour Kalialoh. Namun jika hal tersebut menjadi kewenangan pusat atau propinsi maka Dinas PUBMSDA perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat/provinsi	<p>Upaya normalisasi yang telah dilakukan tahun 2023 dan 2024 :</p> <p>1. Saluran irigasi dan Avour yang menjadi kewenangan Kabupaten melalui kontraktual dan swakelola</p> <p>2. Telah dilakukan koordinasi dengan instansi vertikal terhadap saluran yang merupakan kewenangan instansi vertikal melalui penyusunan draft dan dilakukan kesepakatan awal tentang normalisasi sungai, kerjasama antara BBWS dengan Pemkab Sidoarjo</p>	Normalisasi saluran irigasi secara optimal

20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Tanah aset desa yang belum bersertifikat hendaknya Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi PMD dengan BPN untuk bekerjasama dalam menyelesaikan aset desa yg belum bersertifikat	Pemda telah melakukan MOU dengan BPN untuk penyelesaian sertifikasi aset Desa, selanjutnya pada tahun 2024 telah menyiapkan MOU baru dengan BPN yang sudah menyertakan schedule target penyelesaian. Terkait hal tersebut, Dinas PMD telah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk menyiapkan anggaran untuk sertifikasi aset desa.	Percepatan penyelesaian sertifikasi aset desa



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

2.	Agar disiapkan payung hukum terkait pemanfaatan TKD selain untuk pertanian yang dijadikan sebagai BUMDes	Dinas PMD telah berkoordinasi dengan Dinas P2CKTR dan Bagian Hukum untuk menyiapkan draft Perda terkait pemanfaatan TKD di tahun 2024	Perda pemanfaatan TKD
3.	Berita acara serah terima jabatan Kepala Desa yang lama ke pejabat yang baru wajib dipersyaratkan untuk menghindari hilangnya dokumen milik desa misalnya dokumen Letter C, buku Kretek Desa dan data-data aset desa	Dinas PMD telah merumuskan kebijakan berupa usulan klausul dalam perubahan Perbup No 5 Tahun 2020 Yang di dalamnya terdapat sanksi apabila tidak melaksanakan atau melengkapi dokumen serah terima jabatan (misal: maka tunjangan purna tugas tidak bisa di cairkan) yang akan dilaksanakan mulai tahun 2024	Terinventarisir arsip penting Pemerintahan Desa

21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Melakukan analisis guna mencari penyebab gagal mencapai target yaitu Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi, DPRD merekomendasikan untuk mengurangi tunjangan (TPP / Tukin) ASN di OPD terkait	<p>1. Faktor penyebab turunnya investasi di Sidoarjo dari investasi PMA (Penanaman Modal Asing) yang merupakan kewenangan dari Kementerian Investasi/BKPM. Realisasi PMA tahun 2023 mengalami penurunan 72% bila dibandingkan di tahun 2022. Sedangkan untuk realisasi investasi PMDN mengalami pertumbuhan 34,52% bila dibandingkan realisasi investasi PMDN tahun 2022.</p> <p>2. Capaian nilai investasi tahun 2023 sesuai dengan target Renstra dan RPJMD. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan besar realisasi investasi yakni sebesar 14.086.231.612.109,5 sehingga sedikit saja terjadi penurunan nilai investasi maka deviasi nya minus. Namun secara aktual investasi Sidoarjo masih sangat tinggi yaitu sejak tahun 2021 hingga 2023 selalu berada pada 4 besar realisasi tertinggi di Provinsi Jawa Timur</p>	Peningkatan Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

2.	Penurunan nilai investasi disebabkan karena kurang tertibnya perusahaan yang memiliki investasi dalam melaporkan nilai investasinya kepada OPD terkait. Untuk itu nilai investasi dan pertumbuhan investasi perlu mendapatkan perhatian khusus	1. Sejak tahun 2024, DPMPSTP telah mengembangkan aplikasi inovatif berupa Layanan Kemudahan Berusaha (SIPPADU) yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh layanan perizinan lintas sektor dan perangkat daerah	Peningkatan Realisasi Investasi Sidoarjo
3.	Pada tahun 2023 nilai investasi daerah di Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.13.681.823.120.000,00 dari target Rp.7.396.748.810.000 maka tercapai 184,97 % namun apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yaitu senilai Rp.14.086.231.612.109,50 maka terdapat penurunan nilai % Rp.404.408.492.109,50 atau sekitar $-(2,87\%)$. Penurunan Nnilai investasi disebabkan karena kurang tertibnya perusahaan yang memiliki investasi dalam melaporkan nilai investasinya kepada OPD terkait, untuk itu nilai investasi dan pertumbuhan investasi perlu mendapatkan perhatian khusus	2. Pemangkasan birokrasi berusaha berupa revisi SOP dan SP kemudahan berusaha 3. Penunjukan beberapa perusahaan besar untuk bermitra dengan industri kecil dan usaha mikro, karena hal ini akan berdampak pada peningkatan nilai investasi daerah 4. Membuka Klinik Pendampingan LKPM di MPP Sidoarjo maupun secara online selama periode pelaporan LKPM 5. Sosialisasi secara masif kepada PMA, PMDN, dan UMK terkait pentingnya LKPM bersama stakeholder terkait. Selain itu sosialisasi bertujuan juga memberikan ruang konsultasi bagi pelaku usaha atas permasalahan maupun kendala yang dihadapi saat berusaha di Kabupaten Sidoarjo 6. Pengawasan PMDN menjadi kewenangan Daerah sedangkan PMA menjadi Kewenangan BKPM RI. untuk itu upaya yang akan dilakukan adalah melakukan pengawasan kepada PMDN dan melakukan Koordinasi teknis dan masif dengan BKPM RI.	

22. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Melakukan analisis guna mencari penyebab gagal mencapai target yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah DPRD	AHLS dan RLS dihasilkan dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga kuliah, sedangkan yang dapat diintervensi Pemkab adalah level SD dan SMP saja, tidak semua jenjang dapat diintervensi Kabupaten. Hal ini diperkuat dengan	Meningkatkan capaian HLS RLS pada usia pendidikan dasar (9 tahun)



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	merekendasikan untuk mengurangi tunjangan (TPP / Tukin) ASN di OPD terkait	data APM SD dan SMP Kabupaten Sidoarjo yang sudah diatas 95%.	
2.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang merata seluruh wilayah agar Masyarakat secara bertahap namun pasti sekolah dimanapun kualitasnya sama, melalui Upaya pemenuhan tuntas paripurna SPM Pendidikan, standarisasi kualitas Guru dan sarana prasarana Pendidikan, pemberian reward and punishment inovasi Pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta	<p>1. Pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan dengan realisasi SPM Bidang Pendidikan sudah tercapai 84,98% (tuntas madya), melalui berbagai upaya percepatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Advokasi Perencanaan Berbasis Data berdasarkan Rapor Pendidikan sekolah. b. Pendampingan dalam Akreditasi Sekolah. c. Advokasi pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka, termasuk penguatan literasi-numerasi, iklim keamanan, iklim inklusivitas, dan iklim kebhinekaan. d. Memberikan layanan bantuan transportasi untuk guru dan siswa dari sekolah yang sulit terjangkau. e. Layanan PPDB dengan memperhatikan bakat minat siswa, yaitu adanya Kelas Khusus Olahraga, Kelas Khusus Cerdas Istimewa, dan Kelas Khusus Seni Budaya. f. Memfasilitasi kegiatan pengembangan bakat, minat, dan kreativitas siswa. g. Memfasilitasi layanan Program Indonesia Pintar (PIP). <p>2. Peningkatan kualitas sarana prasana sekolah dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan database sarana prasarana yang valid dan update sesuai kondisi yang sebenarnya (melibatkan peran sekolah untuk memberikan data yang benar) b. Melakukan analisa penentuan prioritas pembangunan/rehab bangunan untuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo c. Mengoptimalkan bantuan penyediaan dana dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, BOSP, BOSDA, dan lainnya. d. Membuka kesempatan peran serta aktif dari masyarakat untuk peningkatan layanan sarana prasarana sekolah 	Untuk meningkatkan pemenuhan SPM
		<p>3. Peningkatan kualitas sarana prasana sekolah dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan database sarana prasarana yang valid dan update sesuai kondisi yang sebenarnya 	Sebagai upaya peningkatan kulaitas layanan sarana prasarana pendidikan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		<p>(melibatkan peran sekolah untuk memberikan data yang benar);</p> <p>b. Melakukan analisa penentuan prioritas pembangunan/rehab bangunan untuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>c. Mengoptimalkan bantuan penyediaan dana dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, BOSP, BOSDA, dan lainnya;</p> <p>d. Membuka kesempatan peran serta aktif dari masyarakat untuk peningkatan layanan sarana prasarana sekolah;</p>	
3.	Untuk segera mengusulkan dan melaksanakan rehab ruang kelas SDN sejumlah 182 dan SMPN sejumlah 117 ruang kelas yang kondisinya rusak Berat	Untuk 182 ruang kelas SDN dan 117 ruang kelas SMPN kondisi rusak berat telah dilakukan kegiatan rehabilitasi sebagai berikut : Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rehab berat 76 ruang kelas SDN dan 15 lokal ruang lain (R. guru,R. Kepala sekolah, perpustakaan dan KM) dan pada tahun 2024 dialokasikan rehab berat sebanyak 39 ruang kelas dan 6 ruang lain (perpustakaan, R Guru KM). Sebanyak 21 ruang kelas SMPN telah dianggarkan dalam APBD 2024, rehab 2 ruang kelas SMPN diusulkan melalui dana bantuan keuangan Pemerintah Propinsi Tahun 2025 dan Rehab 43 ruang kelas SMPN serta 54 ruang kelas SDN diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025.	Penyediaan sarana gedung sekolah yang layak untuk peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
4.	Untuk benar benar mengontrol dan mengawasi kualitas pembangunan sekolah atau rehab ruang kelas, karena selama ini kualitas bangunan sangat mengecewakan	Dispendikbud telah melakukan monev dan pemetaan terhadap kondisi bangunan kelas, sebagai dasar prioritas tahapan rehab/perbaikan	Menyesuaikan rencana kegiatan pembangunan fisik sesuai kebutuhan, monitoring kegiatan fisik agar sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan, meningkatkan peran serta aktif pihak sekolah untuk turut memantau pelaksanaan kegiatan rehabilitasi gedung sekolah
5.	Pemenuhan standarisasi kualitas sarana dan prasarana Pendidikan untuk kenyamanan proses belajar mengajar		Data base yang valid dan <i>up to date</i> mendukung kegiatan penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana sekolah, peningkatan keterlibatan sekolah untuk memberikan update data kondisi



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

			bangunan secara berkala. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta kebutuhan pemenuhan data yang diperlukan
6.	PPDB di Tahun 2024 DPRD merekomendasikan untuk modifikasi zonasi yang memberikan kesempatan sama dan setara bagi semua desa yaitu 30% untuk ring 1 dan 20% untuk pemerataan	Rekomendasi telah ditindaklanjuti berupa evaluasi pelaksanaan PPDB Tahun 2024. Berdasarkan evaluasi tersebut, pada PPDB Tahun 2024 untuk jalur zonasi terdapat zonasi pemerataan. Dalam Perbup Sidoarjo Tahun 2024 tentang PPDB dituliskan bahwa "Khusus untuk calon peserta didik yang bertempat tinggal di desa yang jauh dari jangkauan SMP Negeri terdekat, diberlakukan aturan zonasi pemerataan". Berdasarkan evaluasi jalur zonasi pada PPDB Tahun 2023, terdapat 155 desa/kelurahan yang termasuk kategori jauh dari jangkauan SMP Negeri terdekat. Banyak siswa yang dapat diterima adalah 174 siswa.	1. Memberikan jaminan bahwa di setiap desa ada lulusan SD/MI yang diterima di SMP Negeri terdekat melalui jalur zonasi; 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang PPDB yang berasaskan objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
7.	Formasi seleksi PPPK di Dinas pendidikan harus selektif dengan memperhatikan masa kerja (alokasi di tahun 2024 sebanyak 400 orang termasuk PAI)	Rekomendasi telah ditindaklanjuti pada formasi guru sebanyak 400 orang termasuk PAI, akan diikuti oleh GTT di Sekolah Negeri secara selektif dengan memperhatikan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terpenuhinya kekurangan Guru termasuk Guru PAI dari GTT yang diangkat PPPK sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
8.	Relokasi sekolah yang tidak layak seperti SMPN 2 Tanggulangin Desa Kedungbanteng	Sebagai upaya penanganan, pada tahun 2024 telah dilaksanakan pembangunan ground water tank dan peninggian 3 ruang kelas yang bertujuan mengatasi genangan air di lingkungan sekolah	Sebagai langkah awal penanganan genangan air yang mengganggu proses belajar mengajar di SMPN 2 Tanggulangin. Terhadap rencana relokasi masih diperlukan kajian lebih lanjut.
9.	Insentif guru TPQ/guru ngaji melalui verifikasi dan validasi dari OPD terkait menjadi satu basis data untuk diajukan usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan dukungan penguatan verifikasi dan validasi data dengan mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Lembaga TPQ	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan realisasi pencairan berdasarkan rekomendasi dari Kemenag
10.	Agar indikator sasaran harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dapat tercapai maka pemerintah daerah harus memberikan perhatian	Dinas Pendidikan telah melakukan penyaluran insentif guru PKBM berdasar PAPBD 2024 sejumlah 23 PKBM 158 Tutor Kesetaraan	Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Kesejahteraan Bagi Tutor Kesetaraan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	lebih Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Sidoarjo terutama insentif untuk tutor/guru yang selama ini belum pernah mendapatkan		Meningkatkan Motivasi dan kinerja Tutor kesetaraan
11.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus memberikan perhatian lebih dengan memberikan bantuan seperti hibah dan peningkatan insentif untuk guru swasta	Dinas Pendidikan telah melakukan penyaluran bantuan dan hibah sejumlah ... Guru Swasta	Meningkatnya kesejahteraan Guru Swasta dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

23. Dinas Perhubungan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Pengelolaan sistim transportasi terpadu	Realisasi sistem transportasi terpadu yang telah dilakukan tahun 2024 :	Terdapat sistem pengelolaan transportasi terpadu
2.	Membuat sistem transportasi umum yang baik/terpadu dan meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi kemacetan di Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Sidoarjo melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa pengadaan transportasi masal intercity yang menghubungkan Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. 2. Rekayasa lalu lintas di titik rawan kemacetan 3. Pelaksanaan inspeksi dan pengaturan lapangan pada jam-jam sibuk diberbagai titik rawan kemacetan 4. Memastikan dukungan kelengkapan jalan telah memenuhi standar kenyamanan dan keamanan jalan 	Mengurangi titik kemacetan lalu lintas
3.	Mengembalikan lagi fungsi pengelolaan terminal tipe C yang ada di Sidoarjo sebagai tempat parkir untuk angkutan umum, bukan menjadi pasar (Terminal Krian)	Dishub akan melakukan penelaahan terhadap urgensi mengaktifkan kembali pengelolaan terminal Tipe C di krian.	Menelaah pengkatifan kembali pengelolaan terminal Tipe C di Krian.

24. Dinas Perikanan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Perlu meningkatkan pekerjaan normalisasi saluran tambak untuk pasang surutnya air laut di daerah Sidoarjo Timur	Dinas Perikanan telah melakukan normalisasi tambak sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Saluran 	Dinas Perikanan telah mengupayakan untuk menormalisasi saluran tambak, perluasan akses utama transportasi, dan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		<p>Tambak untuk petani tambak dan pembudidaya ikan di daerah Sidoarjo timur sejumlah 1 (satu) lokasi di Kec. Candi, untuk menjaga kualitas air budidaya air payau (salinitas/ kadar garam);</p> <p>2. Rehab Saluran Tambak sudah dilakukan sesuai kebutuhan yaitu normalisasi/ rehab setahun 2 (dua) kali untuk mengatasi sedimentasi dan peningkatan produktifitas budidaya tambak.</p>	penambahan program pendampingan
2.	Memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan Produksi sebagai akses utama transportasi panen dan pengangkutan benih	<p>Upaya untuk peningkatan akses utama transportasi Perikanan Budidaya sebagai berikut :</p> <p>1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Produksi sebanyak 5 (lima) lokasi dengan estimasi 3.700 meter (3,7 km);</p> <p>2. Panjang jalan produksi yang telah dibangun di kawasan pertambakan 150 km dan yang belum terbangun 30 km serta pada beberapa lokasi jalan produksi perlu adanya rehabilitasi/ pemeliharaan sebagai akses utama transportasi panen dan pengangkutan benih dan saprokan (sarana produksi perikanan);</p> <p>3. Masa umur efektif jembatan produksi adalah 7 (tujuh) tahun dimana berguna untuk mempercepat jalur transportasi pada saat pengangkutan panen;</p> <p>4. Selain itu perlu adanya penambahan PJU pada jalan produksi sebagai akses penerangan dan keamanan kawasan pertambakan, karena di lokasi tersebut akses jaringan listrik.</p>	Perluasan akses utama transportasi panen dan pengangkutan benih
3.	Memperluas lagi program pelatihan dan pemberian hibah benih sebagai sarana dan prasarana peningkatan pembudidaya ikan	<p>Yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan :</p> <p>1. Pelaksanaan Program Pelatihan dan Pemberian Hibah Benih untuk pembudidaya ikan sebanyak 16 (enam belas) lokasi;</p> <p>2. Pelaksanaan Program Pelatihan dan Pemberian Hibah Benih untuk pembudidaya ikan</p>	Penambahan program pendampingan guna meningkatkan pembudidaya ikan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		<p>dilaksanakan secara merata di wilayah Kab Sidoarjo.</p> <p>Perlunya kegiatan pendampingan secara terus menerus setelah program pelatihan dan pemberian hibah benih agar dapat berkelanjutan.</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	<p>Pada LKPJ tahun 2023 survey kepuasan masyarakat atas layanan Pasar mendapatkan hasil 97,6 % (sangat tinggi), namun berbanding terbalik dengan keadan infrastruktur sarana dan prasarana pasar rakyat di Sidoarjo yang berjumlah 19 Pasar yang kurang representatif, karena bertahun tahun belum bisa membangun atau merevitalisasi pasar tradisional yang tidak layak dipergunakan, untuk itu DPRD merekomendasikan untuk merevitalisasi salah satu pasar tradisional yang representatif di Sidoarjo sebagai percontohan</p>	<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan berbagai upaya spesifik terkait peningkatan kualitas pelayanan pasar tradisional antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan dengan design khusus yang berdampak pada peningkatan kebersihan dan daya tarik pasar tradisional antara lain Pasar Buduran, Pasar Watu Tulis, Pasar Larangan, Pasar Sukodono, Pasar Tulangan 2. Peningkatan status pasar menjadi SNI yaitu Pasar Gedangan 3. Perpanjangan status SNI Pasar Sukodono 	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan pasar tradisional</p>
2.	<p>Membangun tempat Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di Sidoarjo yang bisa menampung Produk industri kreatif dan kerajinan UMKM yang ada di Sidoarjo</p>	<p>Menindaklanjuti adanya urgensi pembangunan gedung Dekranasda maka Disperindag telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengusulkan penganggaran di tahun 2026 agar keberadaan gedung ini segera dapat direalisasikan dan mendorong tumbuhnya industri kecil dan usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>Segera terbangun kembali Gedung Dekranasda</p>

26. Dinas Perpustakaan dan Arsip

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana serta buku di Perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah dan</p>	<p>Pada tahun 2024, Dikbud telah melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan</p>	<p>Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</p>



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

	mengembangkan perpustakaan digital	sekolah serta pengadaan buku di sekolah-sekolah.	
2.	Untuk meningkatkan literasi masyarakat maka diperlukan pembangunan perpustakaan di desa-desa secara bertahap	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah mendorong terbentuknya perpustakaan desa melalui program sebagai berikut : 1. Tahun 2023 dan 2024 membentuk perpustakaan desa melalui program TMMD/Karya Bhakti TNI 2. Melakukan pembinaan, dan mendorong Kades untuk membentuk Perpustakaan atau Taman Bacaan Masyarakat 3. Mendorong desa memanfaatkan dana APBDes untuk pengembangan perpustakaan desa sebesar 5% dari APBDes berdasarkan Permendes PDDT Nomor 11 Tahun 2019	

27. Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Pengelolaan tata kota, perumahan dan permukiman sehat	Kebijakan penataan kota perumahan dan permukiman di Tahun 2024 : 1. Penataan kota melalui review RDTRK Tanggulangin disesuaikan dengan RTRW yang baru Tahun 2024-2044 dan rencana penyusunan RDTRK di Kecamatan strategis lainnya secara bertahap. 2. Sampai dengan tahun 2023 telah dilakukan percepatan serah terima PSU Perumahan pada beberapa perumahan yang telah ditinggalkan pengembang, diharapkan menjadi prioritas pembangunan dalam verifikasi usulan musrenbang desa maupun usulan reses akan diarahkan pada lokasi kawasan kumuh sesuai SK yang berlaku. 3. Pada tahun 2024 disusun Raperbup tentang PSU perumahan dan kawasan industri.	Penuntasan kawasan kumuh, penyediaan dan pemeliharaan PSU perumahan permukiman dan peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		Perlu dialokasikan anggaran untuk rehabilitasi rumah korban bencana karena merupakan indikator SPM.	
2.	Dinas P2CKTR agar mempunyai inovasi untuk menuntaskan masalah sanitasi atau pembangunan jamban sehat dan air bersih di Sidoarjo yang non PDAM	Upaya inovasi yang telah dilakukan : 1. Pembangunan sanitasi sehat dan air minum yang berhasil mendapatkan pendanaan dari APBN disetiap tahun 2. Kerja sama dengan BPR Delta Arta dan PDAM untuk pemenuhan sanitasi aman melalui penyedotan lumpur tinja berupa cicilan dalam bentuk tabungan tiap bulan 3. Inovasi kemudahan layanan masyarakat berbasis digital melalui aplikasi LESTARI untuk mempermudah layanan sedot tinja periodik.	Prasarana air bersih yang disediakan sesuai target dan prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target
3.	Dinas P2CKTR harus bisa menuntaskan permasalahan kawasan kumuh yang belum tertangani kurang lebih sekitar 153,51 Ha	Dari 276,62 Ha SK Kawasan Kumuh 2021 telah berhasil ditangani dan tersisa 153,51 Ha, upaya yang telah dilakukan di tahun 2024 : 1. Pada tahun berjalan 2024 telah dilakukan integrasi intervensi kawasan kumuh lintas OPD (sampah, penanggulangan bencana, dan PJU) 2. Pembangunan infrastruktur permukiman pada kawasan kumuh 3. Rehab rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh	Penuntasan luas kawasan kumuh Sidoarjo
4.	Membuat masterplan pengelolaan tata kota, perumahan dan permukiman sehat di wilayah Kabupaten Sidoarjo	Masterplan yang telah dimiliki yang mengatur air minum dan tata kota. Sedangkan dokumen masterplan yang belum disusun yang mengatur tentang sanitasi, infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman, serta masterplan bangunan gedung pemerintah dan non pemerintah.	Peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang serta penyediaan dan pemeliharaan PSU perumahan permukiman
5.	Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya penggunaan air bersih bagi keberlangsungan hidup	Sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan antara lain : 1. Sosialisasi pada saat pra dan pasca pembangunan dengan masyarakat di lingkungan pembangunan 2. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial yang selanjutnya perlu daya dukung anggaran untuk dilakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat sesuai SPM.	Peningkatan SDM dan kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih dalam kehidupan sehari-hari



28. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Kader pendamping harus memantau keluarga stunting selama 3 bulan dari pemberian makanan tambahan, untuk mengetahui perkembangannya	DP3AKB telah melakukan pendampingan rutin harian (direcord dalam aplikasi ELSIMIL) oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) terhadap kelompok sasaran penerima manfaat dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pangan dan Pertanian	Monitoring efektivitas pemberian makanan tambahan
2.	Data potensi stunting agar selektif betul antara penduduk setempat dengan penduduk domisili/pendatang	Pijakan regulasi sebagai dasar pemberian intervensi program stunting terhadap penduduk Sidoarjo sesuai kebijakan Dispendukcapil apabila sudah 6 bulan memasuki kawasan Sidoarjo, maka sudah dianggap penduduk Sidoarjo yang wajib didampingi dan diawasi potensi stunting	Memastikan data KRS telah mengacu pada regulasi yang ada
3.	Tim percepatan penurunan stunting harus ada laporan terkait progres dalam waktu 3-4 bulan untuk mengetahui perkembangan keluarga tersebut dari permasalahan stunting	1. Laporan progres sudah dilaksanakan secara rutin berkala / semesteran untuk mengetahui perkembangan keluarga tersebut dari permasalahan stunting 2. Selain kegiatan diatas, juga terdapat kegiatan penguatan Tim diantaranya rakor, Rembug Stunting, rakor TPPS, miniloka, dsb.	Mengetahui perkembangan penanganan permasalahan kasus stunting di Kabupaten Sidoarjo

29. Dinas Sosial

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Pemerintah daerah agar fokus pada penuntasan kemiskinan ekstrem (target tahun 2024) dan sisanya pada tahun 2025 jika belum tuntas	Dinas Sosial telah mengintervensi kemiskinan ekstrim berupa penyaluran bansos senilai 1.480.000.500.000 terhadap 18.286 jiwa atau 0,91%. Pada tahun 2025 terdapat program bansos warga miskin yang diharapkan dapat mendukung penanganan kemiskinan ekstrim hingga 0%	Penuntasan Kemiskinan Ekstrem
2.	Memperkuat Integrasi Program kemiskinan Lintas Urusan secara tepat sasaran	Sejak tahun 2022, Dinas Sosial telah terlibat dalam koordinasi dan integrasi pengentasan kemiskinan	Percepatan Penanganan Kemiskinan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		lintas urusan Dinkes, Dukcapil, BPJS dan Perangkat Daerah lainnya terkait program kemiskinan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan program lainnya sebagai upaya percepatan penurunan kemiskinan	
3.	Penerima makanan tiap hari untuk warga miskin sejumlah 730 Orang agar dipastikan penerima bantuan tersebut adalah warga miskin	Upaya Dinas Sosial agar penerima Makanan Gratis tepat sasaran dengan memastikan data penerima Program Prioritas Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin telah diverifikasi oleh TKSK di setiap kecamatan dengan tepat sasaran sesuai dengan indikator	Kecukupan kebutuhan Gizi dan Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.	Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial lebih memperhatikan kelayakan Liponsos dari sisi layanan permakanan, kesehatan serta Sarana dan Prasarananya	Dinas Sosial telah melaksanakan pemeliharaan rutin setiap tahun guna memastikan kelayakan Liponsos. Selain itu anggaran permakanan Liponsos telah bertambah dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dan pada Tahun 2025 akan direncanakan untuk penambahan anggaran yang akan digunakan menambah snack, susu dan buah sesuai dengan kebutuhan	Kecukupan kebutuhan Permakanan dan Gizi Klien UPT PP Rehsos
5.	Guna membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial maka diperlukan pengadaan 1 (satu) unit ambulans Jenazah	Dinas Sosial telah menganggarkan pengadaan mobil ambulans pada Tahun 2025 dan Permohonan bantuan dari CSR untuk perluasan layanan sosial	Memperluas layanan sosial terhadap masyarakat

30. Dinas Ketenagakerjaan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Memperbaiki kebijakan dalam fasilitasi Kemitraan dengan perusahaan bidang Ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan Angkatan Kerja lokal	<ol style="list-style-type: none"> Menginisiasi penyusunan Perda yang secara afirmatif menghimbau perusahaan untuk memprioritaskan lapangan kerja bagi penduduk Kabupaten Sidoarjo; Mendorong perusahaan untuk mempertahankan pekerja lokal apabila terdapat kebijakan PHK; Koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan untuk memastikan kompetensi pendidikan dan pelatihan Disnaker sesuai dengan skill yang dibutuhkan perusahaan. 	Prioritas penyerapan angkatan kerja lokal/ penempatan tenaga kerja lokal masyarakat Sidoarjo di Perusahaan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

2.	Disnaker harus punya basis data pengangguran / Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kebutuhan lapangan kerja di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui kebutuhan program pelatihan kerja yang dibutuhkan bagi para pencari kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Tingkat Pengangguran Terbuka merujuk kepada data BPS sebagai Pengampu Data Nasional. Tantangan yang dihadapi seluruh daerah adalah data TPT tersebut belum dapat menunjukkan secara by name by address 2. Upaya untuk mengatasi keterbatasan data TPT maka Disnaker atas dukungan dari Kemenaker menyusun dokumen RTKD memuat data terkait Perkiraan Ketersediaan Tenaga Kerja, Kebutuhan Tenaga Kerja, Kebutuhan Pelatihan Kerja, Neraca Keseimbangan Tenaga Kerja dan Strategi Kebijakan Program Pembangunan Ketenagakerjaan tertuang dalam Rencana Tenaga Kerja Daerah periode 2024-2029 yang disusun Tahun 2024 	Terpenuhinya Rencana Tenaga Kerja Daerah periode Tahun 2024-2029
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

31. RSUD Notopuro

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Menerapkan 4 (empat) prinsip tata kelola BLUD, antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi	<p>Tindak lanjut atas Rekomendasi LKPJ DPRD 2023 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel khususnya RSUD R.T Notopuro Sidoarjo; 2. Penyelenggaraan Rumah Sakit berpedoman pada Hospital Bylaws yang telah dimiliki oleh RSUD R.T Notopuro Sidoarjo; 3. Mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani) yang telah disandang oleh RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo; 4. Mempertahankan hasil opini atas laporan keuangan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo "Wajar Tanpa Pengecualian" 5. Menyampaikan secara rutin laporan kinerja BLUD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; Sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola BLUD RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dalam mengelola dan menyusun kebijakan teknis operasional; 2. Penegakan integritas dan pelayanan berkualitas; 3. Mencapai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		rumah sakit kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas	
2.	RSUD juga harus merencanakan dengan benar terkait jaringan air atau pembangunan pompa air di RSUD agar tidak terjadi banjir lagi	Sebagai upaya penanganan banjir, RSUD RT Notopuro telah menerapkan prosedur teknis baku sebagai berikut : 1. Pembuatan sistem drainase IGD 2. Pemeliharaan saluran tadah hujan; 3. Pemeliharaan saluran air; 4. Jasa Konsultasi Perencanaan Kajian Teknis Saluran dalam Kawasan (Drainase) 5. Pembangunan Gedung Pusat Terpadu (GPT) disertai pembuatan saluran air 6. Berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air terkait pembersihan dan pemeliharaan sungai di wilayah pemukiman warga disekitar RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo 7. Rencana pemasangan box culvert untuk saluran air area timur RSUD R.T. Notopuro oleh PUBM Tahun 2025 8. Pembuatan Bosem di depan IGD dan halaman depan Tahun 2024 dan rencana pembuatan Bosem Tahun 2025	1. Mengurangi masalah banjir yang terjadi di Gedung IGD lantai dasar jika terjadi hujan dengan curah hujan tinggi 2. Mengantisipasi masalah banjir yang terjadi di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo
3.	Pemerintah daerah segera mengadakan pembahasan dengan seluruh instansi terkait rujukan pasien BPJS dari faskes 1 yang tidak bisa dirujuk ke RS tipe A (RSUD R.T Notopuro Sidoarjo)	Sistem rujukan berjenjang yang sudah diterapkan secara nasional tidak mengurangi kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo, karena :	Rujukan pasien peserta BPJS sesuai kasus dan tingkat fasilitas pelayanan kesehatannya
4.	Pemerintah daerah supaya ada aksi strategis dan cepat untuk antisipasi dampak naik kelasnya RSUD R.T Notopuro ke tipe A	1. Layanan BPJS sudah tidak didasarkan atas lokasi tempat tinggal, sehingga warga dapat berobat ke fasilitas kesehatan manapun sesuai pilihan dan jenjang; 2. Jaminan atas layanan berjenjang justru berdampak pada pemerataan layanan kesehatan kepada masyarakat; 3. Seluruh fasilitas kesehatan pada tiap jenjang telah terakreditasi, sehingga secara kualitas telah memenuhi standar pelayanan nasional	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		Rujukan berjenjang harus tetap diikuti mengingat adanya resiko tidak dibayarkannya claim BPJS bagi fasilitas kesehatan yang melayani pasien tidak sesuai dengan kategori tipe kelas rumah sakit	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

32. RSUD Sidoarjo Barat

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Menerapkan 4 (empat) prinsip tata kelola BLUD, antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi	4 (empat) prinsip tata kelola BLUD sudah diimplementasikan oleh RSUD Sidoarjo Barat dan tetap akan dilaksanakan di tahun mendatang. Wujud dari 4 prinsip tersebut adalah tercapainya status akreditasi tertinggi yaitu paripurna.	Meningkatkan kualitas pelayanan yang bermutu di RSUD Sidoarjo Barat
2.	Menambah SDM tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Sidoarjo Barat	1. RSUD Sidoarjo Barat telah menyusun pemetaan kebutuhan SDM. Terhadap kebutuhan tersebut sudah dilakukan pengajuan kepada BKD. 2. Untuk menutup defisit SDM tahun 2024 telah dilakukan dengan merekrut tenaga ahli sebagai dokter spesialis dan tenaga teknis sampai dengan terpenuhinya SDM.	Pemenuhan kebutuhan SDM tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Sidoarjo Barat yang bermutu
3.	Agar melakukan pembangunan secara bertahap dalam melengkapi fasilitas kesehatan di RSUD Sidoarjo Barat agar dapat memenuhi standarisasi pelayanan minimal kesehatan Rumah Sakit	1. Terdapat 1 Program, 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan RSUD Sidoarjo Barat pada Tahun 2024. Salah satu sub kegiatan tersebut adalah Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya. Pada Tahun 2024 Anggaran Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Ruang Nifas dan ICU) sebesar Rp6.237.000.000 dan (Pembangunan Lantai 2 Gedung Administrasi Terpadu) dengan Anggaran Rp8.168.908.370 2. Pengajuan pembangunan gedung rawat inap terpadu dan gedung hemodialisa pada tahun 2025 untuk standarisasi pelayanan minimal dan peningkatan kualitas pelayanan RSUD Sidoarjo Barat	Untuk memenuhi SPM dalam meningkatkan ketersediaan Sarana yang ada di RSUD Sidoarjo Barat, telah melakukan pemenuhan sarana dan prasarana sebagai berikut : 1. Ruang Nifas kondisi eksisting adalah sebanyak 2 Tempat Tidur dan rencana akan dilakukan penambahan sebanyak 12 Tempat Tidur dengan luas bangunan sebesar 210 m2. Jumlah kunjungan pasien rawat inap sebanyak 30 Pasien, dan jumlah kunjungan pasien sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 adalah sebanyak 30 Pasien. 2. Ruang ICU yang sebelumnya berada di



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

		<p>3. Pada tahun 2024, telah dilakukan rehab ruang tunggu lantai 1 dan lantai 2 yang dilengkapi dengan fasilitas eskalator sehingga menambah ruang tunggu pasien yang lebih nyaman melalui anggaran BLUD</p>	<p>lantai 2 dan memiliki 10 Tempat Tidur, akan dilakukan pergeseran ke Lantai 3 dengan penambahan 5 Tempat Tidur menjadi 15 Tempat Tidur dengan luas bangunan sebesar 450 m².</p> <p>3. Dengan terwujudnya pembangunan Gedung Administrasi Terpadu lantai 2 kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik dan nyaman serta kegiatan Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit akan terfokus di Gedung Administrasi Terpadu.</p>
4.	<p>Harapan dari RSUD Sibar ada Perbub yang mengatur tentang tenaga kesehatan / SK penugasan mutasi dari puskesmas</p>	<p>Langkah untuk penyusunan Perbub yang mengatur tentang pengelolaan SDM akan dirumuskan ditahun berjalan 2024 yang akan dikoordinasikan dengan Bagian Perekonomian sebagai pengampu BLUD</p>	<p>1. Pemetaan dan Penataan SDM tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki</p> <p>2. Kekurangan kebutuhan SDM tenaga kesehatan dapat terpenuhi sesuai hasil pemetaan dan penataan kualifikasi dan kompetensi tenaga kesehatan</p>
5.	<p>Harus ada rumah sakit lagi tipe B di sidoarjo, karena rujukan dari faskes pertama tidak bisa ke kelas rumah sakit tipe A (RSUD R.T Notopuro Sidoarjo) harus ke rumah sakit tipe C atau B, kecuali pasien HD</p>	<p>Upaya percepatan kenaikan tipe RSUD Sidoarjo Barat dilakukan dengan penelaahan terhadap reliabilitas / studi kelayakan untuk memenuhi Tipe B akan lebih efisien dengan upgrade RSUD Sidoarjo Barat atau membangun RSUD baru yang fokus pada pelayanan</p>	<p>Menuju Rumah Sakit tipe B di Kabupaten Sidoarjo. Rumah sakit kelas B merupakan rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis luas dan subspecialis terbatas yang didukung dengan SDM tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkualitas dan kompeten.</p>



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas Pembantuan Pusat atau Provinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota diberikan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam Lingkup Daerah Kabupaten / Kota berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022. Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Tugas Pembantuan. Sedangkan untuk Penugasan, selama Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan tugas pembantuan secara eksplisit kepada Desa / Kelurahan.



BAB V PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2024 Kabupaten Sidoarjo memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala Nasional maupun Regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut :

No.	Tanggal	Judul Penghargaan	Dokumentasi
1.	18 Januari 2024	Peduli Olahraga pada ajang KONI Jatim Award 2023, di Harris Hotel and Convention, Surabaya	
2	25 Januari 2024	Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 95,95 dari Ombudsman RI, di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	
3	27 Februari 2024	Penghargaan Person Of The Year 2023 dari Radar Surabaya dalam rangka HUT Radar Surabaya ke 23 Tahun 2024, di Kantor Radar Surabaya, Kembang Jepun, Surabaya	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

4	29 Februari 2024	Penghargaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kategori Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik Tahun 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta dari Menteri Agama RI	
5	5 Maret 2024	Penghargaan Pelaksana Operasi Pemberantasan BKC Ilegal Terbaik Tahun 2023 dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Timur dalam acara "Kolaborasi Dengan Indonesia Maju", di Aula Kanwil DJBC Jatim I, Sidoarjo	
6	5 Maret 2024	Penghargaan Adipura Tahun 2023 Kategori Kota Sedang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta	
7	6 Maret 2024	Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI sebagai "Kabupaten Bebas Frambusia" pada peringatan Hari Neglected Tropical Disease se-dunia, di Jakarta	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

8	2 Mei 2024	Mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Atas Laoran Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023, dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, di Kantor BPK Jatim	
9	8 Agustus 2024	Menerima Penghargaan Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Covergae (UHC) Award 2024 Kategori Madya dari Wapres Ma`ruf Amin di Jakarta	
10	8 Agustus 2024	Menerima Penghargaan Pelayanan Publik dengan peningkatan inovasi layanan publik yang mudah, cepat, dan bersih dari pungli dna korupsi pada ajang Pemimpin Daerah Award 2024, di Jakarta yang diberikan langsung oleh Menteri PANRB RI	
11	30 Oktober 2024	Meraih Penghargaan Kabupaten Dengan Capaian Sertifikat Halah Terbanyak di Jawa Timur diberikan oleh Pj. Sekdaproj Jatim, dalam ajang East Java Halal Industry Festival 2024, di Hotel Novotel Samator, Surabaya	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

12	16 Oktober 2024	Kabupaten Sidoarjo meraih Penghargaan Karnika Graha Abinaya dalam acara Musyawarah Daerah ke – 16 DPD REI Jawa Timur, di Ballroom Shangrilla Hotel, Surabaya	
13	14 November 2024	Meraih Penghargaan kategori “Menuju Informatif” pada ajang Komisi Informasi Jawa Timur (KI Jatim) 2024 dengan skor 87.27 menduduki peringkat ke -2	
14	14 November 2024	Meraih Penghargaan “Kerja Kolaborasi” Terbaik Ke – 3 Kategori Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Innovation Academy 2024 oleh LAN RI (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia) melalui BPSDM Jatim, di Gedung BPSDM Jatim	
15	21 November 2024	Penghargaan Keberhasilan Mencapai Open Defecation Free (ODF) 100% pada Hari Kesehatan Nasional Ke-60 dari Provinsi Jawa Timur, di Hotel Aston Sidoarjo	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

16	25 November 2024	Penghargaan Program Inovasi Pembangunan Terpuji 2024 atas keberhasilan pengelolaan sampah hingga 67% dari Detik Jatim dalam acara Detikjatim Awards, di Dyandra Convention Centre, Surabaya	
17	5 Desember 2024	Penghargaan Kabupaten Terinofativ pada ajang Innovatove Government Award (IGA) 2024 bekat Inovasi Pelayanan Publik, di Hotel Mercure, Surabaya	
18	10 Desember 2024	Penghargaan Kategori Pratama Terbaik I Nasional dalam ajang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2024 dari Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta	
19	11 Desember 2024	Penghargaan Top 3 Inovasi Terinovatif pada Inovasi My Retribusi dan Inovasi (Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo) Siksda sebagai Top 10 Inovasi Daerah dalam ajang Inotek Award 2024 dari Pemprov Jatim, di Mercure Grand Mirama, Surabaya	



BAB VI PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 yang disusun sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program / kegiatan Tahun Anggaran 2024 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Selain melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2024.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, serta Legislatif (DPRD) dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang mendukung situasi dan kondisi sehingga tetap terjaga kondusif dan penyelenggaraan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka selebar - lebarnya kepada Dewan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian LKPJ Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2024 ini, diiringi harapan semoga di tahun - tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2024

Monumen Jayandaru



www.sidoarjokab.go.id



@pemerintahkabupatensidoarj380



@pemkabsidoarjo